PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025-2029



ᬦᬸᬗᬸᬦ᭄ ᬲᬢ᭄ ᬓᬾᬭ᭄ᬣᬶ ᬮᬓ ᬩᬮᬶ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

MENUJU KARANGASEM YANG "AGUNG"

(Aman, Gigih, Unggul, Nyaman dan Gemah Ripah Loh Jinawi)

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijkan dan program untuk jangka waktu tertentu, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Daerah;

b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangnan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali

Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaanPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
21. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
   b. pedoman dalam penyusunan Renstra-PD sesuai periode RPJMD;
   c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJMD;
   d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
   a. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.	Bab I	:	PENDAHULUAN
b.	BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH
c.	BAB III	:	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
d.	BAB IV	:	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
e.	BAB V	:	PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:
(3, 42 / 2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJMD yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tahun memuat Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijkan dan Program yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJMD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, gender, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2

18

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.3.1 Keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029 ..... I-8
1.3.2 Keselarasan dengan Dokumen RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 - 2045 ... I-10
1.3.3 Keselarasan dengan Dokumen RTRW Kabupaten Karangasem 2025 – 2030 ..... I-11
1.3.4 Keselarasan dengan Dokumen RPJMD Povinsi Bali Tahun 2025 – 2029 ..... I-12
1.3.5 Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-14
1.4 Maksud dan Tujuan I-17
1.4.1 Maksud I-17
1.4.2 Tujuan I-18
1.5 Sistematika Penulisan I-18
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-12
2.1.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karangasem Tahun 2025-2029 ..... II-13
2.1.4 Rekomendasi KLHS Pengelolaan Daya Dukung–Daya Tampung Kabupaten Karangasem Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-15
2.1.5 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan II-17
2.1.6 Pengembangan Tata Ruang Wilayah II-22
2.1.7 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-26
2.1.8 Lingkungan Hidup Berkualitas II-32
2.1.9 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-33

2.1.10 Demografi II-36
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-44
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-44
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-62
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-72
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-101
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-108
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-111
2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-116
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-116
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-117
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-119
2.3.4 Transformasi Digital II-121
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-122
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-126
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-132
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-134
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-134
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-136
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-140
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-145
2.5 BUMD Kabupaten Karangasem II-193
2.6 Gambaran Keuangan Daerah II-196
2.6.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (Tahun 2020 – 2024) II-200
2.6.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020 - 2024 ..... II-201
2.6.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 – 2024 ..... II-212
2.6.4 Pendapatan Transfer II-215
2.6.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH II-217
2.6.6 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah ... II-220
2.6.7 Neraca Daerah II-225
2.6.8 Analisis Neraca Daerah II-232
2.6.9 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah II-239
2.6.10 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam

Periode 2020 – 2024) II-241
2.6.11 Proporsi Penggunaan Anggaran II-242
2.6.12 Analisis Pembiayaan Daerah II-243
2.6.13 Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur II-248
2.6.14 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama II-251
2.6.15 Defisit Rill Anggaran II-255
2.6.16 Kerangka Pendanaan II-263
2.6.17 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2026 – 2030 ..... II-264
2.6.18 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-278
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis II-280
2.7.1 Permasalahan II-280
2.7.2 Isu Strategis Daerah II-321
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi III-1
3.2 Misi III-2
3.3 Tujuan III-6
3.4 Sasaran III-13
3.5 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-46
3.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025 – 2029 III-46
3.5.2 Program-Program Prioritas Daerah Tahun 2025 – 2029 . III-84
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-45
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2024 ..... II-2
Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan II-3
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian II-3
Tabel 2.4 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Tekstur Tanah II-3
Tabel 2.5 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ... II-6
Tabel 2.6 Rata-rata Jumlah Curah Hujan (milimeter) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-8
Tabel 2.7 Rata-rata Suhu Udara (oC) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-9
Tabel 2.8 Rata-rata Kelembaban Udara (persen) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-9
Tabel 2.9 Rata-rata Kecepatan Angin (Knot) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-10
Tabel 2.10 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Karangasem II-10
Tabel 2.11 Rata-rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika di Karangasem Tahun 2024* II-11
Tabel 2.12 Banyaknya Desa yang Berlistrik, Gardu Listrik, dan Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2024 ..... II-26
Tabel 2.13 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2024 ..... II-27
Tabel 2.14 Banyaknya Desa yang Berlistrik, Gardu Listrik, dan Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 ..... II-27
Tabel 2.15 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan dan Kabupaten/ Kota di Bali Tahun 2024 ..... II-28
Tabel 2.16 Jumlah Pelanggan Listrik dan Tarif Listrik PT, PLN (Persero) Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-28
Tabel 2.17 Jumlah Pemakaian Listrik (kWh) dan Nilai Listrik Terjual (Juta Rp) PT, PLN (Persero) Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Karangasem, Tahun 2024 ..... II-29
Tabel 2.18 Banyaknya Pelanggan, Produksi, Penggunaan, dan Penerimaan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota, 2024 ..... II-29
Tabel 2. 19 Luas Panen Padi menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ha), Tahun 2020- 2024 ..... II-31
Tabel 2. 20 Produksi Padi menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ton-GKG) .. II-31

Tabel 2. 21 Produksi Beras menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ton), Tahun 2020 – 2024 ..... II-32
Tabel 2.22 Pengelolaan sampah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024 ..... II-33
Tabel 2.23 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020, 2021, dan 2024 ..... II-36
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu) II-39
Tabel 2.25 Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2024..... II-40
Tabel 2.26 Proyeksi dan Distribusi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2035 ..... II-41
Tabel 2.27 Proyeksi Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020–2030 (Ribu) II-41
Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)..... II-45
Tabel 2.29 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Karangasem.... II-46
Tabel 2.30 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah) di Provinsi Bali, Tahun 2020–2024..... II-47
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Bali, Tahun 2020–2024 ..... II-49
Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024 ..... II-49
Tabel 2.33 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah) di Provinsi Bali, Tahun 2020–2024..... II-50
Tabel 2.34 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2020–2024..... II-51
Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Bali, Tahun 2020–2024 ..... II-51
Tabel 2.36 PDRB Per kapita Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-53

Tabel 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/ Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-56
Tabel 2.38 Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang) II-57
Tabel 2.39 Penduduk Usia Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2020-2024 ..... II-57
Tabel 2.40 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2020-2024 ..... II-58
Tabel 2.41 Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2.42 Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Peren) Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karangasem, 2021-2024 ..... II-60
Tabel 2.44 Indeks Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024 ..... II-61
Tabel 2.45 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.46 Puskesmas Rawat Inap & Non Rawat Inap Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-65
Tabel 2.47 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.48 Jumlah Pustu dan Pusling di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-67
Tabel 2.49 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Posyandu di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-69
Tabel 2.50 Jumlah Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Gizi dan Tenaga Ahli Laboratorium di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-70
Tabel 2.51 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) II-73
Tabel 2.52 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) II-74
Tabel 2.53 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025 ..... II-75
Tabel 2.54 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar (SD) II-75
Tabel 2.55 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025 ..... II-77
Tabel 2.56 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) II-78

Tabel 2.57 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025 ..... II-79
Tabel 2.58 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) II-80
Tabel 2.59 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025 .... II-81
Tabel 2.60 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun Ajaran 2024/2025..... II-82
Tabel 2.61 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun Ajaran 2024 ..... II-83
Tabel 2.62 Angka Melek Huruf (persen) Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.63 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.64 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.65 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tidak/Belum Bersekolah di Kabupaten/ Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.66 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.67 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTP Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) II-88
Tabel 2.68 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTA Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.69 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan DI/DII/DIII di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.70 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan DIV/S1/S2/S3 di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun Tahun 2019-2023 ..... II-91

Tabel 2.72 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.73 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.74 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 19-24 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.75 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/ Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.76 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/ Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.77 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/ Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.78 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi Bali Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.79 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.80 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.81 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.82 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.83 Data literasi digital Provinsi Bali II-101
Tabel 2.84 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota II-102
Tabel 2.85 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.86 Garis Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah) Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.87 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2024 ..... II-110
Tabel 2.88 Distribusi Pendapatan Provinsi Bali Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-112
Tabel 2.89 Distribusi Pendapatan Kabupaten Karangasem Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2020- 2024 ..... II-113
Tabel 2.90 Banyaknya Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/ II-113

Tabel 2.91 Banyaknya Panti Menurut Status Pengusahaan dan II-114
Tabel 2.92 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota, 2024 ..... II-114
Tabel 2.93 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.94 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2.95 Rasio PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024..... II-119
Tabel 2.96 Luas Hutan dan Fungsinya Menurut Kabupaten (Hektar)..... II-120
Tabel 2.97 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-123
Tabel 2.98 PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) II-124
Tabel 2.99 PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) II-124
Tabel 2.100 Perkembangan Nilai Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.101 Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan II-127
Tabel 2.102 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karangasem (km), Tahun 2020–2024 ..... II-127
Tabel 2.103 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem (Km), Tahun 2020–2024 ..... II-128
Tabel 2.104 Jumlah Rumah Tangga Layak Huni berdasarkan sumber pendanaan Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.105 Rasio pajak terhadap PDRB Harga Berlaku (%) II-133
Tabel 2.106 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (Persen)..... II-134
Tabel 2.107 Tiga Besar Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024..... II-135
Tabel 2.108 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024..... II-135
Tabel 2.109 Indeks Integritas Nasional Tahun 2024..... II-136
Tabel 2.110 Indeks Demokrasi Indonesia..... II-137
Tabel 2.111 Panjang Jalan (km) Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Bali Keadaan Akhir Tahun 2022-2024 ..... II-141
Tabel 2.112 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2024..... II-142
Tabel 2.113 Realisasi Penanaman Modal Asing (Juta Rupiah) di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2024..... II-143
Tabel 2.114 Banyaknya Restoran dan Rumah Makan Dirinci Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, Tahun 2020-2024 ..... II-144

Tabel 2.115 Banyaknya Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.116 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-145
Tabel 2.117 Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Kabupaten Karangasem II-202
Tabel 2.118 Rata-rata Pertumbuhan (%) Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024..... II-209
Tabel 2.119 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-211
Tabel 2.120 Proporsi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.121 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.122 Target dan Realisasi Pendapatan Tranfer pada APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-216
Tabel 2.123 Laju Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 . II-217
Tabel 2.124 Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah II-218
Tabel 2.125 Laju Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.. II-219
Tabel 2.126 Laju Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah II-222
Tabel 2.127 Target Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... II-222
Tabel 2.128 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-224
Tabel 2.129 Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2023 (data 2024 belum tersedia)..... II-227
Tabel 2.130 Pertumbuhan (%) Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2023..... II-233
Tabel 2.131 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem II-239
Tabel 2.132 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem II-243
Tabel 2.133 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah..... II-244
Tabel 2.134 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-245
Tabel 2.135 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah..... II-246
Tabel 2.136 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan..... II-248
Tabel 2.137 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-249
Tabel 2.138 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-251
Tabel 2.139 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-253

Tabel 2.140 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-257
Tabel 2.141 Proporsi Realisasi Penerimaan Pembiayaan terhadap total APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-259
Tabel 2.142 Proporsi Realisasi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-261
Tabel 2.143 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024 (Rupiah) II-266
Tabel 2.144 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 (Rupiah) II-268
Tabel 2.145 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-269
Tabel 2.146 Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-270
Tabel 2.147 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2026-2030 (Rupiah) II-273
Tabel 2.148 Target Pendidikan Indonesia Emas 2045 ..... II-327
Tabel 2.149 Target Ketenagakerjaan Nasional 2045 ..... II-328
Tabel 2.150 Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ..... II-338
Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Indikator Kinerja dan Target Kabupaten Karangasem Tahun 2025-202 ..... III-15
Tabel 3.2 Pentahapan Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ..... III-47
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem III-63
Tabel 3.4 Rumusan Program Prioritas Daerah Kabupaten Karangasem III-86
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karangasem IV-46
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karangasem IV-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-8
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Karangasem II-1
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 ..... II-38
Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Persen) II-48
Gambar 2.4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024 ..... II-102
Gambar 2.5 Perbandingan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024 ..... II-104
Gambar 2.6 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024 ..... II-105
Gambar 2.7 Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024 ..... II-106
Gambar 2.8 Kawasan Hutan di Provinsi Bali II-120
Gambar 2.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/Dll di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ..... II-131
Gambar 2.10 Keterkaitan Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah II-198
Gambar 2.11 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-213
Gambar 2.12 Pendapatan Transfer II-216
Gambar 2.13 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 ..... II-218
Gambar 2.14 Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 .... II-221
Gambar 3.1 Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 – 2045 ..... III-5
Gambar 3.2 Keselarasan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 – 2045 ..... III-6
Gambar 3.3 Perumusan Tujuan Misi 1 ..... III-10
Gambar 3.4 Perumusan Tujuan Misi 2 ..... III-11
Gambar 3.5 Perumusan Tujuan Misi 3 ..... III-12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jakarta. Sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Karangasem.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 41 yaitu diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih setelah dilantik melakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan Awal RPJMD sesuai ketentuan Pasal 57, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud, harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik, sebagai bahan pembahasan bersama DPRD untuk memperoleh kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan awal RPJMD untuk menjadi Rancangan RPJMD. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rancangan RPJMD dibahas pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik. Sesuai Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD. Selanjutnya Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rancangan RPJMD disempurnakan sesuai Berita Acara Kesepakatan menjadi rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Selanjutnya Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan

Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Karangasem menyusun Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Karangasem Tahun 2025- 2029 merupakan bagian dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 selain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 dan juga menyelaraskan dengan pencapaian target dan indikator RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Karangasem menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan melalui pendekatan teknokratik; partisipatif; politis; atas-bawah dan bawah-atas; holistik-tematik; integratif; dan spasial.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tanggal 27 Maret 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

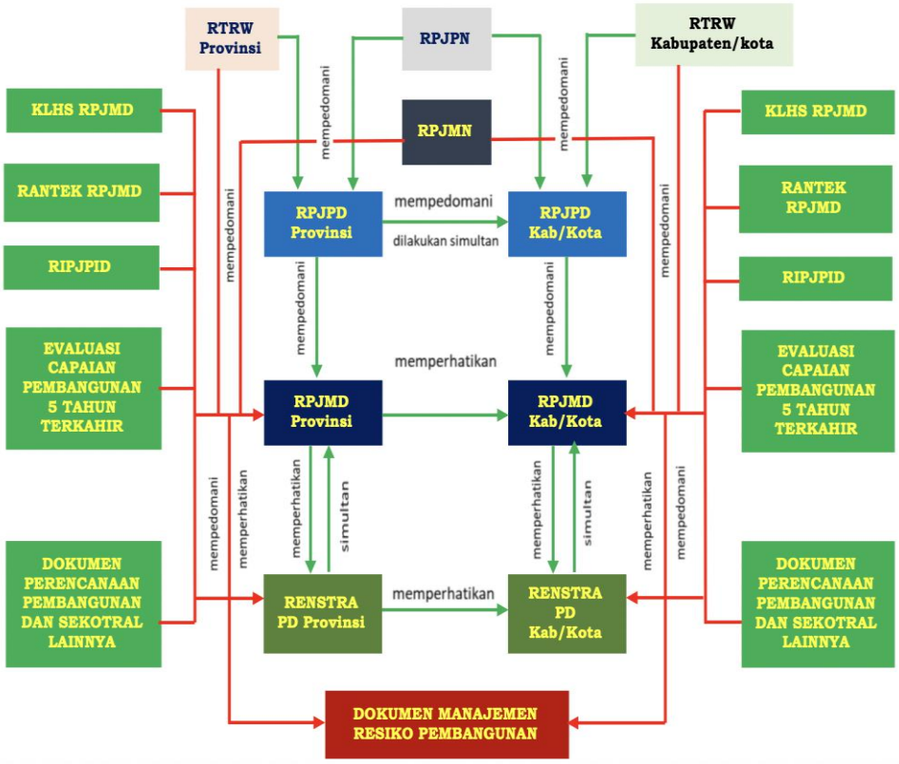
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
5. Keterkaitan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.3.1 Keselarasan Dengan RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu secara langsung pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 serta menjadi turunan dari RPJPN 2025–2045. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 berperan penting sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dengan pembangunan nasional serta

sebagai dasar evaluasi kinerja daerah dan akses terhadap pembiayaan pusat. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Karangasem memposisikan dirinya secara strategis dalam mendukung tercapainya target nasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik lokal, potensi wilayah, dan kearifan budaya Bali seperti nilai-nilai Subak dan Tri Hita Karana.

Sejalan dengan prioritas nasional, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 mengedepankan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan mutu dan akses pendidikan, pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, serta pelatihan keterampilan digital bagi generasi muda. Dalam mendukung transformasi ekonomi digital dan hijau, pemerintah daerah mendorong digitalisasi UMKM dan desa, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengelolaan sumber daya lokal. Selain itu, program ketahanan energi, pangan, dan air menjadi bagian penting dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 dengan strategi penguatan sistem irigasi berbasis Subak, intensifikasi pertanian organik, dan konservasi sumber daya air daerah.

Dalam sektor kesehatan dan perlindungan sosial, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 menyelaraskan agenda reformasi kesehatan nasional dengan peningkatan pelayanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, serta perluasan cakupan jaminan sosial. Reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian, melalui upaya digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan melalui Musrenbang tematik.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 juga mengintegrasikan indikator makro dan sektoral nasional, seperti target penurunan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengurangan emisi karbon. Kabupaten Karangasem akan menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, relevan, dan selaras dengan target nasional, untuk memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional secara agregat. Selanjutnya, dokumen RPJMD mendukung implementasi dan percepatan proyek strategis nasional (PSN) yang berkaitan langsung dengan wilayah Bali, seperti

pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Tulamben dan Amed, pembangunan pelabuhan penunjang konektivitas timur Bali, dan pengembangan kawasan industri hijau yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata berbasis budaya.

Pemerintah Kabupaten Karangasem juga mengambil peran aktif dalam pelaksanaan pembangunan tematik nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian stunting, dan penguatan pendidikan vokasi. Melalui sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pelaksanaan Musrenbang tematik, kolaborasi lintas sektor ditingkatkan guna memperkuat efektivitas kebijakan daerah. Keselarasan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 dengan RPJMN juga menjadi dasar bagi penguatan daya saing fiskal daerah, baik melalui akses Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun pendanaan berbasis kinerja dan prioritas nasional.

Dengan demikian, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029 dirancang secara struktural dan fungsional untuk mendukung capaian pembangunan nasional, meningkatkan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah, serta menegaskan peran strategis Karangasem dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya lokal.

1.3.2 Keselarasan Dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045

RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2045 disusun sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, dan daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen ini menjadi dasar kebijakan pembangunan dua dekade mendatang, berlandaskan evaluasi RPJPD sebelumnya (2005–2025), dan memperhatikan keselarasan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Hal ini menunjukkan orientasi pembangunan jangka panjang yang terpola, terintegrasi, dan menjunjung nilai-nilai ideologis, kultural, dan religius.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, serta penguatan infrastruktur wilayah. Terdapat pula penekanan pada upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, mengingat karakteristik geografis Karangasem yang rentan. Transformasi struktural dilakukan melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Karangasem pada periode 2025–2030 difokuskan pada penguatan pondasi transformasi daerah. Fokus utamanya mencakup perbaikan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan sektor pertanian berkelanjutan. Periode ini juga menjadi masa awal penataan kelembagaan dan sistem perencanaan daerah berbasis digital, serta konsolidasi kelembagaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, dan berbasis data.

Dengan demikian, RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2045 merupakan instrumen strategis pembangunan daerah yang menekankan kesinambungan, kolaborasi lintas sektor dan wilayah, serta transformasi menuju masyarakat Karangasem yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, hingga penganggaran tahunan daerah (APBD), serta acuan penting bagi kepala daerah yang akan menjabat di periode mendatang.

1.3.3 Keselarasan Dengan Dokumen RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2030

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem dalam RTRW difokuskan pada penataan ruang yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana. Kebijakan ini mencakup penetapan pusat-pusat kegiatan dengan dukungan prasarana wilayah untuk mengurangi

ketimpangan antarwilayah, pengembangan kawasan budidaya yang memperhatikan budaya lokal dan mitigasi bencana, serta pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Kabupaten Karangasem.

Secara spasial, RTRW mengarahkan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat pelayanan kegiatan (PKL, PPK, dan PPL), penguatan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih), serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan pariwisata Tanah Ampo, Labuhan Amed, dan Besakih. Pengembangan agribisnis berbasis pertanian organik juga menjadi prioritas, terutama untuk menjaga ketahanan pangan dan budaya agraris Bali. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur listrik dan air bersih diarahkan untuk mendorong pemerataan layanan dasar.

Penataan wilayah pesisir juga menjadi perhatian, dengan strategi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan partisipasi masyarakat. Kawasan rawan bencana, khususnya di sekitar Gunung Agung, direncanakan dengan pendekatan mitigasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, penerapan kearifan lokal dalam peraturan zonasi, pengendalian pemanfaatan ruang, dan sistem insentif-disinsentif diharapkan dapat memperkuat implementasi RTRW yang sesuai dengan nilai lokal dan kontekstual.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Karangasem dalam periode 2025–2030 menitikberatkan pada pengembangan wilayah yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan identitas budaya. Perencanaan spasial ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi daerah, sekaligus sebagai pengarah agar investasi dan kegiatan pembangunan tidak merusak struktur ruang, ekosistem, dan nilai budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat Karangasem.

1.3.4 Keselarasan Dengan Dokumen RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029 memberikan arah yang jelas bagi Karangasem untuk memposisikan diri sebagai

bagian penting dari strategi pembangunan Bali secara menyeluruh. Kabupaten Karangasem dalam menyusun RPJMD mengadopsi arah kebijakan provinsi, antara lain : penguatan ekonomi lokal berbasis budaya dan alam, akselerasi pelayanan dasar dan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap tantangan ekologis. Harmonisasi ini penting untuk menjamin sinkronisasi kebijakan lintas level, serta agar Karangasem dapat turut serta aktif dalam mewujudkan visi besar Bali Era Baru yang inklusif, lestari, dan berkepribadian budaya.

1. Landasan Filosofis dan Integrasi Wilayah

   RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029 menempatkan pembangunan sebagai upaya harmonis dan menyeluruh dalam kerangka Bali Era Baru, dengan landasan utama filosofi Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Arah kebijakan provinsi menuntut integrasi pembangunan dalam satu pola, satu tata kelola, dan satu pulau, yang menekankan kesatuan wilayah Provinsi Bali. Hal ini relevan bagi Karangasem sebagai bagian dari kawasan timur Bali yang selama ini menunjukkan disparitas infrastruktur dan ekonomi. Dengan demikian, Karangasem diarahkan untuk terlibat aktif dalam pembangunan lintas wilayah melalui integrasi program pembangunan dan penguatan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Unggulan Karangasem

   Salah satu prioritas RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah transformasi ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Ini membuka peluang besar bagi Karangasem untuk mengembangkan sektor pertanian organik, perikanan lestari, serta pariwisata spiritual dan budaya. Kabupaten Karangasem memiliki kawasan suci seperti Pura Besakih, Lempuyang, dan Tirta Gangga yang dapat didorong sebagai poros wisata spiritual Bali Timur, sejalan dengan prioritas provinsi untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Bali. Selain itu, penguatan UMKM lokal, hilirisasi produk pertanian dan perikanan, serta integrasi dengan digitalisasi ekonomi merupakan arahan yang dapat langsung diadopsi pemerintah kabupaten.

3. Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur Strategis

Provinsi Bali melalui RPJMD menekankan pemerataan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, terutama di wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah. Karangasem, dengan beberapa kecamatan yang masih tergolong tertinggal, sangat berkepentingan terhadap arah kebijakan ini. Peningkatan infrastruktur seperti jalan penghubung antarwilayah, akses air bersih pedesaan, dan penguatan jaringan digital (internet) juga menjadi instrumen percepatan pembangunan Karangasem. RPJMD Provinsi menyebutkan pentingnya mendorong desa mandiri dan integrasi layanan publik sebagai strategi pemerataan pembangunan yang dapat diakselerasi di Karangasem melalui Dana Transfer Provinsi, kolaborasi BUMD, dan kemitraan swasta.

Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Jalan Sang Hyang Ambu, konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.
2) Pembangunan Jalan Berina, konektivitas Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
3) Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
4) Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih
5) Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Lempuyang Luhur
6) Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Andakasa
7) Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Amed.

1.3.5 Keselarasan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

A. Dokumen 100 Tahun Haluan Masa Depan Bali

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun memberikan arah yang jelas dan mendalam bagi Kabupaten Karangasem untuk membangun masa depannya dengan menyeimbangkan

kekuatan spiritual-budaya, keberlanjutan alam, dan ketangguhan masyarakatnya. Periode awal 2025–2029 dimanfaatkan untuk membangun fondasi transformasi wilayah Karangasem yang berpijak pada jati diri lokal, namun berpandangan global dan terintegrasi dalam kerangka "Bali Era Baru" meliputi:

1. Kerangka Ideologis Pembangunan Bali dan Relevansinya untuk Karangasem

   Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (2025–2125) sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 adalah pedoman strategis jangka panjang yang mengintegrasikan dimensi ideologis, kultural, religius, dan nasionalis berbasis filosofi Sad Kerthi dan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Dokumen ini menekankan bahwa pembangunan Bali tidak boleh terpisah-pisah secara sektoral atau wilayah, tetapi harus dibangun dalam kerangka "Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola". Bagi Karangasem, ini menegaskan pentingnya merancang pembangunan yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan lokal, tetapi juga terintegrasi dalam skenario besar Bali secara keseluruhan.

2. Arah Strategis Pembangunan Karangasem Berdasarkan Pilar Sad Kerthi

   Sad Kerthi—yakni Atma Kerthi (jiwa), Segara Kerthi (laut), Danu Kerthi (air), Wana Kerthi (hutan), Jana Kerthi (manusia), dan Jagat Kerthi (alam semesta)—menjadi fondasi arah pembangunan Bali. Untuk Karangasem, penerjemahan nilai ini dapat dilakukan melalui pelestarian kawasan spiritual seperti Pura Besakih (Atma), rehabilitasi DAS dan irigasi tradisional Subak (Danu), perlindungan pesisir Amed dan Tulamben dari abrasi dan polusi (Segara), serta reboisasi wilayah kering di Abang dan Kubu (Wana). Di bidang Jana Kerthi, peningkatan kualitas SDM Karangasem melalui pendidikan berbasis budaya, pelestarian bahasa Bali, dan ketahanan sosial menjadi kunci.

3. Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal

Haluan 100 Tahun Bali mendorong ekonomi Bali ke arah ekonomi spiritual dan budaya, yang mengutamakan sektor pertanian organik, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya. Karangasem diharapkan tidak bergantung semata pada pariwisata massal, tetapi mengembangkan pariwisata spiritual dan desa adat berbasis keseimbangan alam dan budaya. Selain itu, penting untuk mendorong revitalisasi pertanian tradisional, penguatan UMKM lokal berbasis hasil bumi dan laut, serta sistem distribusi pangan lokal yang mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi wilayah.

4. Implementasi Tata Kelola, Partisipasi Masyarakat, dan Inovasi
   Haluan ini mewajibkan setiap kepala daerah di Bali—termasuk Bupati Karangasem untuk menjabarkan visi 100 Tahun Bali ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD secara terintegrasi. Kabupaten Karangasem dituntut mengembangkan pemerintahan berbasis budaya dan gotong royong, melibatkan Desa Adat dalam pembangunan, serta mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi lokal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, pendidikan karakter Bali, dan penguatan tata-titi kehidupan lokal akan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang konsisten secara niskala–sekala.

B. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Karangasem

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek sebagai kerangka dasar pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen ini bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah melalui riset dan inovasi terintegrasi, serta sebagai referensi perencanaan lintas sektor dalam meningkatkan tata kelola, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Iptek diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah, termasuk

penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, dan pengentasan kemiskinan.

a. Kebijakan Iptek Kabupaten Karangasem periode 2025–2029 berfokus pada lima tema prioritas.
b. Ketahanan pangan berbasis pertanian organik dan teknologi tepat guna (TTG).
c. Energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan biomassa.
d. Pengembangan tanaman obat lokal untuk mendukung kesehatan berbasis kearifan lokal.
e. Digitalisasi pelayanan publik dan UMKM, termasuk sistem informasi desa dan inovasi teknologi lokal.
f. Inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui riset potensi lokal dan teknologi komersialisasi.

Untuk mewujudkan arah kebijakan Iptek tersebut, Kabupaten Karangasem menyusun peta jalan riset dan inovasi yang mencakup:

a. Prioritas program pada sektor ekonomi berkelanjutan, kesehatan masyarakat, pelayanan publik, dan konservasi lingkungan.
b. Rencana aksi berupa penguatan data dan kajian ilmiah, penerapan pilot project, hingga model replikasi inovasi di kecamatan dan desa.
c. Evaluasi berbasis indikator dampak: peningkatan jumlah inovasi desa, indeks inovasi daerah, efektivitas pelayanan publik digital, dan pertumbuhan UMKM berbasis teknologi.

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih.
2. Mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick

Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Periode 2025-2029 dan juga menyelaraskan dengan pencapaian target dan indikator RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang koordinatif antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD, sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka forum musyawarah pembangunan daerah secara berjenjang.
2. Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang bersifat integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3. Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta partisipasi masyarakat.
4. Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan program-program pembangunan yang ditindaklanjuti dengan indikator kegiatan terukur serta efektif, efisien dalam penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tanggal 27 Maret 2025 memuat:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

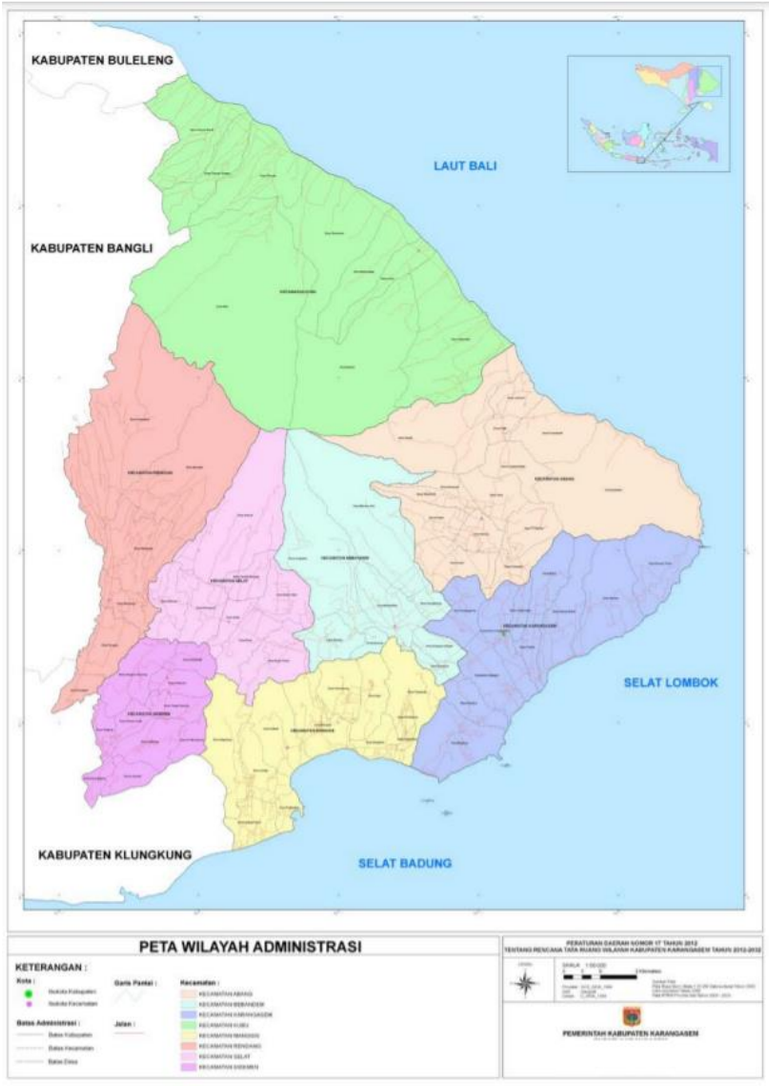
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8°00'00" – 8°04'37,8" Lintang Selatan dan 115°35'9,8" – 115°54'8,9" Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Karangasem

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 atau 83.954 Ha (14,90 persen luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Batas wilayah administrasi Kabupaten Karangasem adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah timur berbatasan dengan Laut Bali dan Selat Badung, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung dan Kabupaten Klungkung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 75 Desa dan 3 Kelurahan. Kecamatan Abang sebanyak 14 Desa, Kecamatan Bebandem sebanyak 8 Desa, Kecamatan Karangasem 8 Desa dan 3 Kelurahan, Kecamatan Kubu sebanyak 9 Desa, Kecamatan Manggis sebanyak 12 Desa, Kecamatan Rendang sebanyak 6 Desa, Kecamatan Selat sebanyak 8 Desa, dan Kecamatan Sidemen sebanyak 10 Desa.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,70	10.970	13,11
2	Sidemen	35,15	3.515	5,15
3	Manggis	69,83	6.983	9,16
4	Karangasem	94,23	9.423	11,03
5	Abang	134,05	13.405	15,67
6	Bebandem	81,51	8.151	9,75
7	Selat	80,35	8.035	8,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,56
Jumlah		**839,54**	**83.954**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

3. Jumlah Desa/Kelurahan

Kabupaten Karangasem terdiri dari delapan kecamatan dengan jumlah desa mencapai 75 desa dan 3 kelurahan. Jumlah desa adat mencapai 190 dan jumlah banjar adat sebanyak 772 dan jumlah desa dinas mencapai 554 serta jumlah lingkungan sebanyak 52.

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	66	62	-
2	Sidemen	10	-	19	71	51	-
3	Manggis	12	-	20	82	59	-
4	Karangasem	8	3	23	180	76	52
5	Abang	14	-	20	97	96	-
6	Bebandem	8	-	15	68	70	-
7	Selat	8	-	27	97	66	-
8	Kubu	9	-	41	111	74	-
Jumlah		75	3	190	772	554	52

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

4. Topografi

Secara topografi hampir separuh luas wilayah atau sebesar 43,5 persen memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74 persen wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sedang, dan 26 persen sisanya memiliki tekstur yang kasar.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian

No.	Kecamatan	Ketinggian (m)				Jumlah
		0 – 50	50–100	100-500	> 500	
1	Rendang	-	-	12,16	97,54	109,70
2	Sidemen	-	0,6	31,35	3,20	35,15
3	Manggis	23,68	19,20	24,39	2,56	69,83
4	Karangasem	28,80	24,96	32,79	7,68	94,23
5	Abang	17,52	13,44	68,13	34,96	134,05
6	Bebandem	-	-	32,87	48,64	81,51
7	Selat	-	-	22,40	57,95	80,35
8	Kubu	40,32	20,18	61,28	112,61	234,72
	Jumlah	**110,32**	**78,38**	**285,37**	**365,14**	**839,54**

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Tekstur Tanah dan

No.	Kecamatan	Halus		Sedang	
		Luas (Ha)	Persentase (persen)	Luas (Ha)	Persentase (persen)
1	Rendang	12,18	1,46	97,49	11,65
2	Sidemen	18,29	2,19	24,52	2,93

No.	Kecamatan	Halus		Sedang	
		Luas (Ha)	Persentase (persen)	Luas (Ha)	Persentase (persen)
3	Manggis	1,74	0,21	74,90	8,95
4	Karangasem	37,35	4,46	54,86	6,56
5	Abang	3,33	0,40	127,99	15,30
6	Bebandem	30,22	3,61	50,66	6,05
7	Selat	1,17	0,14	70,66	8,44
8	Kubu	-	-	231,32	27,65
	Jumlah	**104,28**	**12,47**	**732,40**	**87,53**

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

5. Geologi

Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari formasi Kuarter, Kuarter Bawah, dan Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah kabupaten. Formasi Kuarter dengan Litologi Tufa Pasiran dan endapan lahar terdapat di pesisir utara yakni di daerah Tianyar. Litologi berupa lahar, pasir, lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya di daerah Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran Tukad Buhu, dan Tukad Bangka. Di Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang, daerah aliran sungai Unda. Komposisi lahar terdiri dari batuan beku andesit dan batu apung dengan masa dasar tufa pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik, dan mineral hitam. Lapili dan bom komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit, umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat pada batuan ini terdapat lava dan breksi, kompak dan keras, pada lava sebagian berongga. Formasi Kuarter Bawah terdapat di daerah ujung timur kabupaten yakni Kecamatan Karangasem bagian timur dan Kecamatan Abang bagian utara. Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava berwarna abu-abu kehitaman. Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan formasi Ulakan. Lava berwarna abu-abu kehitaman dan breksi berwarna coklat kehitaman.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Karangasem berupa jenis mediteran, alluvial, latosol, dan regosol. Jenis tanah mediteran

merupakan bagian terkecil (147 ha atau 0,2%), sebarannya di bagian pesisir kecamatan Manggis seperti sebagian wilayah Desa Antiga, wilayah Desa Ulakan, wilayah Desa Manggis, wilayah Nyuh Tebel (Kecamatan Karangasem). Jenis tanah alluvial tersebar di Kecamatan Sidemen, Manggis, Karangasem, Bebandem dan Selat. Kemudian latosol (luas 36.325 ha atau 43,3%) di wilayah Kecamatan Karangasem bagian timur (Desa Seraya, Seraya Barat, Seraya Timur), sebagian wilayah Kecamatan Abang seperti Desa Purwakerti, daerah perbukitan Manggis sampai sebagian Kecamatan Selat bagian selatan, dan sebagian Kecamatan Sidemen. Jenis tanah latosol ini umumnya sangat rawan terhadap erosi, lebih-lebih di Kecamatan Karangasem Timur karena tanahnya banyak terdiri dari batu lepas dengan vegetasi yang kurang serta kemiringan yang terjal. Jenis tanah regosol (luas 36.784 ha atau 43,8%) meliputi sebagian terbesar wilayah Kabupaten Karangasem. Sebarannya adalah dari bagian utara sampai bagian tengah. Tanah jenis ini juga rawan erosi khususnya pada daerah dengan kemiringan lahan tinggi.

6. Hidrologi

Hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 M. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air dibumi. Adapun sumber daya air Kabupaten Karangasem meliputi:

1) Air Tanah

Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut:

a. Setempat kandungan air besar (10 Lt/det) lokasinya: pesisir utara Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.
b. Setempat kandungan air sedang (5 Lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.

c. Setempat kandungan air sedikit (0,5 lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.
d. Setempat Kandungan air sangat sedikit sekali (0,1 lt/det) umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yaitu di sekitar kaki Gunung Agung.
e. Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 lt/det) terdapat di gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

2) Air Permukaan

a. Air Sungai

Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20 sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan 03.01.17.

Tabel 2.5
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Karangasem Tahun 2024

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai
1	Tukad Bumbung	14,1
2	Tukad Deling	6,6
3	Tukad Daya	16,3
4	Tukad Barak	5,2
5	Tukad Dalem	9,0
6	Tukad Musu	6,0
7	Tukad Galiran	4,6
8	Tukad Bakalan	6,5
9	Tukad Linggah	12,0
10	Tukad Sakta	7,5
11	Tukad Penanggungan	8,0
12	Tukad Lebah Celagi	6,8
13	Tukad Buluh	10,0
14	Tukad Maong	6,0
15	Tukad Lamben	8,0
16	Tukad Wanang	8,6
17	Tukad Kelontong	12,0
18	Tukad Kates	6,4
19	Tukad Base	4,5

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai
20	Tukad Katumanak	3,5
21	Tukad Ilu	3,8
22	Tukad Bunut	4,9
23	Tukad Seraya	6,6
24	Tukad Nyuling	13,0
25	Tukad Luah	15,4
26	Tukad Bangka	10,0
27	Tukad Bubu	19,0
28	Tukad Betel	11,4
29	Tukad Kretuk	14,0
30	Tukad Selahu	2,0
31	Tukad Ngelinti	6,0
32	Tukad Deling	6,6
33	Tukad Santar	4,0
34	Tukad Timbul	6,0
35	Tukad Mlaka	5,0
36	Tukad Baapi	5,0
37	Tukad Sayong	10,5
38	Tukad Tungtung	7,2
39	Tukad Bulakan	5,0
40	Tukad Nanang	10,0
41	Tukad Tihis	3,2
42	Tukad Buah	3,4
43	Tukad Banges	4,9
44	Tukad Toyo	6,7
45	Tukad Mantri	7,6
46	Tukad Jangga	9,9
47	Tukad Buatan	6,0
48	Tukad Mengereng	6,3
49	Tukad Hampo	5,8
50	Tukad Prakpak	4,5
51	Tukad Celincing	2,3

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Di antara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telaga Waja. Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3 jenis, yaitu:

1) Mengalir sepanjang tahun (*perennial streams*) umumnya mengalir ke bagian selatan seperti: Tukad Jangga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kerkuk, Tukad Buhu dan lainnya.
2) Mengalir hanya pada musim hujan (*intermitten streams*). Sungai jenis ini banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.
3) Mengalir hanya pada saat hujan (*ephemeral streams*) umumnya semua sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).

b. Air Danau/ Waduk

Kabupaten Karangasem tidak terdapat danau alam sebagai sumber air. Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk yang dimaksud adalah Embung Seraya yang terdapat di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem.

7. Klimatologi

Klimatologi didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang Panjang. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2020-2024 paling tinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 2.409,9 mm dan paling rendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1.473,2 mm. Dilihat dari kondisi per bulannya, puncak musim hujan terdapat di bulan Januari-Maret dan bulan Desember.

Tabel 2.6
Rata-rata Jumlah Curah Hujan (milimeter) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	369,6	156,0	456,8	309,0	327,1
Februari	299,7	357,3	295,3	648,6	408,2
Maret	346,7	325,7	233,2	140,1	252,0
April	138,0	75,7	151,7	278,7	128,6
Mei	106,8	147,6	100,1	48,5	11,3
Juni	6,5	21,1	93,7	15,3	14,1

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Juli	5,0	11,6	20,4	118,3	4,8
Agustus	7,9	14,5	145,3	3,8	107,2
September	6,7	14,4	31,1	9,4	8,7
Oktober	0,0	97,6	365,8	0,8	1,5
November	54,5	57,9	239,4	35,6	90,6
Desember	131,8	397,1	277,1	79,5	284,4
Tahunan	**1.473,2**	**1.676,5**	**2.409,9**	**1.687,6**	**1.638,5**

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Rata-rata suhu udara di Kabupaten Karangasem berkisar antara 21,2 (°C) hingga 32 (°C) dengan kelembaban udara antara 71persen hingga 88persen. Kecepatan angin mencapai 2 hingga 8 knot per jam.

Tabel 2.7
Rata-rata Suhu Udara (°C) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Bulan	Minimum					Maksimum					Rata – rata				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	20,0	22,0	20,4	21,0	29,6	-	32,0	31,4	30,4	29,6	28,55	27,5	27,1	27,2	25,6
Februari	20,4	21,2	21,2	21,4	30,1	-	30,8	31,0	30,0	30,1	27,99	27,0	27,5	26,3	25,7
Maret	21,0	21,4	22,4	20,4	30,3	-	-	33,4	32,2	30,3	28,5	27,4	28,2	27,9	26,0
April	20,8	20,2	22,0	22,0	31,3	-	-	33,0	32,0	31,3	28,94	28,7	29,0	28,1	26,6
Mei	21,4	22,0	22,6	20,8	30,8	-	32,2	32,0	31,4	30,8	28,69	28,9	28,9	28,3	26,5
Juni	20,6	21,2	22,2	20,4	30,0	32,0	32,4	31,6	31,2	30,0	28,3	28,6	28,5	28,2	25,5
Juli	20,0	19,2	20,2	21,4	29,7	31,8	31,6	31,8	30,4	29,7	27,47	28,0	27,6	27,0	25,1
Agustus	20,8	22,0	20,2	20,6	29,7	31,8	31,4	31,4	31,0	29,7	27,57	28,0	27,8	27,1	24,5
September	21,4	21,4	22,2	20,2	30,9	32,4	32,0	31,8	32,4	30,9	28,58	28,2	28,3	27,9	26,0
Oktober	23,0	22,0	23,2	20,0	32,2	32,5	32,8	31,4	34,3	32,2	28,89	28,8	28,1	30,1	26,8
November	22,6	21,4	22,0	23,4	32,9	33,6	32,6	33,0	34,8	32,9	29,58	28,6	28,7	30,3	27,8
Desember	21,2	22,0	21,0	22,0	32,9	32,0	32,0	32,6	33,6	32,9	27,21	28,0	28,2	29,5	27,6

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Tabel 2.8
Rata-rata Kelembaban Udara (persen) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	78	82	83,0	82,5	88
Februari	82	84	81,9	87,4	82
Maret	80	83	80,1	80,3	86
April	76	73	74,2	79,3	82
Mei	76	72	77,1	73,1	77
Juni	72	73	74,9	72,2	76
Juli	72	71	74,0	74,4	75
Agustus	71	73	70,6	70,4	74
September	69	72	72,1	67,8	73
Oktober	71	71	76,4	64,2	68

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
November	73	77	76,7	67,8	70
Desember	83	80	77,2	72,1	75

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Tabel 2.9
Rata-rata Kecepatan Angin (Knot) Setiap Bulan Selama Setahun di Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	2	4	3,4	3,3	1,48
Februari	2	4	3,9	2,0	1,6
Maret	2	4	5,0	3,8	1,94
April	2	6	5,1	3,5	2,13
Mei	3	6	5,0	5,7	2,72
Juni	3	6	5,6	6,2	2,79
Juli	4	7	6,8	6,7	3,17
Agustus	3	7	6,9	6,1	3,12
September	4	7	7,3	6,6	2,62
Oktober	4	7	6,0	6,0	2,85
November	3	5	4,1	5,9	1,81
Desember	2	4	4,2	5,6	1,28

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Kabupaten Karangasem memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dan terdapat musim kemarau dan hujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah hujan. Pada daerah pegunungan curah hujan terdapat pada setiap bulan atau sepanjang tahun hampir tidak terdapat bulan-bulan kering. Selama tahun 2024, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 927,9 mm dengan hari hujan sebanyak 31 hari, Sementara itu, kondisi curah hujan rendah, hanya terjadi selama bulan Agustus, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya, curah hujan kembali meningkat hingga akhir tahun. Selengkapnya hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Karangasem 2024 disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Karangasem

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	304,1	15	3,8
2	Februari	203	19	4,2

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
3	Maret	245,6	18	4,4
4	April	172,5	15	5,8
5	Mei	23,7	4	7,9
6	Juni	72,7	7	7,1
7	Juli	48,5	24	7
8	Agustus	1,8	31	7,5
9	September	37,7	30	7,7
10	Oktober	39,6	31	7,9
11	November	74,8	30	6,3
12	Desember	927,9	31	1,8

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Kondisi meteorologi dan geofisika sepanjang tahun 2024, menunjukkan curah hujan maksimum terjadi pada bulan Februari dan minimum terjadi pada bulan Oktober, suhu udara berada pada 20,0-34,8^{o}C, dengan kelembaban 46,0-98,0persen, dan kecepatan angin antara 5,0-6,7 knot.

Tabel 2. 11
Rata-rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika di Karangasem Tahun 2024

No.	Uraian	Minimum	Maksimum
1	Jumlah curah hujan (mm)	0,8 (Oktober)	648,6 (Februari)
2	Suhu Udara (^{o} C)	20,0 (Oktober)	34,8 (November)
3	Kelembaban udara (persen)	46,0 (Oktober)	100 (Maret)
4	Rata-rata penyinaran matahari (persen)	32,11 (Desember)	98,0 (Januari, Februari, April dan Agustus))
5	Rata-rata kecepatan angin (knot)	2,0 (Februari)	6,7 (Juli)
6	Rata-rata tekanan udara (milibar)	990,4 (Februari)	1.001,1 (Agustus)

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi wilayah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 – 2032 meliputi potensi di wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat kabupaten untuk melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan terdiri atas:

a. Potensi wilayah Utara mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dan pengembangan listrik tenaga surya dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;
b. Potensi wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan di kabupaten;
c. Potensi wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian, kepariwisataan dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah Pengembangan Bali Timur, dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan;
d. Potensi kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;
e. Potensi Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis dengan skala pelayanan nasional;
f. Potensi kawasan strategis kabupaten untuk melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Potensi agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis

pertanian organik terdiri atas:

a. Potensi sektor pertanian keanekaragaman jenis bahan pangan untuk ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
b. Potensi kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;
c. Potensi kawasan pertanian lahan kering pada wilayah- wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi.

2.1.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karangasem Tahun 2025-2029

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, maka diperlukan analisis KLHS yang memberikan arahan pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunannya agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh daerah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan hasil kajian KLHS, Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan ukuran penting dalam menilai kemampuan lingkungan Kabupaten Karangasem dalam menopang aktivitas pembangunan secara berkelanjutan. Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam, meliputi ketersediaan lahan, air, dan pangan, tanpa mengurangi kualitas maupun keberlanjutannya. Daya tampung lingkungan hidup menggambarkan kapasitas lingkungan untuk menerima beban pencemaran, limbah, atau tekanan lain akibat aktivitas manusia, tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem atau menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Daya Dukung Lahan

   Luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Karangasem mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan untuk permukiman, pariwisata, dan infrastruktur. Meskipun sebagian besar wilayah masih memiliki potensi lahan pertanian yang memadai, tren konversi lahan yang terus meningkat dapat mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan fungsi ekologis. Peta status daya dukung lahan menunjukkan variasi antar kecamatan, di mana wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat pembangunan pesat cenderung memiliki tekanan lebih besar.

2. Daya Dukung Air

   Sumber daya air di Kabupaten Karangasem berasal dari air permukaan (sungai, mata air) dan air tanah. Analisis status air tahun 2023 menunjukkan ketersediaan air masih mencukupi secara agregat, namun distribusinya tidak merata. Pada musim kemarau, beberapa kecamatan mengalami defisit air akibat menurunnya debit sumber air dan meningkatnya kebutuhan domestik, pertanian, serta industri. Proyeksi tahun 2030 memperlihatkan potensi peningkatan tekanan terhadap ketersediaan air jika tidak dilakukan upaya konservasi dan efisiensi penggunaan.

3. Daya Dukung Pangan

   Ketahanan pangan diukur dari keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan utama, khususnya beras. Kondisi tahun 2023 menunjukkan ketersediaan pangan relatif mencukupi, namun rentan terhadap perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan fluktuasi produksi pertanian. Proyeksi 2030 menuntut peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi komoditas, dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

4. Daya Tampung Lingkungan

   Daya tampung lingkungan terkait pencemaran menunjukkan bahwa beberapa wilayah perairan mulai mengalami beban pencemaran ringan hingga sedang yang bersumber dari limbah domestik, pertanian, dan kegiatan pariwisata. Penurunan kualitas air, degradasi kawasan pesisir, dan berkurangnya tutupan hutan menjadi indikator penting bahwa kapasitas penyerapan beban lingkungan mulai mendekati ambang batas di beberapa lokasi.

5. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

   Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan memiliki hubungan erat dengan pencapaian indikator TPB, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengelolaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan ekosistem darat dan laut, serta pengendalian perubahan iklim. Tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung yang melebihi kapasitas dapat menghambat pencapaian target TPB di Kabupaten Karangasem.

2.1.4 Rekomendasi KLHS Pengelolaan Daya Dukung–Daya Tampung Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil analisis, daya dukung lahan Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 masih tergolong memadai untuk menopang kebutuhan pembangunan, terutama di sektor pertanian. Namun, tekanan alih fungsi lahan terus meningkat, khususnya di kecamatan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pariwisata yang pesat. Jika tidak dikendalikan, proyeksi tahun 2030 menunjukkan potensi penurunan luas lahan pangan berkelanjutan sekitar 5–10 persen akibat konversi untuk permukiman dan

infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengendalian izin alih fungsi lahan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan tidur dan lahan marginal menjadi lahan pertanian produktif.

Daya dukung air secara agregat masih mencukupi pada tahun 2023, namun distribusinya tidak merata. Beberapa kecamatan mengalami defisit ketersediaan air pada musim kemarau. Tanpa intervensi tambahan, proyeksi tahun 2030 memperkirakan defisit dapat meningkat hingga 15–20 persen di wilayah rawan kekeringan. Upaya pengelolaan yang disarankan meliputi penguatan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, pembangunan embung dan sumur resapan, penerapan sistem irigasi hemat air, serta pengelolaan terpadu sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS).

Pada aspek daya dukung pangan, ketersediaan beras dan pangan lokal pada tahun 2023 relatif mencukupi. Namun, ketersediaan ini rentan terganggu akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Jika tren tersebut berlanjut, produksi padi diperkirakan menurun sebesar 8–12 persen pada tahun 2030. Rekomendasi pengelolaan mencakup diversifikasi pangan lokal (umbi-umbian, jagung, hortikultura), peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna, serta perlindungan rantai pasok dan pengolahan hasil pertanian pascapanen.

Sementara itu, daya tampung pencemaran menunjukkan adanya beban pencemar ringan hingga sedang pada beberapa badan air yang bersumber dari limbah domestik, pertanian, dan aktivitas pariwisata. Tanpa pengendalian yang memadai, beban pencemar Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) berpotensi meningkat 10–15 persen pada tahun 2030. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, penerapan tangki septik kedap, edukasi pengelolaan limbah rumah tangga dan industri kecil, serta pemantauan kualitas air secara berkala menjadi prioritas pengelolaan.

Pada aspek kawasan lindung dan ekosistem, kawasan hutan dan pesisir mengalami tekanan dari aktivitas ekonomi dan potensi bencana.

Proyeksi 2030 menunjukkan potensi penurunan tutupan hutan serta degradasi ekosistem pesisir sekitar 5 persen jika tidak dilakukan perlindungan tambahan. Upaya pengelolaan yang disarankan meliputi rehabilitasi hutan dan ekosistem mangrove, penegakan hukum terhadap perusakan kawasan lindung, serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat sebagai alternatif sumber pendapatan yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.

2.1.5 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Secara umum, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Karangasem masih berada pada tingkat yang dapat menopang pembangunan, namun terdapat kecenderungan penurunan pada beberapa aspek, terutama ketersediaan air di musim kemarau, perlindungan lahan pertanian, dan kualitas lingkungan perairan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpadu, pembatasan alih fungsi lahan produktif, konservasi sumber daya air, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengendalian beban pencemaran. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

Secara umum daya dukung lahan di wilayah Kabupaten Karangasem berada pada kondisi sudah terlampaui sebesar 47841.52 Ha. Kondisi daya dukung lahan yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Kubu yakni sebesar 14994.88 Ha. Sedangkan, untuk kondisi daya dukung lahan belum terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Rendang sebesar 8995.87 Ha. Status air pada tahun 2023 di wilayah Kabupaten Karangasem berada pada kondisi sudah terlampaui dengan luas total sebesar 44817.14 Ha. Untuk status air tahun 2023 yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Kubu yakni sebesar 13687.23 Ha. Sedangkan, untuk status air tahun tahun 2023 yang belum terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Kubu sebesar 9784.77 Ha.

Kabupaten Karangasem memiliki kandungan air tanah cukup tinggi yakni + 10 liter/detik (Peta Hidrologi Pulau Bali). Hal ini

disebabkan di samping karena lapisan geologinya berupa formasi kwarter di mana akifernya cukup baik, juga karena adanya tekanan air tanah secara grafitasi dari perbukitan. Sumber air lainnya yang terdapat di Kabupaten Karangasem berasal dari sungai, air danau/waduk, dan mata air.

a) Air tanah Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut:
   a. Setempat kandungan air besar (10 lt/det), lokasinya: pesisir utara Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.
   b. Setempat kandungan air sedang (5 lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.
   c. Setempat kandungan air sedikit (0,5 lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.
   d. Setempat kandungan air sangat sedikit (0,1 lt/det), umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yakni di sekitar kaki Gunung Agung.
   e. Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 lt/det) terdapat di gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

b) Mata Air Potensi mata air di Kabupaten Karangasem telah didata dari berbagai sumber di antaranya Proyek Irigasi Bali (1980) dan pendataan dari Bali IUIDP (1989). Pada studi inventarisasi Potensi Air Baku Bali dilakukan pendataan ulang di mana hasil pendataan studi ini adalah potensi mata air tiap-tiap desa di Bali Utara dan Bali Timur.

   Di Kabupaten Karangasem tercatat 106 buah mata air dengan debit total 5.371 L/dt di mana potensi terbesar ada di Kecamatan Rendang dengan debit mencapai 1.929 L/dt dari 15 buah mata air sedangkan potensi terendah ada di Kecamatan Kubu dengan debit 7 L/dt dari 2 buah mata air. Untuk Kecamatan Karangasem perkiraan debit mencapai 143 L/dt dari 9 buah mata air. Mata air merupakan

sumber air baku utama bagi sistem penyediaan air minum di Kabupaten Karangasem.

Pemanfaatan air baku dari mata air yaitu:

a. SPAM Unit Karangasem memanfaatkan mata air antara lain MA Tauka, MA Tirta Gangga, MA Ababi, MA Ujung, MA Embukan dan MA Yeh Ha ditambah dengan SBP Temega da SBP Perasi dengan potensi sumber 230 liter/detik.
b. SPAM Unit Rendang memanfaatkan MA Gerubugan dengan potensi sumber 407 liter/detik.
c. SPAM Unit Manggis memanfaatkan MA Embukan dan air tanah dalam dengan potensi sumber 80 liter/detik.
d. SPAM Unit Selat mengambil air baku dari MA Mumbul, MA Perangsari, MA Padangaji, dan MA Pejeng dengan potensi sumber 55 liter/detik.
e. SPAM Unit Sidemen mengambil sumber air baku dari MA Sangkan Gunung dan MA Tirta Sari/Kikian dengan potensi sumber 17 liter/detik.
f. SPAM Unit Bebandem memanfaatkan air baku dari MA Linggasana, MA Dukuh Moding dan ditambah sumur bor dengan potensi sumber 30 liter/detik.
g. SPAM Unit Abang memanfaatkan air baku dari MA Ababi, MA Pidpid, MA Yeh Ha, MA Culik dan ditambah sumur bor dengan potensi sumber 59,5 liter/detik.
h. SPAM Unit Kubu memanfaatkan sumber air baku dari air tanah dalam degan potensi sumber 45 lter/detik.

c) Akuifer Air Tanah dan Cekungan Air Tanah Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Aliran air tanah itu sendiri dimulai pada daerah resapan air tanah atau sering juga disebut sebagai daerah imbuhan air tanah (recharge zone). Daerah ini adalah wilayah di mana air yang berada di permukaan tanah baik air hujan ataupun air permukaan mengalami proses penyusupan (infiltrasi) secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan. Proses penyusupan ini akan berakumulasi pada satu titik di mana

air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang bersifat kedap air (impermeabel). Titik akumulasi ini akan membentuk suatu zona jenuh air (saturated zone) yang sering kali disebut sebagai daerah luahan air tanah (discharge zone). Perbedaan kondisi fisik secara alami akan mengakibatkan air dalam zonasi ini akan bergerak/mengalir baik secara gravitasi, perbedaan tekanan, kontrol struktur batuan dan parameter lainnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai aliran air tanah. Daerah aliran air tanah ini selanjutnya disebut sebagai daerah aliran (flow zone). Cekungan air tanah di Kabupaten Karangasem yaitu CAT Tejakula, CAT Amlapura dan CAT Denpasar-Tabanan. CAT Tejakula merupakan CAT lintas kabupaten dimana di wilayah Kabupaten Karangasem terdapat di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang. CAT ini mempunyai potensi air tanah bebas 188 juta m3/tahun dan air tanah tertekan 3 juta m3/tahun. CAT Amlapura tersebar di Kecamatan Karangasem dengan potensi air tanah bebas 60 juta m3/tahun dan air tanah tertekan 2 juta m3/tahun. CAT Denpasar-Tabanan merupakan CAT lintas kabupaten/kota dengan potensi air tanah bebas 894 m3/tahun dan air tanah tertekan 8 m3/tahun. Sedangkan di daerah Kecamatan Manggis tidak terdapat cekungan air tanah (Badan Geologi, 2008). d) Air Sungai Satuan wilayah sungai Di Bali diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20 sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan 03.01.17. Di antara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telagawaja.

Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3 jenis, yaitu:

1. Mengalir sepanjang tahun (*perennial streams*) umumnya mengalir ke bagian selatan seperti: Tukad Janga, Tukad

Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kerkuk, Tukad Buhu dan lainnya.

2. Mengalir hanya pada musim hujan (*intermitten streams*). Sungai jenis ini banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.
3. Mengalir hanya pada saat hujan (*ephemeral streams*) umumnya semua sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).

Sumber air lainnya yang terdapat di Kabupaten Karangasem berasal dari sungai, air danau/waduk, dan mata air.

1. Air tanah Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut:
   a) Kandungan air besar (10 lt/det), lokasinya: pesisir utara Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.
   b) Kandungan air sedang (5 lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.
   c) Kandungan air sedikit (0,5 lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.
   d) Kandungan air sangat sedikit (0,1 lt/det), umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yakni di sekitar kaki Gunung Agung.
   e) Kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 lt/det) terdapat di gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

a) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi: perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat;

b) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya;
c) Pendayagunaan sumber daya air melalui pengembangan prasarana irigasi;
d) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air (sungai) pada bagian hulu ditekankan pada upaya konservasi, bagian madya/tengah diarahkan untuk pendayagunaan sumber daya air bagi kebutuhan kawasan pertanian dan permukiman, serta pada bagian teben/hilir diarahkan pada pengendalian daya rusak air;
e) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai;
f) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan selain diperbolehkan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
g) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
h) Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
    1. Tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air; dan
    2. Jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

2.1.6 Pengembangan Tata Ruang Wilayah

Pengembangan tata ruang wilayah kabupaten tidak dapat dilepaskan dari kedudukan atau peranannya dalam lingkup antar wilayah, dalam arti Kabupaten Karangasem tidak hanya berperan dalam konteks intra wilayah, melainkan juga sangat berperan dalam wilayah regional Bali bahkan Nasional. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem secara makro adalah sebagai berikut :

1) Karakteristik geografis Kabupaten Karangasem sebagai wilayah

yang berada pada jalur lintasan transportasi darat dan laut memberikan pengaruh sebagai berikut :

a. Jalan arteri primer Gilimanuk–Padangbai merupakan penghubung antara wilayah Kabupaten Karangasem dengan wilayah lain di luar Pulau Bali terutama provinsi-provinsi lain di bagian timur Pulau Bali. Hal ini memberikan keuntungan komparatif terhadap wilayah sekitar Padangbai karena menjadi pintu gerbang selatan Kabupaten Karangasem sekaligus pintu gerbang laut selatan untuk Pulau Bali.
b. Adanya rencana pengembangan Pelabuhan Amed sebagai pelabuhan penyeberangan Bali–Lombok menjadi salah satu keuntungan lain yang diperoleh Kabupaten Karangasem karena keberadaan pelabuhan ini menjadi pintu gerbang utara bagi kabupaten ini ke wilayah lain di luar Pulau Bali.
c. Rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed akan menjadikan ruas jalan Gilimanuk–Amed menjadi salah satu penghubung yang dapat menjadi mendorong pertumbuhan daerah-daerah di bagian utara Kabupaten Karangasem.

2) Keberadaan pintu gerbang laut eksisting (Padang Bai) dan rencana (Amed) dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah Kabupaten Karangasem dengan kabupaten atau bahkan provinsi lainnya.
3) Jalan arteri Gilimanuk–Padangbai, jalan kolektor Amlapura–Selat–Rendang–Klungkung, dan jalan "penghubung" Ban–Menanga-Bangli–Klungkung menjadikan sirkulasi transportasi yang sangat lancar ke arah Kota Semarapura yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pembangunan Bali Timur (WPBT). Hal ini menjadi salah satu potensi untuk lebih mengoptimalkan kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sentra produksi pertanian maupun sektor lainnya.

Dalam konteks intra wilayah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:

1) Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung secara fisik merupakan limitasi pengembangan kawasan budidaya,

mengingat kelestariannya perlu dijaga, dalam hal ini kawasan lindung akan membatasi pengembangan kegiatan budidaya pada jalur pegunungan di bagian tengah dan timur Karangasem maupun kawasan perbukitan pada jalur di sepanjang pantai yang sejalan dengan aplikasi dari falsafah Nyegara-Gunung (segara = laut/kelod, gunung = bukit/kaja) sebagai kawasan-kawasan suci (kawasan lindung yang harus dilindungi keberadaannya, dan sebagai kawasan perlindungan setempat);

2) Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya baik yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kawasan lindung maupun yang bersifat budidaya pertanian (tanaman pangan lahan basah, perkebunan) dan budidaya non pertanian sebagai pusat-pusat pembangkit pergerakan yang relatif besar (pariwisata dan kawasan perkotaan) dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya;
3) Guna meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Karangasem maka pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta mengalokasikan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan segala kemungkinan investasi;
4) Sesuai dengan karakter fisik dan permasalahan mendasar di Kabupaten Karangasem maka dalam rangka pemerataan pembangunan diperlukan pembagian wilayah Kabupaten Karangasem menjadi tiga wilayah pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Utara, Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Selatan, dan Wilayah Pembangunan (WP) Karangasem Barat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
   - Adanya penegasan atau pengkhususan fungsi utama masing-masing wilayah.
   - Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian investasi yang sudah terarah dan spesifik dengan karakter masing-masing wilayah pembangunan. Dalam penataan ruang ketiga WP ini ada beberapa konsep pengembangan yaitu: - WP Utara akan dikembangkan dengan lebih mengoptimalkan serta

mengeksploitasi potensi alami kawasan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Perlunya optimalisasi dan eksploitasi ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan serta penyelesaian permasalahan utama WP ini yaitu pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

- WP Selatan akan dikembangkan dengan konsep meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai pemicu pertumbuhan wilayah. Sebagian besar pemanfaatan ruang di WP ini didominasi oleh kawasan pariwisata sehingga peranan sektor ini perlu didorong sebagai penggerak perekonomian serta dipadukan dengan sektor lainnya.
- WP Barat akan dikembangkan dengan konsep mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas produksi sektor-sektor basis masyarakat sesuai dengan daya tampung dan daya dukung wilayah. Dalam hal ini perlunya peningkatan kapasitas produksi sektor basis masyarakat ini diharapkan agar produksi yang ada tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari (sub sistem) tetapi dapat dikembangkan sebagai sektor yang berorientasi industri.

5) Penguatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan peranan dan fungsi kawasan perdesaan.
6) Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Karangasem menjadi pusat pertumbuhan yang dapat melayani dan mendukung perkembangan kawasan perdesaan di sekitarnya atau tidak diarahkan menjadi kawasan perkotaan yang metropolitan.

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem :

1) Penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;
2) Pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;

3) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;
4) Pemerataan pembangunan wilayah utara, selatan, dan barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya dan pariwisata yang berkelanjutan;
5) Pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik;
6) Penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
7) Penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.1.7 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Energi Listrik

Fasilitas penerangan listrik di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 seluruh desa sudah berakses listrik (78 Desa) namun jumlah pelanggan masih lebih kecil (139.382) dibanding kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Gianyar (201.307), dan Kabupaten Tabanan (169.582).

Tabel 2.12
Banyaknya Desa yang Berlistrik, Gardu Listrik, dan Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Telah Berlistrik	Gardu Induk	Gardu Distribusi	Jumlah Pelanggan
1	Jembrana	51	2	1.046	134.321
2	Tabanan	133	3	1.088	169.582
3	Badung	62	4	4.497	346.995
4	Gianyar	70	2	1.694	201.307
5	Klungkung	59	–	520	73.183
6	Bangli	73	–	535	75.422
7	Karangasem	78	1	895	139.382
8	Buleleng	148	2	1.292	234.719
9	Denpasar	43	4	2.994	421.772
	Bali	**717**	**18**	**14.561**	**1.796.683**

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Daya terpasang listrik di Kabupaten Karangasem mencapai 222 MW untuk memenuhi 78 Desa dengan jumlah pelanggan mencapai 139.382 yang sebagian besar adalah rumah tangga (120.317). Untuk golongan industri, bisnis masih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.13
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Daya Terpasang (MW)	Produksi Listrik (MWh)	Listrik Terjual (MWh)	Dipakai Sendiri (MWh)	Susut/ Hilang (MWh)
1	Jembrana	250	342.847	329.656	2.936	10.255
2	Tabanan	324	403.212	385.682	1.391	16.140
3	Badung	1.752	3.090.968	2.965.921	11.063	113.984
4	Gianyar	549	801.606	761.222	4.999	35.386
5	Klungkung	133	195.826	176.997	1.500	17.329
6	Bangli	120	127.986	119.045	1.500	7.441
7	Karangasem	222	256.06	240.216	2.000	14.090
8	Buleleng	343	417.046	397.212	3.736	16.097
9	Denpasar	1.271	2.013.606	1.925.414	7.421	80.772
	Bali	4.965	7.649.403	7.301.364	36.544	311.494

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 2.14
Banyaknya Desa yang Berlistrik, Gardu Listrik, dan Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Telah Berlistrik	Gardu Induk	Gardu Distribusi	Jumlah Pelanggan
1	Jembrana	51	2	1.046	134.321
2	Tabanan	133	3	1.088	169.582
3	Badung	62	4	4.497	346.995
4	Gianyar	70	2	1.694	201.307
5	Klungkung	59	–	520	73.183
6	Bangli	73	–	535	75.422
7	Karangasem	78	1	895	139.382
8	Buleleng	148	2	1.292	234.719
9	Denpasar	43	4	2.994	421.772
	Bali	717	18	14.561	1.796.683

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 2.15
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan dan Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	*Jenis Pelanggan*						Jumlah
		Sosial	Rumah tangga	Bisnis	Industri	Publik	Layanan Khusus	
1	Jembrana	3.750	114.123	14.630	166	815	837	134.321
2	Tabanan	5.484	143.230	18.276	184	964	1.444	169.582
3	Badung	5.911	261.485	63.695	216	2.326	13.362	346.995
4	Gianyar	5.073	165.832	27.069	159	1.097	2.077	201.307
5	Klungkung	3.648	57.156	11.407	47	636	289	73.183
6	Bangli	3.555	58.077	13.015	75	629	71	75.422
7	Karangasem	6.803	120.317	10.485	108	1.413	256	139.382
8	Buleleng	7.488	213.262	10.689	170	1.364	1.746	234.719
9	Denpasar	5.014	335.304	56.220	331	1.928	22.975	421.772
	Bali	46.726	1.468.786	225.486	1.456	11.172	43.057	1.796.683

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 2.16
Jumlah Pelanggan Listrik dan Tarif Listrik PT, PLN (Persero) Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Jenis Konsumen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	2024
Jumlah Pelanggan Listrik					
- Sosial	6.638	6.708	6.762	6.803	6.803
- Rumah Tangga	116.701	117.861	119.059	120.317	120.317
- Usaha Industri	109	108	108	108	108
- Usaha Dagang	9.584	9.886	10.171	10.485	10.485
- Instansi Pemerintah	1.294	1.294	1.303	1.413	1.413
- Lainnya	251	248	249	256	256
KARANGASEM	134.577	136.105	131.597	139.382	139.382
Tarif Listrik					
- Sosial	789	788	790	794	794
- Rumah Tangga	1.140	1.144	1.146	1.149	1.149
- Usaha Industri	1.108	1.107	1.113	1.117	1.117
- Usaha Dagang	1.297	1.299	1.301	1.303	1.303
- Instansi Pemerintah	1.637	1.638	1.638	1.637	1.637
- Lainnya	1.648	1.648	1.647	1.697	1.697
KARANGASEM	1.204	1.207	1.209	1.212	1.212

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Tabel 2.17
Jumlah Pemakaian Listrik (kWh) dan Nilai Listrik Terjual (Juta Rp) PT, PLN (Persero) Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Jenis Konsumen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	2024
Jumlah Pemakaian Listrik					
Sosial	2.357.410	4.768.224	7.248.024	10.085.206	10.085.206
Rumah Tangga	30.358.334	61.090.173	91.849.388	125.440.666	125.440.666
Usaha Industri	3.247.148	6.575.529	10.120.392	13.70.646	13.70.646
Usaha Dagang	17.294.233	35.980.466	55.460.099	75.934.153	75.934.153
Instansi Pemerintah	3.437.604	6.847.581	10.317.159	14.017.382	14.017.382
Lainnya	264.158	507.895	792.979	1.038.253	1.038.253
KARANGASEM	56.958.887	115.769.868	175.788.041	240.216.306	240.216.306
Nilai Listrik Terjual					
Sosial	1.89	3.759	5.729	8.003	8.003
Rumah Tangga	34.609	69.877	105.215	144.119	144.119
Usaha Industri	3.597	7.278	11.262	15.304	15.304
Usaha Dagang	22.425	46.750	72.171	98.923	98.923
Instansi Pemerintah	5.626	11.215	16.902	22.948	22.948
Lainnya	435	837	1.306	1.761	1.761
KARANGASEM	68.551	13.716	212.585	291.058	291.058

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

2. Air Bersih

Daya saing fasilitas air bersih tahun 2023, di Kabupaten Karangasem terdapat 43.531pelanggan dengan penggunaan air bersih mencapai 10.692 m3. Jumlah ini lebih kecil dari Kabupaten Klungkung yang mencapai 13.076 m3.

Tabel 2.18
Banyaknya Pelanggan, Produksi, Penggunaan, dan Penerimaan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelanggan (Unit)	Kapasitas Produksi Air (Liter/detik)	Penggunaan Air Bersih (Ribu m3)	*Jumlah Penerimaan (Juta Rp)*
1	Jembrana	26.482	261	4.675	26.351
2	Tabanan	67.545	660	15.416	86.993
3	Badung	80.792	17.330	38.264	190.902
4	Gianyar	61.062	751	21.421	66.278
5	Klungkung	41.388	463	13.076	26.062
6	Bangli	24.054	313	6.894	25.383
7	Karangasem	43.531	588	10.692	29.254

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelanggan (Unit)	Kapasitas Produksi Air (Liter/detik)	Penggunaan Air Bersih (Ribu m3)	*Jumlah Penerimaan (Juta Rp)*
8	Buleleng	83.724	889	19.270	58.830
9	Denpasar	91.605	1.165	23.025	161.237
	Bali	**520.183**	**22.420**	**152.733**	**671.291**

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

3. Pangan

ketahanan pangan berkorelasi positif dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Kemampuan penyediaan beras dari produksi sendiri yang dalam setiap tahunnya masih kekurangan, yang disebabkan oleh lahan persawahan yang sangat terbatas, ketersediaan air masih terbatas untuk mengairi sawah, sehingga prioritas pembangunan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Karangasem diarahkan pada:

1. Pengembangan ketersediaan pangan utama setara beras.
2. Pengembangan ketersediaan energi dan protein melalui analisa PPH Ketersediaan.
3. Penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan Desa Mandiri Pangan.
4. Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
5. Pengembangan penganekaragaman konsumsi melalui analisa PPH Konsumsi.
6. Pengembangan mutu dan keamanan pangan melalui uji lab keamanan pangan segar.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Karangasem tahun 2020-2024 menunjukkan cukup baik. Hasil penen padi mengalami menurun di tahun 2021 sedangkan di tahun 2024 kembali naik. Panen raya padi terjadi 2 kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan November.

Tabel 2.19
Luas Panen Padi menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ha) Tahun 2020- 2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	585,2	287,7	964,88	690,38	712,61
Februari	105,3	267,85	301,82	238,38	265,64
Maret	131,72	430,23	420,27	194,19	161,26
April	927,36	772,01	801,82	703,21	423,19
Mei	1,483,81	2,033,26	2,008,78	2,163,94	2.401,94
Juni	770,74	563,42	377,55	1,021,69	738,36
Juli	498,42	388,56	269,55	167,31	166,85
Agustus	166,85	514,63	523,98	233,25	256,14
September	759,06	170,77	178,56	133,92	518,65
Oktober	477,22	269,4	217,98	219,64	470,32
November	800,81	817,91	1,879,31	1,300,19	1.187,92
Desember	348,64	311,51	757,23	585,77	765,08
Kabupaten Karangasem	7,055,13	6,827,25	8,701,73	7,651,87	8.067,96
Bali	94,730,00	105,201,31	114,322,19	108,514,06	107.239,52

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Produksi padi di Kabupaten Karangasem tergantung pada musim panen raya yang umumnya terjadi di Bulan Januari, Mei, November, dan Desember. Bulan Mei puncak produksi padi hingga mencapai 13 ribu ton. Kabupaten Karangasem memiliki lahan sawah yang cukup terbatas hanya 7300 Ha. Produksi padi paling sedikit terjadi di Bulan Maret dan Juli. Secara umum panen raya padi di Bali, biasanya terjadi antara bulan Januari hingga April, dengan puncak panen diperkirakan di akhir Februari hingga Maret.

Tabel 2.20
Produksi Padi menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ton-GKG)

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	3.237	1.644	5.273	3.934	4.287
Februari	583	1.531	1.649	1.358	1.598
Maret	729	2.459	2.297	1.106	970
April	5.130	4.412	4.382	4.007	2.546
Mei	7.746	12.009	13.063	13.023	13.507
Juni	4.024	3.328	2.455	6.149	4.152
Juli	2.602	2.295	1.753	1.007	938

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Agustus	871	3.040	3.407	1.404	1.440
September	5.163	1.104	1.157	935	3.383
Oktober	3.246	1.742	1.413	1.534	3.027
November	5.447	5.290	12.186	9.080	6.783
Desember	2.371	2.015	4.910	4.091	6.196
Kabupaten Karangasem	41.150	40.867	53.947	47.628	48.828
Bali	570.319	618.911	689,191,38	673.581	647.966

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Produksi beras di Kabupaten Karangasem tahun 2024 mencapai 27.537 Ton atau sekitar 7,54% dari produksi beras Provinsi Bali. Sebagain upaya mendukung ketahanan pangan, Kabupaten karangsem mengembangkan padi gogo varietas Luhur yang menghasilkan 4,9 ton per Hektar.

Tabel 2. 21
Produksi Beras menurut Bulan di Kabupaten Karangasem (ton), 2020 – 2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	594	927	2.974	2.218	2.418
Februari	1.146	863	930	766	901
Maret	1.942	1.387	1.295	624	547
April	3.387	2.488	2.471	2.260	1.436
Mei	2.590	6.773	7.367	7.345	7.617
Juni	3.087	1.877	1.385	3.468	2.342
Juli	1.374	1.294	989	568	529
Agustus	1.495	1.714	1.922	792	812
September	1.162	623	625	527	1.908
Oktober	1.255	983	764	865	1.707
November	2.776	2.983	6.583	5.121	3.825
Desember	1.984	1.136	2.073	2.307	3.494
Kabupaten Karangasem	22.792	23.048	29.377	26.160	27.537
Bali	325.028	349.038	383.829	379.870	365.424

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

2.1.8 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah

sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pengelola dari proses pengolahan ini sangat tergantung dari dimana proses pengolahan dilakukan. Pengolahan skala sumber, sangat berperan dalam mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola. Adanya konsep 3R (reduce, reuse dan recycle) serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai merubah pradigma masyarakat tentang sampah. Sampah adalah sumber daya yang harus dikelola sejak mulai dari sumber sampah.

Tabel 2.22
Pengelolaan sampah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Sampah Yang Dikelola (Ton)	Persentase Sampah Dikelola Terhadap Timbulan Sampah (persen)	Sampah Yang Tidak Dikelola (Ton)	Persentase Sampah yang Tidak Dikelola Terhadap Timbulan Sampah (persen)
Jembrana	26.795.37	45,11	32.600,35	54,89
Tabanan	12.162,23	14,44	72.085,25	85,56
Badung	108.393,35	92,86	8.337,89	7,14
Gianyar	124.398,42	88,02	16.938,71	11,98
Klungkung	30.425,74	88,91	3.795,83	11,09
Bangli	28.385,95	70,12	12.094,01	29,88
Karangasem	45.845,16	47,31	51.066,84	52,69
Buleleng	80.938,86	65,39	42.832,64	34,61
Denpasar	325.860,69	93,23	23.658,75	6,77
Provinsi Bali	783.205,77	67,27	263.410,27	32,73

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

2.1.9 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Merujuk dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karangasem, potensi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Karangasem adalah sejumlah 12 (dua belas) jenis potensi ancaman bencana. Dua belas potensi ancaman ini muncul berdasarkan pada sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Potensi Bencana di Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Gempa Bumi

4. Letusan Gunung Api
5. Tsunami
6. Tanah Longsor
7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
8. Cuaca Ekstrim
9. Kekeringan
10. Kebakaran Hutan dan Lahan
11. Kegagalan Teknologi
12. Wabah Penyakit

Jenis-jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Karangasem yang termasuk dalam kategori bencana yang disebabkan oleh:

1. Bencana Geologi meliputi: bencana gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan letusan gunung api;
2. Bencana Hidrometeorologi meliputi: bencana banjir, banjir bandang, gelombang pasang/abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
3. Bencana Kegagalan Teknologi;
4. Bencana Wabah Penyakit.

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023-2028 bencana prioritas berikut merupakan bencana yang banyak menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa dibandingkan dengan bencana lainnya yang terjadi di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis prioritas risiko bencana dan potensi ancaman bencana yang berdampak masif yang perlu dijadikan prioritas di tingkat Kabupaten Karangasem, yaitu:

1. Gempa Bumi
2. Cuaca Ekstrim
3. Banjir Bandang
4. Tanah Longsor
5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam Perda nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Kabupaten Karangasem Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 – 2032, ditetapkan Kawasan Rawan Bencana, di mana kawasan

yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, terdiri atas:

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor; berupa zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Dengan luas kurang lebih 1.887 (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, terletak di:
   a) Desa Tiyingtali, Desa Tri Buana, Desa Bunutan, Desa Pidpid, Desa Nawakerti, Desa Purwakerthi, Desa Kerthamandala, dan Desa Datah di Kecamatan Abang;
   b) Desa Buana Giri dan Desa Budakeling di Kecamatan Bebandem;
   c) Desa Bukit, Desa Seraya, Desa Seraya Timur, dan Desa Seraya Barat di Kecamatan Karangasem;
   d) Desa Dukuh, Desa Tulamben, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat, dan Desa Kubu di Kecamatan Kubu; dan
   e) Desa Sebudi di Kecamatan Selat.

b. Kawasan rawan bencana letusan gunung api; kawasan rawan bencana III bahaya jatuhan dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer dengan luas kurang lebih 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektar, terletak di:
   a) Desa Datah, Desa Nawakerti di Kecamatan Abang;
   b) Desa Buana Giri, Desa Jungutan di Kecamatan Bebandem;
   c) Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Dukuh, Desa Kubu, Desa Tulamben di Kecamatan Kubu;
   d) Desa Besakih di Kecamatan Rendang; dan
   e) Desa Sebudi di Kecamatan Selat.

c. Sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. Sempadan patahan aktif (*active fault*) Culik-Abang sebagaimana selebar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif dengan luas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar pada kawasan rawan bencana gempa bumi yang melintasi Kecamatan Abang.

Rencana pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah termasuk longsor adalah sebagai berikut: a) Pencegahan terhadap longsor dapat memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor. B) Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. C) Pembuatan Cek DAM penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah perbukitan.

Secara umum arahan penataan ruang untuk kawasan rawan bencana terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a) Upaya mitigasi; adalah upaya mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bahaya.
b) Upaya adaptasi; dilakukan terutama pada daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu jenis bencana, terutama karena suatu wilayah merupakan zona rawan tinggi sementara wilayah tersebut telah terbangun.

Tabel 2.23
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020, 2021, dan 2024

Kabupaten/ Kota	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Jembrana	7	13	5	0	0	0	3	5	4
Tabanan	0	4	8	0	11	4	11	15	29
Badung	3	2	5	0	1	11	5	9	10
Gianyar	1	2	2	0	2	0	6	13	19
Klungkung	0	2	1	16	22	3	0	2	4
Bangli	0	4	0	4	2	21	7	18	19
Karangasem	4	0	6	0	3	8	6	8	19
Buleleng	5	7	15	26	14	8	12	21	25
Denpasar	5	5	6	7	13	34	0	0	0
Provinsi Bali	25	39	48	53	68	89	50	91	129

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

2.1.10 Demografi

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat

pertumbuhannya, maka jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Penduduk Kabupaten Karangasem berdasarkan atas sensus tahun 2010 diproyeksikan hingga 2020 sedangkan proyeksi penduduk tahun 2021-2024 diproyeksikan berdasarkan atas jumlah penduduk hasil sensus 2020.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk 2020-2022 hasil SP 2020, diketahui bahwa jumlah penduduk Karangasem terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan implikasi dari adanya kelahiran dan ditambah dengan sedikit pengaruh dari migrasi masuk. Jumlah penduduk Karangasem tahun 2023 mencapai 499,95 ribu jiwa, meningkat sekitar 2.480 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2022. Berdasarkan rasio jenis kelamin dari total penduduk Karangasem tersebut, sebanyak 50,22 persen atau tepatnya 251 ribu jiwa tercatat berjenis kelamin laki-laki. Sejalan dengan hal tersebut, *sex ratio* Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 adalah 100,88. Artinya, terdapat 100 hingga 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2023. Dengan demikian, diketahui bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Karangasem relatif sama.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem (Ribu Jiwa) berdasarkan bentuk piramida penduduk, dapat diketahui bahwa komposisi penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 bersifat stasioner. Bentuk piramida ini menggambarkan tingkat kelahiran yang hampir seimbang dengan tingkat kematian, serta pertumbuhan penduduk yang relatif tetap. Kondisi tersebut dapat dilatarbelakangi oleh tingkat kelahiran dan angka kematian yang relatif rendah. Selain itu, tercatat pula bahwa sekitar 335,52 ribu (67,11 persen) penduduk Karangasem berada pada kisaran umur 15-64 tahun. Artinya, hampir dua pertiga penduduk produktif. Dominasi pada kelompok usia ini mengindikasikan bahwa Karangasem memiliki jumlah SDM yang sangat berpotensi untuk menggairahkan roda perekonomian. Dengan demikian, fokus perhatian saat ini dapat mengarah pada bagaimana membekali penduduk dalam

usia produktif agar dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menunjang perekonomian Karangasem.



Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut
Kelompok Umur Tahun 2024

Bertambahnya jumlah penduduk bisa menjadi 'sumber kekuatan' sekaligus 'tantangan' bagi suatu daerah di era pembangunan saat ini. Sebagai 'sumber kekuatan', meningkatnya jumlah penduduk sama artinya dengan meningkatnya potensi SDM untuk memutar roda perekonomian. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Karangasem tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 502,33 ribu jiwa. Dari jumlah ini, sebanyak 86 persen di antaranya (432 jiwa) merupakan mereka yang benar-benar berpotensi dalam menggerakkan perekonomian yang disebut angkatan kerja. Adapun angkatan kerja atas mereka yang bekerja serta mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha (menganggur). Sementara itu, 14 persen sisanya bukan merupakan angkatan kerja, terdiri atas mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif (usia anak- anak dan usia tua) baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Tahun 2024, penduduk laki-laki pada usia anak-anak diproyeksikan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yaitu 59,56 ribu orang berbanding 57,15 ribu orang. Sedangkan pada kelompok usia tua, penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki yaitu 25,95 ribu orang berbanding 21,78 ribu orang. Hal ini sejalan dengan umur harapan hidup perempuan di Kabupaten Karangasem tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,77 berbanding 68,85.

Sejalan dengan angka tersebut, jumlah dan pertumbuhan penduduk usia tua di Karangasem juga meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini mengangkat isu baru dalam kependudukan di Kabupaten Karangasem yaitu *aging population*. *Aging population* merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya perubahan struktur penduduk usia non produktif (khususnya penduduk usia 65 tahun ke atas) semakin bertambah. Pertambahan ini mengakibatkan jarak kuantitas usia produktif dengan usia non produktif lambat laun menjadi semakin dekat dan memiliki kecenderungan sama dengan usia produktif. Isu ini mulai berkembang di negara-negara maju (industrialisasi).

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur Tahun 2024
(ribu)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	20,36	19,58	39,94
5–9	18,95	18,36	37,31
10–14	20,09	19,19	39,28
15–19	20,92	19,87	40,79
20–24	18,50	17,64	36,14
25–29	17,74	17,56	35,30
30–34	18,76	18,54	37,30
35–39	20,35	19,65	40,00
40–44	19,61	18,08	37,69
45–49	17,66	17.31	34,98
50–54	14,70	14,25	28,95
55–59	11,23	12,28	23,51
60–64	10,49	11,73	22,22
65–69	8,52	9,77	18,28

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
70–74	6,41	7,56	13,97
75+	7,30	9,37	16,67
Kabupaten Karangasem	251,60	250,73	502,33

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Jumlah penduduk di Karangasem tahun 2024 yang sebesar 502,33 ribu jiwa dibagi dengan total luas wilayah Karangasem yakni seluas 839,32 km2, maka diperoleh tingkat kepadatan penduduk Karangasem pada tahun 2022 adalah sebesar 598,50 jiwa/km2. Artinya, rata-rata tiap 1 Kilometer persegi wilayah di Kabupaten Karangasem didiami oleh sekitar 599 penduduk. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Bali seperti Denpasar dan Gianyar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai ribuan, Karangasem memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan kata lain, meskipun luas wilayahnya menduduki peringkat ketiga terluas se-Bali, diketahui bahwa jumlah penduduk di kabupaten ini tidak terlalu besar

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten
Karangasem Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah (Ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Rendang	44,38	8,24	403	102,33
Sidemen	40,08	7,44	927	100,63
Manggis	58,10	10,79	756	101,37
Karangasem	107,24	19,92	1.159	101,33
Abang	89,23	16,57	679	103,71
Bebandem	59,31	11,02	725	101,66
Selat	47,39	8,80	659	100,44
Kubu	92,66	17,21	401	104,45
Kabupaten Karangasem	538,39	100,00	642	102,24

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Permasalahan kepadatan penduduk menjadi salah satu permasalahan serius sebab fenomena yang terjadi adalah penduduk yang selalu bertambah akibat kelahiran maupun migrasi, sedangkan luas wilayah yang memiliki kecenderungan yang tetap. Jika merujuk pada letak geografis Kabupaten Karangasem yang berbatasan langsung

dengan laut, luas wilayah Kabupaten Karangasem mempunyai peluang untuk berkurang karena abrasi laut. Namun, kepadatan penduduk di Kabupaten Karangasem selama empat tahun terakhir selalu di bawah angka kepadatan penduduk Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karangasem bukan merupakan daerah padat penduduk di Provinsi Bali.

Tabel 2.26
Proyeksi dan Distribusi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2035

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)			
	2020	2025	2030	2035
Jembrana	316,31	327,71	336,68	343,05
Tabanan	461,22	469,13	475,10	477,85
Badung	547,41	573,70	598,17	618,89
Gianyar	514,50	530,12	543,70	553,94
Klungkung	206,51	209,87	211,78	212,29
Bangli	258,18	263,17	266,53	268,17
Karangasem	492,24	504,61	514,21	520,92
Buleleng	789,83	820,48	845,70	865,07
Denpasar	725,47	762,48	793,26	817,13
Provinsi Bali	4,311,67	4,461,27	4,585,11	4,677,29
Kabupaten/ Kota	**Distribusi Penduduk (%)**			
	2020	**2025**	**2030**	**2035**
Jembrana	7,34	7,35	7,34	7,33
Tabanan	10,70	10,52	10,36	10,22
Badung	12,70	12,86	13,05	13,23
Gianyar	11,93	11,88	11,86	11,84
Klungkung	4,79	4,70	4,62	4,54
Bangli	5,99	5,90	5,81	5,73
Karangasem	11,42	11,31	11,21	11,14
Buleleng	18,32	18,39	18,44	18,50
Denpasar	16,83	17,09	17,30	17,47
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

Tabel 2.27
Proyeksi Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020–2030 (Ribu)

Laki-Laki

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	20,96	20,75	20,56	20,38	20,22	20,06
5–9	18,56	18,95	19,32	19,70	20,15	20,74
10–14	19,76	19,50	19,29	19,11	18,87	18,47
15–19	20,96	20,84	20,58	20,23	19,86	19,54

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20–24	18,56	18,74	18,95	19,16	19,31	19,34
25–29	17,25	16,82	16,51	16,32	16,25	16,31
30–34	18,17	17,62	17,10	16,61	16,15	15,70
35–39	20,10	19,71	19,20	18,63	18,03	17,46
40–44	19,84	20,02	20,15	20,18	20,08	19,83
45–49	17,99	18,30	18,56	18,80	19,03	19,25
50–54	15,32	15,83	16,27	16,64	16,98	17,30
55–59	11,43	11,85	12,43	13,11	13,77	14,35
60–64	10,50	10,41	10,26	10,14	10,13	10,32
65–69	8,65	8,81	8,99	9,15	9,25	9,27
70–74	6,56	6,70	6,81	6,91	7,02	7,14
75+	7,47	7,66	7,87	8,10	8,32	8,55
Total	**252,07**	**252,49**	**252,85**	**253,16**	**253,41**	**253,61**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

Tabel 2.27
Proyeksi Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020–2030 (Ribu) (Lanjutan)

Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	20,10	19,91	19,73	19,56	19,40	19,25
5–9	18,00	18,35	18,68	19,04	19,44	19,97
10–14	19,00	18,84	18,69	18,54	18,32	17,96
15–19	19,99	19,97	19,84	19,65	19,44	19,24
20–24	17,80	18,09	18,40	18,71	18,93	19,04
25–29	17,22	16,85	16,56	16,38	16,36	16,50
30–34	18,28	18,10	17,95	17,79	17,55	17,21
35–39	19,82	19,78	19,54	19,19	18,85	18,58
40–44	18,21	18,50	18,90	19,34	19,68	19,85
45–49	17,63	17,78	17,79	17,73	17,74	17,87
50–54	14,76	15,31	15,89	16,44	16,91	17,22
55–59	12,39	12,63	12,96	13,39	13,87	14,37
60–64	11,86	11,89	11,84	11,78	11,78	11,88
65–69	9,97	10,21	10,47	10,72	10,91	11,04
70–74	7,81	8,03	8,22	8,40	8,58	8,78
75+	9,70	10,07	10,47	10,91	11,37	11,83
Total	**252,54**	**254,27**	**255,93**	**257,55**	**259,10**	**260,59**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

Tabel 2.27
Proyeksi Penduduk Kabupaten Karangasem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020–2030 (Ribu) (Lanjutan)

Laki-laki + Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	41,05	40,66	40,29	39,94	39,62	39,32
5–9	36,56	37,30	38,00	38,74	39,59	40,71
10–14	38,76	38,33	37,99	37,64	37,19	36,43
15–19	40,94	40,80	40,42	39,88	39,30	38,78
20–24	36,36	36,82	37,35	37,87	38,24	38,37
25–29	34,47	33,67	33,07	32,70	32,61	32,81
30–34	36,45	35,72	35,05	34,40	33,70	32,91
35–39	39,92	39,48	38,74	37,82	36,88	36,04
40–44	38,04	38,52	39,05	39,51	39,76	39,69
45–49	35,62	36,08	36,35	36,54	36,76	37,11
50–54	30,08	31,13	32,15	33,08	33,88	34,51
55–59	23,82	24,48	25,40	26,50	27,64	28,72
60–64	22,36	22,30	22,10	21,92	21,91	22,20
65–69	18,63	19,02	19,46	19,87	20,16	20,31
70–74	14,38	14,73	15,03	15,31	15,60	15,92
75+	17,17	17,73	18,34	19,01	19,69	20,38
Total	**504,61**	**506,76**	**508,79**	**510,72**	**512,51**	**514,21**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, perekonomian Bali juga Kabupaten Karangasem mencatatkan pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 yaitu sebesar 4,33 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem kembali mencapai level 3 setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, hantaman pandemi Covid-19 akhirnya membawa ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi berlanjut pada tahun 2021, namun tahun 2022, perekonomian Kabupaten Karangasem mulai menunjukkan tren positif hingga berlanjut pada tahun 2024 yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi selama pasca pandemi covid-19.

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2024 mencapai 11.663,31 miliar. Angka tersebut naik dari 11.179,22 triliun rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 tumbuh positif sebesar 4,33 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 3,10 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2024, salah satunya didorong oleh kembali pulihnya aktivitas pariwisata di Bali. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat. Beberapa indikator perkembangan aktivitas pariwisata yang menunjukkan peningkatan yaitu Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik Hotel Bintang maupun Non Bintang, serta penerimaan pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten/kota. Selain itu sepanjang tahun 2024, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga berhasil mencatatkan pelayanan kepada lebih dari 21 juta penumpang yang naik signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kondisi tersebut diduga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Bali sepanjang tahun 2024, utamanya dalam penciptaan nilai tambah bagi beberapa Kategori

Lapangan Usaha yaitu Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi.

Ekonomi Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, tahun 2019 ekonomi tumbuh sebesar 1,95 persen dan meningkat di tahun 2023 menjadi 4,16 persen sedangkan di tahun 2020 akibat covid-19 ekonomi mengalami perlambatan atau menurun yaitu pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,49 persen dan di tahun 2021 juga sedikit meningkat menjadi 1,22 persen sedangkan di tahun 2022 berhasil meningkat seiring dengan pulihnya kasus covid-19 sehingga ekonomi meningkat menjadi 4,35 persen. Sektor lapangan usaha yang tumbuh dengan baik di antaranya: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa lainnya, Pengadaan Listrik dan Gas dan Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 2.28
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,17	2,86	-0,52	-1.15	1,99
B, Pertambangan dan Penggalian	0,31	6,45	7,12	5.82	5,09
C, Industri Pengolahan	-2,29	0,29	3,89	0.89	1,54
D, Pengadaan Listrik dan Gas	-7,65	-2,53	9,73	10.71	1,61
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,06	-1,45	1,10	5.60	5,27
F, Konstruksi	-3,41	5,64	3,13	2.04	5,43
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,13	-0,68	5,43	3.62	0,49
H, Transportasi dan Pergudangan	-9,10	-8,54	4,07	5.18	3,15
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-29,82	-10,29	10,66	14.85	9,02
J, Informasi dan Komunikasi	7,20	4,36	0,12	1.66	4,33
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,37	-3,21	9,85	15.79	11,89
L, Real Estate	0,52	1,80	1,08	1.62	3,73
M, N, Jasa Perusahaan	-3,04	-2,18	6,34	3.34	7,46
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,13	-3,79	-2.92	6,97
P, Jasa Pendidikan	-0,16	1,59	0,48	0.11	5,35
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78	4,66	1,37	2.60	4,66
R,S, T, U, Jasa lainnya	-5,42	-3,48	9,89	8.38	3,52
PDRB	-4,49	-0,56	2,58	3.10	4,33

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

2. Nilai PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (*value added*) dari seluruh sektor perekonomian. PDRB merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Total nilai tambah yang dihasilkan tersebut dihitung tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang menghasilkannya dimiliki oleh residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, serta pendapatan, dan ketiganya disajikan dalam dua kategori harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan terutama untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar dan terutama bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Nilai PDRB di tahun di tahun 2020 16.399,77 miliar rupiah dan meningkat sedikit di tahun 2021 menjadi 16.506,62 miliar rupiah dan tahun 2022 meningkat menjadi 17.669,49 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2023 dan 2024 masing-masing meningkat menjadi sebesar 18.974,68 miliar rupiah dan 20.210,33 miliar rupiah.

Tabel 2.29
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Kabupaten Karangasem Tahun

Kategori Industri	2020	2021	2022	2023	2024*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.325,47	4.521,82	4.692,14	4.888,23	5.136,05
B. Pertambangan dan Penggalian	516,24	554,41	614,61	676,62	732,50
C. Industri Pengolahan	672,60	684,23	740,48	774,52	812,24

Kategori Industri	2020	2021	2022	2023	2024*
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15,73	15,35	17,18	19,35	19,58
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,18	21,95	22,69	24,56	26,07
F. Konstruksi	1.083,69	1.180,14	1.270,81	1.318,05	1.388,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	901,70	906,87	1.005,92	1.077,72	1.083,92
H. Transportasi dan Pergudangan	2.824,77	2.591,36	2.789,76	3.070,99	3.239,84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.366,24	1.222,60	1.427,39	1.739,41	1.963,79
J. Informasi dan Komunikasi	586,22	622,13	634,62	653,18	688,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	735,91	749,13	901,45	1.062,93	1.194,49
L. Real Estate	671,71	687,83	721,18	754,93	796,75
M, N. Jasa Perusahaan	129,30	128,62	142,52	152,03	166,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334,47	1.376,50	1.365,65	1.365,40	1.470,85
P. Jasa Pendidikan	448,05	456,81	464,02	467,12	505,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373,39	403,18	420,58	442,88	472,30
R,S, T, U. Jasa lainnya	392,10	383,68	438,50	487,82	512,56
PDRB	16.399,77	16.506,62	17.669,49	18.974,68	20.210,33

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karangasem secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke-enam setelah Kabupaten Tabanan dan berada di atas Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli.

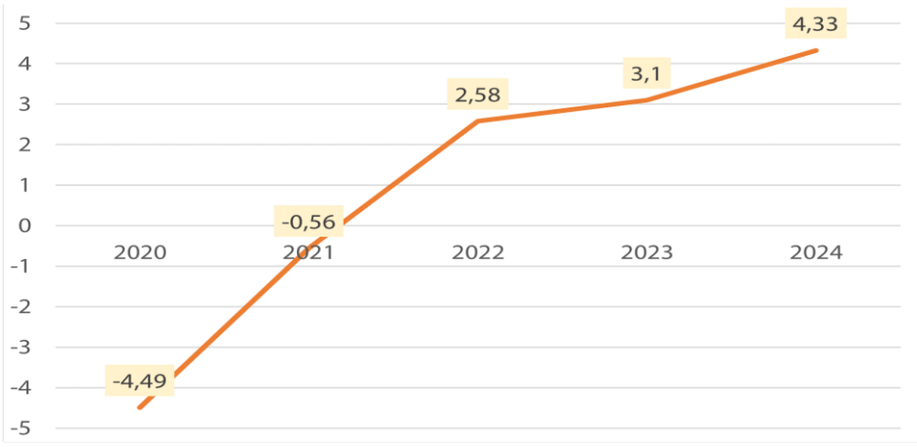
Tabel 2.30
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah) di Provinsi Bali, 2020–2024

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Jembrana	13.437,61	13.510,63	14.532,26	15.613,28	16.845,01
2	Tabanan	22.257,58	22.021,14	23.681,30	25.531,69	27.649,80

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
3	Badung	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.399,54	75.098,20
4	Gianyar	25.841,72	25.788,23	27.944,21	30.529,42	33.046,60
5	Klungkung	8.450,67	8.534,43	9.210,21	10.072,22	11.015,49
6	Bangli	6.716,09	6.825,56	7.337,99	7.908,31	8.465,60
7	Karangasem	16.399,77	16.506,62	17.669,49	18.974,78	20.210,33
8	Buleleng	33.302,72	33.363,29	35.805,28	38.351,36	41.387,75
9	Denpasar	49.607,46	49.686,63	54.633,83	60.100,30	65.300,21

Sumber : BPS Prov.Bali, 2025

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir juga berfluktuasi. Tahun 2020 nilai PDRB sebesar 16.399,77 miliar rupiah meningkat menjadi 16.506,62 miliar rupiah di tahun 2021 dan meningkat menjadi menjadi 17.669,49 miliar rupiah di tahun 2022 dan meningkat sedikit di tahun 2023 menjadi 18.974,78 miliar rupiah dan tahun 2024 meningkat menjadi 20.210,33 miliar rupiah.



Gambar 2.3
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Persen)

Daya saing Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem tahun 2024 secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke-sembilan (4,33%). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Badung paling tinggi (5,94%), Kota Denpasar (5,55%), Kabupaten Gianyar (5,47%), Kabupaten Klungkung (5,08%), Sedangkan Kabupaten Jembrana (4,98%), Tabanan (4,94%) dan Bangli sebesar (4,54%).

Tabel 2. 31
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Bali, 2020–2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Jembrana	-4,98	-0,65	2,98	3,66	4,98
2	Tabanan	-6,17	-1,98	2,93	3,56	4,94
3	Badung	-16,55	-6,74	9,97	11,29	5,94
4	Gianyar	-8,39	-1,05	4,04	5,06	5,47
5	Klungkung	-6,38	-0,23	3,12	4,7	5,08
6	Bangli	-4,1	-0,33	2,8	3,5	4,54
7	Karangasem	-4,49	-0,56	2,58	3,1	4,33
8	Buleleng	-5,8	-1,27	3,11	3,64	5,04
9	Denpasar	-9,44	-0,92	5,02	5,69	5,55

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Karangasem dominan dibentuk sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024

Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.729,58	2.807,53	2.792,96	2.758,06	2.813,05
B, Pertambangan dan Penggalian	341,03	363,01	388,87	411,50	432,46
C, Industri Pengolahan	443,40	444,70	461,80	466,09	473,24
D, Pengadaan Listrik dan Gas	9,28	9,04	9,92	10,99	11,16
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,77	17,51	17,70	18,69	19,68
F, Konstruksi	715,45	755,82	779,44	795,35	838,57
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	615,40	611,20	644,40	670,41	673,72
H, Transportasi dan Pergudangan	1.639,06	1.499,08	1.560,02	1.640,86	1.692,47

Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785,05	704,30	779,35	895,07	975,82
J, Informasi dan Komunikasi	508,62	530,79	531,44	540,25	563,66
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	475,24	459,99	505,31	585,10	654,70
L, Real Estate	514,65	523,92	529,60	538,20	558,28
M, N, Jasa Perusahaan	85,88	84,01	89,33	92,31	99,20
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	933,50	934,72	899,25	872,94	933,81
P, Jasa Pendidikan	306,39	311,27	312,76	313,09	329,85
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262,99	275,24	279,01	286,27	299,60
R,S, T, U, Jasa lainnya	247,08	238,49	262,08	284,04	294,03
PDRB	10.630,37	10.570,60	10.843,41	11.179,22	11.663,31

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke-enam setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan berada di atas Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli.

Tabel 2.33
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah) di Provinsi Bali, 2020–2024

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022*	2023*	2024**
1	Jembrana	8.951,35	8.892,80	9.157,67	9.492,38	9.965,23
2	Tabanan	14.808,65	14.515,58	14.940,44	15.472,12	16.236,00
3	Badung	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32	37.667,34
4	Gianyar	17.442,44	17.258,77	17.956,69	18.865,02	19.896,35
5	Klungkung	5 608,69	5.595,88	5.770,48	6.041,65	6.348,54
6	Bangli	4.399,19	4.384,73	4.507,38	4.665,10	4.876,68
7	Karangasem	10.630,37	10.570,60	10.843,41	11.179,22	11.663,31
8	Buleleng	22.066,16	21.785,73	22.463,38	23.281,43	24.453,82
9	Denpasar	32.740,22	32.439,61	34.066,71	36.004,30	38.001,22

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Kontribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karangasem terhadap Provinsi Bali sebesar antara 7,29% (tahun 2020) hingga 7,47% (tahun 2021). Kontribusi ini mengalami fluktuasi di mana tahun 2022 menurun menjadi 7,18% dan di tahun 2024 menurun lagi menjadi 6,76%.

Tabel 2.34
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020–2024

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Jembrana	5,97	6,11	5,9	5,67	5,63
2	Tabanan	9,89	9,96	9,62	9,27	9,25
3	Badung	21,79	20,3	22,47	24,83	25,11
4	Gianyar	11,48	11,66	11,35	11,08	11,05
5	Klungkung	3,76	3,86	3,74	3,66	3,68
6	Bangli	2,98	3,09	2,98	2,87	2,83
7	Karangasem	7,29	7,47	7,18	6,89	6,76
8	Buleleng	14,8	15,09	14,55	13,92	13,84
9	Denpasar	22,04	22,47	22,2	21,82	21,84
	Bali	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Daya saing Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Bali periode tahun 2020-2024 menempati urutan kesembilan yaitu di tahun 2024 sebesar 3,84%, di bawah Kabupaten Buleleng (4,27%), Kabupaten Bangli (4,17%).

Tabel 2. 35
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Bali, 2020–2024

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Jembrana	-16,21	-1,50	2,21	2,92	4,28
2	Tabanan	-9,15	-2,31	2,56	3,20	4,59
3	Badung	3,20	-7,38	8,92	10,25	4,97
4	Gianyar	-8,51	-1,58	3,41	4,43	4,85
5	Klungkung	-18,69	-0,74	2,76	4,37	4,78
6	Bangli	-15,37	-0,86	2,39	3,10	4,17
7	Karangasem	-18,80	-1,44	2,05	3,10	3,84
8	Buleleng	-20,92	-2,26	2,29	2,86	4,27

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
9	Denpasar	19,42	-1,87	3,93	4,64	4,54

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

3. Laju Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka di atas 10 persen. Kondisi perkembangan inflasi Provinsi Bali bulan November 2022 sebesar 0,28persen (mtm) atau 6,62persen (yoy). Komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni pada *volatile foods* (bawang merah, sawi hijau dan tomat) dan *core inflation*, sedangkan penurunan harga kelompok *Administered Price* menjadi penahan laju inflasi.

Sesuai laporan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali per 7 September 2022 diketahui perkembangan realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 5,75persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,41persen (yoy) maupun triwulan II 2021 yang sebesar 0,58persen (yoy). Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2022 didorong oleh naiknya tekanan harga pada hampir semua kelompok barang. Lebih lanjut, realisasi inflasi Bali triwulan II 2022 juga tercatat lebih tinggi daripada realisasi inflasi Nasional yaitu sebesar 4,35persen (yoy). Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi diprakirakan semakin meningkat, terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan karena adanya momentum liburan musim panas dan liburan sekolah, meningkatnya harga komoditas global, kenaikan tarif PPN menjadi 11persen, kenaikan tarif dasar listrik serta adanya kebijakan spasial di Kota Denpasar yang menaikkan tarif PDAM. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali akan terus mengawal pergerakan harga sehingga inflasi agar hingga akhir tahun tetap berada dalam sasaran nasional 3±1persen (yoy).

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai tambah yang tercipta dari aktivitas ekonomi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dari perbandingan tersebut, didapatkan gambaran secara sederhana, nilai tambah yang mampu dihasilkan per satu orang penduduk. Namun tidak serta merta indikator ini dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan penduduk. Pada kenyataannya, masih terdapat variasi pendapatan di antara golongan penduduk. Selain itu, nilai PDRB juga masih mengandung nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan oleh penduduk Bali. Oleh karenanya, gambaran kesejahteraan penduduk yang dihasilkan melalui indikator PDRB per kapita perlu disandingkan dengan indikator-indikator lainnya untuk mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk secara lebih komprehensif.

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami fluktuasi, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2020 sebesar 39,19 juta rupiah dan di tahun 2021 menurun hingga 32,96 juta rupiah. Setelah pandemi Covid 19 berakhir, di tahun 2022 PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Karangasem mulai meningkat menjadi 34,56 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 2,05 persen dari tahun sebelumnya dan di tahun 2023 PDRB per kapita naik menjadi 37,95 juta rupiah, demikian pula tahun 2024 naik menjadi 40,23 juta rupiah.

Tabel 2. 36
PDRB Per kapita Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (miliar Rupiah)	16.399,77	16.506,62	17.669,49	18.974,68	20.210,33
ADHK (miliar rupiah)	11.130,34	10.630,38	10.570,60	10.843,41	11.663,31
PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)	39,19	32,96	34,56	37,95	40,23
PDRB Per Kapita ADHK (juta rupiah)	25,40	21,11	21,21	21,68	23,22
Pertumbuhan PDRB per	-18,80	-1,44	2,05	2,59	3,84

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
kapita ADHK (persen)					
Jumlah Penduduk (Ribu)	418,5	500,85	511,28	499,95	502,33
Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,46	1,70	2,08	2,17	0,50

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

5. Pengeluaran per Kapita

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kabupaten Karangasem. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, *gini ratio* maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem dikatakan cukup baik. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah mengetahui pendapatan masyarakat. Terdapat beberapa batasan dalam memperoleh data pendapatan yang valid sehingga nilai pengeluaran dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk. Hal tersebut tidak terlepas dari asumsi bahwa semakin tinggi pengeluaran seseorang maka semakin besar pendapatan yang diperolehnya dan semakin sejahtera orang tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Karangasem tercatat sebesar 828.750 rupiah. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan menghabiskan sebanyak 414.353 rupiah, sedangkan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan sebesar 414.397 rupiah. Berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 56,95 persen, kelompok pengeluaran 40 persen tengah sebesar 52,39 persen, dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas sebesar 43,83 persen. Data tersebut

menunjukkan bahwa seiring kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan cenderung lebih kecil dan pengeluaran untuk bukan makanan semakin besar.

1) Pengeluaran untuk Makanan

Pengeluaran terbesar untuk kelompok makanan adalah konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi sebesar 25,57 persen, diikuti komoditas padi-padian sebesar 21,93 persen, dan komoditas sayur-sayuran sebesar 9,38 persen. Sedangkan, proporsi pengeluaran terkecil adalah konsumsi komoditas umbi-umbian sebesar 1,01 persen. Proporsi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yang lebih besar dibandingkan komoditas makanan lainnya menggambarkan bahwa pola konsumsi penduduk sudah beralih dari makanan yang dimasak sendiri ke makanan dan minuman jadi yang dibeli.

Pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, hampir sepertiga (31,52 persen) pengeluaran per kapita sebulan terhadap total makanan dihabiskan untuk konsumsi komoditas padi-padian, diikuti komoditas makanan dan minuman jadi sebesar 22,78 persen. Sedangkan, pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas, proporsi pengeluaran per kapita sebulan terhadap total makanan paling dominan adalah untuk konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi (masing-masing 25,34 persen dan 27,89 persen) dan konsumsi komoditas padi-padian (masing-masing sebesar 22,32 persen dan 14,37 persen). Secara umum, konsumsi untuk komoditas padi-padian cenderung menurun seiring dengan kelompok pengeluaran dan bergeser ke komoditas makanan dan minuman jadi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan yang serba ingin praktis dan instan.

2) Pengeluaran untuk Bukan Makanan

Dari total pengeluaran kelompok bukan makanan, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Karangasem sebagian besar (51,10 persen) digunakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga, diikuti pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar 18,56 persen. Sedangkan, proporsi pengeluaran per kapita sebulan terendah untuk konsumsi pakaian, alas kaki dan tutup kepada sebesar 2,95 persen.

Kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 40 persen tengah, sebagian besar (di atas 50 persen) pengeluaran digunakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga, sedangkan pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya sebesar 44,88 persen. Seiring dengan kelompok pengeluaran terlihat bahwa proporsi pengeluaran cenderung meningkat untuk konsumsi barang tahan lama, keperluan pesta dan upacara/kenduri, serta aneka barang dan jasa.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2020-2024 selalu di atas rata-rata Provinsi Bali. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jembrana	75,92	81,26	80,60	80,05	80,10
Tabanan	75,47	74,98	76,93	74,16	75,29
Badung	72,69	72,52	72,80	73,79	75,59
Gianyar	71,27	69,88	80,26	77,26	76,50
Klungkung	75,27	72,83	79,81	79,88	77,23
Bangli	82,2	82,09	83,36	83,04	82,27
Karangasem	80,75	81,15	85,39	86,01	83,74
Buleleng	75,07	73,08	75,38	75,49	79,77
Denpasar	70,91	68,67	72,37	73,13	69,71
Provinsi Bali	74,32	73,54	76,86	77,08	77,11

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Perbandingan regional Provinsi Bali, angka TPAK tertinggi tahun 2019 adalah Kabupaten Bangli yang mencapai 80,61 dan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana sebesar 80,61. Tahun 2023 TPAK tertinggi adalah Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 86,01 dan yang terendah adalah Kota Denpasar yaitu sebesar 73,13.

Tabel 2.38
Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	165.688	179.114	179.356	202.938	204.741
Tabanan	277.098	277.828	287.569	284.632	290.128
Badung	394.943	404.664	417.078	333.483	345.770
Gianyar	292.619	290.574	337.855	326.918	325.970
Klungkung	106.852	104.268	115.235	131.562	127.801
Bangli	146.377	147.556	151.191	172.395	171.536
Karangasem	259.153	262.729	278.920	330.108	323.579
Buleleng	382.712	376.174	391.692	473.440	504.678
Denpasar	542.477	537.616	579.643	434.761	504.678
Provinsi Bali	2567.919	2.580.523	2.738.539	2.690.237	2.714.097

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel di atas Menunjukkan bahwa penduduk angkatan kerja di Kabupaten Karangasem tahun 2019 yaitu sebesar 256.257 orang lebih rendah dari Kota Denpasar yaitu sebesar 535.801 orang sedangkan jumlah menyeluruh untuk penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali yaitu sebesar 2.508.294 orang. Jumlah penduduk Angkatan kerja tertinggi tahun 2019 terdapat di Kota Denpasar sebanyak 535.801 orang dan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 434.761 orang. Sedangkan di Kabupaten Klungkung memiliki penduduk Angkatan kerja terendah yaitu tahun 2019 sebanyak 106.993orang dan di tahun 2023 yaitu meningkat sebanyak 131.562 orang.

Tabel 2.39
Penduduk Usia Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	218.241	220.422	222.517	253.521	255.614
Tabanan	367.178	370.528	373.825	383.831	385.367
Badung	543.301	557.972	572.909	451.921	457.414
Gianyar	410.576	415.831	420.949	423.131	426.078
Klungkung	141.950	143.172	144.389	164.697	165.490
Bangli	178.071	179.739	181.363	207.608	208.513
Karangasem	320.931	323.773	326.632	383.824	386.393
Buleleng	509.835	514.726	519.615	627.160	632.699

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	765.044	782.927	800.943	419.894	602.318
Provinsi Bali	3.455.127	3.509.090	3.563.142	3.490.205	3.519.886

BPS Provinsi Bali, 2025

Penduduk usia kerja di Provinsi Bali tahun 2019 sebanyak 3.400.208 orang dan di tahun 2023 meningkat sebanyak 3.490.205 orang. Meningkatnya penduduk usia kerja ini dilihat dari adanya peningkatan dari tahun ke tahun yakni di Kabupaten Karangasem tahun 2019 sebanyak 317.908 orang meningkat sebanyak 383.824 orang di tahun 2023. Jumlah penduduk usia kerja tertinggi di tahun 2019 yaitu di Kota Denpasar yaitu sebesar 747.253 orang sedangkan di Kabupaten Klungkung memiliki penduduk usia kerja paling rendah yaitu sebanyak 140.687 orang. Penduduk usia kerja di tahun 2023 paling tinggi sebanyak 627.160 orang yaitu di Kabupaten Buleleng sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebanyak 164.697 orang.

Tabel 2.40
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	158.203	171.760	172.282	197.832	201.608
Tabanan	265.435	266.889	276.569	277.112	284.771
Badung	367.619	376.637	388.428	324.403	339.430
Gianyar	270.591	270.510	314.934	317.231	319.504
Klungkung	101.058	98.691	112.973	129.864	126.227
Bangli	143.650	144.897	150.045	171.097	170.275
Karangasem	252.869	256.630	270.291	321.506	318.294
Buleleng	362.851	355.940	371.334	456.389	494.270
Denpasar	501.143	499.900	550.214	422.382	411.042
Provinsi Bali	2.423.419	2.441.854	2.607.070	2.617.816	2.665.421

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Karangasem tahun 2019 mencapai 254.667 orang dan meningkat sebanyak 321.506 orang di tahun 2023. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja paling tinggi di tahun 2019 adalah di Kota

Denpasar sebanyak 523.524 orang dan mengalami penurunan sebesar 422.382 orang di tahun 2023 sedangkan Kabupaten Klungkung di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja yang paling rendah sebesar 105.314 orang dan di tahun 2023 sebanyak 129.864 orang.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.41
Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	7.485	7.354	7.074	5.106	3.133
Tabanan	11.663	10.939	11.000	7.520	5.357
Badung	27.324	28.027	28.650	9.080	6.340
Gianyar	22.028	20.064	22.921	9.687	6.466
Klungkung	5794	5.577	2.262	1.698	1.574
Bangli	2.727	2.659	1.146	1.298	1.261
Karangasem	6.284	6.099	8.629	8.602	5.285
Buleleng	19.861	20.234	20.358	17.051	10.408
Denpasar	41.334	37.716	29.429	12.379	8.852
Provinsi Bali	144.500	138.669	131.469	72.421	48.676

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Banyaknya pengangguran di Provinsi Bali dari tahun 2019 sebanyak 39.288 orang hingga tahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 72.421 orang. Kabupaten Karangasem di tahun 2019 memiliki pengangguran sebanyak 1.590 orang dan di tahun 2023 meningkat menjadi 8.602 orang. Banyaknya pengangguran paling tinggi terdapat di Kota Denpasar sebanyak 12.277 orang di tahun 2019 dan meningkat menjadi 12.379 orang di tahun 2023. Sedangkan, Kabupaten Bangli memiliki pengangguran paling sedikit yakni sebanyak 1.298 orang.

Tabel 2.42
Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	4,52	4,11	3,94	2,52	1,53
Tabanan	4,21	3,94	3,83	2,64	1,85
Badung	6,92	6,93	6,87	2,72	1,83
Gianyar	7,53	6,90	6,78	2,69	1,98

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Klungkung	5,42	5,35	1,96	1,29	1,23
Bangli	1,86	1,80	0,76	0,75	0,74
Karangasem	2,42	2,32	3,09	2,61	1,63
Buleleng	5,19	5,38	5,20	3,60	2,06
Denpasar	7,62	7,02	5,08	2,85	2,11
Provinsi Bali	5,63	5,37	4,80	2,69	1,79

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Perbandingan persentase pengangguran Kabupaten Karangasem di tahun 2019 sebesar 0,62 persen dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 2.61 persen lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali yaitu sebesar 2,46 persen. Persentase pengangguran tertinggi tahun 2019 terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 3,12 persen sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Badung yakni sebesar 0,40 persen. Tahun 2023 persentase pengangguran tertinggi sebesar 3,60 persen terdapat di Kabupaten Buleleng dan paling rendah sebesar 0,75 terdapat di Kabupaten Bangli. Persentase pengangguran di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2020-2024 di bawah rata-rata Provinsi Bali. Tahun 2019 persentase pengangguran mencapai 0,62 persen sedangkan di Provinsi Bali Mencapai 1,57 persen. Tahun 2024 pengangguran di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan menjadi 1,63 persen sedangkan di Provinsi Bali lebih tinggi yaitu 1,79 persen. Pengangguran tertinggi di Provinsi Bali terjadi di tahun 2020 mencapai 5,63 persen dan di tahun 2021 mencapai 5,37 persen.

Tabel 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karangasem, 2021-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2021	2,32	81,15
2022	3,09	85,39
2023	2,61	86,01
2024	1,63	83,74
Bali (2024)	1,79	77,11

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

8. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri atas :

- GR ≤ 0,20 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah
- 0,20 < GR ≤ 0,39 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- 0,39 < GR ≤ 0,59 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- 0,59 < GR ≤ 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- GR > 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2020 sebesar 0,3268 mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,283. Nilai ini masih berada di bawah Provinsi Bali.

Tabel 2.44
Indeks Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,288
Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,301
Badung	0,3168	0,3320	0,3160	0,2800	0,281
Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,286
Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,307
Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,302
Karangasem	0,3268	0,3180	0,2970	0,3370	0,283
Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,279
Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,341

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bali	0,369	0,3780	0,3630	0,3620	0,361

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Angka harapan hidup penduduk merupakan rata- rata peluang ataupun waktu hidup yang tersisa. Umur harapan hidup dapat dimaksud pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup hingga usia tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup ataupun panjang hidup ialah jumlah tahun maksimum penduduk buat bisa hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk sesuatu negeri ataupun wilayah dengan wilayah yang lain tidak berbeda sebab usia manusia terdapat batasan maksimumnya.

Besaran Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2020 di Kabupaten Karangasem yaitu 70,47 tahun (di bawah Provinsi Bali yang mencapai 72,13 tahun) dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 71,53 tahun, masih di bawah rata-rata Provinsi Bali yaitu 73,29 tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali, Kabupaten Karangasem berada pada posisi terendah. Perbandingan secara regional Provinsi Bali diketahui bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi di tahun 2024 adalah Kabupaten Badung yang mencapai 76,18 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH Kab. Karangasem selalu mengalami peningkatan semenjak tahun 2020 hingga kini, walaupun nilainya masih di bawah AHH Provinsi Bali

Tabel 2.45
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	72,35	72,46	72,82	73,20	73,51
Tabanan	73,65	73,75	74,10	74,48	74,80
Badung	75,1	75,18	75,51	75,88	76,18
Gianyar	73,68	73,78	74,13	74,52	74,86
Klungkung	71,25	71,41	71,83	72,28	72,50
Bangli	70,52	70,62	70,97	71,33	71,63
Karangasem	70,47	70,56	70,89	71,25	71,53
Buleleng	71,83	71,95	72,32	72,70	72,92
Denpasar	74,82	74,93	75,30	75,69	76,01
Provinsi Bali	72,13	72,24	72,60	72,98	73,29

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

2. Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Di samping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat

mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Tingkat kualitas kesehatan menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin berkualitas kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah akan sangat membantu proses dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pada akhirnya hasil akhir pembangunan ekonomi berupa tingkat produktivitas penduduk yang meningkat dapat terwujud.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah menjalankan program-program untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya memberikan kemudahan akses bagi penduduk pada fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak atas proses kesehatan antara lain:

a. Rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 2.500;
b. Rasio tenaga Dokter Spesialis per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter spesialis berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 16.000;
c. Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Bidan

berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 1.000;

d. Rasio Perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1: 855;
e. Rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk dengan Rasio ideal sebesar 1 : 16.000;
f. Rasio Puskesmas pembantu terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu terhadap jumlah penduduk dengan Rasio ideal sebesar 1 : 1.500. Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit layanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan.

Di Kabupaten Karangasem terdapat 3 (tiga) rumah sakit umum yang terdiri dari:

- Rumah sakit pemerintah sebanyak 2 (dua) unit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karangasem, dengan rumah sakit tipe C yang memiliki 219 tempat tidur dan RS Pratama Kubu yang merupakan rumah sakit tipe D dengan kapasitas 32 tempat tidur.
- Rumah sakit swasta sejumlah 1 (satu) unit yaitu Rumah Sakit Bali Med Karangasem dengan tipe D dengan jumlah 64 tempat tidur.
- Jumlah dan persebaran Puskesmas baik yang melayani rawat jalan saja maupun melayani rawat inap di Puskesmas yang ada di Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.46
Puskesmas Rawat Inap & Non Rawat Inap Kabupaten Karangasem Tahun 2024

No.	Puskesmas	Status		Alamat
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	
1	Manggis I	√		Desa Ulakan, Kec. Manggis
2	Manggis II		√	Jln. I Gst Ngr Tenganan-Pesedahan
3	Sidemen	√		Jln. Raya Sidemen Desa Talibeng
4	Selat	√		Jln. Karangasem-Besakih Desa Selat
5	Rendang	√		Jln. Batur No. 5, Desa Menanga
6	Bebandem		√	Jln. Kuncara Giri, Bebandem
7	Karangasem I		√	Jln.Raya Perasi Kec. Karangasem
8	Karangasem II	√		Desa Seraya, Karangasem
9	Abang I		√	Desa Abang, Kec. Abang
10	Abang II		√	Jln. Raya Amlapura Singaraja, Culik
11	Kubu I	√		Jln. Raya Amlapura Singaraja, Kubu
12	Kubu II		√	Jln. Raya Amlapura Singaraja, Tianyar

Sumber: Profil Kesehatan Karangasem, Tahun 2025

Capaian pelayanan kesehatan oleh RSUD Karangasem tahun 2020-2024, jumlah kunjungan menunjukkan adanya peningkatan, dimana tahun 2020 sebanyak 123.971 orang meningkat menjadi 186.838 orang di tahun 2024. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan juga meningkat dari 87,46% di tahun 2020 menjadi 87,98% di tahun 2024.

Tabel 2.47
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Indikator	Pencapaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	35,35%	35.78%	40.42%	56,20%	52,59%	Standar Kemenkes 60 – 85 %.
2	*Gross Death Rate* (GDR)	38,17%	49.38%	42,63%	47,60%	43%	Standar Kemenkes < 45 ‰
3	*Net Death rate* (NDR)	17,72%	20.29%	14,21%	19,80%	19,5 %	Standar Kemenkes < 25 ‰
4	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	87,46%	87,40%	87,40%	87,82%	87,98%	

No	Indikator	Pencapaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	112.366	109.778	134.442	169.831	174.241	
6	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	11.605	10.794	12.222	10.897	12.597	

Sumber: Profil Kesehatan Karangasem, Tahun 2025

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah 12 Puskesmas. Dari 12 Puskesmas yang ada, terdiri dari 6 (enam) unit Puskesmas yang merupakan Puskesmas perawatan yang disertai dengan layanan rawat inap dan sisanya yaitu 6 (enam) Puskesmas yang tidak memiliki fasilitas rawat inap. Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 sebanyak 71 unit sama dengan jumlah yang ada pada tahun sebelumnya yang tersebar di seluruh wilayah Puskesmas di Kabupaten Karangasem. Untuk Puskesmas Keliling yang tersedia sebanyak 12 unit yang tersebar di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.48
Jumlah Pustu dan Pusling di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Karangasem Tahun 2024

No	Puskesmas	Pustu	Pusling
1	Manggis I	5	1
2	Manggis II	4	1
3	Sidemen	5	1
4	Selat	9	1
5	Rendang	6	1
6	Bebandem	7	1
7	Karangasem I	4	1
8	Karangasem II	5	1
9	Abang I	6	1
10	Abang II	8	1
11	Kubu I	6	1
12	Kubu II	6	1
Jumlah		**71**	**12**

Sumber: Profil Kesehatan Karangasem, Tahun 2024

Rasio ideal puskesmas terhadap penduduk adalah 1: 16.000 (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli

Hak Asasi Manusia) namun di Kabupaten Karangasem hampir semua kecamatan rasionya melebihi 16.000 penduduk. Sedangkan rasio puskesmas pembantu dengan penduduk idealnya adalah 1: 1500, namun di hampir semua kecamatan rasionya melebihi 1.500. Berdasarkan atas data tersebut, Kabupaten Karangasem kekurangan sarana Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu. Kekurangan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidak-adilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat. Sarana dan prasarana Puskesmas sangat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan termasuk aksesibilitas lokasi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berada langsung di tengah masyarakat akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, maka peranan dan kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena peranan dan kedudukan Puskesmas di Indonesia amat unik, sebagai sarana pelayanan kesehatan primer yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai upaya preventif. Tujuan utama Puskesmas adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat (Azwar, 2010).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja, Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan baik pada sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil). Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di

Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau spesifik lokal.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskemas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Kabupaten Karangasem terdapat 4 buah Rumah Sakit Umum, Puskesmas rawat inap sebanyak 7 buah, Puskesmas tidak rawat inap sebanyak 5 buah, Klinik Pratama sebanyak 15 buah dan Posyandu sebanyak 690.

Tabel 2.49
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Posyandu di Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskes-mas Rawat Inap	Puskes-mas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
Kab. Jembrana	4	0	6	4	6	333
Kab. Tabanan	7	0	5	15	16	830
Kab. Badung	11	2	0	13	64	564
Kab. Gianyar	8	0	0	13	32	568
Kab. Klungkung	5	0	3	6	20	306
Kab. Bangli	2	1	5	7	13	356
Kab. Karangasem	4	0	7	5	15	690
Kab. Buleleng	9	0	4	16	12	719
Kota Denpasar	15	4	0	11	69	459
Provinsi Bali	63	11	39	81	171	4.824

Sumber: BPS. Provinsi Bali, 2025

Perbandingan secara regional di Provinsi Bali, jumlah rumah sakit umum dan khusus paling banyak terdapat di Kota Denpasar mencapai 19 buah yang didukung Puskesmas sebanyak 11 buah, Klinik Pratama sebanyak 69 buah dan Posyandu sebanyak 459 buah. Jumlah Rumah sakit paling sedikit yaitu di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 3 buah, Puskesmas sebanyak 12 buah, Klinik Pratama sebanyak 13 buah dan Posyandu sebanyak 356 buah.

Jumlah tenaga Kesehatan dokter di Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebanyak 173 orang dokter, sebanyak 27 orang dokter gigi, sebanyak 606 orang perawat, sebanyak 486 orang Bidan, sebanyak 88 orang Tenaga Farmasi, sebanyak 49 orang Tenaga Kesehatan

Masyarakat, sebanyak 38 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, sebanyak 48 orang Tenaga Gizi dan 61 orang Tenaga Keteknisan Medis.

Jumlah tenaga Kesehatan paling banyak terdapat di Kota Denpasar yaitu jumlah dokter mencapai 2.301 orang dokter umum dan Spesialis, sebanyak 170 orang dokter gigi, sebanyak 4.254 orang perawat, sebanyak 1.080 orang Bidan, sebanyak 828 orang Tenaga Farmasi, sebanyak 321 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, sebanyak 131 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, sebanyak 197 orang Tenaga Gizi dan 319 orang Tenaga Keteknisan Medis.

Tabel 2.50
Jumlah Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Gizi dan Tenaga Ahli Laboratorium
di Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisan Medis
Jembrana	181	53	507	410	97	48	32	35	70
Tabanan	377	58	1.194	711	228	129	64	89	85
Badung	710	83	2.123	912	512	213	43	75	146
Gianyar	423	69	1.381	647	237	51	61	71	98
Klungkung	243	31	745	375	119	46	41	45	55
Bangli	185	46	881	337	85	60	37	49	52
Karangasem	173	27	606	486	88	49	38	48	61
Buleleng	349	38	1.263	718	206	76	45	75	103
Denpasar	2.301	170	4.254	1.080	828	321	131	197	319
Provinsi Bali	4.942	573	12.954	5.676	2.400	993	492	684	989

Sumber: BPS. Provinsi Bali, 2025

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilakukan dengan membangun rumah sakit di provinsi dan kabupaten/kota salah satunya adalah Rumah Sakit Pratama Kubu di Kabupaten Karangasem, dibuka tanggal 25 Mei 2016. Adapun hasil kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem sudah menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti Angka Kematian Ibu (AKI) sudah lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali.

3. Prevalensi Stunting

Keadaan pendek (stunting) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak adalah dikatagorikan sangat pendek (severely stunted) apabila Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan adalah lebih kecil dari (< -3 SD), dan dikatagorikan Pendek (stunted) apabila Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan adalah antara (- 3 SD sd <- 2 SD) (Kementerian Kesehatan RI., 2020). Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14% dan standard WHO di bawah 20% ((Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., 2023).

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021). Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita (usia 0-59 bulan). Upaya penurunan stunting memerlukan keterpaduan

baik dari segi tata-kelola maupun penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan. Untuk mencapai keterpaduan/konvergensi tersebut diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian lintas sektor dan antar pemerintahan pada seluruh tingkatan, para pemangku kepentingan dan masyarakat

Kabupaten Karangasem menjadi salah satu Kabupaten dari 15 Kabupaten/kota se-Indonesia yang meraih Penerima Tanda Penghargaan Program Percepatan Penurunan Stunting, sebagai Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Stunting Terendah berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Pencapaian prevalensi Stunting di Kabupaten Karangasem sebesar 6,4% berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Turun sebanyak 2,8% dari tahun 2022 dari angka 9,2%. Trend penurunan prevalensi Stunting dari tahun ke tahun membuat Kabupaten Karangasem optimis mampu mencapai target 4% di tahun 2024.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Jumlah Sekolah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berkaitan erat dengan pendidikan. Adapun pembangunan disektor pendidikan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta sarana penunjang lainnya. Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebanyak 126 buah dengan jumlah murid sebanyak 5.034 orang dan jumlah guru mencapai 425 orang. Rasio murid guru mencapai 11,84 orang artinya rata-rata 1 orang guru TK mengasuh sebanyak 11 orang murid. Rata-rata jumlah murid per sekolah sebanyak 39,95 (dibulatkan 40 orang). Rata-rata jumlah guru TK per sekolah sebanyak 3,37 atau rata-rata per sekolah terdapat 3 orang guru TK.

Tabel 2.51
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK)

Kabupaten /Kota	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Jembrana	109	4.252	354	39,01	12,01	3,25
Tabanan	216	7.896	578	36,56	13,66	2,68
Badung	237	13.756	1.235	58,04	11,14	5,21
Gianyar	158	9.446	847	59,78	11,15	5,36
Klungkung	93	4.396	441	47,27	9,97	4,74
Kab. Bangli	88	3.092	406	35,14	7,62	4,61
Karangasem	126	5.034	425	39,95	11,84	3,37
Buleleng	221	10.183	819	46,08	12,43	3,71
Denpasar	293	18.422	1.534	62,87	12,01	5,24
Provinsi Bali	1.541	76.477	6.639	49,63	11,52	4,31

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Perbandingan secara regional Provinsi Bali, jumlah sekolah TK terbanyak adalah di Kota Denpasar sebanyak 293 buah dengan murid mencapai 18.422 orang yang diasuh oleh 1.534 orang guru. Jumlah sekolah TK paling sedikit adalah di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 88 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.092 orang yang diasuh oleh 406 orang guru.

Perbandingan rasio jumlah murid TK per sekolah paling tinggi adalah di Kota Denpasar mencapai 62,87 artinya per sekolah rata-rata terdapat 62 orang murid TK. Sedangkan di Kabupaten Karangasem rata-rata per sekolah terdapat 40 orang murid (angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 49,63). Rasio jumlah murid terhadap guru paling tinggi adalah di Kabupaten Tabanan yaitu 13,66 atau 1 orang guru rata-rata mengasuh 13 orang murid. Sedangkan di Kabupaten Karangasem rasionya adalah 11,84 atau 1 orang guru mengasuh rata-rata 11 orang murid. Rasio guru per sekolah d atas Provisi Bali adalah di Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar dengan rasio 5,21, 5,36 dan 5,24 atau rata-rata per sekolah terdapat 5 guru TK. Di Kabupaten Karangasem rata-rata per sekolah terdapat 3 guru TK.

Tabel 2.52
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK)

Kecamatan	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/Sekolah	Rasio Murid/Guru	Rasio Guru/Sekolah
Rendang	8	359	32	44,88	11,22	4,00
Sidemen	11	392	28	35,64	14,00	2,55
Manggis	20	660	50	33,00	13,20	2,50
Karangasem	26	1.307	111	50,27	11,77	4,27
Abang	14	638	44	45,57	14,50	3,14
Bebandem	13	479	41	36,85	11,68	3,15
Selat	21	625	56	29,76	11,16	2,67
Kubu	15	532	37	35,47	14,38	2,47
Kab. Karangasem	128	4.992	399	39,00	12,51	3,12

Sumber: BPS. Karangasem, 2025

Jumlah sekolah TK menurut kecamatan di Kabupaten Karangasem sesuai Tabel 2.42 di atas diketahui jumlah sekolah paling banyak terdapat di Kecamatan Karangasem sebanyak 26 buah dan paling sedikit di Kecamatan Rendang yaitu sebanyak 8 buah. Rasio jumlah murid per sekolah paling tinggi yaitu di Kecamatan Karangasem mencapai 50,27 atau rata-rata jumlah murid per sekolah mencapai 51 orang dan paling rendah di Kecamatan Selat yaitu 29,76 atau rata-rata jumlah murid per sekolah mencapai 30 orang. Rasio murid terhadap guru paling tinggi di Kecamatan Kubu mencapai 14,38 atau 1 orang guru mengasuh rata-rata 14 orang murid, sedangkan rasio paling rendah adalah di Kecamatan Rendang yaitu 11,22 atau 1 orang guru mengasuh rata-rata 11 orang murid.

Rasio guru per sekolah paling tinggi adalah di Kecamatan Karangasem mencapai 4,27 atau rata-rata jumlah guru per sekolah sebanyak 4-5 orang, sedangkan rasio paling rendah adalah di Kecamatan Kubu yaitu 2,47 atau rata-rata jumlah guru per sekolah sebanyak 2-3 orang.

Tabel 2.53
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025

Kabupaten /Kota	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Jembrana	185	22.362	1.773	120,88	12,61	9,58
Tabanan	287	34.310	2.762	119,55	12,42	9,62
Badung	287	58.125	3.991	202,53	14,56	13,91
Gianyar	291	43.715	2.784	150,22	15,70	9,57
Klungkung	133	16.445	1.258	123,65	13,07	9,46
Bangli	164	21.490	1.611	131,04	13,34	9,82
Karangasem	357	42.043	3.141	117,77	13,39	8,80
Buleleng	465	66.027	4.451	141,99	14,83	9,57
Kota Denpasar	238	77.977	4.032	327,63	19,34	16,94
Provinsi Bali	2.407	382.494	25.803	158,91	14,82	10,72

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Jumlah sekolah SD tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karangasem, jumlah sekolah SD paling banyak terdapat di Kecamatan Karangasem mencapai 67 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 8.913 orang yang diasuh oleh 678 orang guru. Jumlah sekolah SD paling sedikit adalah di Kecamatan Sidemen yaitu sebanyak 29 sekolah SD dengan jumlah murid sebanyak 2.753 orang yang diasuh oleh 220 orang guru.

Tabel 2.54
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar (SD)

Kecamatan	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Rendang	33	3.507	259	106,27	13,54	7,85
Sidemen	29	2.753	220	94,93	12,51	7,59
Manggis	45	4.568	353	101,51	12,94	7,84
Karangasem	67	8.913	678	133,03	13,15	10,12
Abang	59	6.959	495	117,95	14,06	8,39
Bebandem	39	4.212	357	108,00	11,80	9,15

Kecamatan	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Selat	34	3.699	278	108,79	13,31	8,18
Kubu	51	7.414	505	145,37	14,68	9,90
Kab. Karangasem	357	42.025	3.145	117,72	13,36	8,81

Sumber: BPS. Karangasem, 2025

Pelayanan Pendidikan dasar di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Karangasem saat ini terdapat 48 sekolah SMP yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah murid mencapai 22.037 orang yang diasuh oleh 1.137 orang guru SMP. Perbandingan secara regional Provinsi Bali, jumlah sekolah SMP paling banyak terdapat di Kota Denpasar sebanyak 77 sekolah SMP dengan jumlah murid sebanyak 35.694 orang yang diasuh oleh 1.767 orang guru SMP. Jumlah sekolah paling sedikit adalah di Kabupaten Kabupaten Jembrana sebanyak 21 buah sekolah SMP dengan jumlah murid sebanyak 11.093 orang yang diasuh oleh 673 orang guru SMP. Jumlah murid SMP paling banyak adalah di Kota Denpasar mencapai 35.694 orang yang diasuh oleh 1.767 orang guru SMP. Rasio murid SMP per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 459,10 atau rata-rata per sekolah terdapat 459 orang murid SMP sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 470,15 atau rata-rata di Bali per sekolah SMP terdapat 470 orang murid, sehingga rata-rata jumlah murid per sekolah di Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dari kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, Bangli. Rasio murid SMP terhadap guru di Kabupaten Karangasem adalah 19,38 atau rata-rata 1 orang guru mengasuh 20 orang murid sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 17,01. Sehingga rasio murid SMP terhadap guru SMP di Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Rasio jumlah guru SMP per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 23,69 atau per sekolah rata-rata terdapat 23-24 orang guru sedangkan rata-rata di tingkat Provinsi Bali adalah 27,64 atau per sekolah rata-rata terdapat 27-28 orang guru.

Tabel 2.55
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025

Kabupaten/ Kota	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Jembrana	21	11.093	673	528,24	16,48	32,05
Tabanan	39	15.753	1.009	403,92	15,61	25,87
Badung	65	28.070	1.913	431,85	14,67	29,43
Gianyar	31	22.247	1.083	717,65	20,54	34,94
Klungkung	22	8.563	595	389,23	14,39	27,05
Bangli	28	11.386	867	406,64	13,13	30,96
Karangasem	48	22.037	1.137	459,10	19,38	23,69
Buleleng	71	34.156	1.976	481,07	17,29	27,83
Denpasar	77	35.694	1.767	463,56	20,20	22,95
Provinsi Bali	402	188.999	11.110	470,15	17,01	27,64

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Jumlah sekolah SMP tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karangasem, jumlah sekolah SMP paling banyak terdapat di Kecamatan Kubu mencapai 11 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.607 orang yang diasuh oleh 175 orang guru. Jumlah sekolah SMP paling sedikit adalah di Kecamatan Selat yaitu sebanyak 3 sekolah SMP dengan jumlah murid sebanyak 2.189 orang yang diasuh oleh 94 orang guru. Rasio jumlah murid SMP per sekolah paling tinggi adalah di Kecamatan Selat mencapai 729,67 atau per sekolah terdapat 729 lebih orang murid. Rasio jumlah murid SMP per sekolah paling rendah adalah di Kecamatan Kubu yaitu 327,91 atau rata-rata jumlah murid per sekolah adalah 328 orang. Rasio murid SMP terhadap guru paling tinggi yaitu di Kecamatan Selat sebesar 23,29 atau satu orang guru mengasuh sebanyak 24 orang murid. Rasio murid SMP terhadap guru paling rendah adalah di Kecamatan Karangasem yaitu sebesar 18,15 atau 1 orang guru mengasuh murid sebanyak 18 Orang. Rata-rata jumlah guru per sekolah SMP paling tinggi adalah di Kecamatan Karangasem mencapai 33 orang, sedangkan paling rendah adalah di Kecamatan Kubu yaitu 15,91 atau 16 orang.

Tabel 2.56
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kecamatan	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Rendang	4	1.952	102	488,00	19,14	25,50
Sidemen	4	1.626	83	406,50	19,59	20,75
Manggis	5	2.412	124	482,40	19,45	24,80
Karangasem	8	4.829	266	603,63	18,15	33,25
Abang	8	3.275	170	409,38	19,26	21,25
Bebandem	5	2.168	129	433,60	16,81	25,80
Selat	3	2.189	94	729,67	23,29	31,33
Kubu	11	3.607	175	327,91	20,61	15,91
Kab. Karangasem	48	22.058	1.143	459,54	19,30	23,81

Sumber: BPS. Karangasem, 2025

Pelayanan Pendidikan menengah di Kabupaten Karangasem saat ini terdapat 18 sekolah SMA yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah murid mencapai 9.339 orang yang diasuh oleh 594 orang guru SMA. Perbandingan secara regional Provinsi Bali, jumlah sekolah SMA paling banyak terdapat di Kota Denpasar sebanyak 36 sekolah SMA dengan jumlah murid sebanyak 20.085 orang yang diasuh oleh 1.133 orang guru SMA. Jumlah sekolah paling sedikit adalah di Kabupaten Bangli sebanyak 6 buah sekolah SMA dengan jumlah murid sebanyak 4.589 orang yang diasuh oleh 290 orang guru SMA. Jumlah murid SMA paling banyak adalah di Kota Denpasar mencapai 20.085 orang yang diasuh oleh 1.133 orang guru SMA. Rasio murid SMA per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 518,83 atau rata-rata per sekolah terdapat 519 orang murid SMA sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 572,70 atau rata-rata di Bali per sekolah SMA terdapat 573 orang murid, sehingga rata-rata jumlah murid per sekolah di Kabupaten Karangasem masih relevan dari kabupaten/kota lainnya di Bali. Rasio murid SMA terhadap guru di Kabupaten Karangasem adalah 15,72 atau rata-rata 1 orang guru mengasuh 16 orang murid sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 15,65. Sehingga rasio murid SMA terhadap guru SMA di Kabupaten Karangasem hampir sama dari Provinsi Bali. Rasio jumlah guru SMA per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 33,00 atau per sekolah rata-rata terdapat 33 orang guru sedangkan rata-rata di

tingkat Provinsi Bali adalah 36,60 atau per sekolah rata-rata terdapat 36-37 orang guru.

Tabel 2.57
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025

Kabupaten/ Kota	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Jembrana	11	6.421	384	583,73	16,72	34,91
Tabanan	10	7,554	529	755,40	14,28	52,90
Badung	30	15.100	1.018	503,33	14,83	33,93
Gianyar	11	8.692	544	790,18	15,98	49,45
Klungkung	11	6.327	429	575,18	14,75	39,00
Bangli	6	4.589	290	764,83	15,82	48,33
Karangasem	18	9.339	594	518,83	15,72	33,00
Buleleng	28	14.098	972	503,50	14,50	34,71
Denpasar	36	20.085	1.133	557,92	17,73	31,47
Provinsi Bali	161	92.205	5.893	572,70	15,65	36,60

Sumber: BPS. Provinsi Bali, 2025

Jumlah sekolah SMA tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karangasem, jumlah sekolah SMA paling banyak terdapat di Kecamatan Karangasem mencapai 7 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.555 orang yang diasuh oleh 216 orang guru. Jumlah sekolah SMA paling sedikit adalah di Kecamatan Rendang, Sidemen, Bebandem, Kubu yaitu sebanyak 1 sekolah SMA dengan jumlah murid masing-masing dari 4 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 770 orang yang diasuh oleh 51 orang guru pada Kecamatan Rendang, sebanyak 540 orang yang diasuh oleh 48 orang guru pada Kecamatan Sidemen, sebanyak 826 orang yang diasuh oleh 55 orang guru pada Kecamatan Bebandem, sebanyak 709 orang yang diasuh oleh 55 orang guru, Kecamatan Kubu sebanyak 721 orang yang diasuh oleh 45 orang guru. Rasio jumlah murid SMA per sekolah paling tinggi adalah di Kecamatan Rendang mencapai 770 atau per sekolah terdapat 770 orang murid. Rasio jumlah murid SMA per sekolah paling rendah adalah di Kecamatan Abang yaitu 349,67 atau rata-rata jumlah murid per sekolah adalah 350 orang. Rasio murid SMA terhadap guru paling tinggi yaitu di Kecamatan Abang sebesar 20,17 atau satu orang guru mengasuh sebanyak 21 orang

murid. Rasio murid SMA terhadap guru paling rendah adalah di Kecamatan Sidemen yaitu sebesar 11,25 atau 1 orang guru mengasuh murid sebanyak 11 Orang. Rata-rata jumlah guru per sekolah SMA paling tinggi adalah di Kecamatan Bebandem mencapai 55 orang, sedangkan paling rendah adalah di Kecamatan Abang yaitu 17,33 atau 17 orang.

Tabel 2.58
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kecamatan	Banyak Sekolah	Banyak Murid	Banyak Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Rendang	1	770	51	770,00	15,10	51,00
Sidemen	1	540	48	540,00	11,25	48,00
Manggis	2	826	55	413,00	15,02	27,50
Karangasem	7	3.555	216	507,86	16,46	30,86
Abang	3	1.049	52	349,67	20,17	17,33
Bebandem	1	709	55	709,00	12,89	55,00
Selat	2	1.169	72	584,50	16,24	36,00
Kubu	1	721	45	721,00	16,02	45,00
Kab. Karangasem	18	9.339	594	518,83	15,72	33,00

Sumber: BPS. Karangasem, 2025

Pelayanan Pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Karangasem saat ini terdapat 12 sekolah SMK yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah murid mencapai 7.332 orang yang diasuh oleh 429 orang guru SMK. Perbandingan secara regional Provinsi Bali, jumlah sekolah SMK paling banyak terdapat di Kota Denpasar sebanyak 35 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 21.327 orang yang diasuh oleh 1.131 orang guru SMK. Jumlah sekolah paling sedikit adalah di Kabupaten Klungkung sebanyak 7 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 3.822 orang yang diasuh oleh 234 orang guru SMK. Rasio murid SMK per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 611,00 atau rata-rata per sekolah terdapat 611 orang murid SMK sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 559,96 atau rata-rata di Bali per sekolah SMK terdapat 560 orang murid, sehingga rata-rata jumlah murid per sekolah di Kabupaten Karangasem lebih tinggi dari Provinsi Bali sedangkan rasio yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 635,88 orang murid. Rasio murid SMK terhadap guru di Kabupaten Karangasem

adalah 17,09 atau rata-rata 1 orang guru mengasuh 17 orang murid sedangkan rasio Provinsi Bali adalah 16,74. Sehingga rasio murid SMK terhadap guru SMK di Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Rasio jumlah guru SMK per sekolah di Kabupaten Karangasem mencapai 35,75 atau per sekolah rata-rata terdapat 36 orang guru sedangkan rata-rata di tingkat Provinsi Bali adalah 33,46 atau per sekolah rata-rata terdapat 33-34 orang guru.

Tabel 2.59
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024/2025

Kabupaten/ Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Jembrana	8	4.685	296	585,63	15,83	37,00
Tabanan	14	6.789	417	484,93	16,28	29,79
Badung	28	12.664	694	452,29	18,25	24,79
Gianyar	27	16.005	925	592,78	17,30	34,26
Klungkung	7	3.822	234	546,00	16,33	33,43
Bangli	12	5.476	475	456,33	11,53	39,58
Karangasem	12	7.332	429	611,00	17,09	35,75
Buleleng	26	16.533	1.053	635,88	15,70	40,50
Denpasar	35	21.327	1.131	609,34	18,86	32,31
Provinsi Bali	169	94.633	5.654	559,96	16,74	33,46

Sumber: BPS. Provinsi Bali, 2025

Jumlah sekolah SMK tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karangasem, jumlah sekolah SMK paling banyak terdapat di Kecamatan Karangasem mencapai 5 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 2.357 orang yang diasuh oleh 149 orang guru. Jumlah sekolah SMK paling sedikit adalah terdapat di 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Rendang yaitu sebanyak 1 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 258 orang yang diasuh oleh 9 orang guru, Kecamatan Manggis yaitu sebanyak 1 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 1.098 orang yang diasuh oleh 63 orang guru, Kecamatan Abang yaitu sebanyak 1 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 868 orang yang diasuh oleh 67 orang guru, dan terakhir Kecamatan Bebandem yaitu sebanyak 1 sekolah SMK dengan jumlah murid sebanyak 673 orang yang diasuh oleh 34 orang guru. Rasio jumlah murid SMK per sekolah paling tinggi

adalah di Kecamatan Manggis mencapai 1.098,00 atau per sekolah terdapat 1.098 orang murid. Rasio jumlah murid SMK per sekolah paling rendah adalah di Kecamatan Rendang yaitu 258,00 atau rata-rata jumlah murid per sekolah adalah 258 orang. Rasio murid SMK terhadap guru paling tinggi yaitu di Kecamatan Kubu sebesar 20,70 atau satu orang guru mengasuh sebanyak 21 orang murid. Rasio murid SMK terhadap guru paling rendah adalah di Kecamatan Rendang yaitu sebesar 11,75 atau 1 orang guru mengasuh murid sebanyak 12 Orang. Rata-rata jumlah guru per sekolah SMK paling tinggi adalah di Kecamatan Abang mencapai 67 orang. Sedangkan paling rendah adalah di Kecamatan Rendang yaitu 9,00 atau 9 orang.

Tabel 2.60
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun Ajaran 2024/2025

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/ Sekolah	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah
Rendang	1	258	9	258,00	11,75	9,00
Sidemen	-	-	-	-	-	-
Manggis	1	1.098	63	1098,00	17,97	63,00
Karangasem	5	2.357	149	471,40	14,03	29,80
Abang	1	868	67	868,00	14,13	67,00
Bebandem	1	673	34	673,00	17,79	34,00
Selat	-	-	-	-	-	-
Kubu	3	2.078	107	692,67	20,7	35,67
Kab. Karangasem	12	7.332	429	611,00	16,43	35,75

Sumber: BPS. Karangasem, 2025

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan tingkat pendidikan sekolah dasar tahun ajaran 2024 sebanyak 78 desa kelurahan, terbanyak ada di Kecamatan Abang yaitu sebanyak 14 desa/kelurahan dan paling sedikit di Kecamatan Rendang yaitu 6 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama (SMP) sebanyak 41 desa/kelurahan dan terbanyak di Kecamatan Karangasem dan Kubu masing-masing sebanyak 7 desa/kelurahan, dan paling sedikit yaitu di Kecamatan Selat yaitu

sebanyak 3 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan tingkat pendidikan sekolah menengah atas tahun ajaran 2024 sebanyak 17 desa/kelurahan dan terbanyak di Kecamatan Karangasem sebanyak 5 desa/kelurahan sedangkan paling sedikit di Kecamatan Rendang, Kubu dan Selat yaitu masing-masing 1 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan tahun ajaran 2024 sebanyak 12 desa/kelurahan. Terbanyak ada di Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Kubu sebanyak 3 desa/kelurahan dan di Kecamatan Bebandem, Manggis, Abang, Sidemen masing-masing sebanyak 1 desa/kelurahan dan di Kecamatan Rendang sebanyak 2 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan tingkat pendidikan perguruan tinggi tahun ajaran 2024 sebanyak 2 desa/kelurahan di Kecamatan Karangasem.

Tabel 2.61
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun Ajaran 2024

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	PT
1	Rendang	6	4	2	2	-
2	Sidemen	10	4	1	1	-
3	Manggis	12	5	2	1	-
4	Karangasem	11	7	5	3	2
5	Abang	14	6	3	1	-
6	Bebandem	8	5	2	1	-
7	Selat	8	3	1	-	-
8	Kubu	9	7	1	3	-
Jumlah		78	41	17	12	2

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

pada Maret 2024 lalu, persentase penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf berada di angka 96,53 persen.

Menurut data BPS Kabupaten Karangasem persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut kepandaian membaca dan menulis diketahui melek huruf yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Selama kurun waktu periode 2020-2024 capaian angka melek huruf laki-laki dan perempuan Kabupaten Karangasem sudah mampu meningkat menjadi dari 87,09 persen di tahun 2023 menjadi 87,80 pada tahun 2024, namun masih di bawah capaian Provinsi Bali.

Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf berbeda dengan angka buta huruf, Seseorang yang melek huruf adalah orang yang mampu membaca dan menulis pernyataan singkat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya dengan pemahamannya. Seseorang yang buta huruf adalah orang yang tidak mampu membaca dan menulis pernyataan singkat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari.

Tabel 2.62
Angka Melek Huruf (persen) Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki-Laki	91,13	93,12	90,10	92,13	92,20
2.	Perempuan	78,97	85,06	78,16	81,95	83,04
3.	Laki dan Perempuan	85,01	89,05	84,08	87,09	87,58
4.	Provinsi Bali Laki dan Perempuan	94,53	94,80	95,00	95,53	95,79

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah merupakan cerminan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Semakin lama seseorang bersekolah diasumsikan semakin handal orang tersebut/semakin tinggi kualitasnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani

pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 mencapai 6,32 tahun dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 6,70 tahun. Capaian angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yang telah mencapai 9,54 tahun dan Kota Denpasar telah mencapai 11,53 tahun. Kendati terjadi kenaikan, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Karangasem baru mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD atau dengan kata lain belum bisa menikmati WAJAR 9 tahun.

Tabel 2.63
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	8,23	8,35	8,64	8,65	8,70
Tabanan	8,88	9,14	9,15	9,35	9,57
Badung	10,39	10,62	10,64	10,90	11,14
Gianyar	9,04	9,29	9,55	9,80	9,84
Klungkung	8,13	8,14	8,46	8,84	8,74
Bangli	7,17	7,18	7,47	7,57	7,58
Karangasem	6,32	6,33	6,67	6,68	6,70
Buleleng	7,24	7,25	7,56	7,57	7,69
Denpasar	11,47	11,48	11,50	11,52	11,53
Provinsi Bali	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Angka rata-rata lama sekolah di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: (a) tingkat kemiskinan; (b) ketersediaan ruang dan sekolah; (c) jarak tempuh ke sekolah; (d) jumlah tanggungan dalam keluarga; dan (e) jumlah peserta didik yang putus sekolah karena berbagai sebab. Masih rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem paling tinggi di Bali.

4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS Provinsi bali pada

tahun 2024 sebesar 13,62 tahun, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,62 tahun atau setara dengan Pendidikan Diploma I. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karangasem di tahun 2024 (sebesar 12,91 tahun) meningkat sedikit dibanding tahun 2020 (sebesar 12,41 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) paling tinggi adalah Kota Denpasar (14,13 tahun), Kabupaten Badung (14,23 tahun), dan Kabupaten Gianyar (14,11 tahun).

Tabel 2.64
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	12,65	12,92	13,01	13,02	13,05
Tabanan	13,00	13,01	13,03	13,04	13,29
Badung	13,98	13,99	14,03	14,22	14,23
Gianyar	13,89	13,97	14,01	14,09	14,11
Klungkung	12,99	13,00	13,02	13,12	13,13
Bangli	12,34	12,35	12,49	12,52	12,53
Karangasem	12,41	12,42	12,62	12,63	12,91
Buleleng	13,07	13,08	13,26	13,27	13,30
Denpasar	14,00	14,09	14,10	14,11	14,13
Provinsi Bali	13,33	13,40	13,48	13,58	13,62

Sumber: BPS. Provinsi Bali, 2025

5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2024 tidak/belum bersekolah paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 16,27 persen, capaian ini masih di atas Provinsi Bali yaitu sebesar 5,06 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kota Denpasar sebesar 1,00 persen.

Tabel 2.65
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tidak/Belum Bersekolah di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	12,98	15,72	13,36	2,62	3,45
Tabanan	10,69	10,78	10,07	5,15	3,61
Badung	6,61	5,95	7,52	3,10	2,10
Gianyar	9,41	11,31	11,63	5,19	5,95
Klungkung	12,54	21,08	16,36	11,20	6,72
Bangli	12,83	22,53	20,06	9,69	9,07
Karangasem	16,44	33,47	25,00	15,60	16,27
Buleleng	14,64	21,02	16,82	6,54	6,93
Denpasar	3,42	3,62	2,58	1,22	1,00
Provinsi Bali	14,92	13,44	11,50	5,41	5,06

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2024 yang memiliki ijazah SD/Sederajat di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sebesar 26,42 persen. Persentase penduduk yang memiliki ijazah SD paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 29,65 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kabupaten Denpasar sebesar 13,70 persen.

Tabel 2.66
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	30,37	25,06	23,60	24,35	24,10
Tabanan	27,61	22,40	25,80	25,21	24,49
Badung	18,00	16,09	14,45	13,10	13,93
Gianyar	24,66	18,63	17,91	16.81	16,45
Klungkung	31,65	25,07	19,34	19,72	24,05
Bangli	38,57	28,74	27,59	26,63	29,65
Karangasem	39,06	28,07	25,79	25,70	26,42
Buleleng	31,70	26,30	27,05	28,58	27,45
Denpasar	12,87	11,72	15,81	14,14	13,70
Provinsi Bali	20,08	20,29	20,67	20,09	20,16

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas

tahun 2024 yang memiliki ijazah SLTP/Sederajat di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sebesar 21,71 persen (meningkat 5,23 persen dari tahun 2020 sebesar 16,48 persen) namun sudah di atas capaian Provinsi Bali sebesar 20,21 persen. Persentase penduduk yang memiliki ijazah SLTP/Sederajat paling tinggi terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 24,50 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kabupaten Gianyar sebesar 16,94 persen.

Tabel 2.67
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SLTP Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	20,69	19,25	21,70	23,42	23,21
Tabanan	17,87	17,64	18,21	19,56	20,75
Badung	16,84	16,32	18,74	20,29	17,57
Gianyar	16,73	19,59	18,56	17,83	16,94
Klungkung	15,72	16,74	18,84	19,11	21,13
Bangli	19,55	18,99	20,81	19,86	18,51
Karangasem	16,48	16,83	19,41	20,09	21,71
Buleleng	18,97	20,87	22,35	24,17	24,50
Denpasar	17,97	25,32	18,57	21,03	19,68
Provinsi Bali	17,77	19,90	19,51	20,75	20,21

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2024 yang memiliki ijazah SLTA/Sederajat di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sebesar 19,46 persen (menurun 1,84 persen dari tahun 2020 sebesar 21,30 persen) namun masih di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 32,68 persen. Persentase penduduk yang memiliki ijazah SLTA/Sederajat paling tinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar 41,38 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 21,81 persen.

Tabel 2.68
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
SLTA Sederajat di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	26,59	30,32	29,73	28,54	28,13

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tabanan	29,96	34,18	31,09	30,73	31,32
Badung	40,96	43,36	38,10	39,11	40,52
Gianyar	35,56	36,26	35,28	37,83	36,53
Klungkung	28,89	26,45	31,84	29,59	30,62
Bangli	22,57	21,96	22,05	21,89	21,81
Karangasem	21,30	17,15	21,99	19,31	19,46
Buleleng	26,59	24,93	27,09	23,89	22,46
Denpasar	42,32	35,93	39,97	41,02	41,38
Provinsi Bali	33,05	32,14	32,77	32,57	32,69

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2024 yang memiliki ijazah DI/DII/DIII di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sebesar 5,41 persen namun masih berbeda jauh di bawah capaian Provinsi Bali yang meningkat 16,00 persen pada tahun 2024. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DI/DII/DIII paling tinggi terdapat di Kabupaten Badung sebesar 23,31 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 7,08 persen.

Tabel 2.69
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan DI/DII/DIII di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	2,13	3,35	4,29	9,93	10,70
Tabanan	4,32	5,45	4,81	14,65	15,02
Badung	6,22	6,19	7,25	22,26	23,31
Gianyar	4,33	3,57	4,26	16,68	18,50
Klungkung	2,95	3,03	3,86	12,70	13,14
Bangli	1,10	1,55	1,18	9,51	10,05
Karangasem	1,98	1,00	2,55	5,95	5,41
Buleleng	2,16	2,12	1,47	4,97	7,08
Denpasar	6,83	5,32	5,36	21,34	22,98
Provinsi Bali	4,25	3,98	4,31	14,80	16,00

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2024 yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sebesar 5,41 persen (meningkat sebesar 0,68

persen dari tahun 2020 sebesar 4,73 persen) namun masih di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 16,00 persen. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 paling tinggi terdapat di Kabupaten Badung sebesar 23,31 persen, sedangkan persentase yang paling rendah terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 7,08 persen.

Tabel 2.70
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
DIV/S1/S2/S3 di Kabupaten/Kota di Bali (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	7,26	6,30	7,32	9,93	10,70
Tabanan	9,56	9,55	10,04	14,65	15,02
Badung	11,37	12,10	13,94	22,26	23,31
Gianyar	9,32	10,63	12,36	16,68	18,50
Klungkung	8,25	7,64	9,75	12,70	13,14
Bangli	5,39	6,22	8,32	9,51	10,05
Karangasem	4,73	3,48	5,26	5,95	5,41
Buleleng	5,95	4,76	5,22	4,97	7,08
Denpasar	16,58	18,09	17,72	21,34	22,98
Provinsi Bali	**9,93**	**10,26**	**11,25**	**14,80**	**16,00**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

6. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi persentase APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12 tahun di Kabupaten Karangasem di tahun 2020 sebesar 99,32 persen (artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun terdapat 1 anak yang tidak bersekolah) dan terjadi

peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 99,84 persen. Capaian Angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12 tahun Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 99,65 persen.

Secara regional Bali, Capaian APS tertinggi usia 7-12 tahun pada tahun 2024 adalah Kabupaten Badung, Bangli dan Buleleng. Secara lengkap capaian APS Tahun 2020-2024 untuk Kabupaten/Kota di Bali seperti pada tabel 2.69 berikut :

Tabel 2.71
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	99,44	99,68	99,96	99,65	99,82	99,62
Tabanan	99,22	99,19	99,28	99,23	99,76	99,82
Badung	100,00	99,86	99,97	99,97	99,99	99,99
Gianyar	100,00	99,31	99,72	98,81	98,75	99,49
Klungkung	99,68	99,75	99,72	99,28	99,41	99,21
Bangli	99,26	99,72	99,54	99,40	99,49	99,98
Karangasem	99,32	99,86	99,72	99,94	99,79	99,84
Buleleng	99,67	99,4	99,41	99,83	99,69	99,92
Denpasar	100,00	99,51	99,84	99,37	99,12	99,18
B A L I	**99,71**	**99,57**	**99,70**	**99,55**	**99,61**	**99,65**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Angka partisipasi sekolah (APS) usia 13-15 tahun di Kabupaten Karangasem di tahun 2018 sebesar 96,48persen dan terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 96,92persen. Capaian Angka partisipasi sekolah (APS) usia 13-15 tahun Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dari capaian Provinsi Bali. Angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12 tahun Provinsi Bali di tahun 2018 sebesar 97,92 persen dan di tahun 2022 sebesar 97,85 persen

Secara regional Bali 3 Kabupaten dengan angka partisipasi sekolah (APS) tertinggi pada usia usia 13-15 tahun di tahun 2024 Kabupaten Badung, Gianya dan Kabupaten Karangasem secara lengkap capaian APS tahun 2020-2024 seperti tabel 2.70 berikut

Tabel 2.72
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	98,69	99,05	98,37	98,60	99,65
Tabanan	98,65	98,49	98,70	97,78	99,21
Badung	99,19	99,20	98,75	99,49	99,81
Gianyar	99,39	99,32	98,24	98,84	99,79
Klungkung	97,94	97,96	96,81	97,06	98,78
Bangli	96,19	96,21	96,15	98,55	98,22
Karangasem	96,77	96,43	96,92	95,96	99,45
Buleleng	96,41	96,53	95,86	96,45	96,24
Denpasar	99,23	98,98	98,84	98,50	98,79
Provinsi Bali	**98,21**	**98,22**	**97,85**	**97,95**	**98,79**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 tahun Kabupaten Karangasem meningkat tajam di tahun 2018 dan tahun 2019 mendekati capaian Provinsi Bali. Angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 tahun di Kabupaten Karangasem di tahun 2018 sebesar 80,11 persen dan terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 81,26 persen dan di tahun 2021 menurun menjadi 80,54 persen. Kemudian, di tahun 2022 persentase APS mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 80,13 persen dari tahun sebelumnya.

Perbandingan secara regional Bali menunjukkan Kabupaten Badung memiliki persentase APS usia 16-18 tahun tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar 90,59 persen sedangkan Kabupaten Bangli memiliki persentase APS terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 74,47 persen.

Tabel 2.73
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	84,84	84,48	84,24	85,13	81,70
Tabanan	87,49	86,33	86,68	87,60	80,98
Badung	91,27	90,79	90,59	91,55	94,52
Gianyar	90,04	89,89	89,89	90,84	92,35
Klungkung	87,12	86,92	86,79	87,71	84,19
Bangli	76,34	74,76	74,47	75,26	77,73

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Karangasem	80,96	80,54	80,13	80,98	84,21
Buleleng	81	80,58	80,33	81,18	82,46
Denpasar	75,47	80,40	80,80	81,66	82,29
Provinsi Bali	82,96	83,96	83,84	84,73	85,17

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian angka partisipasi sekolah (APS) Usia 19-24 tahun di Kabupaten Karangasem tahun 2017 masih sangat rendah yaitu 13,82 sedangkan Provinsi Bali telah mencapai 16,56 persen. Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9,52 persen sedangkan capaian Provinsi Bali meningkat menjadi 28,95 persen. Di tahun 2017 Kota Denpasar memiliki persentase APS Usia 19-24 tahun paling tinggi yaitu sebesar 35,68 persen sedangkan persentase APS Usia 19-24 tahun paling rendah terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 13,82 persen. Di tahun 2021 Usia 19-24 tahun paling tinggi adalah Kota Denpasar dengan capaian sebesar 39,53 persen dan Kabupaten Karangasem masih memiliki angka partisipasi sekolah (APS) Usia 19-24 tahun dengan capaian sebesar 9,52 persen.

Tabel 2.74
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 19-24 Tahun Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	15,34	15,71	23,36	23,56	20,95
Tabanan	16,29	16,83	19,84	26,37	25,78
Badung	31,65	31,94	36,47	42,88	43,76
Gianyar	35,54	35,42	32,38	43,21	43,26
Klungkung	19,80	18,98	25,28	24,55	26,87
Bangli	14,60	15,42	20,71	19,44	18,27
Karangasem	8,99	9,52	14,28	20,57	22,91
Buleleng	26,21	25,8	29,31	26,52	28,39
Denpasar	39,06	39,53	39,92	41,06	41,25
Provinsi Bali	28,67	28,95	30,18	34,31	35,39

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat di Kabupaten Karangasem tahun 2020 hingga 2024 sudah melebihi 100 persen.

Tabel 2.75
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jembrana	103,15	104,85	104,21	101,48	102,57
Tabanan	102,88	102,81	102,38	102,69	103,36
Badung	106,00	105,61	105,84	104,28	106,56
Gianyar	101,47	102,62	102,60	102,23	103,16
Klungkung	107,88	108,94	108,25	108,09	105,50
Bangli	100,01	99,44	99,61	100,65	103,70
Karangasem	104,37	102,65	103,54	103,10	106,21
Buleleng	101,28	101,24	101,76	99,80	102,00
Denpasar	101,38	102,49	102,36	103,63	105,99
Provinsi Bali	**102,87**	**103,09**	**103,16**	**102,70**	**104,51**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian APK SMP/Sederajat Kabupaten Karangasem tahun 2020 mencapai 103,5 persen dan di tahun 2021 meningkat menjadi 104,99 persen. Namun, di tahun 2022 capaian APK SMP/Sederajat di Kabupaten Karangasem menurun menjadi sebesar 93,99 persen tahun 2024 mencapai 106,03 persen. Sedangkan APK SMP/Sederajat Provinsi Bali tahun 2020 sebesar 97,40 persen dan di tahun 2021 masih tetap lebih rendah dari Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 98,68 persen, namun di tahun 2022, capaian APK SMP/Sederajat Provinsi Bali lebih tinggi daripada Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 96,23 persen. Perbandingan secara regional Provinsi Bali diketahui bahwa di tahun 2020 APK jenjang pendidikan SMP/Sederajat paling tinggi adalah

Kabupaten Gianyar dengan capaian 106,84 persen. Di tahun 2024 APK jenjang pendidikan SMP/Sederajat paling tinggi adalah Kabupaten Karangasem dengan capaian 106,03 persen.

Tabel 2.76
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	105,01	103,73	106,05	97,68	96,05
Tabanan	96,05	96,92	99,90	100,40	93,59
Badung	89,68	90,69	94,71	99,00	95,01
Gianyar	106,84	105,77	101,30	104,89	95,40
Klungkung	98,21	98,40	101,24	85,46	87,55
Bangli	104,97	108,38	110,31	91,41	82,64
Karangasem	103,5	104,99	93,99	95,16	106,03
Buleleng	95,26	102,99	100,51	108,42	102,64
Denpasar	93,12	92,05	84,34	90,68	89,25
Provinsi Bali	**97,4**	**98,68**	**96,23**	**98,18**	**95,25**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Kabupaten Karangasem di tahun 2020 mencapai 74,79 persen, angka ini masih lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yaitu 86,87 persen. Tahun 2022 capaian APK SMA Kabupaten Karangasem menurun menjadi 74,34 persen namun angka ini masih lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yaitu 90,82 persen. Perbandingan secara regional Provinsi Bali, capaian angka partisipasi kasar (APK) SMA/Sederajat Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebesar 86,14 persen sedangkan capaian Provinsi Bali sebesar 94,16 persen.

Tabel 2.77
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Provinsi Bali Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	83,46	85,61	85,67	97,96	93,67
Tabanan	91,15	89,26	90,71	85,56	97,98
Badung	92,55	95,73	98,12	93,84	95,75
Gianyar	96,52	96,97	96,48	88,67	96,20
Klungkung	93,32	91,27	91,25	105,78	96,38
Bangli	83,49	81,56	83,03	97,18	95,39
Karangasem	74,79	74,13	74,34	83,52	86,14
Buleleng	98,72	97,43	98,24	85,82	92,07

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	82,46	86,8	88,88	102,41	95,11
Provinsi Bali	**88,67**	**89,87**	**90,82**	**93,40**	**94,16**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem tahun 2020 sebesar 11,51 persen, angka ini lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yang sudah mencapai 30,55 persen. Demikian juga di tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem mampu meningkat menjadi 22,87 persen namun masih di bawah Provinsi Bali yang sudah mencapai 31,94persen. Perbandingan secara regional Provinsi Bali, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi tahun 2019 tertinggi yaitu Kota Denpasar dengan capaian sebesar 43,34 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yang mencapai 9,43 persen, dan di tahun 2023 sudah meningkat menjadi 24,05 persen.

Tabel 2.78
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi Bali Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	14,11	16,17	22,00	22,64	25,12
Tabanan	18,36	18,24	18,32	27,01	29,69
Badung	41,21	37,76	39,47	48,42	48,70
Gianyar	30,47	32,05	35,84	47,57	48,39
Klungkung	18,08	17,42	23,67	26,21	23,39
Bangli	12,48	13,91	16,19	17,65	18,03
Karangasem	11,51	13,29	22,87	24,05	26,76
Buleleng	22,42	21,66	24,54	25,38	28,17
Denpasar	42,73	43,64	45,70	43,14	43,40
Provinsi Bali	**30,55**	**30,64**	**31,94**	**36,46**	**38,15**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

8. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM dapat di definisikan sebagai Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C)

turut diperhitungkan. Makin tinggi nilai APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100persen. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Kabupaten Karangasem tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Kabupaten Karangasem sebesar 96,91 persen dan meningkat menjadi 96,85 persen di tahun 2021 dan di tahun 2024 naik menjadi 98,89 persen menurun sedikit dibanding tahun 2022 yang telah mencapai 99,01persen.

Tabel 2.79
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	99,24	99,37	97,83	97,77	96,98
Tabanan	97,43	99,07	98,62	99,22	99,82
Badung	99,75	99,41	98,20	98,03	98,72
Gianyar	98,07	98,32	97,47	97,40	98,59
Klungkung	98,90	98,90	98,25	98,18	97,85
Bangli	94,59	94,23	93,53	96,77	99,18
Karangasem	96,91	96,85	99,01	98,85	98,89
Buleleng	95,16	94,45	95,10	95,12	98,83
Denpasar	94,27	96,29	98,20	98,83	98,67
Provinsi Bali	**96,84**	**97,20**	**97,46**	**97,77**	**98,70**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Kabupaten Karangasem tahun 2020-2023 masih tetap berada di bawah Provinsi Bali, namun di tahun 2024 berada di atas Provinsi Bali. Tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Kabupaten Karangasem sebesar 85,06 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat di tahun 2021 sebesar 84,51 persen (di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 87,11 persen) mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 83,99 persen dan angka ini masih di bawah capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 86,88 persen. Tahun 2023 meningkat menjadi 84,20 persen

sedangkan Provinsi Bali sebesar 84,78 persen. Tahun 2024 mencapai 87,83 sedangkan Provinsi Bali sebesar 86,30 persen.

Tabel 2.80
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jembrana	94,26	94,05	94,11	88,12	85,36
Tabanan	91,69	91,90	91,51	88,46	89,92
Badung	84,48	84,71	84,23	86,64	88,57
Gianyar	97,45	97,70	97,70	90,04	89,52
Klungkung	90,18	90,79	90,15	74,00	75,63
Bangli	90,85	91,18	90,83	74,90	76,31
Karangasem	85,06	84,51	83,99	84,20	87,83
Buleleng	86,40	87,15	86,87	85,44	87,30
Denpasar	80,04	79,13	79,40	82,25	84,62
Provinsi Bali	**87,26**	**87,11**	**86,88**	**84,78**	**86,30**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Kabupaten Karangasem tahun 2020-2024 masih tetap berada di bawah Provinsi Bali. Tahun 2020-2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Kabupaten Karangasem sebesar 60,06 persen, Tahun 2022 menurun menjadi 59,93 persen dimana angka ini masih lebih rendah dari Provinsi Bali yaitu sebesar 74,73 persen. Tahun 2024 mencapai 67,71 persen masih lebih rendah dari Provinsi Bali yaitu sebesar 74,19 persen.

Perbandingan secara regional Provinsi Bali diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat tertinggi di tahun 2020 adalah Kabupaten Tabanan yang mencapai 80,74 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 60,6 persen. Pada tahun 2022 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat tertinggi adalah Kabupaten Badung yaitu sebesar 81,94 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yang mencapai 59,93 persen. Tahun 2024 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Kabupaten Karangasem meningkat menjadi 67,71 persen.

Tabel 2.81
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	72,81	71,81	72,86	77,73	77,31
Tabanan	80,74	80,57	80,59	71,46	72,81
Badung	80,15	82,02	81,94	81,57	83,40
Gianyar	77,59	77,44	77,26	79,26	82,58
Klungkung	77,38	77,29	77,12	78,39	74,47
Bangli	73,77	73,74	73,50	65,76	67,15
Karangasem	60,06	60,06	59,93	64,38	67,71
Buleleng	79,81	79,22	78,58	64,34	66,01
Denpasar	64,96	70,44	71,12	82,95	73,66
Provinsi Bali	**73,29**	**74,82**	**74,73**	**75,60**	**74,19**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem tahun 2020-2023 masih tetap berada di bawah Provinsi Bali. Tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem sebesar 7,52 persen dan meningkat menjadi 8,65 persen di tahun 2021. Capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit menjadi 8,65persen dan tahun 2022 naik lagi menjadi 1,13 persen di mana angka ini jauh lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 25,28 persen.

Perbandingan secara regional Provinsi Bali diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi tertinggi di tahun 2020 adalah Kota Denpasar yang mencapai 35,38 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 7,52 persen. Pada tahun 2024 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem meningkat menjadi 18,77 persen yang tahun sebelumnya 16,66 persen.

Tabel 2.82
Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	10,07	11,15	19,12	16,89	17,77
Tabanan	15,26	15,73	16,72	23,44	24,22
Badung	31,27	31,56	33,52	39,89	39,72

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Gianyar	24,77	24,42	29,36	41,29	41,16
Klungkung	14,52	14,59	21,64	18,37	19,30
Bangli	11,51	12,12	15,65	12,08	12,99
Karangasem	7,52	8,65	13,00	16,66	18,75
Buleleng	19,44	18,35	22,87	18,95	19,76
Denpasar	35,38	36,86	38,51	35,17	33,75
Provinsi Bali	**24,68**	**25,28**	**26,97**	**29,40**	**29,96**

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

9. Indeks Literasi Digital

Berdasarkan data Satu Data Indonesia Provinsi Bali per tahun 2023, capaian indeks literasi digital adalah 3,45 pada skala 1–5. Rincian per pilar literasi digital menunjukkan: (a) Digital Culture: 3,78; (b) Digital Ethics: 3,76; (c) Digital Skills: 3,38 dan (d) Digital Safety: 2,89. Nilai tertinggi tercapai pada aspek budaya digital, mencerminkan kecenderungan masyarakat Bali dalam menjaga nilai-nilai sosial bahkan dalam dunia digital. Namun, perhatian perlu difokuskan untuk meningkatkan aspek keselamatan digital (Digital Safety) yang masih relatif rendah.

Metode pengukuran IMDI yang dirilis Kominfo dan GoodStats tahun 2024 menunjukkan Provinsi Bali memperoleh skor 49,05 dari maksimal 100. Skor ini menempatkan Bali dalam kategori "tinggi" secara nasional. IMDI ini mengukur empat dimensi: (1) Infrastruktur & Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Dengan skor IMDI di level tinggi, Bali terbukti memiliki jaringan digital dan ekosistem yang cukup baik, serta potensi masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaan.

Dalam laporan BPS Provinsi Bali tahun 2023, Kabupaten Karangasem mencatat skor 55,85 (skala 0–100) untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Komponen yang diukur meliputi: (a) Pemerataan layanan perpustakaan: 0,7004; (b) Ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan; (c) Tingkat kunjungan masyarakat; dan (d) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Nilai di atas rata-rata provinsi (Bali: 62,7) menunjukkan bahwa

Karangasem berada dalam posisi cukup baik secara literasi perpustakaan, meski masih ada ruang perbaikan agar menjangkau semua lapisan masyarakat.

Walaupun data literasi digital terperinci untuk Karangasem belum ada, capaian IPLM menunjukkan kemajuan dalam literasi berbasis perpustakaan dan masyarakat. Namun, masih dibutuhkan survei digital khusus (seperti indeks literasi digital 1–5 atau IMDI di tingkat kabupaten) agar evaluasi kinerja dan kebijakan program digital lebih tajam.

Tabel 2.83
Data literasi digital Provinsi Bali

Aspek	Bali (Provinsi)	Karangasem
Indeks Literasi Digital (skala 1–5)	3,45 (2023)	– (data belum tersedia); namun Indeks Literasi Masyarakat: 55,85
IMDI (skala 0–100)	49,05 (tinggi, 2024)	Tidak spesifik tersedia
IPLM Perpustakaan (skala 0–100)	62,7 (rata-rata Bali)	55,85 (Karangasem, 2023)

Sumber: BPS Provinsi Bali 2025

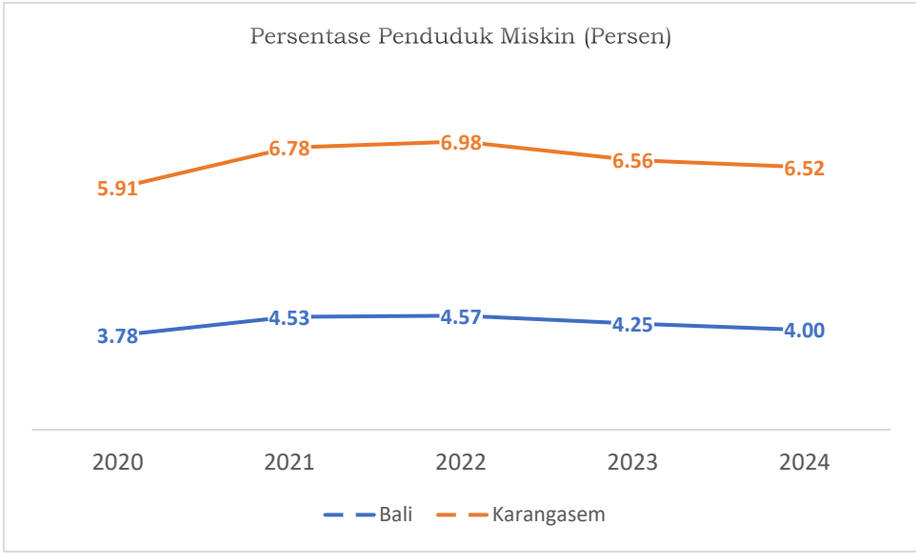
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang

buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.



Gambar 2.4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024

Persentase penduduk miskin di Kabupaten periode tahun 2020-2024 selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tahun 2020 persentase penduduk miskin mencapai 5,91 persen lebih tinggi dari Provinsi Bali yang mencapai 3,78 persen. Tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Akibat terjadinya wabah covid-19, persentase penduduk miskin secara regional Bali mengalami peningkatan. Di Kabupaten Karangasem 2021 meningkat menjadi 6,78 persen dan di tahun 2024 berhasil menurun menjadi 6,52 persen.

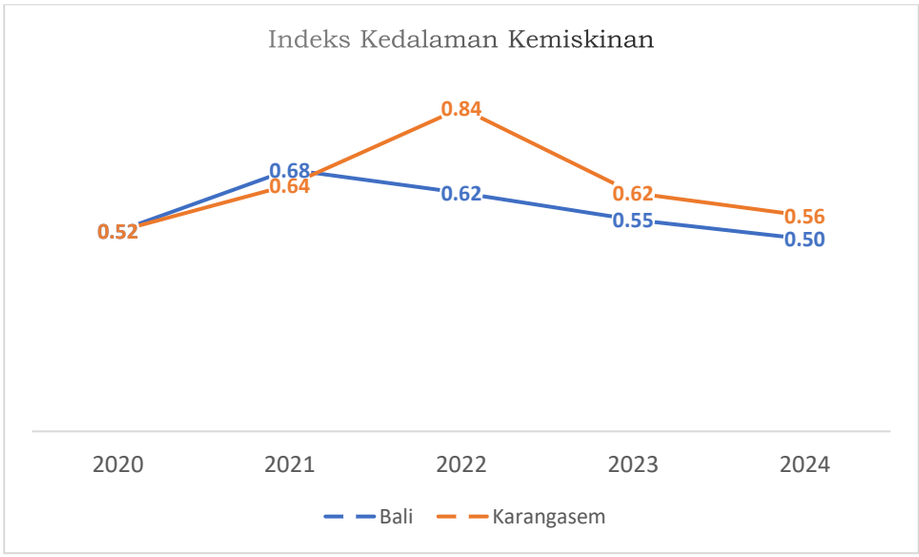
Tabel 2.84
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jembrana	4,51	5,06	5,30	4,96	4,51
Tabanan	4,27	5,12	5,15	4,70	4,40
Badung	2,02	2,62	2,53	2,30	2,23
Gianyar	4,08	4,85	4,70	4,47	4,00
Klungkung	4,87	5,64	6,07	5,61	5,30
Bangli	4,19	5,09	5,28	5,28	5,06
Karangasem	5,91	6,78	6,98	6,56	6,52
Buleleng	5,32	6,12	6,21	5,85	5,39
Denpasar	2,14	2,96	2,97	2,68	2,59
Provinsi Bali	**3,78**	**4,53**	**4,57**	**4,25**	**4,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2025

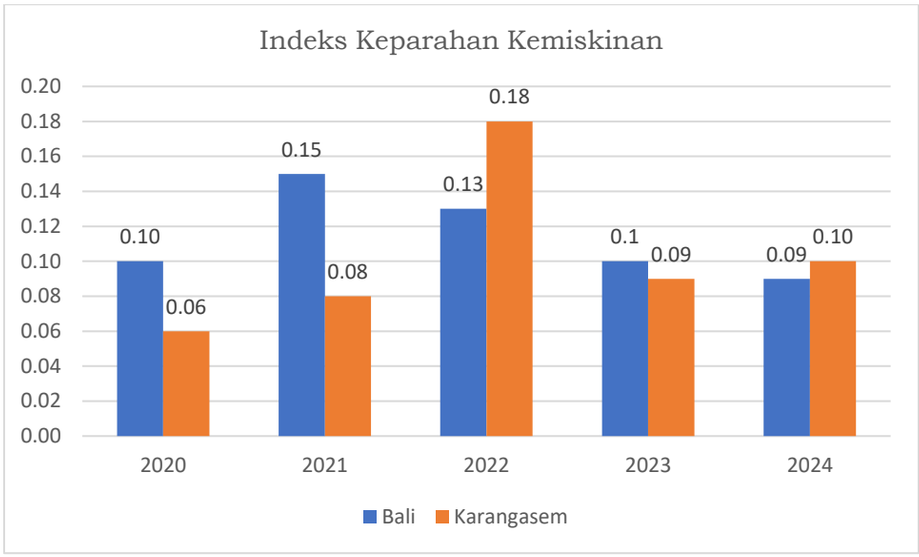
Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distritutionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin didaerah B. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebesar 0,56 lebih tinggi dari Provinsi Bali yang mencapai 0,50.



Gambar 2.5
Perbandingan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024

Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem mencapai tahun 2020 sebesar 0,06 lebih rendah dari Provinsi Bali yaitu sebesar 0,10. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 0,08, tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem lebih rendah dari Provinsi Bali, tahun 2024 kembali lebih tinggi dari Provinsi Bali.



Gambar 2.6
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali Periode Tahun 2020-2024

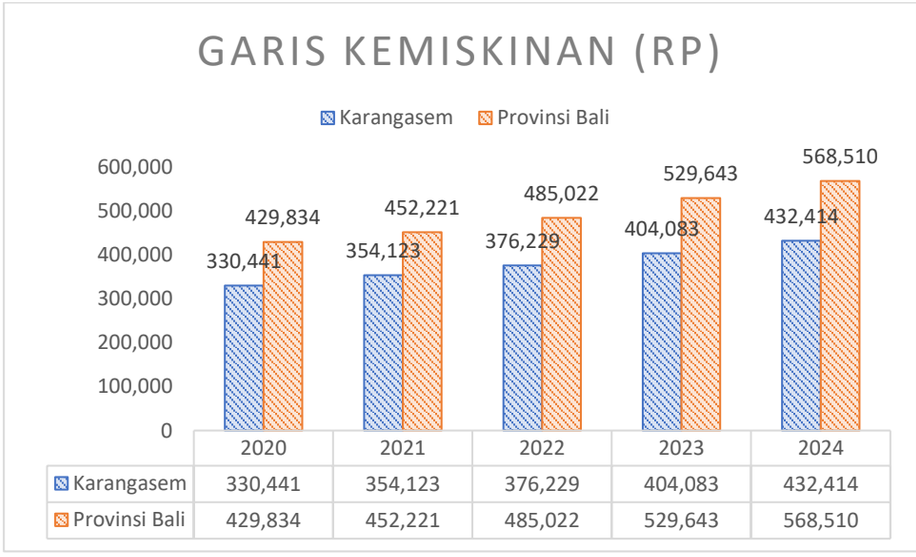
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2024 paling tinggi adalah Kabupaten Bangli sebesar 0,89 dan paling rendah adalah Kabupaten Klungkung sebesar 0,23. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa di tahun 2024 paling tinggi Kabupaten Bangli (0,23) dan paling rendah adalah Kabupaten Klungkung sebesar 0,03.

Tabel 2.85
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota		Indeks Kedalaman Kemiskinan					Indeks Keparahan Kemiskinan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jembrana	0,39	0,63	0,73	0,38	0,36	0,06	0,12	0,15	0,04	0,05
2.	Tabanan	0,58	0,82	0,67	0,52	0,75	0,10	0,22	0,13	0,09	0,19
3.	Badung	0,31	0,43	0,29	0,11	0,32	0,07	0,10	0,05	0,01	0,08
4.	Gianyar	0,57	0,51	0,69	0,42	0,49	0,11	0,09	0,21	0,06	0,09
5.	Klungkung	0,67	0,82	0,53	0,58	0,23	0,17	0,25	0,08	0,09	0,03
6.	Bangli	0,30	0,56	0,72	0,75	0,89	0,04	0,11	0,15	0,17	0,23
7.	Karangasem	0,52	0,64	0,84	0,62	0,56	0,06	0,08	0,18	0,09	0,10
8.	Buleleng	0,53	0,74	0,60	0,53	0,53	0,08	0,14	0,09	0,08	0,14
9.	Denpasar	0,25	0,37	0,30	0,35	0,35	0,05	0,06	0,05	0,10	0,08
	B A L I	0,52	0,68	0,62	0,55	0,50	0,10	0,15	0,13	0,10	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Karangasem tahun 2020 sebesar Rp 330.441 dan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp 432.414 masih di bawah garis kemiskinan di Provinsi Bali yang mencapai Rp 568.510.



Gambar 2.7
Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali
Periode Tahun 2020-2024

Tabel 2.86
Garis Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah) Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	403.462	434.839	458.214	496.435	531.164
Tabanan	450.571	488.750	522.520	562.801	601.963
Badung	587.737	613.993	633.769	688.018	737.800
Gianyar	400.079	407.945	434.163	468.307	500.797
Klungkung	318.139	342.043	359.415	384.983	411.010
Bangli	346.458	370.732	401.650	436.928	465.572
Karangasem	330.441	354.123	376.229	404.083	432.414
Buleleng	424.602	461.018	496.390	537.262	570.129
Denpasar	618.064	662.499	712.815	778.203	820.512
Provinsi Bali	429.834	452.221	485.022	529.643	568.510

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2025

2. Perlindungan Sosial

Penerima Program Perlindungan Sosial, di antaranya: bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Besaran yang didapat KPM adalah Rp200.000,- per bulan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Besaran yang didapat KPM adalah Rp110.000,- per bulan. Persentase rumah tangga yang menjadi KPM pada tahun 2021 sebesar 16,45 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 15,26 persen. Persentase rumah tangga yang menjadi KPM pada tahun 2023 sebesar 19,91 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 24,41 persen.

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Persentase rumah tangga penerima PIP pada tahun 2021 sebesar 8,57 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 13,05 persen. Persentase rumah tangga penerima PIP pada tahun 2022 sebesar 9,82 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 8,57 persen.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Sekitar 13,74 persen rumah tangga mendapatkan program KPS/KKS ini pada tahun 2021, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 13,57 persen. Sekitar 23,18 persen rumah tangga mendapatkan program KPS/KKS pada tahun 2023 di Kabupaten Karangasem, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 18,86 persen.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Rumah tangga penerima PKH pada tahun 2021 tercatat 10,75 persen. Angka ini meningkat dibanding penerima PKH tahun 2020 yang hanya sebesar 8,09 persen. Rumah tangga penerima PKH pada tahun 2023 tercatat 16,33 persen. Angka ini meningkat dibanding penerima PKH tahun 2022 yang hanya sebesar 12,5 persen.

Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun/hari tua pada tahun 2022 sebesar 5,0 persen. Angka ini menurun dari persentase rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun/hari tua pada tahun 2022 yang sebesar 6,62 persen. Fenomena yang sama terjadi pada kepemilikan asuransi/ PHK. Asuransi/PHK yang dimaksud adalah asuransi kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan pesangon PHK. Persentase rumah tangga yang memiliki asuransi/PHK pada tahun 2023 sebesar 5,86 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,01 rumah tangga yang memiliki asuransi/ PHK.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Karangasem memiliki berbagai keunikan tradisi dan budaya yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain di Bali. Karangasem juga menjadi lokasi Pura Besakih sebagai pusat dari seluruh kegiatan keagamaan di Bali, bahkan di dunia.

Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Adapun kategori WBTB meliputi (1). Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, ceritera rakyat, naskah kuno, permainan tradisional (2). Seni pertunjukkan termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik dan film (3). Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional (4). Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional,

kearifan lokal, pengobatan tradisional (5). Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Daftar Warisan Budaya Takbenda:

1) Megibung
2) Usaba Dimel Desa Adat Selat
3) Penting
4) Cakepung Budhakeling
5) Mesabat-sabatan Biu
6) Terompong Beruk
7) Mekare-kare Tenganan Pegeringsingan
8) Usaba Dangsil (Usaba Aya/Usaba Gede)
9) Gamelan Selonding
10) Usaba Sumbu (Guling Siu)
11) Ter-Teran (Meter-teran)
12) Gebug Ende

Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Situs, Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budayadi darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan yaitu:

Kecamatan Manggis:

1) Pura Yeh Santi
2) Pura Batan Cagi

Kecamatan Abang:

1) Pura Kayu Sakti Basangalas
2) Pura Ponjok Batu

Seniman tua atau lingsir merupakan seniman yang mampu menjadi penerus nilai-nilai berkesenian yang telah diwariskan oleh para leluhur dan mewariskannya kepada generasi sekarang. Totalitas pengabdian diri dalam mengembangkan seni budaya telah menghasilkan karya yang baru, inovatif dan bermutu tinggi yaitu:

1) Ida Bagus Made Buruan

2) I Gusti Nengah Putu Terangga
3) Drs. I Ketut Bawa, M.Pd
4) I Ketut Diksa
5) I Made Jiwa
6) Drs. Ida Bagus Wayan Oka Diksa
7) I Gusti Ngurah Sueka, S.ST.,M.Si
8) I Wayan Rupa
9) Ni Nengah Putu
10) I Gede Mangku Suadi

Tabel 2.87
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2024

Kabupaten/ Kota	**Islam**		**Protestan**	**Katolik**		
	Masjid	**Mushola**	**Gereja Protestan**	**Katedral**	**Gereja Katholik**	**Kapel**
Jembrana	66	119	41	0	3	5
Tabanan	13	19	54	0	1	7
Badung	16	76	141	0	14	3
Gianyar	6	13	13	0	1	1
Klungkung	8	8	13	0	1	6
Bangli	3	5	6	0	0	0
Karangasem	39	29	5	0	1	0
Buleleng	73	134	65	0	1	3
Denpasar	28	125	149	1	3	3
Provinsi Bali	252	529	487	1	25	28

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 2.87 (Lanjutan)
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2024

Kabupaten/ Kota	Hindu			Budha			Konghucu
	Sad Kahya-ngan	Dang Kahya-ngan	Kahya-ngan Tiga	Vihara	Citya	Tempat Ibadah Tri Dharma	Klenteng
Jembrana	0	6	16	6	0	1	0
Tabanan	1	18	1.106	4	0	0	0
Badung	2	8	414	4	2	1	1
Gianyar	1	51	834	1	1	1	1
Klungkung	1	8	405	1	0	0	0

Kabupaten/ Kota	Hindu			Budha			Konghucu
	Sad Kahya-ngan	Dang Kahya-ngan	Kahya-ngan Tiga	Vihara	Citya	Tempat Ibadah Tri Dharma	Klenteng
Bangli	2	7	526	1	2	4	1
Karangasem	3	90	689	1	0	0	0
Buleleng	0	49	432	12	3	2	0
Denpasar	1	2	80	11	4	3	2
Provinsi Bali	11	239	4.502	41	12	12	4

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Bidang olahraga, Kabupaten Karangasem saat ini memiliki lapangan olahraga yaitu:

1) Lapangan Yowana Wijaya
2) Lapangan Umum Kecamatan
3) Lapangan Tenis
4) Lapangan Bola basket
5) Lapangan Bola Volly
6) Lapangan Bulu Tangkis
7) Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung
8) Kolam Renang
9) Stadion Kota Amlapura.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40persen terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Ketidakmerataan (ketimpangan pendapatan) dapat disebabkan oleh keberagaman faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu daerah/wilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, maka berkemungkinan besar ia akan memiliki pendapatan yang juga semakin besar. Apabila suatu daerah memiliki ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan yang besar, maka akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, kesenjangan sosial.

Distribusi Pendapatan Menurut pendekatan Bank Dunia yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pendapatannya lebih kecil daripada 12 persen dari keseluruhan penduduk daerah tersebut maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin distribusi pendapatannya berada antara 12-17 persen dari keseluruhan pengeluaran pendapatan maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang moderat. Dan bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pendapatannya lebih kecil daripada 17 persen dari keseluruhan pendapatan maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang rendah.

Menurut Data BPS Provinsi Bali, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan kelompok 40 persen penduduk bawah menerima pendapatan sebesar 22,87. Angka ini lebih baik dari Provinsi Bali yaitu sebesar 18,20. Kelompok 40 persen penduduk sedang menerima pendapatan sebesar 38,41 angka ini lebih kecil dari Provinsi Bali sebesar 38,51 sedangkan kelompok 20 persen penduduk tinggi menerima penghasilan sebesar 38,71.

Tabel 2.88
Distribusi Pendapatan Provinsi Bali Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Distribusi Pendapatan		
	40% Bawah	40% Sedang	20% Tinggi
Jembrana	23.57	36.80	39.63
Tabanan	21.80	39.13	39.07
Badung	22.99	39.33	37.68
Gianyar	22.32	39.80	37.88
Klungkung	22.35	36.95	40.71
Bangli	22.18	38.57	39.25
Karangasem	22.87	38.41	38.71
Buleleng	23.51	37.55	38.94
Denpasar	19.75	38.10	42.16
Bali	18.20	38.51	43.29

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Tabel 2.89
Distribusi Pendapatan Kabupaten Karangasem Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Tahun 2020- 2024

Tahun	Distribusi Pendapatan		
	40 persen Bawah	40 persen Sedang	20 persen Tinggi
2020	20,29	38,84	40,87
2021	21,25	37,83	40,93
2022	22,88	37,02	40,10
2023	21,06	35,80	43,14
2024	22,21	36,12	44,.11

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

2. Penyandang distabilitas

Penyandang distabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai upaya pemenuhan hak bagi disabilitas, pemerintah Kabupaten Karangasem telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Tabel 2.90
Banyaknya Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi Bali, 2024

Kabupaten/ Kota	Tuna Netra	Tuna Wicara	Cacat Anggota Tubuh
Jembrana	204	195	458
Tabanan	273	576	1.854
Badung	217	415	1.794
Gianyar	247	343	1.237
Klungkung	78	277	584
Bangli	137	165	618
Karangasem	145	124	2.273
Buleleng	389	515	3.452
Denpasar	160	249	620
Provinsi Bali	1.850	2.859	12.890

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem sebanyak 1.200 orang (menempati urutan paling rendah dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Disabilitas di Kabupaten Karangasem terdiri dari: tuna netra sebanyak 92 orang, tuna wicara sebanyak 92 orang, cacat anggota tubuh sebanyak 814 orang, cacat mental sebanyak 178 orang dan cacat ganda sebanyak 24 orang.

Tabel 2.91
Banyaknya Panti Menurut Status Pengusahaan dan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2024

Kabupaten/ Kota	Pemerintah		Swasta		Jumlah	
	Panti	Penghuni	Panti	Penghuni	Panti	Penghuni
Jembrana	-	-	18	461	18	461
Tabanan	-	-	6	219	6	219
Badung	-	-	10	316	10	316
Gianyar	-	-	1	94	1	94
Klungkung	-	-	4	156	4	156
Bangli	-	-	2	79	2	79
Karangasem	-	-	5	193	5	193
Buleleng	1	45	19	617	20	662
Denpasar	-	-	18	446	18	446
Provinsi Bali	1	45	83	2.581	84	2.626

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

3. Bantuan Sosial

Tabel 2.92
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota, 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Jembrana	88.258	85.583	35.561.000.000	34.482.400.000
Tabanan	129.316	123.601	52.564.600.000	50.253.200.000
Badung	52.586	47.648	21.272.600.000	19.278.000.000
Gianyar	81.676	76.061	32.957.400.000	30.698.800.000
Klungkung	34.045	33.882	20.427.000.000	20.329.200.000
Bangli	44.983	44.747	26.989.800.000	26.848.200.000
Karangasem	207.881	203.531	85.686.800.000	83.859.800.000
Buleleng	268.500	264.861	108.162.400.000	106.660.200.000

Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Denpasar	9.748	9.471	5.842.000.000	5.682.600.000
Provinsi Bali	916.993	889.385	389.463.600.000	378.092.400.000

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

4. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Karangasem masih cukup tinggi, jika dibandingkan rata-rata IKG di Provinsi Bali. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), angka IKG untuk Kabupaten Karangasem pada tiga tahun belakangan (2020-2024) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat IKG di Kabupaten Karangasem sebesar 0,342 dan di tahun 2021 naik menjadi 0,401, menurun pada tahun 2022 yakni 0,297, dan kembali meningkat menjadi 0,358 di tahun 2023 dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 0,284.

Tabel 2.93
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	0,252	0,365	0,320	0,206	0,211
Kab. Tabanan	0,168	0,236	0,148	0,180	0,170
Kab. Badung	0,149	0,142	0,130	0,118	0,126
Kab. Gianyar	0,306	0,216	0,204	0,193	0,193
Kab. Klungkung	0,157	0,149	0,193	0,198	0,186
Kab. Bangli	0,389	0,362	0,261	0,257	0,249
Kab. Karangasem	0,342	0,401	0,297	0,358	0,284
Kab. Buleleng	0,384	0,405	0,421	0,462	0,389
Kota Denpasar	0,271	0,348	0,212	0,303	0,288
Provinsi Bali	0,237	0,305	0,265	0,321	0,239

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Pada 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,447, sedangkan capaian Kabupaten Karangasem masih di bawah nasional yaitu 0,284. Masih tingginya IKG di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh beberapa faktor, satu diantara indikatornya yakni masih banyak perempuan yang menikah dini, bahkan sampai putus sekolah. Di beberapa desa, bahkan masih dapat ditemui perempuan

yang menikah dan melahirkan di bawah usia 20 tahun. Menurut BPS dimensi pembentuk IKG yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Tabel 2.94
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	72,36	72,75	73,58	74,80	75,32
Kab. Tabanan	76,17	76,45	76,75	77,87	78,83
Kab. Badung	81,60	81,83	82,13	83,00	83,73
Kab. Gianyar	77,36	77,70	78,39	79,69	80,23
Kab. Klungkung	71,73	71,75	72,55	74,18	75,15
Kab. Bangli	69,36	69,37	70,26	71,99	72,51
Kab. Karangasem	67,35	67,36	68,28	70,09	70,91
Kab. Buleleng	72,55	72,56	73,45	74,87	75,35
Kota Denpasar	83,93	84,03	84,37	84,68	85,11
Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	78,01	78,63

Sumber : BPS Provinsi Bali 2025

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem terus meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022. PDA Tahun 2024 IPM Kabupaten Karangasem telah mencapai 70,91, naik 0,82 poin dari tahun sebelumnya sebesar 70,09, dengan nilai IPM yang telah mencapai lebih dari 70 maka IPM Kabupaten Karangasem telah masuk dalam katagori tinggi. Capaian IPM Kabupaten Karangasem memiliki selisih 1,6 poin dari Kabupaten dengan capaian IPM terdekat yaitu Bangli. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan

capaian IPM Provinsi Bali, IPM Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dengan selisih sebesar 7,72 poin.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Iptek dan Inovasi

Kemajuan iptek dan inovasi diukur berdasar Indeks Inovasi Daerah (IID) yang merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Indeks inovasi Kabupaten Karangasem tahun 2023 sudah mencapai skor 54,79 termasuk katagori inovatif. Tahun 2020 indeks inovasi Kabupaten Karangasem adalah Kurang Inovatif.

Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 Kabupaten Karangasem termasuk katagori Inovatif dengan indeks 58,30 dan Provinsi Bali katagori Sangat Inovatif (69,92).

2. Produktivitas Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi. Melalui proses tersebut akan terjadi pula pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi pada hakekatnya. dimaksudkan untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan ekonomi, dapat diukur dari data statistik pendapatan nasional/regional secara berkala. Statistik pendapatan nasional/regional digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Statistik pendapatan nasional/regional tersebut dapat juga dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Angka-angka yang disajikan dalam statistik pendapatan tersebut merupakan rincian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Struktur ekonomi Kabupaten Karangasem dibentuk dari komposisi ekonomi menurut sumbangan dari masing-masing kategori lapangan usaha yang berproduksi di Karangasem. Besaran nilai tambah pada masing-masing kategori dibandingkan dengan total PDRB yang terbentuk diistilahkan sebagai kontribusi. Kategori lapangan usaha dengan kontribusi yang menonjol menjadi ciri khas suatu wilayah dan menunjukkan dominasi pada perekonomian wilayah tersebut. Kontribusi terbesar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2024 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai sebesar 25,41 persen peranan sektor ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan di mana peranan sektor ini di tahun 2020 mencapai 26,31 persen. Berikutnya katagori lapangan usaha transportasi dan pergudangan, peranan sektor ini mencapai 16,03 persen (menurun) dibandingkan tahun 2020 peranan sektor ini sebesar 17,22 persen. Katagori penyediaan akomodasi dan makan minum, peranan sektor ini di tahun 2024 sebesar 9,72 persen meningkat dibandingkan tahun 2024 peranan sektor ini sebesar 8,33 persen. Selanjutnya katagori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,28 persen (menurun) dibandingkan tahun 2020 peranan sektor ini sebesar 8,14 persen. Katagori lapangan usaha konstruksi tahun 2024, peranan sektor ini mencapai 6,87 persen (meningkat) dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,61 persen.

Tabel 2.95
Rasio PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Kategori Industri	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,38	27,39	26,56	25,76	25,41
B. Pertambangan dan Penggalian	3,15	3,36	3,48	3,56	3,62
C. Industri Pengolahan	4,10	4,15	4,19	4,08	4,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,10	0,10	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
F. Konstruksi	6,61	7,15	7,19	6,95	6,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50	5,49	5,69	5,68	5,36
H. Transportasi dan Pergudangan	17,22	15,70	15,79	16,18	16,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,33	7,41	8,08	9,17	9,72
J. Informasi dan Komunikasi	3,57	3,77	3,59	3,44	3,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,49	4,54	5,10	5,60	5,91
L. Real Estate	4,10	4,17	4,08	3,98	3,94
M, N. Jasa Perusahaan	0,79	0,78	0,81	0,80	0,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,14	8,34	7,73	7,20	7,28
P. Jasa Pendidikan	2,73	2,77	2,63	2,46	2,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,44	2,38	2,33	2,34
R,S, T, U. Jasa lainnya	2,39	2,32	2,48	2,57	2,54
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem 2025

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Sesuai Perda Provinsi Bali No.2 Tentang RTRW provinsi Bali tahun 2023-2043 di Kabupaten Karangasem terdapat hutan antara lain: 1. Hutan lindung gunung Abang Agung; 2. Hutan lindung Seraya; 3. Hutan Lindung Bunutan; 4. Hutan lindung Bukit Gumang; 5. Hutan lindung Bukit Pawon; 6. Hutan lindung Kondang Dia.



Gambar 2.8
Kawasan Hutan di Provinsi Bali
(Sumber: https://tarubali.baliprov.go.id/perlindungan-kawasan-hutan-lindung-dalam-rtrwp-bali-tahun-2023-2043/)

Tabel 2.96
Luas Hutan dan Fungsinya Menurut Kabupaten (Hektar)

Kabupaten/Kota Bali	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung
Jembrana	383.10	2.610.20	32.974.97
Tabanan	-	-	8.668.24
Badung	-	-	1.126.90
Gianyar	-	-	-
Klungkung	-	244.00	804.50
Bangli	-	453.00	6.239.01
Karangasem	-	204.11	14.016.12
Buleleng	1.524.00	3.207.95	31.936.32
Kota Denpasar	-	-	-

2. Indeks Ekonomi Biru

Blue Economy Development Index (BEDI) bertujuan untuk mengukur tingkat pembangunan sektor kelautan berkelanjutan di negara-negara maritim. Berdasarkan hasil penilaian BEDI, Indonesia memiliki skor total sebesar 4,3 atau masuk ke dalam kategori menengah dengan posisi 36 dari 47 negara yang diamati. Indonesia memiliki skor terendah atas penilaian terhadap variabel Indeks Inklusivitas. Selain itu, skor dari variabel Tingkat Ketenagakerjaan, Indeks Teknologi, dan Kualitas Sumber Daya juga berada di bawah rerata global. Di sisi lain,

hasil penilaian Indonesia cukup baik pada variabel Kontribusi Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan dengan skor di atas rerata global.

Ekonomi biru, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dianggap sebagai salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Bappenas/Kementerian PPN mencatat bahwa sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Dalam peta jalan ekonomi biru, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB nasional dari 7,9 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Menurut Siaran Pers, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 55.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 18 Januari 2024, Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat, persentase bauran energi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 masih dipegang oleh batubara, yaitu sebesar 40,46%. Namun, persentase tersebut terus menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,38%. Persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi Batubara (40,46%), Minyak Bumi (30,18%), Gas Bumi (16,28%), EBT (13,09%). Prosentase energi baru terbarukan (EBT) meningkat 0,79% sehingga menjadi 13,09% pada tahun 2023. Namun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,87%. Perkembangan persentase energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi daerah pada seluruh provinsi. Daerah dengan pencapaian EBT tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (35,83%) dan pencapaian EBT terendah adalah Provinsi Maluku (0,17%).

2.3.4 Transpormasi Digital

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam

kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu *suplay and demand*. Supplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan *demand* terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, memperkuat sistem jaringan sistem informasi, penyusunan master plan pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi berbasis Web, peningkatan kecepatan akses internet. Di samping berkembangnya pemakaian telepon seluler, derasnya kebutuhan akan arus informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan. Kebutuhan akan internet semakin bertambah.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan PDB. Komponen PMTB juga merupakan komponen dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Komponen pembentukan modal tetap

bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan mengenai bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (capital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari produk impor.

Tabel 2.97
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Karangasem,
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai PMTB (Miliar Rupiah)					
ADHB	2.305,47	2.360,56	2.545,74	2.682,80	2.833,91
ADHK 2010	1.621,68	1.604,09	1.644,21	1.675,65	1.740,94
Proporsi dan Pertumbuhan Nilai PMTB (Persen)					
Proporsi Terhadap PDRB ADHB	14,06	14,30	14,41	14,14	14,02
Pertumbuhan	-7,84	-1,08	2,50	1,91	3,9

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem 2025

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Pada Tabel 2.94 ditunjukkan, selama kurun waktu 2020-2024, terlihat bahwa nilai PMTB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, pengeluaran PMTB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 2,30 triliun, kemudian meningkat hingga mencapai Rp 2,83 triliun di tahun 2024. Demikian halnya dengan pengeluaran PMTB atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami fluktuasi pada masing-masing tahun. Sementara kontribusi PMTB terhadap total PDRB Kabupaten Karangasem berada pada kisaran 14,06 persen hingga 14,02 persen.

Tahun 2020 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Karangasem sebesar 1.621.681,15 juta rupiah dengan laju pertumbuhan negatif 7,84 persen sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 1.740.940,44 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 3,9 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari negatif 7,84 persen tahun 2020 menjadi 3,9 persen pada tahun 2024. Sementara di tahun lainnya masing-masing sebesar -7,84 persen (2020); -1,08 persen (2021); 2,50 persen (2022) dan 1,91 persen (2023). peningkatan yang terjadi selama lima tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi peningkatan PMTB dari sisi kuantitas.

Tabel 2.98
PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6.605,57	6.586,97	6.866,55	7.266,84	7.588,13
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	198,77	204,89	228,81	264,45	339,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.039,63	1.013,00	1.005,87	1.004,78	1.099,57
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1.621,68	1.604,09	1.644,21	1.675,65	1.740,94
Perubahan Inventori	15,77	20,52	22,2	7,75	6,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.148,94	1.141,14	1.075,78	959,76	888,85
PDRB	10.630,37	10.570,60	10.843,41	11.179,22	11.663,31

Tabel 2.99
PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-1,68	-0,28	4,24	5,83	4,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,14	3,08	11,67	15,58	28,5
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1	-2,56	-0,7	-0,11	9,43
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-7,84	-1,08	2,5	1,91	3,9

PDRB	-4,49	-0,56	2,58	3,1	4,33

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem 2025

2. Ekspor Barang dan Jasa

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerahnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Karangasem tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Karangasem. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten

Karangasem di luar domestik. baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Karangasem terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024 nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga berlaku menunjukkan tren yang menurun setiap tahun, baik atas dasar konstan maupun berlaku. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan terhadap impor dalam penggunaan barang dan jasa.

Tabel 2.100
Perkembangan Nilai Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Karangasem,
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai Net Ekspor (Miliar Rupiah)					
ADHB	2.304,90	2.255,73	2.133,21	2.072,99	1.918,15
ADHK 2010	1.148,94	1.141,14	1.075,78	959,76	888,85
Proporsi Nilai Net Ekspor (Persen)					
Proporsi Terhadap PDRB ADHB	14,05	13,67	12,07	10,92	9,49

Sumber: BPS Karangasem, 2025

Proporsi net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Karangasem sejalan dengan perkembangan agregatnya, juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Artinya, terdapat pergeseran struktur PDRB yang dialihkan dari kontribusi net ekspor terhadap komponen pengeluaran lainnya.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Kualitas Layanan Infrastruktur

A. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta

pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Jalan yang ada di Kabupaten Karangasem terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten. Panjang jalan negara tahun 2019 hingga 2023 yaitu 91,83 Km, panjang jalan provinsi yaitu 147,86 Km dan Panjang jalan kabupaten yaitu 1.201,60 Km.

Tabel 2.101
Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan

No.	Tingkat Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Negara	75,47	97,97	97,97	91,83	91,83
2	Provinsi	145,98	145,98	145,98	147,86	147,86
3	Kabupaten	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.201,60	1.201,60
	Jumlah	1.423,99	1.446,49	1.446,49	1.441,29	1.441,29

Sumber: BPS Karangasem, 2025

Berdasarkan atas permukaan jalan, kondisi jalan di Kabupaten Karangasem di tahun 2024 sepanjang 1.012,78 Km sudah kondisi aspal, sudah di beton sepanjang 88,68 Km dan sisanya masih kerikil, tanah dan lainnya.

Tabel 2.102
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karangasem (km), Tahun 2020–2024

No.	Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	976,32	854,29	895,85	913,72	1.012,78
2	Kerikil	0	114,62	71,43	62,09	18,93
3	Tanah	175,05	134,13	116,34	112,97	81,21
4	Beton	51,17	60,03	63,01	63,25	88,68
5	Tidak dirinci	-	39,47	55,91	50,51	-
	Jumlah	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.201,60

Sumber: BPS Karangasem, 2025

Kondisi jalan baik di tahun 2023 sudah mencapai 737,43 Km dan kondisi sedang sepanjang 259,35 Km sisanya masih dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Tabel 2.103
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem (km), 2020–2024

No.	Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	658,70	616,40	705,07	737,43	651,48
2	Sedang	77,57	274,87	228,71	205,76	166,57
3	Rusak	87,44	65,65	59,00	59,74	118,40
4	Rusak Berat	378,83	245,62	209,76	199,61	265,15
	Jumlah	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.201,60

Sumber: BPS Karangasem, 2025

B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia. Selain menjadi tempat berteduh, rumah juga berfungsi sebagai tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan di antara setiap orang yang menempatinya, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga. Bahkan bagi beberapa kalangan, rumah juga merupakan lambang dari status sosial.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap penduduk dan merupakan faktor penentu kesehatan masyarakat. Agar penghuninya tetap sehat, perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan. Perumahan yang sehat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kualitas suatu rumah dapat dilihat dari kualitas material yang digunakan seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas, termasuk fasilitas penunjang lainnya seperti luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang besar dan sumber penerangan. Apabila memenuhi beberapa kriteria tersebut, sebuah rumah dikategorikan rumah layak huni.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga

sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m2. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di rumah. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 meter.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, sebesar 98,55 persen rumah tangga di Kabupaten Karangasem memiliki rumah dengan lantai bukan tanah, 99,20 persen rumah tangga yang atap terluas rumah tinggalnya adalah beton/genteng/sirap/seng/asbes, dan sebesar 98,54 persen rumah tangga juga sudah memiliki dinding rumah terluas berupa tembok atau kayu. Persentase rumah tangga menurut luas lantai tempat tinggal didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m2 yaitu sebesar 50,92 persen. Rumah tangga dengan luas lantai 20-49 m2 sebesar 27,79 persen dan sebesar 12,23 persen yang luas lantainya 100-149 m2. Sedangkan rumah tangga yang luas lantainya kurang dari 19 m2 sebesar 2,37 persen, dan yang lebih dari 150 m2 hanya sebesar 6,70 persen saja.

Pada 2024, sebanyak 95,16 persen rumah tangga di Kabupaten Karangasem berdasarkan hasil Susenas menempati rumah miliknya sendiri, sedangkan sisanya 4,84 persen menempati rumah bukan milik sendiri. Peningkatan persentase rumah tangga yang menempati rumah miliknya dari tahun 2023 ke tahun 2024 tentu memberi sinyal yang baik bagi kondisi perumahan di Karangasem. Rumah yang dimiliki sendiri dapat berasal dari membeli baik secara tunai atau dicicil. Ada juga yang menempati rumah orang tua yang sudah diwariskan walaupun tidak

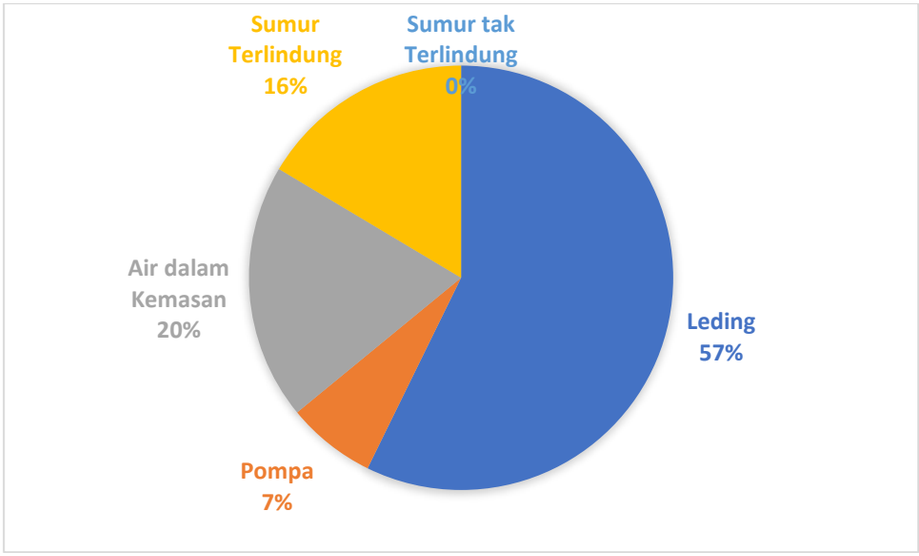
menggunakan SHM atas nama anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut, namun masih menggunakan nama orang tuanya.

Salah satu usaha sanitasi yang cukup penting peranannya adalah penyediaan sarana jamban. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Maka dari itu, pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan. Ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik merupakan fasilitas rumah tinggal yang berkait erat dengan hal tersebut. Sebesar 69,59 persen rumah tangga di Kabupaten Karangasem telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri pada tahun 2024. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 77,07 persen.

Dari 69,59 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri pada tahun 2024, seluruhnya telah menggunakan kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa septik/ IPAL/SPAL. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas tempat buang air besar di masyarakat. Pada tahun 2024, sudah tidak ditemukan rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan kloset lainnya. Namun, masih ditemukan masyarakat yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja lainnya, khususnya pada masyarakat golongan 40% terbawah di tahun 2024 dan 40% menengah di tahun 2023. Tempat pembuangan akhir tinja lainnya berarti rumah tangga membuang kotoran di tempat lain seperti kolam, sawah, sungai, danau, maupun di pantai, tanah lapang maupun kebun serta di tempat lainnya.

Persentase rumah tangga di Kabupaten Karangasem yang menggunakan air bersih pada tahun 2024 adalah sebesar 79,41 persen. Air bersih adalah air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 meter. Selama dua tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga menggunakan leding sebagai sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk

mandi/cuci/dll. Terlihat juga bahwa leding mendominasi sumber air utama untuk rumah tangga apapun kelompok pengeluarannya.



Gambar 2.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Mandi/ Cuci/Dll di Kabupaten Karangasem, 2024

C. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap penduduk dan merupakan faktor penentu kesehatan masyarakat. Agar penghuninya tetap sehat, perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan. Perumahan yang sehat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kualitas suatu rumah dapat dilihat dari kualitas material yang digunakan seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas, termasuk fasilitas penunjang lainnya seperti luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang besar dan sumber penerangan. Apabila memenuhi beberapa kriteria tersebut, sebuah rumah dikategorikan rumah layak huni.

Tabel 2.104
Jumlah Rumah Tangga Layak Huni berdasarkan sumber pendanaan tahun 2020-2024

APBN			Provinsi			Kab/Kota			Lainnya		
Nama Program	Tahun	Jumlah	Nama Program	Tahun	Jumlah	Nama Program	Tahun	Jumlah	Nama Program	Tahun	Jumlah
Bantuan BSPS	2019	500	Bedah Rumah	2019	7	Pemb RTLH	2019	1060	BKK Badung	2019	405
Bantuan BSPS	2020	750	Bedah Rumah	2020	-	Pemb RTLH	2020	-		2020	
Bantuan BSPS	2021	175	Bedah Rumah	2021	-	Pemb RTLH	2021	176		2021	
Bantuan BSPS	2022	235	Bedah Rumah	2022	-	Pemb RTLH	2022	196	CSR BPD dan Korpri	2022	4
Bantuan BSPS	2023	118	Bedah Rumah	2023	-	Pemb RTLH	2023	393		2023	
JUMLAH		2.784			7			2.377			409

Sumber: BPS Karangasem, 2025

D. Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 jumlah desa mandiri di Indonesia meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2023. Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Bali pada tahun 2024 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada tahun 2023. Tahun 2024 termasuk katagori Maju sebanyak 132 desa dan Berkembang sebanyak 2 desa.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (economy), selanjutnya disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan negara, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut.

Tabel 2.105
Rasio pajak terhadap PDRB Harga Berlaku (%)

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	PDRBHB (juta rupiah)	Rasio
2020	66.506.517.157,75	16.399.774,86	0,025%
2021	85.660.356.296,00	16.506.624,87	0,019%
2022	167.957.909.825,42	17.669.491,36	0,011%
2023	232.153.510.496,00	18.974.675,40	0,008%
2024	273.800.083.472,10	20.210.330,00	0,007%

Sumber: BPS Karangasem, 2025

2. Inflasi

Pada bulan April 2024 secara *year on year* (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,28. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,42 persen dengan IHK sebesar 109,67 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 3,69 persen dengan IHK sebesar 106,99.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik setinggi 9,89 persen; kelompok pakaian dan alas kaki setinggi 1,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga setinggi 0,12 persen; kelompok kesehatan setinggi 1,99 persen; kelompok transportasi setinggi 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya setinggi 2,38 persen; kelompok pendidikan setinggi 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran setinggi 3,65 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya setinggi2,35 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun

sedalam 0,19 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,02 persen. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di 4 kabupaten/kota tersebut, pada April 2024 terjadi inflasi y-on-y setinggi 4,02 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,13 pada April 2023 menjadi 107,28 pada April 2024. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) April 2024 tercatat inflasi sebesar 1,78 persen, sedangkan inflasi bulanan (m-to-m) tercatat inflasi sebesar 0,32 persen. Laju Inflasi secara terukur hanya diukur pada Kota Suingaraja dan Denpasar dengan perkembangan disajikan berikut.

Tabel 2.106
Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (Persen)

Wilayah Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	0,55	2,01	6,44	2,54	2,34
Singaraja	2,48	2,39	4,63	4,31	2,69
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025

2.4Aspek Pelayanan Umumn

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.107
Tiga Besar Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks
1	Pemerintah Kabupaten Karangasem	99,16
2	Pemerintah Kota Denpasar	98,99
3	Pemerintah Kabupaten Bangli	98,90

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB. Satuan : Indeks.

Tabel 2.108
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,07	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,45	Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Klungkung	3,02	Baik
5	Pemerintah Kab. Gianyar	3,14	Baik
6	Pemerintah Kab. Karangasem	2,30	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bangli	2,48	Cukup
8	Pemerintah Kab. Badung	3,66	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Tabanan	3,77	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,80	Sangat Baik

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas

pelayanan publik yang diberikan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebesar 3,76 katagori Baik.

4. Indeks Integritas Nasional

Indeks integritas nasional sebesar 70,97 poin pada 2024. Skor tersebut menunjukkan Indonesia masuk dalam kategori rentan korupsi. Skor integritas pada tahun lalu terpantau turun 0,97 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,94 poin. Nilainya juga masih belum mencapai target yang sebesar 74 poin. Secara rinci, skor indeks integritas di tingkat kementerian sebesar 73,5 poin pada tahun lalu. Kemudian, indeks integritas di tingkat lembaga sebesar 76,4 poin. Skor indeks integritas di tingkat pemerintah provinsi sebesar 77,97 poin pada 2024. Sedangkan, indeks integritas untuk pemerintah Kabupaten Karangasem mencapai 78,38 poin.

Tabel 2.109
Indeks Integritas Nasional Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	77,97	Terjaga
2	Pemerintah Kabupaten Buleleng	79,14	Terjaga
3	Pemerintah Kabupaten Jembrana	70,55	Rentan
4	Pemerintah Kabupaten Klungkung	74,47	Waspada
5	Pemerintah Kabupaten Gianyar	79,87	Terjaga
6	Pemerintah Kabupaten Karangasem	78,38	Terjaga
7	Pemerintah Kabupaten Bangli	79,04	Terjaga
8	Pemerintah Kabupaten Badung	75,06	Waspada
9	Pemerintah Kabupaten Tabanan	77,39	Waspada
10	Pemerintah Kota Denpasar	79,02	Terjaga

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda). Capaian persentase penegakan perda di Kabupaten Karangasem sudah mencapai 100% setiap tahun.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Provinsi Bali sebanyak 7 Kabupaten dan 1 Kota telah memperoleh Sertifikat kabupaten/kota Peduli HAM, hal ini menjadi wujud nyata komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang peduli bahwa penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Indeks Demokrasi Indonesia

Bali menjadi provinsi dengan skor IDI yang tertinggi di Indonesia pada tahun lalu, yaitu sebesar 85,13 poin. Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta dengan skor indeks demokrasi sebesar 84,57 poin.

Tabel 2.110
Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek Indeks Demokrasi (Metode Baru)	2023	2022	2021
Kebebasan	85,23	85,78	84,62
Kesetaraan	85,75	83,9	77,25
Kapasitas Lembaga Demokrasi	84,28	79,83	63,92
Skor Indeks Demokrasi	85,13	83,21	75,35

Sumber: BPS, 2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan

Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Pengukuran ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan berbasis fakta (event-based), yaitu berdasarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun, dan diberi skor oleh panel ahli. Tiga Dimensi Utama yang Dinilai:

1. Kebebasan (Freedom): Mencakup kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat.
   Bali mencatat nilai tinggi (85,23) yang menunjukkan ruang partisipasi publik dan ekspresi di media tergolong sangat baik.
2. Kesetaraan (Equality): Menggambarkan sejauh mana hak warga negara dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi.
   Skor Bali (85,75) tertinggi di antara semua aspek, menunjukkan komitmen tinggi terhadap nondiskriminasi gender, politik, dan ekonomi.
3. Kapasitas Lembaga Demokrasi (Institutional Capacity): Menilai kinerja DPRD, penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas kepala daerah, dan peran Bawaslu.
   Bali mengalami peningkatan signifikan dari 63,92 (2021) menjadi 84,28 (2023), mencerminkan reformasi institusional dan partisipasi politik yang meningkat.

4. Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari- hari. Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada kuesioner yang mensurvei penduduk tentang keamanan di sekitar mereka. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya. Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor rasa

aman. Skor ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal mengidentifikasi masalah keamanan dan membuat tindakan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya.

Berdasarkan laporan Polres Karangasem, tingkat kriminalitas di wilayah ini mengalami fluktuasi selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 158 kasus kriminalitas, meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan 126 kasus pada tahun 2022. Namun, hingga pertengahan 2024, terjadi sedikit penurunan dengan total 155 kasus yang berhasil ditangani, menunjukkan tren pengendalian yang cukup stabil. Jenis kejahatan yang paling dominan adalah kasus narkotika, pencurian, dan penganiayaan, yang menjadi perhatian utama aparat penegak hukum (Sumber: Tribrata News Polres Karangasem, 2023–2024)【source: Tribrata News】.

Dalam aspek penanganan narkoba, Polres Karangasem mencatat 21 kasus di tahun 2023, yang naik menjadi 25 kasus pada 2024, menandai lonjakan kembali dalam peredaran gelap narkotika di wilayah ini. Strategi yang digunakan oleh aparat adalah dengan memperkuat patroli di kawasan rawan serta mengimplementasikan metode pengamanan "sodok dan lompat kodok" yang difokuskan pada pencegahan dini. Selain itu, peningkatan Anev Kamtibmas (Analisis dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menunjukkan efektivitas strategi dalam menurunkan kriminalitas umum sebesar 33% dalam beberapa minggu awal tahun 2025. Namun, laporan juga menyoroti peningkatan pada kasus bunuh diri, pencurian, dan penganiayaan, yang masih membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor (Sumber: Tribratanews.bali.polri.go.id, 2023–2025).

Salah satu peristiwa penting dalam konteks konflik sosial di Karangasem adalah kasus sengketa tanah dan pembangunan resort mewah di wilayah Desa Adat Bugbug. Konflik ini sempat berujung pada aksi anarkis berupa pembakaran dan perusakan properti yang menimbulkan keresahan sosial. Dalam penanganannya, Polres Karangasem menetapkan 16 orang tersangka, menunjukkan respons tegas terhadap konflik adat yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di tingkat lokal. Kasus ini menekankan pentingnya mediasi

berbasis budaya dan penguatan kelembagaan desa adat dalam penyelesaian konflik (Sumber: Bali Express, 2023).

Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Karangasem, informasi spesifik mengenai angka kriminalitas per jenis kejahatan belum terpublikasi secara rinci dalam versi daring. Namun, publikasi Statistik Daerah Kabupaten Karangasem 2023 dan Statistik Kriminal Nasional mencantumkan gambaran umum tentang kondisi ketertiban, keamanan, serta data sosial terkait peran lembaga penegak hukum dan layanan perlindungan masyarakat. Salah satu indikator yang diacu adalah jumlah personel Polri per 100.000 penduduk, serta data partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan berbasis komunitas (Sumber: BPS Karangasem, Statistik Daerah 2023).

Dari sisi lalu lintas, Polres Karangasem melaporkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) mengalami penurunan sebesar 14% dalam beberapa bulan terakhir di awal 2025, yang dikaitkan dengan intensifikasi patroli dan kampanye keselamatan berkendara yang dilakukan secara masif di sekolah dan komunitas.

5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, Trantibum merupakan salah satu sub urusan pemerintahan yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kinerja penyelenggaraan urusan tersebut harus senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

a. Fasilitas/Infrastruktur

Daya saing fasilitas jalan Kabupaten Karangasem memiliki panjang jalan terpanjang di Provinsi Bali tahun 2024 yaitu 1.421,40 Km dengan kewenangan jalan kabupaten mencapai 1.201,59 Km.

Tabel 2.111
Panjang Jalan (km) Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Bali Keadaan Akhir Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Tingkat Kewenangan Pemerintahan			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	
Jembrana	2022	72,63	30,52	1.075,93	1.179,08
	2023	72,91	29,37	1.003,74	1.106,02
	2024	72,91	29,37	1.003,74	1.106,02
Tabanan	2022	65,73	135,68	863,22	1.064,63
	2023	75,34	155,65	872,00	1.102,99
	2024	75,34	155,65	872,00	1.102,99
Badung	2022	63,61	60,58	683,74	807,93
	2023	54,12	63,64	809,59	927,35
	2024	54,12	63,64	809,59	927,35
Gianyar	2022	64,33	86,54	515,24	666,11
	2023	66,56	88,85	556,98	712,39
	2024	66,56	88,85	560,95	716,36
Klungkung	2022	37,71	9,34	453,8	500,85
	2023	30,82	12,69	464,96	508,47
	2024	30,82	12,69	464,96	508,47
Bangli	2022	21,19	125,45	905,81	1.052,45
	2023	12,40	167,37	999,00	1.178,77
	2024	12,40	167,37	999,00	1.178,77
Karangasem	2022	97,97	146,33	1.202,54	1.446,84
	2023	91,24	128,56	1.201,59	1.421,39
	2024	91,24	128,56	1.201,60	1.421,40
Buleleng	2022	156,34	104,27	1.136,60	1.397,21
	2023	146,61	106,28	949,82	1.202,71
	2024	146,61	106,28	949,82	1.202,71
Denpasar	2022	49,88	44,63	486,08	580,59
	2023	39,64	52,94	450,13	542,71
	2024	39,64	52,94	450,13	542,71
Bali	2021	629,39	743,34	7.322,97	8.695,70
	2022	589,64	805,35	7.307,81	8.702,80
	2023	589,64	805,35	7.311,79	8.706,78

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

b. Iklim Investasi

Iklim investasi di Karangasem juga menentukan bagaimana perekonomian dapat berlangsung. Pada tahun 2020 hingga 2024, penanaman modal di Karangasem masih didominasi oleh modal asing, walaupun mengalami sedikit penurunan. Namun, pada tahun 2021, investasi asing terus mengalami tren menurun yang tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan pariwisata Bali. Di sisi lain, penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri mendominasi iklim investasi di Kabupaten Karangasem.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) di Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebesar 104.159 juta rupiah, menempati urutan ke-tujuh. Investasi paling tinggi adalah di Kabupaten Badung, disusul Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Gianyar.

Tabel 2.112
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) di Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	142.332	173. 492	201.730	486.632	186.441
2	Tabanan	758.200	1.035.195	194.247	162.769	385.863
3	Badung	3.558.447	2.514.694	3.170.567	2.739.222	4.103.973
4	Gianyar	145.776	871.301	295.323	293.607	804.195
5	Klungkung	42.420	66.996	106.496	20.451	46.214
6	Bangli	23.055	31.854	20.970	67.117	44.323
7	Karangasem	78.045	142.373	161.417	201.212	104.159
8	Buleleng	361.332	552.240	322.338	343.714	1.280.254
9	Denpasar	323.068	967.105	1.529.016	2.636.062	2.199.949
	Jumlah	5.432.675	6.355.249	6.002.103	6.950.785	9.155.371

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Daya saing Penanaman Modal Asing Kabupaten Karangasem tahun 2024 sebesar 227.732 Juta Rupiah menempati urutan ke-enam setelah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.113
Realisasi Penanaman Modal Asing (Juta Rupiah) di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	1.722	55.661	107.299	158.088	72.932
2	Tabanan	94.481	1.066.835	670.349	456.609	660.635
3	Badung	2.783.261	2.315.029	3.238.136	6.587.903	10.117.946
4	Gianyar	234.196	618.811	944.099	2.283.607	2.810.510
5	Klungkung	273.871	123.249	164.481	271.954	147.527
6	Bangli	1.352	4.411	8.597	45.809	51.468
7	Karangasem	120.010	49.639	55.008	283.366	227.732
8	Buleleng	277.252	1.108.616	126.336	254.937	1.828.766
9	Denpasar	436.687	1.256.461	1.136.541	1.623.308	3.027.127
	Jumlah	4.222.832	6.598.711	6.450.848	11.965.581	18.944.643

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

c. Perbankan

Sektor perbankan dan investasi merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di Kabupaten Karangasem. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Karangasem terdiri dari bank milik pemerintah dan swasta (bank umum), bank perkreditan rakyat (BPR), lembaga perkreditan desa (LPD), koperasi, dan sebagainya.

Berdasarkan perkembangan indikator perbankan bank umum, banyaknya kredit dan dana pihak ketiga (DPK) berfluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah penyaluran kredit bank umum di Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan DPK yang harus dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perbankan di Kabupaten Karangasem masih didominasi oleh permintaan kredit dibandingkan penyimpanan uang di bank oleh nasabah.

2. Pariwisata

Kepariwisataan di Kabupaten Karangasem didukung sarana dan prasarana seperti rumah makan/restoran yang jumlahnya bertambah

mencapai 168 buah yang tersebar di semua kecamatan yang sebelumnya adalah 157 buah rumah makan/restoran.

Tabel 2.114
Banyaknya Restoran dan Rumah Makan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	136	158	136	317	-
Tabanan	80	119	92	105	581
Badung	823	728	823	869	7.142
Gianyar	952	1.053	952	1.109	2.972
Klungkung	245	375	245	423	-
Bangli	47	14	47	67	130
Karangasem	146	125	127	157	168
Buleleng	200	548	200	430	215
Denpasar	604	604	604	952	743
Bali	3.233	3.868	3.245	4.429	11.783

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 2.115
Banyaknya Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	–	–	–	5	-
Tabanan	4	4	–	10	-
Badung	154	50	155	50	62
Gianyar	23	15	8	94	352
Klungkung	1	4	–	79	96
Bangli	2	2	–	135	-
Karangasem	2	2	1	–	-
Buleleng	1	4	1	–	-
Denpasar	270	275	251	275	857
Bali	457	356	416	648	1.367

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Tingkat kunjungan hotel di Kabupaten Karangasem tidak menunjukkan adanya trend peningkatan dengan rata-rata lama menginap antara 1 hingga 3 hari dan tingkat hunian mencapai 3,22% hingga 50%.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Pada Tabel 2.114 disajikan capaian indikator kinerja daerah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.116
Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	ASPEK KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	-4,45	-0,56	2,58	3,1	4,33	Bapeda
3	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	39,31	32,96	34,56	37,95	40,23	Bapeda
4	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,318	0,297	0,337	0,283	Bapeda
6	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	2,42	2,32	3,09	2,61	1,63	Bapeda
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	90	84,08	97,32	85,85	85,85	Disdikpora
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,31	6,33	6,67	6,68	6,7	Disdikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
3	Persentase APK SD / MI	Persentase (%)	111,97	110,79	109,36	117,67	110,95	Disdikpora
4	Persentase APK SMP /MTs	Persentase (%)	107,37	109,78	102,71	112,84	107,45	Disdikpora
	Angka Pendidikan yang ditamatkan :							Disdikpora
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	93,76	100	100	100	100	Disdikpora
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	99,72	100	99,99	100	100	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni :							Disdikpora
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99,42	98,97	97	95,7	103,35	Disdikpora
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	83,95	82,53	84,5	77,38	86,54	Disdikpora
	Angka Partisipasi Sekolah :							Disdikpora
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99,32	106,71	99,52	106,83	107,93	Disdikpora
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	96,97	84,81	84,49	84,5	96,91	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah :							Disdikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,1	0,26	0,09	0,14	0,17	Disdikpora
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,34	0,17	0,36	0,44	0,084	Disdikpora
	Angka Kelulusan :							Disdikpora
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Disdikpora
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Disdikpora
	Angka Melanjutkan (AM) :							Disdikpora
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase (%)	95,6	93,56	97,66	97,38	93,5	Disdikpora
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persentase (%)	77,8			76,2	84,25	Disdikpora
	Fasilitas Pendidikan :							Disdikpora
17	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	33,22	30,28	99,52	49,27	49,44	Disdikpora
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	66	67,71	99,42	70,89	66,55	Disdikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	0,07	62,89	98,55	685,96	579,5	Disdikpora
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	14,63	65,34	62,53	3,35	6,18	Disdikpora
22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	97,7	97,7	97,06	99,74	94,62	Disdikpora
23	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	100	100	99,8	100	100	Disdikpora
24	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	89,05	89,05	97,32	96,85	96,85	Disdikpora
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 :							Disdikpora
25	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (PAUD)	Persentase (%)	88,25	88,25	76,38	24,92	20,96	Disdikpora
26	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (SD/MI)	Persentase (%)	95,89	97,03	97,44	95,96	98,97	Disdikpora
27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (SMP/MTs)	Persentase (%)	97,28	97,28	97,64	99,64	99,81	Disdikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
28	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persentase (%)	0,73	0,091	0,72	0,76	24,5	Disdikpora
29	Persentase wirausaha muda	Persentase (%)	0,04	0,035	0,3	0,07	0,04	Disdikpora
30	Cakupan pembinaan olahraga	Persentase (%)	50	45	31	50	50	Disdikpora
31	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	50	40	50	50	50	Disdikpora
32	Cakupan pembinaan atlet muda	Persentase (%)	0,73	0,73	0,72	0,35	0,025	Disdikpora
33	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	3	5	10	162	21	Disdikpora
34	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	3	5	10	18		Disdikpora
	KESEHATAN							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	8,35	7,4	6,2	10,3	11,74	Diskes
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	8,92	8,6	7,5	10,8	12,64	Diskes
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5,47	5	4,9	8,95	9,5	Diskes
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 KH	115,12	148,1	159,08	33,8	72,27	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	2,2	2,82	2,91	2,75	3,03	Diskes
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk :							
6	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	33	0,03	0,023	0,023	0,022	Diskes
7	Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	0	0,04	0,452	0,439	0,433	Diskes
8	Rasio pustu per satuan penduduk	Rasio	0,4	0,15	0,12	0,12	0,12	Diskes
9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,01	0,007	0,006	0,006	0,007	Diskes
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,1	0,31	0,45	0,39	0,40	Diskes
	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk :							
11	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1,5	1,5	0,68	1,03	1,29	Diskes
12	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	0,75	0,87	0,80	0,86	1,07	Diskes
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	65,52	57,7	62,7	83,6	86,5	Diskes
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	104,86	104,1	95,3	89,45	84,0	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
15	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase (%)	100	96,2	100	94,87	100	Diskes
16	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes
17	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	23,6	23	30	60,7	50,2	Diskes
18	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	86,5	83,3	87,17	82,4	89	Diskes
19	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes
20	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	219,6	43,7	160,88	125,01	197,02	Diskes
21	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes
22	Tingkat kematian akibat malaria	Persentase (%)	0	0	0	0	0	Diskes
23	Annual Parasite Incidence (API)	/1.000 penduduk	0	0,002	0,006	0,005	0,004	Diskes
24	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	5,18	4,37	9,4	51	47,12	Diskes
25	Persentase kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	N/A	100	70	97,44	100	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
28	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	113,33	112,58	97,7	103,58	105	Diskes
29	Cakupan kunjungan puskesmas	Persentase (%)	59,72	48,72	44,61	29,73	30,5	Diskes
31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	95,43	89,7	84,31	84,1	81,4	Diskes
32	Cakupan pelayanan nifas	Persentase (%)	99,21	101,3	91,1	85,78	79,9	Diskes
33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	43,81	44,02	45,15	56,32	80	Diskes
34	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	90,81	93,62	95,7	94,97	101	Diskes
36	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	73,26	90,63	100	100	100	Diskes
38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes
39	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan :							
40	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persentase (%)	95,43	89,72	84,31	100	79,8	Diskes
41	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Persentase (%)	104,86	104,11	95,32	100	86,14	Diskes
42	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase (%)	106,14	107,28	97,69	100	89,33	Diskes
43	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persentase (%)	90,81	93,62	75,96	100	99,08	Diskes
44	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	45,15	92,28	98,9	100	95,56	Diskes
45	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	37,8	83,66	85,21	100	93,34	Diskes
46	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	52,82	65,8	82,22	100	97,76	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
47	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	51,13	59,91	54,42	100	95,98	Diskes
48	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	86,18	91,35	108,66	100	96,19	Diskes
49	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase (%)	83,75	90,84	92,11	95,3	95,56	Diskes
50	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase (%)	39,71	31,24	35,57	100	50,89	Diskes
51	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase (%)	72,17	77,41	71,48	100	73,58	Diskes
52	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persentase (%)	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	Diskes
53	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	DPUPR & PERKIM							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase (%)	55,67	58,58	62,27	67,42	54,22	DPUPRKIM
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	244	433	425	425	371	DPUPRKIM
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persentase (%)	55,67	58,58	62,27	67,42	54,22	DPUPRKIM
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persentase (%)	0,8	1,41	1,43	1,4	0,72	DPUPRKIM
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase (%)	89,96	90,08	90,11	90,08	90,11	DPUPRKIM
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	71,9	78,39	83,15	78,39	92,37	DPUPRKIM
7	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	6,92	5,16	6,79	69,23	6,99	DPUPRKIM
8	Persentase penduduk berakses air minum	Persentase (%)	92,67	96,52	97,44	96,52	97,9	DPUPRKIM
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum	Persentase (%)	63,28	67,51	67,6	67,51	97,9	DPUPRKIM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	layak, perkotaan dan perdesaan							
10	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Persentase (%)	0,05	0,05	0,24	0,05	0	DPUPRKIM
11	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persentase (%)	0,29	0	0	0	0	DPUPRKIM
12	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase (%)	72,14	69,23	76,73	69,23	79,48	DPUPRKIM
13	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	Persentase (%)	63,28	67,51	97,44	67,51	97,9	DPUPRKIM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	tangga di seluruh kabupaten/kota							
14	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase (%)	89,96	90,08	90,11	90,08	90,11	DPUPRKIM
15	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	96,49	100	96,49	100	DPUPRKIM
16	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase (%)	70,87	77,7	78,43	85,36		DPUPRKIM
17	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	60	66	75	83,33	83,36	DPUPRKIM
18	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase (%)	85	100	100	100	98.72	DPUPRKIM
	Penataan Ruang							
19	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPUPRKIM
20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	Rasio	0,520	0.750	0.750	0,75	0.750	DPUPRKIM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Luas Wilayah ber HPL/HGB							
21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persentase (%)	11.966	11.96	20.15	20,15	20.15	DPUPRKIM
22	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	0.016	0.017	100%			DPUPRKIM
23	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPRKIM
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,429111	0.618	0.600	0,600	0.600	DPUPRKIM
25	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase (%)	61	62	65	65	73,905	DPUPRKIM
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
26	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi	Persentase (%)	n/a	0	100	100	100	DPUPRKIM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	korban bencana Kabupaten/Kota							
27	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persentase (%)	n/a	0	100	100	100	DPUPRKIM
28	Penataan kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persentase (%)	n/a	0	100	100	100	DPUPRKIM
29	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	8279	176	435	393	792	DPUPRKIM
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	unit/paket		0	35	n/a	54,29	DPUPRKIM
31	Rumah layak huni yang tertangani	UNIT	8279	176	435	393	792	DPUPRKIM
32	Lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani	Paket	n/a	0	0	3	7	DPUPRKIM
	BPBD							
1	Persentase Pelayanan Informasi Layanan Bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	BPBD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%)	36,79	100	100	100	91	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%)	67,36	100	100	100	100	BPBD
	PEMADAM KEBAKARAN							
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	82,31	82,4	82,5	82,7	84,1	Disdamkartan
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	28,12	32,26	64,7	54,8	75	Disdamkartan
	SATPOL PP							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	0,66	0,69	0,70	0,71	0,72	Satpolpp
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	99	100	100	100	100	Satpolpp
3	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	90,37	100	100	100	100	Satpolpp

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	DINSOS,DP3A DAN KB							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	N/A	0,68	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	N/A	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	N/A	0	3	91	100	Dinsos, P3A, PPKB
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	N/A	100	73	35	0	Dinsos, P3A, PPKB
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	N/A	10	20	20	20	Dinsos, P3A, PPKB
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	3,157	0,147	46,3	47,19	49,79	Dinsos, P3A, PPKB
7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	6,818	6,67	6,67	6,67	6,67	Dinsos, P3A, PPKB
8	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	29,27	42,02	41,24	41,24	47,19	Dinsos, P3A, PPKB
9	Rasio KDRT	Rasio	2	1	1	1	0,0079	Dinsos, P3A, PPKB
10	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	0,67	32,52	85,39	86,01	80,11	Dinsos, P3A, PPKB
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	dan PPT/PKT di Rumah Sakit							
13	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
14	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
16	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	99,73% : 94,14 %	99,50% : 94,16%	99.93%:94%	98,85	100%;96%	Dinsos, P3A, PPKB
18	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	79,61% : 90,16%	79,50% : 90,18%	81% : 91 %	84,2	83%:93%	Dinsos, P3A, PPKB
19	Rasio melek huruf perempuan terhadap	Rasio	79,16% : 90,75%	81,25% : 92,30%	87% : 98%	81,25% : 92,30%	91% : 100 %	Dinsos, P3A, PPKB
	laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		54,66	55,66	56,66	55,66	33,83	Dinsos, P3A, PPKB
20	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persentase (%)	0.022	0,037	0,54	0,193	0,22	Dinsos, P3A, PPKB
21	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Persentase (%)	5,96	0,009	5,1	'0,0195	0,0157	Dinsos, P3A, PPKB
22	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /Kota	Persentase (%)	4,67	5,809	8,37	0,00245	0,0079	Dinsos, P3A, PPKB
23	Rasio Kekerasan terhadap perempuan,termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase (%)	2,3	2,18	1,94	2,03	2,31	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
24	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	85,65	85,65	85,65	64,6	85,75	Dinsos, P3A, PPKB
25	Ratio Akseptor KB	Rasio	85,65	85,65	85,65	65,9	60	Dinsos, P3A, PPKB
26	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	38,59	20	18	17	30	Dinsos, P3A, PPKB
27	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15– 19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persentase (%)	20,8	20,8	13,8	6,9	6,9	Dinsos, P3A, PPKB
28	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	44,11	50	86,88	22,1	60	Dinsos, P3A, PPKB
29	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	85,65	86	86	65,6	69	Dinsos, P3A, PPKB
30	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	70,5	73	76	2,14	80	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
31	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	67,8	70	53	14	85	Dinsos, P3A, PPKB
32	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	58,9	65	14	67	87	Dinsos, P3A, PPKB
33	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	80	85	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB
34	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	48,5	50	75	52	77	Dinsos, P3A, PPKB
35	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	64	51	69	54	35	Dinsos, P3A, PPKB
36	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	40,5	41,2	42	31,6	70	Dinsos, P3A, PPKB
37	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri							
38	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	80	90	85	85	90	Dinsos, P3A, PPKB
39	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	85	90	90	90	95	Dinsos, P3A, PPKB
40	Persentase Faskes dan jejaringnya diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase (%)	60	75	80	85	90	Dinsos, P3A, PPKB
41	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persentase (%)	40,5	41,5	42	42	42	Dinsos, P3A, PPKB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
42	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	22,9	23	23	22,1	22	Dinsos, P3A, PPKB
43	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	Dinsos, P3A, PPKB
44	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	0,78			0,93		Dinsos, P3A, PPKB
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
	KETENAGAKERJAAN							
1	Angka Partisipasi angkatan kerja	Jumlah	80,75	82,01	86,01	86,01	86,01	Disnaker
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	97,57	97,28	97,82	98,32	98,21	Disnaker
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	Disnaker
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Disnaker

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Perjanjian Bersama (PB)							
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase (%)	81	89,7	90,3	90,8	90,9	Disnaker
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persentase (%)	71,2	75,4	77,3	94,94	93,45	Disnaker
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	0	Disnaker
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase (%)	46	47	49	52	55	Disnaker
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	4,73	4,77	4,79	5	5,2	Disnaker
10	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase (%)	53	n/a	n/a	n/a	n/a	Disnaker
11	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase (%)	70	80	85	95	95	Disnaker
	KETAHANAN PANGAN							
1	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Distan PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
2	Energi (kkal)	kkal	2137,59	2215,8	2080,9	2716	2716	Distan PP
3	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	skor	74,5	98,86	81,9	76,8	76,8	Distan PP
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Distan PP
	PERTANIAN							
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persentase (%)	0,56	4,9	-1,84	2	2	Distan PP
6	Cakupan bina kelompok petani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Distan PP
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
7	Produksi perikanan	Jumlah	26224,6	26463,75	27126,3	28195	28195	Distan PP
8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	20	20	18	25	25	Distan PP
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	tingkat daerah provinsi							
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	50	50	50	50	68,4	DLH
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	91,51	91,51	92,67	92,67	91,14	DLH
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,56	47,46	38,62	38,62	39,9	DLH
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DLH
8	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	0	0	0	0	DLH
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	0	0	17	17	19	DLH
10	Terlaksananya pemberian	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	penghargaan lingkungan hidup							
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DLH
12	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase (%)	25,18	27	29	31	33	DLH
13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persentase (%)	25,17	27	29	31	33	DLH
14	Persentase cakupan area pelayanan	Persentase (%)	12	3,63	3,63	3,63	3,63	DLH
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	100	71	71	71	71	DLH
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persentase (%)	N/A	2	2	2	2	DLH
17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DLH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	terhadap peraturan perundang- undangan							
	DISDUKCAPIL							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	96,88	98,86	97,82	97	98,89	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	90,56	99,81	99,86	99,85	98,15	Disdukcapil
3	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Disdukcapil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	96,88	98,86	100	100	100	Disdukcapil
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	49,5	100	100	100	100	Disdukcapil
7	Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Rasio	18,8	21,36	41,88	42,2	41,29	Disdukcapil
8	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Disdukcapil
9	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persentase (%)	44,89	28,13	28,21	38,24	12,2	Disdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DPMD
2	Cakupan fasilitasi kerjasama desa dan penyediaan sarana prasarana desa	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DPMD
3	Cakupan penataan desa dan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DPMD
4	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DPMD
5	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase (%)	74,67	66,67	52	42,67	29,33	DPMD
	PERHUBUNGAN							
1	Angkutan Darat	Jumlah	6.785	6.452	6.003	5.033	4.012	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
2	Angkutan laut	Jumlah	28	26	25	25	25	Dinas Perhubungan
3	Rasio ijin trayek	Rasio	58	0,000578	0,00033287	0,000282908	0,000285194	Dinas Perhubungan
4	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	2.214	1.929	1.443	1016	509	Dinas Perhubungan
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termina l Bis							Dinas Perhubungan
5	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
6	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
7	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	27	23,05	27,48	27,48	28,32	Dinas Perhubungan
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	11,84	0,74	1,42	n/a	1,42	Dinas Perhubungan
10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,01	0,0084	0,008399282	00.01	0,007	Dinas Perhubungan
	Pelabuhan							Dinas Perhubungan
12	Jumlah Orang	Jumlah	776.167	318.138	1.310.885	1,981,005	2.256.987	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Jumlah Barang	Jumlah	1.866.142	577.839	897.142	971,166	1.647.780	Dinas Perhubungan
	Terminal							Dinas Perhubungan
13	Jumlah Orang	Jumlah	189.529	195.110	119.723	85,818	81.411	Dinas Perhubungan
14	Jumlah Barang	Jumlah	16.533	7.954	9.866	13.948	10.812	Dinas Perhubungan
15	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,60<V/C<0,70	0,60<V/C<0,70	0,60<V/C<0,70	0,60<V/C<0,70	0,47	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	100	9,75	9,75	9,75	9,75	Diskominfo
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	60	70	90	90,88	90,88	Diskominfo
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase (%)	75	80	85	77,56	77,56	Diskominfo
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persentase (%)	60	70	90	57,09	57,09	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	50	60	75	71,9	71,9	Diskominfo
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Diskominfo
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase (%)	9	10	13,95	18,6	20,45	Diskominfo
8	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	27	50	72	64	60,17	Diskominfo
9	Buku "Karangasem Membangun"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	Persentase (%)	0	100	41,86	100	61,76	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	menyusun perencanaan pembangunan daerah							
11	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	0	100	41,86	100	61,76	Diskominfo
	PERSANDIAN							
12	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	0	0	0	38,2	32	Diskominfo
13	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	0	0	43	95,3	100	Diskominfo
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH & PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN							
1	Persentase koperasi aktif	Persentase (%)	67	74,18	68	68,53	68,53	Diskoperindag
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase (%)	90,76	55	99,86	99,9	37,17	Diskoperindag
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase (%)	4,5	3,6	4,40	10,29	6	Diskoperindag

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
4	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase (%)	23,26	0,8	0,69	0,28	0,24	Diskoperindag
	PERDAGANGAN							
5	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai	7.620.088.730	166.923.448.243,76	37.110.489.266,9	35.466.440.764	65.812.066.372,52	Diskopperindag
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persentase (%)	0	5	10	15	0	Diskopperindag
7	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase (%)	0	0	45,3	51,56	14,06	Diskopperindag
8	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase (%)	44	75	97,39	64,56	45,50	Diskopperindag
9	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase (%)	3,65	0,048	38,16	17,98	27	Diskopperindag
	PERINDUSTRIAN							
10	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase (%)	20	11,19	30.146	4,86	17,36	Diskopperindag

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
11	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase (%)	n/a	-0,15	14,75	0,12	18,42	Diskopperindag
12	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Persentase (%)	n/a	0	0	0,0031	0	Diskopperindag
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	n/a	0	3,18	0,02	1,48	Diskopperindag
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Diskopperindag

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Diskopperindag
16	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase (%)	n/a	0	55	55	55	Diskopperindag
	PENANAMAN MODAL							
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	203	233	153	539	1334	DPMPTSP
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	198.584.220.000	192.011.049.006	216.424.761.683	484.578.380.382	573.590.700.000	DPMPTSP
12.03	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3,74	1,79	5,57	1,9	0,69	DPMPTSP
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persentase (%)	-12,1	3,31	12,71	123,9	18,37	DPMPTSP
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	22.696	741	6.344	4000	5.570	Dispustaka
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	14.471	14.889	15.098	15307	15.934	Dispustaka
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	17.24,8	17.24,8	17.24,8	17.06,5	17.06,5	Dispustaka
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jumlah	109	125	137	151	167	Dispustaka
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	11.034	11.222	11.316	11410	10.900	Dispustaka
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	4	4	4	3	3	Dispustaka
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase (%)	n/a	45	65	65	60,49	Dispustaka
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	57	58	58,3	58	Dispustaka
	KEARSIPAN							
1	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah	15	35	65	45	45	Dispustaka
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	12,71	38,13	50,85	50,85	50,58	Dispustaka

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase (%)	66	75	75	75	75	Dispustaka
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah	0	50	66	66	100	Dispustaka
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	PARIWISATA							
1	Kunjungan wisatawan	Persentase (%)	114	114	114	1128,698535	114	Disbudpar
2	Wisatawan Nusantara	Persentase (%)	184	184	184	72,42707071	184	Disbudpar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
3	Wisatawan mancanegara	Persentase (%)	44	44	44	2184,97	44	Disbudpar
4	Lama Tinggal Wisatawan	Jumlah	1	1	1	1	1	Disbudpar
5	Wisatawan Nusantara	Jumlah	1	1	1	1	1	Disbudpar
6	Wisatawan mancanegara	Jumlah	n/a	n/a	n/a	1	n/a	Disbudpar
7	PAD sektor pariwisata	Persentase (%)	1,47	1,47	1,47	0,22	1,47	Disbudpar
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persentase (%)	-82	-82	-82	70	-82	Disbudpar
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	-3	-3	-3	70	-3	Disbudpar
10	Tingkat hunian akomodasi	Persentase (%)	8	8	8	50	8	Disbudpar
	KEBUDAYAAN							
11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	3	3	3	Disbudpar
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar	Persentase (%)	20,53	20,53	20,53	17,35	20,53	Disbudpar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Budaya yang dilestarikan							
13	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	57	57	57	68	57	Disbudpar
14	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1	1	1	1	1	Disbudpar
	PENUNJANG URUSAN							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bapeda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bapeda
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	DPUPRKIM
	Penelitian dan Pengembangan							
7	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persentase (%)	20,73	30`	35	40	55	BRIDA
8	Persentase hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	BRIDA
	BPKAD							
1	Opini BPK	Status	WTP			WTP	WTP	BPKAD
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	WTP	9,31	9,31	9,31	WTP	BPKAD
3	Persentase SILPA	Persentase (%)	N/A	9,31	9,31	9,31	9,32	BPKAD
4	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	N/A	35,73	35,73	35,73	9,32	BPKAD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20,85	20,85	20,85	31,38	BPKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	WTP	WTP	WTP	19,85	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
8	Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Operasi	Persentase (%)	60	56	56	56	57	BPKAD
9	Persentase Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Operasi	Persentase (%)	34	41	41	41	37	BPKAD
10	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Operasi	Persentase (%)	17	10	10	10	19	BPKAD
11	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp. 000.000,00	11.558,24	30.110.56	30.110.56	30.110.56	39.170,19	BPKAD
12	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
13	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase (%)	20	10,96	10,96	10,96	10,41	BPKAD
14	Rasio PAD	Persentase (%)	1,38	23,22	23,22	23,22	23,49	BPKAD
15	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persentase (%)	72	74,8	74,8	74,8	68,09	BPKAD
16	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
17	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	0	-0,57	-0,57	-0,57	5,58	BPKAD
18	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	0	64,04	64,04	64,04	24,3	BPKAD
19	Ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKAD
20	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase (%)	7	9,31	9,31	9,31	9,32	BPKAD
21	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	BPKAD
22	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	BPKAD
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam/hari	2 Jam/hari	2 Jam/hari	3 Jam/hari	4 Jam/hari	5 Jam/hari	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase (%)	5	7,93	1,07	2,18	21,08	BKPSDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase (%)	85,78	83,89	70,30	67,68	65,43	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	29	23	27	28	24	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	1779	517	1370	1290	1203	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	4324	4144	4668	4326	5133	BKPSDM
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	103, 25	447,52	128,59	137,92	137,72	BKPSDM
8	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	6, 90	7,62	19,48	19,83	18,20	BKPSDM
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru	Persentase (%)	100	100	35,80	40,18	41,03	BKPSDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	dan tenaga kesehatan)							
	ITDA							
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persentase (%)	89	94,45	94,45	94,45	94,45	Itda
2	Jumlah temuan BPK	Jumlah	9	14	14	14	14	Itda
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Status	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Itda
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Status	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Itda
	SETDA							
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	N/A	-	-	-	-	Setda
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase (%)	N/A	0	0	0	0	Setda
3	Persentase jumlah pengadaan uang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase (%)	41	0,36	0,36	0,36	0,36	Setda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase (%)	53	7,923	7,923	7,923	7,923	Setda
	SEKERTARIAT DEWAN							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
	Dokumen Anggaran Setwan DPRD							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,35	67,36	68,28	70,09	70,09	Bapeda
	Angka Beban Tanggungan (Dependency Raïio) %		52,46	52,05	48,93	49,01	49,01	Bapeda

2.5 BUMD Kabupaten Karangasem

A. Perumda Tirta Tohlangkir

Perumda Tirta Tohlangkir adalah perusahaan umum daerah Kabupaten Karangasem memberikan pelayanan pemenuhan air minum di wilayah Kabupaten Karangasem. Berdiri dari tahun 1976 sampai tahun 2018, Perumda Tirta Tohlangkir dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar air minum dengan memenuhi syarat kesehatan, secara adil, merata dan terus menerus dan kini telah melayani 34.318 sambungan dengan cakupan rata-rata 46,07% (https://tirtatohlangkir.karangasemkab.go.id).

Sebagai penyedia layanan dasar di bidang air bersih, PDAM Karangasem telah menunjukkan peningkatan kinerja signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut dibuktikan melalui perolehan penghargaan Top BUMD 2019 yang diserahkan pada kegiatan penganugerahan tingkat nasional di Jakarta pada akhir April 2019. Penghargaan ini menandai penghargaan ketiga yang diterima sejak awal tahun 2019, dan sekaligus mencerminkan peningkatan tata kelola pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Keberhasilan memperoleh penghargaan didasarkan pada indikator kinerja yang mencakup efektivitas pelayanan kepada pelanggan, kemampuan menekan jumlah keluhan (komplain), pengendalian tingkat kebocoran air, serta pendistribusian air bersih yang merata. Upaya-upaya tersebut secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan secara objektif dan terstruktur oleh lembaga independen dengan melibatkan unsur kementerian, lembaga pengawas, dan mitra swasta. Dalam proses seleksi, sebanyak 1.149 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disaring, dan 200 di antaranya dinyatakan lolos ke tahap final. Selanjutnya, 162 BUMD dipilih untuk menjalani proses evaluasi mendalam berdasarkan kriteria inovasi, kinerja keuangan, tata kelola, dan dampak terhadap layanan publik. Dalam konteks ini, PDAM Karangasem dinilai layak memperoleh apresiasi karena mampu menjaga

kesinambungan pelayanan meskipun berada dalam tantangan geografis dan teknis di daerah.

Pada tahun yang sama, pengakuan tambahan juga diterima dalam bentuk penghargaan nasional lain yang menyoroti kepuasan pelanggan dan reputasi institusi dalam pelayanan air bersih. Semua penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei dan evaluasi yang melibatkan kolaborasi lintas institusi, termasuk Kementerian Perdagangan, lembaga pemerintah terkait, serta organisasi masyarakat sipil.

Lebih jauh, pencapaian ini memperkuat capaian PDAM Karangasem sebelumnya, seperti penghargaan Prestise Indonesia 2018 dan Perpamsi Award 2017, yang diterima dalam kategori pelayanan air bersih pada wilayah dengan jumlah penduduk 200.000–500.000 jiwa. Cakupan pelayanan saat itu mencakup lebih dari 34.000 sambungan rumah, yang menjadi indikator keberhasilan dalam menyediakan layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, penghargaan yang diterima dijadikan sebagai momentum refleksi untuk terus memperbaiki mutu pelayanan air bersih. Fokus diarahkan pada peminimalan keluhan masyarakat, optimalisasi distribusi air secara adil, serta pengurangan tingkat kebocoran melalui peningkatan sistem jaringan dan pengawasan teknis. Meskipun kebocoran teknis tidak dapat dieliminasi sepenuhnya, berbagai langkah korektif terus diupayakan guna memastikan bahwa air bersih dapat digunakan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dasar yang bermartabat.

B. PT. Karangasem Sejahtera (PERSERODA)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Karangasem Sejahtera merupakan salah satu asset Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, Pendidikan, pariwisata dan pertambangan sesuai dengan

kewenangan daerah yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pendirian PT. Karangasem Sejahtera awalnya disahkan berkedudukan di Kabupaten Karangasem sesuai Surat Keputusannya Nomor AHU50162.AH.01.01 tertanggal 14 Oktober tahun 2011. Sesuai akta notaris I Nengah Swadi, SH.MKn Nomor 107 tertanggal 31 Oktober 2023 diadakan perubahan anggaran dasar perusahaan yang antara lain perubahanya adalah sebagai berikut:

1) Maksud dan Tujuan Kegiatan Perusahaan
   Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha di bidang jasa, industri, perdagangan
2) Perubahan Modal Dasar Perseroan
   Perubahan modal dasar perseroan yang dulu sebesar Rp. 50.000.000.- menjadi Rp. 40.000.000.000.- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Daerah Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera, yang di tetapkan di Amlapura tertanggal 8 November tahun 2022. Modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 50.000.000.- menjadi Rp.10.010.000.000.- berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera, yang ditetapkan di Amplapura tertanggal 10 November 2022. Perubahan modal dasar dan disetor membuat komposisi jumlah saham dari pemegang saham Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp. 10.000.000.000.; dan Koperasi Pegawai Negeri Werdhi Guna selaku pemilik sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
3) Menyetujui Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan
   Mengesahkan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 331/HK/2023 tentang Pengangkatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah

Karangasem Sejahtera Periode 2023-2024 dan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 332.HK/2023 tenyang Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera Periode 2023-2025. Direktur Utama atas nama I Wayan Sutama SPT, M.M dan Komisaris I Gustri Bagus Budiadnyana, S.T., M.T.

Secara garis besar Realisasi Kinerja dalam Tahun 2024 dilakukan dengan pemasaran dan penjualan produk ke pegawai ASN maupun Non ASN yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Karangasem dengan masing-masing target penjualan adalah 10kg per orang. Penjualan ke ASN dilakukan dengan mengirimkan surat penawaran Beras PT Karangasem Sejahtera ke seluruh OPD dan Unit Kerja Kabupaten Karangasem yang mulai dilakukan pada Bulan Juli. Kemudian dilakukan perjanjian konsinyasi bekerja sama dengan 3 outlet yaitu Koperasi Werdhi Guna Praja, Cv. Sinar Sari Bumi, dan UD Bala bala Utama agar penjualan menjadi lebih optimal. Produk beras yang tersedia adalah beras kemasan 5kg, 10kg dan 25kg. Tidak hanya beras, Perseroda Karangasem juga menyediakan paket sembako sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kegiatan operasional penjualan mulai dilakukan pada pertengahan bulan juni dengan awal pemasanan 300 paket sembako dari Perumda Tirta Tohlangkir. Tidak hanya ke ASN adapun pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk Beras PT Karangasem Sejahtera adalah dengan ikut serta dalam kegiatan pasar murah ataupun pameran. Berdasarkan target di RKAP pada tahun 2024 adalah Rp 9.978.030.000, pada Tahun 2024 terealisasi Rp 316.749.500.

2.6 Gambaran Keuangan Daerah

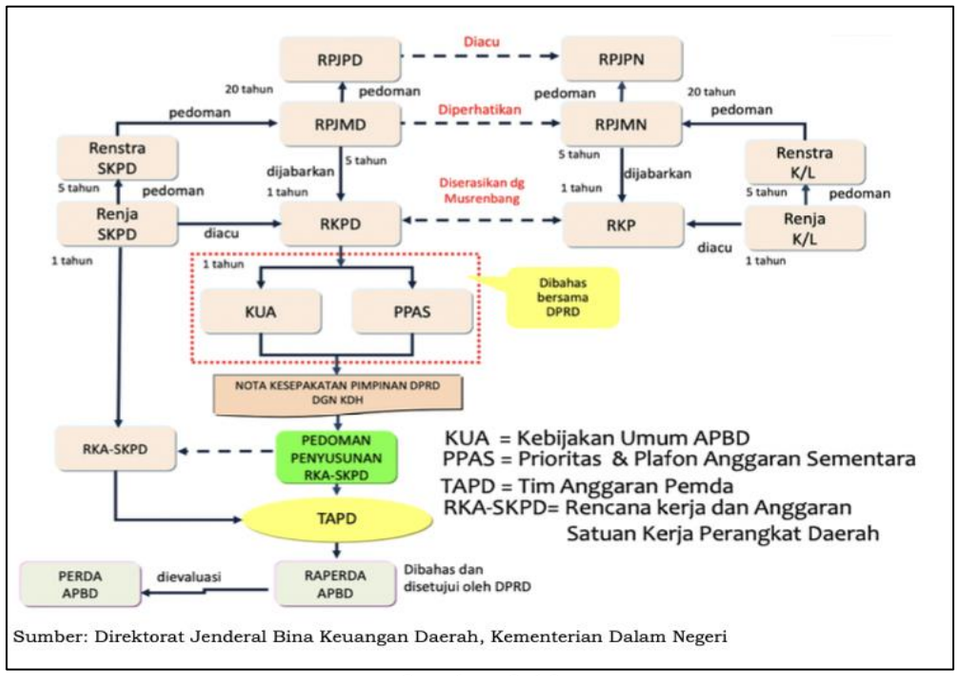
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut : (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER) ; (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus

untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 menyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan/stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.



Gambar 2.10
Keterkaitan Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai Gambar 2.10, siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dan RPJMD untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); mengatur kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat

mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow* program).

Analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karangasem pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang berisikan realisasi capaian kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: (i) Kinerja Masa Lalu, (ii) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan (iii) Kerangka Pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan mencakup analisis sumber dan jenis obyek- obyek pendapatan, bidang-bidang pembangunan yang membutuhkan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan

dalam susunan/struktur APBD serta perkembangan neraca daerah yang meliputi aset daerah, hutang dan ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah diukur dari sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Sedangkan analisis kerangka pendanaan daerah dimaksud untuk memberikan gambaran proyeksi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu jangka waktu tertentu. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan dijelaskan secara terperinci pada bagian berikut.

2.6.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (Tahun 2020-2024)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Karangasem disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Karangasem berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar- Daerah ; dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan (realisasi) sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (ii) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut.

2.6.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024

Kinerja Pelaksanaan APBD menguraikan perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan gambaran Realisasi Belanja Daerah, Rincian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Karangasem tahun 2020 hingga tahun 2024. Khusus tahun 2020 format realisasi struktur APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan tetapi guna memudahkan dalam penyajian dan analisis data maka struktur APBD tahun 2020 disesuaikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.117
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8=average(2020-2024)	9	10=9/3
4.	**PENDAPATAN**	**1.475.561.872.299,19**	**1.555.811.557.854,48**	**1.577.410.438.958,88**	**1.641.545.932.774,25**	**1.822.317.175.253,20**	**1.614.529.395.428,00**	**346.755.302.954,01**	**23,50%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**219.234.680.191,34**	**252.691.747.485,16**	**301.332.231.354,78**	**381.240.518.353,76**	**414.565.206.028,20**	**313.812.876.682,65**	**195.330.525.836,86**	**89,10%**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	66.506.517.157,75	85.667.480.089,00	167.957.909.825,42	232.153.510.496,00	273.646.072.481,10	**165.186.298.009,85**	207.139.555.323,35	311,46%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.350.561.671,00	9.207.856.781,00	10.215.719.116,00	10.472.014.639,00	9.508.777.306,00	**9.750.985.902,60**	158.215.635,00	1,69%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	11.968.117.309,66	10.759.415.258,47	9.321.192.563,91	10.334.895.322,92	17.077.888.186,17	**11.892.301.728,23**	5.109.770.876,51	42,69%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	131.409.484.052,93	147.056.995.356,69	113.837.409.849,45	128.280.097.895,84	114.332.468.054,93	**126.983.291.041,97**	-17.077.015.998,00	-13,00%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.181.370.504.509,03**	**1.218.932.970.246,13**	**1.251.259.824.797,00**	**1.258.329.468.738,00**	**1.406.411.525.953,00**	**1.263.260.858.848,63**	**225.041.021.443,97**	**19,05%**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.039.076.219.402,00**	**1.097.820.639.495,00**	**1.060.714.386.563,00**	**1.065.323.588.563,00**	**1.162.203.551.295,00**	**1.085.027.677.063,60**	**123.127.331.893,00**	**11,85%**
4.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**918.022.076.402,00**	**954.204.838.495,00**	**973.346.781.563,00**	**964.079.478.563,00**	**1.069.138.776.295,00**	**975.758.390.263,60**	**151.116.699.893,00**	**16,46%**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	21.426.698.466,00	27.677.029.795,00			17.398.566.000,00	**22.167.431.420,33**	-4.028.132.466,00	-18,80%
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.155.335.938,00	-	-	-	-	**231.067.187,60**	-1.155.335.938,00	-100,00%
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	713.291.169.000,00	700.663.380.000,00			775.837.883.115,00	**729.930.810.705,00**	62.546.714.115,00	8,77%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Fisik	38.269.064.645,00	82.936.341.064,00			55.595.869.328,00	**58.933.758.345,67**	17.326.804.683,00	45,28%
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	143.879.808.353,00	142.928.087.636,00			220.306.457.852,00	**169.038.117.947,00**	76.426.649.499,00	53,12%
4.2.1.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**-**	**58.326.553.000,00**	**9.523.895.000,00**	**21.860.366.000,00**	-	**17.942.162.800,00**	**-**	
4.2.1.5	**Dana Desa**	**-**	**85.289.248.000,00**	**77.843.710.000,00**	**79.383.744.000,00**	80.146.587.000,00	**64.532.657.800,00**	**80.146.587.000,00**	**100,00%**
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**121.054.143.000,00**	**-**	**-**	**-**	**12.918.188.000,00**	**26.794.466.200,00**	**-108.135.955.000,00**	**-89,33%**
	Dana Penyesuaian	121.054.143.000,00	-	-	-	-	**24.210.828.600,00**	-121.054.143.000,00	-100,00%
	Insentif fiskal					12.918.188.000,00	**12.918.188.000,00**	12.918.188.000,00	100,00%
4.2.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**108.747.242.652,03**	**88.024.000.926,13**	**131.395.646.289,00**	**152.889.792.401,00**	**189.805.671.394,00**	**134.172.470.732,43**	**81.058.428.741,97**	**74,54%**
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	108.747.242.652,03	-	-	-	-	**21.749.448.530,41**	-108.747.242.652,03	-100,00%
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	88.024.000.926,13	131.395.646.289,00	152.889.792.401,00	189.805.671.394,00	**112.423.022.202,03**	189.805.671.394,00	100,00%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
4.2.4	**Bantuan Keuangan**	**33.547.042.455,00**	**33.088.329.825,00**	**59.149.791.945,00**	**40.116.087.774,00**	**54.402.303.264,00**	**44.060.711.052,60**	**20.855.260.809,00**	**62,17%**
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	33.047.042.455,00	33.088.329.825,00	59.149.791.945,00	40.116.087.774,00	54.402.303.264,00	**43.960.711.052,60**	21.355.260.809,00	64,62%
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	500.000.000,00	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-500.000.000,00	-100,00%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**74.956.687.598,82**	**84.186.840.123,19**	**24.818.382.807,10**	**1.975.945.682,49**	**1.340.443.272,00**	**37.455.659.896,72**	**-73.616.244.326,82**	**-98,21%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	74.956.618.979,00	2.673.116.227,38	398.546.349,10	14.949.125,48	1.152.190,00	**15.608.876.574,19**	-74.955.466.789,00	-100,00%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	68.619,82	81.513.723.895,81	24.419.836.458,00	1.960.996.557,01	1.339.291.082,00	**21.846.783.322,53**	1.339.222.462,18	1951655,46%
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.475.561.872.299,19**	**1.555.811.557.854,48**	**1.577.410.438.958,88**	**1.641.545.932.774,25**	**1.822.317.175.253,20**	**1.614.529.395.428,00**	**346.755.302.954,01**	**23,50%**
5.	**BELANJA**	**1.464.635.320.648,62**	**1.547.531.450.798,42**	**1.548.907.880.948,46**	**1.583.642.341.522,99**	**1.816.957.179.582,48**	**1.592.334.834.700,19**	**352.321.858.933,86**	**24,06%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.175.320.214.966,18**	**1.210.433.001.300,69**	**1.199.158.170.051,31**	**1.230.741.037.196,70**	**1.307.733.953.825,72**	**1.224.677.275.468,12**	**132.413.738.859,54**	**11,27%**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
5.1.1	Belanja Pegawai	732.793.781.667,97	744.032.552.582,16	721.933.660.292,55	684.649.124.686,67	775.007.959.015,13	**731.683.415.648,90**	42.214.177.347,16	5,76%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	376.100.346.825,58	442.983.592.013,70	452.812.860.996,76	499.841.936.183,78	460.062.847.288,96	**446.360.316.661,76**	83.962.500.463,38	22,32%
5.1.3	Belanja Bunga	2.785.820,91	-	-	-	-	**557.164,18**	-2.785.820,91	-100,00%
5.1.5	Belanja Hibah	65.381.039.651,72	18.086.736.704,83	18.364.668.762,00	34.393.666.026,25	60.783.147.521,63	**39.401.851.733,29**	-4.597.892.130,09	-7,03%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.042.261.000,00	5.330.120.000,00	6.046.980.000,00	11.856.310.300,00	11.880.000.000,00	**7.231.134.260,00**	10.837.739.000,00	1039,83%
5.2	**BELANJA MODAL**	**81.578.987.875,56**	**143.668.862.436,15**	**139.308.067.685,15**	**119.036.449.121,10**	**250.683.792.931,76**	**146.855.232.009,94**	**169.104.805.056,20**	**207,29%**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	**-**	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.961.049.723,07	48.585.490.957,63	47.219.074.193,50	39.642.592.244,00	69.853.847.154,00	**48.052.410.854,44**	34.892.797.430,93	99,80%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.105.183.205,49	15.612.356.116,52	32.102.107.210,05	36.688.278.976,39	62.040.107.934,76	**33.109.606.688,64**	42.934.924.729,27	224,73%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.465.919.377,00	75.187.840.992,00	59.535.424.292,60	41.479.827.150,71	117.717.493.843,00	**62.877.301.131,06**	97.251.574.466,00	475,19%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.046.835.570,00	4.283.174.370,00	451.461.989,00	1.210.750.750,00	295.994.000,00	**2.657.643.335,80**	-6.750.841.570,00	-95,80%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0	15.000.000,00	776.350.000,00	**197.837.500,00**	0	100,00%
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**19.630.352.099,09**	**2.119.880.311,00**	**-**	**54.000,00**	**-**	**4.350.057.282,02**	**-19.630.352.099,09**	**-100,00%**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	19.630.352.099,09	2.119.880.311,00	0,00	54.000,00	-	**4.350.057.282,02**	-19.630.352.099,09	-100,00%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**188.105.765.707,79**	**191.309.706.750,58**	**210.441.643.212,00**	**233.864.801.205,19**	**258.539.432.825,00**	**216.452.269.940,11**	**70.433.667.117,21**	**37,44%**
5.4.1	Belanja Bagi hasil	11.558.024.859,79	12.055.086.912,23	20.875.653.392,00	30.110.567.205,20	39.170.192.200,00	**22.753.904.913,84**	27.612.167.340,21	238,90%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.547.740.848,00	179.254.619.838,35	189.565.989.820,00	203.754.233.999,99	219.369.240.625,00	**193.698.365.026,27**	42.821.499.777,00	24,25%
	TOTAL BELANJA	**1.464.635.320.648,62**	**1.547.531.450.798,42**	**1.548.907.880.948,46**	**1.583.642.341.522,99**	**1.816.957.179.582,48**	**1.592.334.834.700,19**	**352.321.858.933,86**	**24,06%**
								-	-
	SURPLUS/DEFISIT	**10.926.551.650,57**	**8.280.107.056,06**	**28.502.558.010,42**	**57.903.591.251,26**	**5.359.995.670,72**	**22.194.560.727,81**	**-5.566.555.979,85**	**-50,95%**
6	**PEMBIAYAAN**	**102.981.784.830,31**	**109.908.336.480,88**	**115.687.586.745,82**	**119.801.537.734,75**	**187.095.928.986,01**	**127.095.034.955,55**	**84.114.144.155,70**	**81,68%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**103.047.221.288,53**	**113.908.336.480,88**	**118.187.586.745,82**	**161.301.537.734,75**	**188.595.928.986,01**	**137.008.122.247,20**	**85.548.707.697,48**	**83,02%**
6.1.01	Penggunaan SiLPA/Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103.044.007.652,53	113.908.336.480,88	118.187.586.745,82	144.191.886.744,75	177.705.128.986,01	**131.407.389.322,00**	74.661.121.333,48	72,46%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	17.109.200.000,00	10.890.800.000,00	**5.600.000.000,00**	10.890.800.000,00	100,00%
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-			

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-			
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.213.636,00	-	-	450.990,00	-	**732.925,20**	-3.213.636,00	-100,00%
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-			
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-			
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**65.436.458,22**	**4.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**41.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**9.913.087.291,64**	**1.434.563.541,78**	**2192,30 %**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	28.000.000.000,00	-	**5.600.000.000,00**	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	13.500.000.000,00	1.500.000.000,00	**4.300.000.000,00**	1.500.000.000,00	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	65.436.458,22	-	-	-	-	**13.087.291,64**	-65.436.458,22	-100,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah								
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah								
								-	-

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata realisasi Pendapatan	% Laju Pertumbuhan (2020-2024)	
	PEMBIAYAAN NETTO	**102.981.784.830,31**	**109.908.336.480,88**	**115.687.586.745,82**	**119.801.537.734,75**	**187.095.928.986,01**	**127.095.034.955,55**	**84.114.144.155,70**	**81,68%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**113.908.336.480,88**	**118.188.443.536,94**	**144.190.144.756,24**	**177.705.128.986,01**	**192.455.924.656,73**	**149.289.595.683,36**	**78.547.588.175,85**	**68,96%**

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-20

Tabel 2.118
Rata-rata Pertumbuhan (%) Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Derah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata (2020-2024)
4.	**PENDAPATAN**	**-9,16%**	**5,44%**	**1,39%**	**4,07%**	**11,01%**	**2,55%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**-5,91%**	**15,26%**	**19,25%**	**26,52%**	**8,74%**	**12,77%**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-38,63%	28,81%	96,06%	38,22%	17,87%	**28,47%**
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-28,33%	-1,53%	10,95%	2,51%	-9,20%	**-5,12%**
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	2,88%	-10,10%	-13,37%	10,88%	65,24%	**11,11%**
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31,46%	11,91%	-22,59%	12,69%	-10,87%	**4,52%**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**-11,17%**	**3,18%**	**2,65%**	**0,57%**	**11,77%**	**1,40%**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**-5,33%**	**5,65%**	**-3,38%**	**0,43%**	**9,09%**	**1,30%**
4.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**-7,04%**	**3,94%**	**2,01%**	**-0,95%**	**10,90%**	**1,77%**
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	49,82%	29,17%	-100,00%		100,00%	**15,80%**
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-14,73%	-100,00%	0,00%		-	**-22,95%**
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	-7,58%	-1,77%	-100,00%		100,00%	**-1,87%**
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Fisik	-27,77%	116,72%	-100,00%		100,00%	**17,79%**
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-2,17%	-0,66%	-100,00%		100,00%	**-0,57%**
4.2.1.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**-**	**100,00%**	**-83,67%**	**129,53%**	**-100,00%**	**9,17%**
4.2.1.5	**Dana Desa**	**-**	**100,00%**	**-8,73%**	**1,98%**	**0,96%**	**18,84%**
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**10,02%**	**-100,00%**	**-**		**100,00%**	**2,00%**
	Dana Penyesuaian	10,02%	-100,00%	-			**-18,00%**
	Insentif Fiskal	-		-		100,00%	**20,00%**
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**-19,47%**	**-19,06%**	**49,27%**	**16,36%**	**24,15%**	**10,25%**
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	100,00%	-100,00%	0,00%			**0,00%**
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-100,00%	100,00%	49,27%	16,36%	24,15%	**17,96%**
4.2.4	**Bantuan Keuangan**	**-65,54%**	**-1,37%**	**78,76%**	**-32,18%**	**35,61%**	**3,06%**
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-7,39%	0,12%	78,76%	-32,18%	35,61%	**14,99%**
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	-99,19%	-100,00%	-			**-39,84%**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**22,07%**	**12,31%**	**-70,52%**	**-92,04%**	**-32,16%**	**-32,07%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	22,14%	-96,43%	-85,09%	-96,25%	-92,29%	**-69,58%**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	-99,81%	118790249,34%	-70,04%	-91,97%	-31,70%	**23757991,16%**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata (2020-2024)
	JUMLAH PENDAPATAN	**-9,16%**	**5,44%**	**1,39%**	**4,07%**	**11,01%**	**2,55%**
5.	**BELANJA**	**-10,46%**	**5,66%**	**0,09%**	**2,24%**	**14,73%**	**2,45%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**-8,95%**	**2,99%**	**-0,93%**	**2,63%**	**6,26%**	**0,40%**
5.1.1	Belanja Pegawai	-3,28%	1,53%	-2,97%	-5,16%	13,20%	**0,66%**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-24,15%	17,78%	2,22%	10,39%	-7,96%	**-0,34%**
5.1.3	Belanja Bunga	-79,31%	-100,00%	-			**-35,86%**
5.1.5	Belanja Hibah	342,87%	-72,34%	1,54%	87,28%	76,73%	**87,22%**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-95,39%	411,40%	13,45%	96,07%	0,20%	**85,15%**
5.2	**BELANJA MODAL**	**-46,41%**	**76,11%**	**-3,04%**	**-14,55%**	**110,59%**	**24,54%**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-		-			**-**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,83%	38,97%	-2,81%	-16,05%	76,21%	**22,23%**
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-48,27%	-18,28%	105,62%	14,29%	69,10%	**24,49%**
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-71,95%	267,38%	-20,82%	-30,33%	183,79%	**65,62%**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-40,72%	-39,22%	-89,46%	168,18%	-75,55%	**-15,35%**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-		-		5075,67%	**1015,13%**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**100,00%**	**-89,20%**	**-100,00%**	**100,00%**	**-100,00%**	**-17,84%**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	100,00%	-89,20%	-100,00%	100,00%	-100,00%	**-17,84%**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**100,00%**	**1,70%**	**10,00%**	**11,13%**	**10,55%**	**26,68%**
5.4.1	Belanja Bagi hasil	100,00%	4,30%	73,17%	44,24%	30,09%	**50,36%**
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	100,00%	1,53%	5,75%	7,48%	7,66%	**24,49%**
	TOTAL BELANJA	**-10,46%**	**5,66%**	**0,09%**	**2,24%**	**14,73%**	**2,45%**
	SURPLUS/DEFISIT	**-195,08%**	**-24,22%**	**244%**	**103,15%**	**-90,74%**	**7,47%**
6.	**PEMBIAYAAN**	**-10,03%**	**6,73%**	**5,26%**	**3,56%**	**56,17%**	**12,34%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-14,73%**	**10,54%**	**3,76%**	**36,48%**	**16,92%**	**10,59%**
6.1.01	Penggunaan SiLPA/Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-14,72%	10,54%	3,76%	22,00%	23,24%	**8,97%**
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	-		100,00%	-36,35%	**12,73%**
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-100,00%	-	-	-	-	**-20,00%**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,00%	-100,00%		100,00%	(1,00)	**0,00%**
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	**-**
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-	**-**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata (2020-2024)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-98,97%**	**6012,80%**	**-37,50%**	**1560,00%**	**-96,39%**	**1467,99%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-100,00%	100,00%	-37,50%	440,00%	-88,89%	**62,72%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	**-**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-100,00%	100%	-	-	-	**0,00%**
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	**-**
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	**-**
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-	**-**
	PEMBIAYAAN NETTO	**-10,03%**	**6,73%**	**5,26%**	**3,56%**	**56,17%**	**12,34%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**10,62%**	**3,76%**	**22,00%**	**23,24%**	**8,30%**	**13,59%**

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Tabel 2.119
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pendapatan Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	15,20%	16,59%	19,85%	23,81%	23,45%	19,78%
Pendapatan Transfer Pusat	72,06%	72,10%	69,86%	66,52%	65,74%	69,26%
Pendapatan Transfer Daerah	7,54%	5,78%	8,65%	9,55%	10,74%	8,45%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,20%	5,53%	1,63%	0,12%	0,08%	2,51%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.

Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah, b. Pendapatan Transfer Pusat, c. Pendapatan Transfer Daerah, dan d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dibentuk oleh Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 19,78 % dari Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer Pusat sebesar 69,26 % dari Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Transfer Daerah sebesar 8,45 % dari Pendapatan Daerah,

serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,51 % dari Pendapatan Daerah. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kontribusi terbesar Pendapatan Daerah adalah bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat. Dalam 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pendapatan Transfer Pusat memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah.

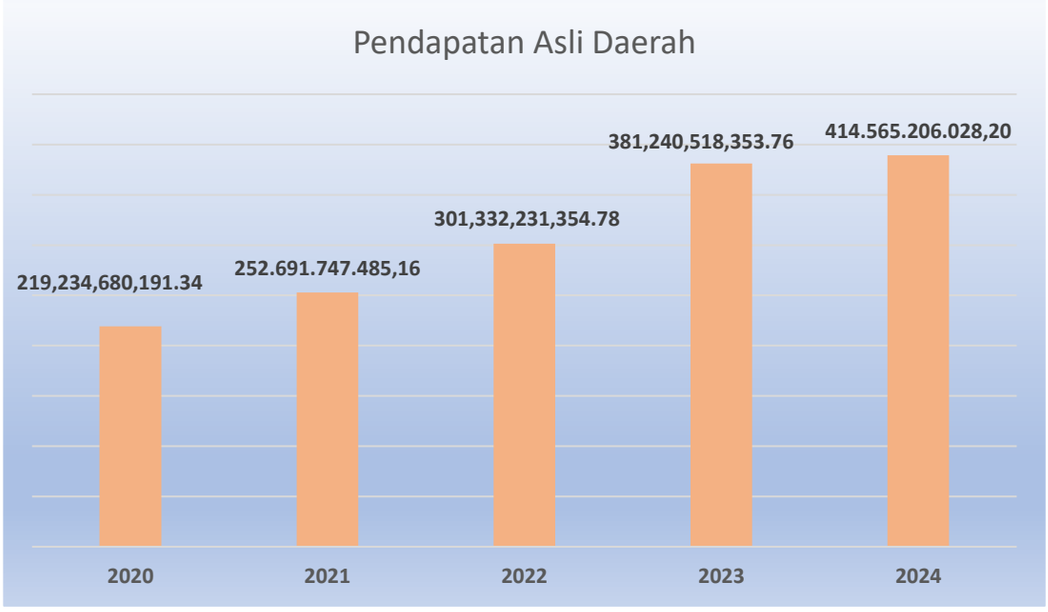
2.6.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020 hingga 2024 Secara umum terus mengalami peningkatan, karena aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi peningkatan PAD terutama yang bersumber dari pendapatan sektor pajak daerah di tahun 2020 sebesar Rp. 66.506.517.157,75, di tahun 2021 pendapatan pajak daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 85.667.480.089,00, ditahun 2022 pendapatan pajak daerah meningkat menjadi sebesar Rp.167.957.909.825,42, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp. 232.153.510.496,00 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp. 273.646.072.481,10. Sedangkan retribusi daerah tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, di mana tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 9.350.561.671,00, di tahun 2021 menurun menjadi sebesar Rp. 9.187.772.781,00, di tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 10.215.719.116,00, di tahun 2023 meningkat sedikit menjadi Rp. 10.472.014.639,00 dan di tahun 2024 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 9.508.777.306,00.

Pendapatan pada sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 11.968.117.309,66, di tahun 2021 sebesar Rp. 10.759.415.258,47, di tahun 2022 sebesar Rp. 9.321.192.563,91, di tahun 2023 sebesar Rp. 10.334.895.322,92 dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp. 17.077.888.186,17. Sedangkan pada sektor Lain-lain PAD yang sah tahun 2020 sebesar Rp. 131.409.484.052,93, di tahun 2021 sebesar Rp. 147.056.995.356,69, di tahun 2022 sebesar Rp. 113.837.409.849,45, di tahun 2023 sebesar Rp.

128.280.097.895,48, dan di tahun 2024 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 114.332.468.054,93.

Realisasi PAD selama 5 tahun (2020-2024) berhasil meningkat dari Rp. 219.234.680.191,34 pada tahun 2020 menjadi Rp. 414.565.206.028,20 atau meningkat 47,12% di tahun 2024.



Gambar 2.11
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Sumber pembentuk PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 bersumber dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan d. Lain-lain PAD yang Sah. Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Karangasem selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dibentuk oleh Pendapatan Pajak Daerah rata-rata sebesar 49,38 % dari PAD, Retribusi Daerah sebesar 3,27 % dari PAD, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 3,93 % dari PAD, serta Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 43,43 % dari PAD. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kontribusi terbesar PAD adalah bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD, hal ini disebabkan karena dilakukannya penggalian potensi dalam bentuk pendataan pajak daerah, pengawasan pajak daerah khususnya

pengawasan pajak MBLB. Untuk lebih jelas terkait dengan sumber pembentuk PAD disajikan pada Tabel 2.118.

Tabel 2. 120
Proporsi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata
Pendapatan Pajak Daerah	30,34%	33,90%	55,74%	60,89%	66,01%	49,38%
Pendapatan Retribusi Daerah	4,27%	3,64%	3,39%	2,75%	2,29%	3,27%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	5,46%	4,26%	3,09%	2,71%	4,12%	3,93%
Lain-lain PAD yang Sah	59,94%	58,20%	37,78%	33,65%	27,58%	43,43%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.119 terlihat bahwa realisasi PAD berada di atas target yang ditetapkan pada tahun 2020-2024, dengan angka capaian pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 219.234.680.191,34 atau sebesar 5,45 % dari rencana anggaran, tahun 2021 sebesar Rp. 252.691.747.485,16 atau sebesar 14,92 % dari rencana anggaran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terus meningkat pada tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp. 301.332.231.354,78 atau mencapai 18,69 % dari rencana anggaran, tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp. 381.240.518.353,76 atau sebesar 19,71 % dan di tahun 2024 relisasi PAD sebesar Rp. 414.565.206.028,20 atau 0,06 % dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.121
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2020	207.905.009.114,20	219.234.680.191,34	5,45%	11.329.671.077,14
2	2021	219.880.880.650,00	252.691.747.485,16	14,92%	32.810.866.835,16
3	2022	253.884.957.846,00	301.332.231.354,78	18,69%	47.447.273.508,78

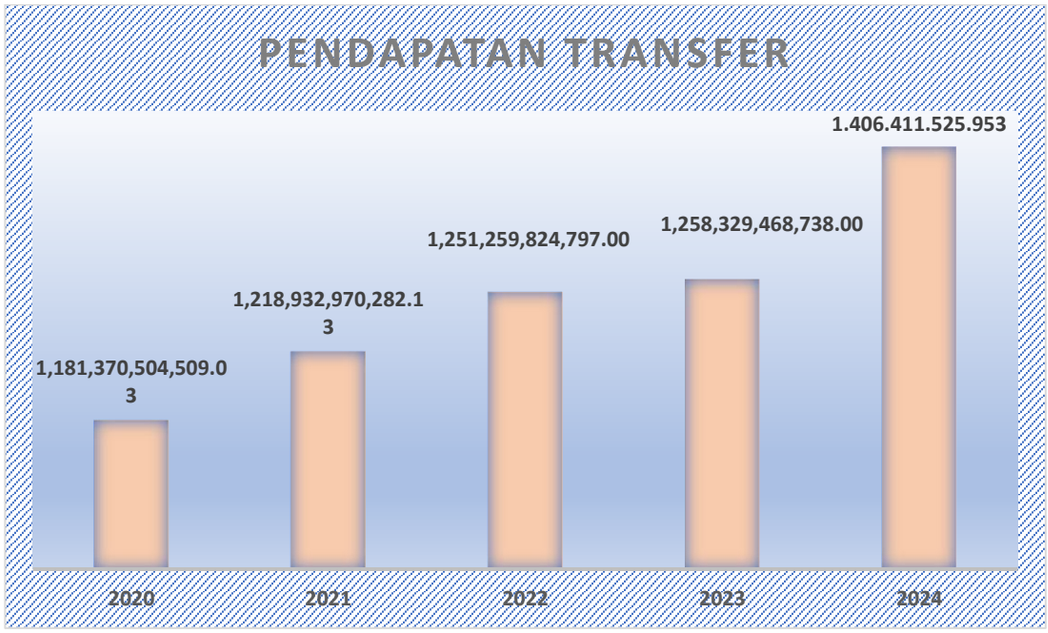
No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
4	2023	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	19,71%	62.783.004.757,76
5	2024 *(unaudited)*	414.300.000.000,00	414.565.206.028,20	0,06%	265.206.028,20

Sumber Data : APBD dan LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

2.6.4 Pendapatan Transfer

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



Gambar 2.12
Pendapatan Transfer

Tabel 2.122
Target dan Realisasi Pendapatan Tranfer pada APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2020	1.234.306.108.969,38	1.181.370.504.509,03	-4,29%	(52.935.604.460,35)
2	2021	1.271.394.033.215,00	1.218.932.970.282,13	-4,13%	(52.461.062.932,87)
3	2022	1.305.565.130.932,00	1.251.259.824.797,00	-4,16%	(54.305.306.135,00)
4	2023	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	-4,36%	(57.416.712.127,00)
5	2024	1.434.527.362.600,00	1.406.411.525.953,00	-1,96%	(28.115.836.647,00)

Sumber Data : APBD dan LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.118. dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2020-2024 belum mampu melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2020 realisasi kurang sebesar 4,29 %, tahun 2021 kurang sebesar 4,13 %, tahun 2022 kurang sebesar 4,16%, tahun 2023 kurang sebesar 4,36%, dan tahun 2024 kurang sebesar 1,96 %. Penyebab belum memenuhinya target realisasi pendapatan transfer adalah karena perubahan kebijakan keuangan negara yang dituangkan dalam regulasi pemerintah pusat.

Tabel 2.123
Laju Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Transfer	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2019	1.329.914.099.670,81	-	-
2	2020	1.181.370.504.509,03	(148.543.595.161,78)	-12,57%
3	2021	1.218.932.970.282,13	37.562.465.773,10	3,08%
4	2022	1.251.259.824.797,00	32.326.854.514,87	2,58%
5	2023	1.258.329.468.738,00	7.069.643.941,00	0,56%
6	2024 *(unaudited)*	1.406.411.525.953,00	148.082.057.215,00	10,53%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

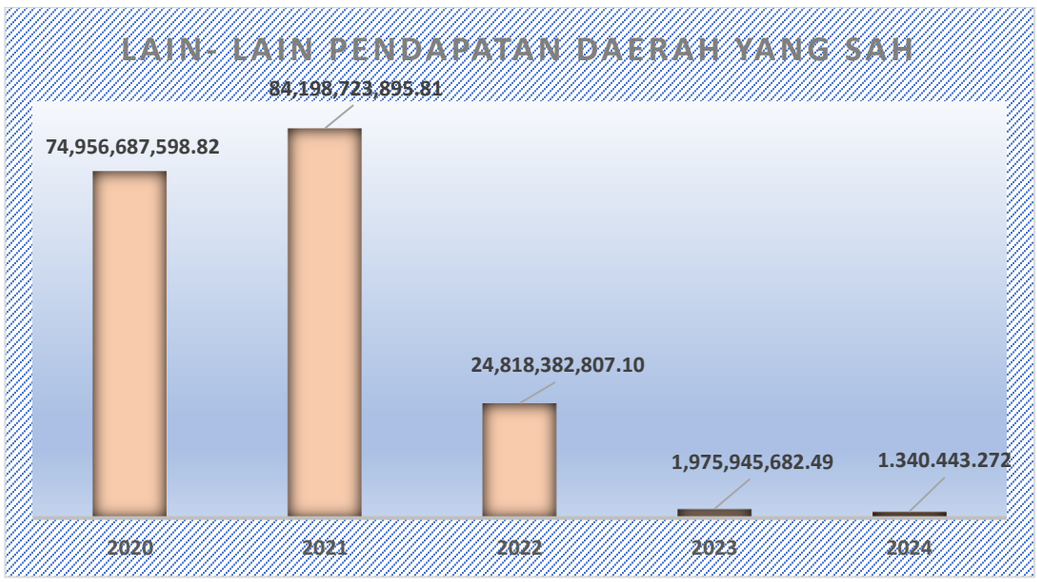
Realisasi Pendapatan transfer Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sebesar Rp. 1.181.370.504.509,03 mengalami penurunan sebesar (Rp. 148.543.595.161,78) atau (12,57)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terjadinya perlambatan ekonomi baik secara global dan nasional yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan menjadi Rp.1.218.932.970.282,13 atau naik sebesar 3,08%, di tahun 2022 meningkat sebesar 2,58% menjadi Rp. 1.251.259.824.797,00, di tahun 2023 naik sebesar 0,56% menjadi Rp. 1.258.329.468.738,00, dan di tahun 2024 juga naik sebesar 10,53% menjadi Rp.1.406.411.525.953,00. Selama tahun 2024 terjadi peningkatan pendapatan transfer yang cukup segnifikan dibandingkan dengan 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini sangat wajar mengingat perlahan-lahan perokonomian negara berkembang ke arah yang lebih baik pasca pandemi, sehingga pendapatan negara baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah mengalami peningkatan.

2.6.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas: 1)

Pendapatan Hibah, dan 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Rumah Sakit Pratama Kubu.



Gambar 2.13
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Tabel 2.124
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
1	2020	68.365.798.978,65	74.956.687.598,82	9,64%	6.590.888.620
2	2021	78.265.053.494,00	84.186.840.123,19	7,57%	5.921.786.629
3	2022	28.023.502.499,00	24.818.382.807,10	-11,44%	(3.205.119.692)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
4	2023	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	1,33%	25.945.682
5	2024	1.906.795.413,00	1.340.443.272,00	-29,70%	(566.352.141)

Sumber Data : APBD dan LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2020-2024. Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan masih fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi tercapai sebesar Rp. 74.956.687.598,82 atau meningkat sebesar 9,64% dari target yang direncanakan. Tahun 2021 sebesar Rp. 84.186.840.123,19 atau meningkat sebesar 7,57% dari target yang direncanakan, pada tahun 2022 realisasi mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.205.119.692,00) atau (11,44 %) dari target yang direncanakan, tahun 2023 realisasi meningkat dari target yang direncanakan sebesar Rp. 25.945.682,00 atau meningkat sebesar 1,33%, dan tahun 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar (Rp. 566.352.141,00) atau turun sebesar (29,70 %) dari target yang direncanakan. Penyebab belum memenuhinya target realisasi pendapatan transfer adalah karena perubahan kebijakan keuangan negara yang dituangkan dalam regulasi pemerintah pusat.

Tabel 2.125
Laju Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Tahun Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2019	61.103.099.952,24	-	-
2	2020	74.956.687.598,82	13.853.587.647	18,48%
3	2021	84.186.840.123,19	9.230.152.524	10,96%
4	2022	24.818.382.807,10	(59.368.457.316)	-239,21%
5	2023	1.975.945.682,49	(22.842.437.125)	-1156,03%
6	2024 *(unaudited)*	1.340.443.272,00	(635.502.410)	-47,41%

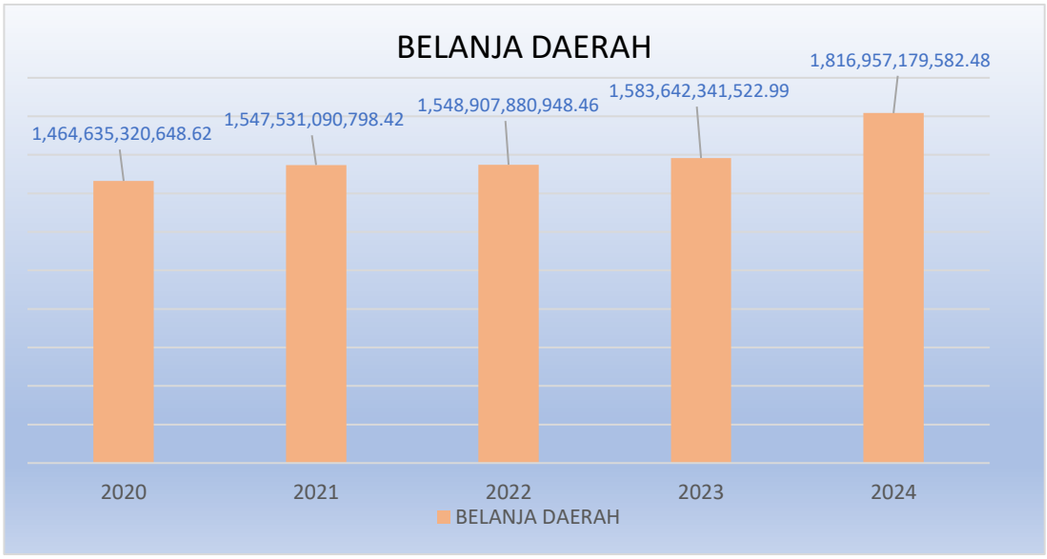
Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Berdasakan Tabel 2.121 Laju Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di tahun 2020 mencapai Rp. 74.956.687.598,82 meningkat sebesar Rp. 13.853.587.647,00 atau sebesar 18,48 % dibandingkan dengan tahun 2019, di tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 9.230.152.524 atau sebesar 10,96 % menjadi Rp. 84.186.840.123,19 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp.59.368.457.316) atau sebesar 239,21 % menjadi Rp. 24.818.382.807,10, di tahun 2023 juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar (Rp.22.842.437.125,00) atau sebesar 1156,03 % menjadi Rp. 1,975,945,682,49 dan di tahun 2024 turun 47,41 % atau sebesar (Rp. 635.502.410,00) menjadi Rp. 1.340.443.272,00 dikarenakan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari komponen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas yang sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada komponen Pendapatan Asli Daerah.

2.6.6 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja Operasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain belanja operasi maka belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



Gambar 2.14
Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pelaksanaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengalami tantangan yang cukup berat, khususnya terkait dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih menunjukkan ketidak pastian. Hal ini berpengaruh terhadap tekanan terhadap pendapatan APBN, dimana berpengaruh terhadap dana transfer ke daerah. Dampak dari pandemic *Covid-19* juga memberikan tekanan terhadap realisasi pendapatan serta realisasi belanja itu sendiri.

Realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 8,72%. Realiasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.464.635.320.648,62 turun sebesar Rp.

172.186.604.794,00 atau sebesar 11,76% dari realisasi tahun 2019. Realisasi belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.547.531.450.798,42 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.896.130.150,00 atau sebesar 5,36 % dari realisasi belanja daerah tahun 2020. Realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp.1.548.907.880.948,46 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.376.430.150,00 atau sebesar 0,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realiasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.583.642.341.522,99 mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.734.460.575,00 atau sebesar 2,19% jika dibandingan dengan kinerja belanja daerah pada tahun 2022, dan realisasi belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.816.957.179.582,48 meningkat sebesar 12,84% atau sebesar Rp. 233.314.838.059 dibandingan dengan kinerja belanja daerah pada tahun 2023.

Tabel 2.126
Laju Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

No	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2019	1.636.821.925.442,27	-	0,00%
2	2020	1.464.635.320.648,62	(172.186.604.794)	-11,76%
3	2021	1.547.531.450.798,42	82.896.130.150	5,36%
4	2022	1.548.907.880.948,46	1.376.430.150	0,09%
5	2023	1.583.642.341.522,99	34.734.460.575	2,19%
6	2024 *(unaudited)*	1.816.957.179.582,48	233.314.838.059	12,84%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Tabel 2.127
Target Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2020	1.613.401.229.416,76	1.464.635.320.648,62	(148.765.908.768,14)	-9,22%
2	2021	1.679.448.303.840,00	1.547.531.450.798,42	(131.916.853.042)	-7,85%
3	2022	1.703.162.034.813,04	1.548.907.880.948,46	(154.254.153.865)	-9,06%

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	2023	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	(172.310.697.694)	-9,81%
5	2024 *(unaudited)*	2.037.830.086.999,00	1.816.957.179.582,48	(220.872.907.417)	-10,84%

Sumber Data : APBD dan LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2021-2024 belum bisa mencapai 100% dari alokasi yang direncanakan. Pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp. 1.464.635.320.648,62 turun sebesar Rp. 148.765.908.768,14 atau (9,22%) dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 1.613.401.229.416,76. Tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp 1.547.531.450.798,42 turun sebesar Rp. 131.916.853.042 atau sebesar 7,85% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.679.448.303.840,00. Tahun 2022 realisasi belanja sebesar Rp. 1.548.907.880.948,46 turun sebesar Rp. 154.254.153.865,00 atau sebesar 9,06 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.703.162.034.813,04. Tahun 2023 realisasi belanja sebesar Rp. 1.583.642.341.522,99 turun sebesar (9,81 %) atau turun sebesar Rp. 172.310.697.694 dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.755.953.039.217,00. Dan tahun 2024 realisasi belanja sebesar Rp. 1.816.957.179.582,48 mengalami penurunan sebesar (10,84 %) atau sebesar Rp. 220.872.907.417 dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.037.830.086.999,00. Penyebab belum memenuhinya target realisasi alokasi belanja adalah karena adanya penghematan belanja yang bersumber dari perbedaan harga pasar dengan standar satuan harga dan penghematan belanja akibat adanya kebijakan pengurangan volume belanja, serta adanya kebijakan belanja yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk juga perencanaan program dan kegiatan yang belum optimal sehingga sering dilakukan revisi Anggaran. Meskipun belum optimal, namun realisasi belanja tahun 2024 menunjukkan tren mendekati 100%.

Pemerintah Kabupaten Karangasem masih mempunyai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas dari belanja daerah dalam mendukung berbagai program prioritas penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, seperti kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan belanja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu evaluasi triwulan atas kinerja perangkat daerah juga efektif untuk mengejar ketepatan waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ada.

Tabel 2.128
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karangasem
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 *(unaudited)*	Rata-rata
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	BELANJA OPERASI	80,25%	78,22%	77,42%	77,72%	71,97%	77,11%
1	Belanja Pegawai	50,03%	48,08%	46,61%	43,23%	42,65%	46,12%
2	Belanja Barang dan Jasa	25,68%	28,63%	29,23%	31,56%	25,32%	28,08%
3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Hibah	4,46%	1,17%	1,19%	2,17%	3,35%	2,47%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,07%	0,34%	0,39%	0,75%	0,65%	0,44%
B	**BELANJA MODAL**	**5,57%**	**7,15%**	**8,99%**	**7,52%**	**13,80%**	**8,61%**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,39%	1,01%	3,05%	2,50%	3,84%	2,56%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,30%	1,01%	2,07%	2,32%	3,41%	2,02%
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,40%	4,86%	3,84%	2,62%	6,48%	3,84%
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,48%	0,28%	0,03%	0,08%	0,02%	0,18%
5	Belanja Modal Aset Lainnya				0,001%	0,043%	0,02%
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1,34%**	**0,14%**	**0,00%**	**0,000003%**	**0,00%**	**0,30%**
D	**BELANJA TRANSFER**	**12,84%**	**12,36%**	**13,59%**	**14,77%**	**14,23%**	**13,56%**
1	Belanja Bagi hasil	0,79%	0,78%	1,35%	1,90%	2,16%	1,39%
2	Belanja Bantuan Keuangan	12,05%	11,58%	12,24%	12,87%	12,07%	12,16%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Selama 5 (lima) tahun realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai rata-rata persentase yang paling besar yaitu sebesar 77,11% dari total belanja daerah. Komponen belanja operasi yang mempunyai rata-rata persentase tertinggi adalah pada komponen belanja pegawai sebesar 46,12%, sedangkan belanja Barang dan Jasa rata-rata persentase sebesar 28,08%, belanja hibah 2,47% dan belanja bantuan sosial 0,44%.

Rata-rata realisasi belanja modal selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 8,61 % dari total realisasi belanja daerah. Belanja tidak terduga mempunyai rata-rata persentase realisasi sebesar 0,30% dari total belanja daerah. Realisasi belanja transfer mempunyai rata-rata persentase realisasi sebesar 13,56 %, komponen belanja transfer yang mempunyai persentase tertinggi adalah pada Belanja Bantuan Keuangan sebesar 12,16 % sedangkan Belanja Bagi Hasil sebesar 1,39 %.

2.6.7 Neraca Daerah

Neraca daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca daerah Kabupaten Karangasem adalah dokumen yang menyajikan informasi komprehensif tentang kondisi keuangan daerah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengukur posisi keuangan daerah pada akhir periode tertentu, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan pembangunan.

Neraca daerah Kabupaten Karangasem menunjukkan pengelolaan keuangan yang berfokus pada optimalisasi aset dan pengendalian kewajiban. Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, serta persediaan barang untuk mendukung operasional pemerintahan. Sementara itu, aset tetap seperti tanah, bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya merupakan elemen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Dari sisi kewajiban, pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya mengelola utang daerah dengan baik, memastikan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tetap terkendali. Rasio kewajiban terhadap aset menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Komponen ekuitas mencerminkan akumulasi surplus atau defisit dari hasil pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai upaya, seperti pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024 yang telah diaudit dapat dilihat pada Tabel ber

Tabel 2.129
Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2023 (data 2024 belum tersedia)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.01.01	**ASET**	**1,489,470,137,884.03**	**1,589,273,188,495.12**	**1,602,413,476,157.43**	**1,725,355,969,991.55**
6.1.1.1	**ASET LANCAR**	**199,352,191,530.42**	**255,744,596,514.74**	**255,766,386,631.27**	**333,294,746,466.41**
	Kas dan Setara Kas	**113,912,518,059.25**	**118,531,866,405.30**	**144,190,144,756.05**	**177,705,219,047.73**
6.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	96,189,075,081.08	79,947,618,428.19	124,107,619,222.41	160,859,600,916.45
6.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		-	-
6.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	151,425,337.00	138,005,806.00	3,303,000.00	186,213,706.00
6.1.1.1.4	Kas di BLUD	5,223,145,957.67	31,327,854,583.33	17,714,268,768.00	13,607,809,769.00
6.1.1.1.6	Kas di BOSP	4,327,431,952.82	2,525,986,369.11	400,590,833.83	244,602,583.50
6.1.1.1.7	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	8,020,258,152.31	4,248,978,350.31	1,964,362,931.81	143,665,757.00
	Kas Dana BOK Puskesmas			-	2,663,236,254.00
	Kas Lainnya	1,181,578.37	343,422,868.36	-	90,061.78
	setara Kas	-	-	-	-
6.1.1.1.10	**Piutang**	**106,369,818,130.59**	**151,393,533,659.83**	**132,325,238,427.44**	**180,114,990,818.70**
6.1.1.1.10.1	Piutang Pajak Daerah	74,254,398,479.12	82,102,060,916.12	89,054,021,850.45	94,113,883,017.70

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.1.1.1.10.3	Piutang Retribusi Daerah	270,978,580.00	204,728,837.00	250,354,541.00	487,854,633.00
6.1.1.1.10.5	Piutang lain-Lain PAD yang Sah	23,898,848,767.71	48,430,008,191.71	18,570,584,105.99	12,714,212,354.00
6.1.1.1.10.6	Piutang Transfer Antar Daerah	7,841,379,503.76	20,554,122,915.00	24,347,665,130.00	72,799,040,814.00
6.1.1.1.10.9	Piutang lainnya	104,212,800.00	102,612,800.00	102,612,800.00	-
	Penyisihan Piutang	**(38,293,168,730.66)**	**(42,777,266,571.10)**	**(46,760,339,027.26)**	**(51,821,812,298.11)**
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(38,190,539,930.66)	(42,674,653,771.10)	(46,657,726,227.26)	(51,821,812,298.11)
6.1.1.1.10.10	Penyisihan Piutang Lainnya	(102,628,800.00)	(102,612,800.00)	(102,612,800.00)	-
6.1.1.1.11	**Beban Dibayar Dimuka**	**198,720,679.00**	**211,051,952.07**	**241,577,372.88**	**257,670,283.54**
6.1.1.1.12	**Persediaan**	**17,164,303,392.24**	**28,385,411,068.64**	**25,769,765,102.16**	**27,038,678,614.55**
	Persediaan Barang Habis Pakai	17,164,303,392.24	28,385,411,068.64	25,769,765,102.16	27,038,678,614.55
	Jumlah Aset Lancar	**199,352,191,530.42**	**255,744,596,514.74**	**255,766,386,631.27**	**333,294,746,466.41**
6.1.1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**117,133,738,541.72**	**120,965,044,784.79**	**122,970,265,940.13**	**146,809,960,492.05**
6.1.1.2.1	**Investasi Non Permanen**	**4,290,537,515.71**	**4,290,537,515.71**	**4,290,537,515.71**	**2,691,093,990.31**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.1.1.2.1.1	Dana Bergulir	248,612,789.00	248,612,789.00	208,297,940.00	207,846,950.00
6.1.1.2.1.3	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11,432,236,519.00	11,432,236,519.00	11,432,236,519.00	11,432,236,519.00
	Penyisihan Investasi Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	(7,390,311,792.29)	(7,390,311,792.29)	(7,349,996,943.29)	(8,948,989,478.69)
6.1.1.2.2	**Investasi Permanen**	**112,843,201,026.01**	**116,674,507,269.08**	**118,679,728,424.42**	**144,118,866,501.74**
6.1.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112,843,201,026.01	116,674,507,269.08	118,679,728,424.42	144,118,866,501.74
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**117,133,738,541.72**	**120,965,044,784.79**	**122,970,265,940.13**	**146,809,960,492.05**
6.1.1.3	**ASET TETAP**	**1,152,660,747,195.06**	**1,164,827,026,822.54**	**1,173,203,557,870.85**	**1,184,611,342,510.31**
6.1.1.3.1	Tanah	185,136,430,857.25	161,485,813,857.25	162,717,247,945.25	165,392,320,343.25
6.1.1.3.2	Peralatan dan Mesin	454,803,179,097.28	532,570,887,138.68	559,607,671,676.39	594,067,499,151.39
6.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	838,838,315,753.14	858,295,925,089.48	888,885,578,530.53	926,755,954,219.61
6.1.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,328,267,538,894.16	1,404,299,729,701.16	1,464,775,325,242.76	1,538,240,617,277.17
6.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	43,377,935,939.14	39,299,650,112.35	39,697,000,877.35	40,296,936,577.35
6.1.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12,274,283,066.00	12,960,612,710.00	14,170,335,680.96	19,632,500,602.00

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.1.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,710,036,936,411.91)	(1,844,085,591,786.38)	(1,956,649,602,082.39)	(2,099,774,485,660.46)
	Jumlah Aktiva Tetap	**1,152,660,747,195.06**	**1,164,827,026,822.54**	**1,173,203,557,870.85**	**1,184,611,342,510.31**
6.1.1.4	**DANA CADANGAN**	**-**	**-**	**-**	**10,890,800,000.00**
6.1.1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	10,890,800,000.00
	Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**10,890,800,000.00**
6.1.1.5	**ASET LAINNYA**	**20,323,460,616.83**	**47,736,520,373.05**	**50,473,265,715.18**	**49,749,120,522.78**
6.1.1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	24446989416	24,690,189,416.00	24,690,189,416.00
6.1.1.5.4	Aset Tidak Berwujud	149,945,000.00	245,754,604.00	225,950,521.00	688,429,439.00
6.1.1.5.6	Aset Lain-Lain	20,173,515,616.83	23,043,776,353.05	23,043,994,367.18	22,071,028,667.78
	Dana Transper Treasury Deposit Facility	-	-	2,513,131,411.00	2,299,473,000.00
	Jumlah Aset Lainnya	**20,323,460,616.83**	**47,736,520,373.05**	**50,473,265,715.18**	**49,749,120,522.78**
	JUMLAH ASET	**1,489,470,137,884.03**	**1,589,273,188,495.12**	**1,602,413,476,157.43**	**1,725,355,969,991.55**
6:01:02	**KEWAJIBAN**	**42,615,254,513.97**	**47,633,376,850.10**	**34,870,688,773.20**	**62,466,906,121.45**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.1.2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**42,615,254,513.97**	**47,633,376,850.10**	**34,870,688,773.20**	**62,466,906,121.45**
6.1.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak ketiga	1,181,578.37	302,580,862.00	-	-
6.1.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	540,433,707.00	420,916,766.00	357,776,816.34	1,159,401,566.67
6.1.2.1.5	Utang Belanja dan Transfer	42,073,639,228.60	46,869,037,215.74	34,512,911,956.86	61,307,414,493.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	40,842,006.36	-	90,061.78
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**42,615,254,513.97**	**47,633,376,850.10**	**34,870,688,773.20**	**62,466,906,121.45**
6.1.2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.2.2.1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-
	Jumlah Utang Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**42,615,254,513.97**	**47,633,376,850.10**	**34,870,688,773.20**	**62,466,906,121.45**
6:01:03	**EKUITAS**	**1,446,851,883,388.06**	**1,541,639,811,645.02**	**1,567,542,787,384.42**	**1,662,889,063,869.91**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1,489,467,137,902.03**	**1,589,273,188,495.12**	**1,602,413,476,157.62**	**1,725,355,969,991.36**

2.6.8 Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Tabel 2.127 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Aset tahun 2020-2023 sebesar 15,84% atau rata-rata per tahun sebesar 3,96% sementara pertumbuhan kewajiban tahun 2020-2024 sebesar 46,58% atau rata-rata per tahun 11,65%

Tabel 2.130
Pertumbuhan (%) Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2023

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
6.01.01	**ASET**	**1,489,470,137,884.03**	**1,725,355,969,991.55**	**15.84%**	**3.96%**
6.1.1.1	**ASET LANCAR**	**199,352,191,530.42**	**333,294,746,466.41**	**67.19%**	**16.80%**
	Kas dan Setara Kas	**113,912,518,059.25**	**177,705,219,047.73**	**56.00%**	**14.00%**
6.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	96,189,075,081.08	160,859,600,916.45	**67.23%**	**16.81%**
6.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
6.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	151,425,337.00	186,213,706.00	**22.97%**	**5.74%**
6.1.1.1.4	Kas di BLUD	5,223,145,957.67	13,607,809,769.00	**160.53%**	**40.13%**
6.1.1.1.6	Kas di BOSP	4,327,431,952.82	244,602,583.50	**-94.35%**	**-23.59%**
6.1.1.1.7	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	8,020,258,152.31	143,665,757.00	**-98.21%**	**-24.55%**
	Kas Dana BOK Puskesmas		2,663,236,254.00	**100.00%**	**25.00%**
	Kas Lainnya	1,181,578.37	90,061.78	**-92.38%**	**-23.09%**
	Setara Kas	-	-	-	-
6.1.1.1.10	**Piutang**	**106,369,818,130.59**	**180,114,990,818.70**	**69.33%**	**17.33%**
6.1.1.1.10.1	Piutang Pajak Daerah	74,254,398,479.12	94,113,883,017.70	**26.75%**	**6.69%**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
6.1.1.1.10.3	Piutang Retribusi Daerah	270,978,580.00	487,854,633.00	**80.03%**	**20.01%**
6.1.1.1.10.5	Piutang lain-Lain PAD yang Sah	23,898,848,767.71	12,714,212,354.00	**-46.80%**	**-11.70%**
6.1.1.1.10.6	Piutang Transfer Antar Daerah	7,841,379,503.76	72,799,040,814.00	**828.40%**	**207.10%**
6.1.1.1.10.9	Piutang lainnya	104,212,800.00	-	**-100.00%**	**-25.00%**
	Penyisihan Piutang	**(38,293,168,730.66)**	**(51,821,812,298.11)**	**35.33%**	**8.83%**
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(38,190,539,930.66)	(51,821,812,298.11)	**35.69%**	**8.92%**
6.1.1.1.10.10	Penyisihan Piutang Lainnya	(102,628,800.00)	-	**-100.00%**	**-25.00%**
6.1.1.1.11	**Beban Dibayar Dimuka**	**198,720,679.00**	**257,670,283.54**	**29.66%**	**7.42%**
6.1.1.1.12	**Persediaan**	**17,164,303,392.24**	**27,038,678,614.55**	**57.53%**	**14.38%**
	Persediaan Barang Habis Pakai	17,164,303,392.24	27,038,678,614.55	**57.53%**	**14.38%**
	Jumlah Aset Lancar	**199,352,191,530.42**	**333,294,746,466.41**	**67.19%**	**16.80%**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
6.1.1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**117,133,738,541.72**	**146,809,960,492.05**	**25.34%**	**6.33%**
6.1.1.2.1	**Investasi Non Permanen**	**4,290,537,515.71**	**2,691,093,990.31**	**-37.28%**	**-9.32%**
6.1.1.2.1.1	Dana Bergulir	248,612,789.00	207,846,950.00	**-16.40%**	**-4.10%**
6.1.1.2.1.3	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11,432,236,519.00	11,432,236,519.00	**0.00%**	**0.00%**
	Penyisihan Investasi Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	(7,390,311,792.29)	(8,948,989,478.69)	**21.09%**	**5.27%**
					0.00%
6.1.1.2.2	**Investasi Permanen**	**112,843,201,026.01**	**144,118,866,501.74**	**27.72%**	**6.93%**
6.1.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112,843,201,026.01	144,118,866,501.74	**27.72%**	**6.93%**
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**117,133,738,541.72**	**146,809,960,492.05**	**25.34%**	**6.33%**
6.1.1.3	**ASET TETAP**	**1,152,660,747,195.06**	**1,184,611,342,510.31**	**2.77%**	**0.69%**
6.1.1.3.1	Tanah	185,136,430,857.25	165,392,320,343.25	**-10.66%**	**-2.67%**
6.1.1.3.2	Peralatan dan Mesin	454,803,179,097.28	594,067,499,151.39	**30.62%**	**7.66%**
6.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	838,838,315,753.14	926,755,954,219.61	**10.48%**	**2.62%**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
6.1.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,328,267,538,894.16	1,538,240,617,277.17	**15.81%**	**3.95%**
6.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	43,377,935,939.14	40,296,936,577.35	**-7.10%**	**-1.78%**
6.1.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12,274,283,066.00	19,632,500,602.00	**59.95%**	**14.99%**
6.1.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,710,036,936,411.91)	(2,099,774,485,660.46)	**22.79%**	**5.70%**
	Jumlah Aktiva Tetap	**1,152,660,747,195.06**	**1,184,611,342,510.31**	**2.77%**	**0.69%**
6.1.1.4	**DANA CADANGAN**	**-**	**10,890,800,000.00**	**100.00%**	**25.00%**
6.1.1.4.1	Dana Cadangan	-	10,890,800,000.00	**100.00%**	**25.00%**
	Jumlah Dana Cadangan	**-**	**10,890,800,000.00**	**100.00%**	**25.00%**
6.1.1.5	**ASET LAINNYA**	**20,323,460,616.83**	**49,749,120,522.78**	**144.79%**	**36.20%**
6.1.1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	24,690,189,416.00	**100.00%**	**25.00%**
6.1.1.5.4	Aset Tidak Berwujud	149,945,000.00	688,429,439.00	**359.12%**	**89.78%**
6.1.1.5.6	Aset Lain-Lain	20,173,515,616.83	22,071,028,667.78	**9.41%**	**2.35%**
	Dana Transper Treasury Deposit Facility	-	2,299,473,000.00	**100.00%**	**25.00%**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
	Jumlah Aset Lainnya	**20,323,460,616.83**	**49,749,120,522.78**	**144.79%**	**36.20%**
	JUMLAH ASET	**1,489,470,137,884.03**	**1,725,355,969,991.55**	**15.84%**	**3.96%**
6.01.02	**KEWAJIBAN**	**42,615,254,513.97**	**62,466,906,121.45**	**46.58%**	**11.65%**
6.1.2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**42,615,254,513.97**	**62,466,906,121.45**	**46.58%**	**11.65%**
6.1.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak ketiga	1,181,578.37	-	**-100.00%**	**-25.00%**
6.1.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	540,433,707.00	1,159,401,566.67	**114.53%**	**28.63%**
6.1.2.1.5	Utang Belanja dan Transfer	42,073,639,228.60	61,307,414,493.00	**45.71%**	**11.43%**
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	90,061.78	**100.00%**	**25.00%**
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**42,615,254,513.97**	**62,466,906,121.45**	**46.58%**	**11.65%**
6.1.2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
6.1.2.2.1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	0.00%	**0.00%**
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	0.00%	**0.00%**

Kode Akun	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%)	Rata-rata Per Tahun (%)
	Jumlah Utang Jangka Panjang	-	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	42,615,254,513.97	62,466,906,121.45	46.58%	11.65%
6.01.03	**EKUITAS**	1,446,851,883,388.06	1,662,889,063,869.91	14.93%	3.73%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,489,467,137,902.03	1,725,355,969,991.36	15.84%	3.96%

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Proses ini mencakup penghitungan berbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio solvabilitas untuk mengukur kapasitas dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang, serta rasio aktivitas yang menunjukkan efisiensi pengelolaan aset daerah dalam mendukung aktivitas operasional. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aset daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.131
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Rasio Likuiditas :						
1.1	Rasio Lancar	4,68	5,37	7,33	5,34	5,82	5,71
1.2	Rasio Quick	4,28	4,77	6,60	4,90	4,90	5,09
2	Solvabilitas :						
2.1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
2.2	Rasio Total Hutang Terhadap Modal	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03

2.6.9 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

Walaupun Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

a. Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
b. Ketergantungan pada sektor pendapatan tertentu, seperti pajak mineral bukan logam.
c. Persaingan dengan daerah lain dalam menarik wisatawan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran
d. Potensi hambatan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat.
e. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak atau Retribusi Daerah.
f. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
h. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
i. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Diversifikasi sumber pendapatan, seperti pengelolaan aset daerah yang lebih optimal. Memberdayakan aset daerah melalui kerja sama publik-swasta.
c. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.

d. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
f. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah.
g. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
h. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkesinambungan.
i. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.
j. Mengembangkan kebijakan insentif untuk sektor-sektor potensial yang belum tergarap maksimal.

2.6.10 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam Periode 2020- 2024)

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021- 2026, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, di samping untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas alokasi dana serta adanya transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dalam Tahun Anggaran 2020-2024, disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran belanja daerah diarahkan untuk mengatasi masalah

pembangunan yang bersifat mendasar meliputi bidang ketahanan pangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang adat istiadat seni dan budaya, dan bidang infrastruktur dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Di samping itu penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran sebelumnya, telah ditetapkan prioritas pembangunan adalah: Bidang Pangan, Sandang dan Papan, Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Bidang Pariwisata, Penguatan Insfrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**.**

2.6.11 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berikut disajikan total belanja daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana Tabel 2.129. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa total belanja daerah realisasinya lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan. Terlihat pada Tabel bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Karangasem berada pada tren 90,64%, penyebabnya adalah efisiensi anggaran, tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan kurangnya perencanaan penyerapan anggaran yang baik.

Tabel 2.132
Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2020	1.613.401.229.416,76	1.464.635.320.648,62	(148.765.908.768,14)	-9,22%
2	2021	1.679.448.303.840,00	1.547.531.450.798,42	(131.916.853.042)	-7,85%
3	2022	1.703.162.034.813,04	1.548.907.880.948,46	(154.254.153.865)	-9,06%
4	2023	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	(172.310.697.694)	-9,81%
5	2024 (unaudited)	2.037.830.086.999,00	1.816.957.179.582,48	(220.872.907.417)	-10,84%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.

2.6.12 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang melibatkan penerimaan maupun pengeluaran, baik yang telah diterima maupun yang akan diterima kembali. Dalam konteks penganggaran, pembiayaan terutama ditujukan untuk menutup defisit anggaran dan/atau memanfaatkan surplus yang terjadi. Kebijakan pembiayaan daerah sendiri terdiri atas dua komponen utama, yaitu Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan mengalami surplus, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran tersebut mencakup:

i. Penggunaan SiLPA
ii. Pencairan dana cadangan, dan/atau
iii. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
iv. Penerimaan Pinjaman Daerah,
v. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
vi. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan mengalami defisit, pendanaan defisit tersebut dapat bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

i. Pembentukan Dana Cadangan
ii. Penyertaan Modal Daerah
iii. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
iv. Pemberian Pinjaman daerah
v. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
vi. Pembentukan Dana Abadi Daerah

Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan pembiayaan daerah bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2.133
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Tahun Anggaran	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	%	Bertambah/ (Berkurang)
1	2020	102.969.312.354,53	103.047.221.288,53	100,076%	77.908.934,00
2	2021	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,000%	0,88
3	2022	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	99,999%	(856.790,18)
4	2023	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,001%	2.192.978,75
5	2024 *(unaudited)*	188.595.928.986,00	188.595.928.986,01	100,000%	0,01

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020-2024 penerimaan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa realisasi selalu melampaui dari target anggaran, kecuali pada tahun 2022. Berikut adalah rinciannya:

Tahun 2020, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 103.047.221.288,53 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pembiayaan ini mencapai 100,076% dari anggaran yang telah ditetapkan, dengan

selisih lebih sebesar Rp. 77.908.934,00. Tahun 2021, penerimaan pembiayaan meningkat sebesar 10,54% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp. 113.908.336.480,00. Realisasi ini mencapai hampir 100,00% dari anggaran yang direncanakan dengan selisih sebesar Rp 0,88. Tahun 2022, penerimaan pembiayaan kembali meningkat sebesar 3,76% menjadi Rp 118.187.586.745,82. Namun, realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan, yaitu 99,99% dengan selisih kurang sebesar Rp 856.790,18. Tahun 2023, penerimaan pembiayaan meningkat secara signifikan sebesar 22,00% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 161.301.537.734,75. Tingkat realisasi mencapai 100,01% dari anggaran dengan selisih lebih sebesar Rp. 2.192.878,75. Tahun 2024 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 188.595.928.986,01 (dengan tingkat realisasi mencapai 100,00%, dan selisih sebesar Rp 0,01).

Secara keseluruhan, berdasarkan tabel 2.131 selama kurun waktu 2020-2024, penerimaan pembiayaan Kabupaten Karangasem menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan rata-rata kenaikan selama 5 tahun sebesar 6,18 %. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.134
Laju Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2019	120.841.876.092,64	-	-
2	2020	103.047.221.288,53	(17.794.654.804,11)	-17,27%
3	2021	113.908.336.480,48	10.861.115.191,95	9,53%
4	2022	118.187.586.745,82	4.279.250.265,34	3,62%
5	2023	161.301.537.734,75	43.113.950.988,93	26,73%
6	2024	188.595.928.986,01	27.294.391.251,26	14,47%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp. 120.841.876.092,64. Tahun ini menjadi acuan untuk perhitungan perubahan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pembiayaan menurun menjadi Rp. 103.047.221.288,53. Penurunan ini sebesar Rp. 17.794.654.804,11 dibandingkan tahun sebelumnya, yang merepresentasikan penurunan sebesar 17,27%. Selanjutnya tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pembiayaan menjadi Rp. 113.908.336.480,48. Peningkatan ini mencapai Rp. 10.861.115.191,95 atau sebesar 9,53% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp. 118.187.586.745,82. Namun, peningkatan ini relatif kecil yaitu Rp. 4.279.250.265,34 atau hanya 3,62% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2023 menjadi titik signifikan dengan lonjakan penerimaan pembiayaan daerah yang mencapai Rp. 161.301.537.734,75. Kenaikan ini sebesar Rp. 43.113.950.988,93 dibandingkan tahun 2022, yang setara dengan pertumbuhan sebesar 26,73%. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp. 188.595.928.986,01 meningkat sebesar Rp. 27.294.391.251,26 atau sebesar 14,47% dibandingkan tahun 2023. Dapat dilihat secara keseluruhan, data ini menunjukkan fluktuasi penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Karangasem selama periode 2019-2024. Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan diikuti oleh peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Puncak kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 26,73%. Data ini mencerminkan dinamika kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Tabel 2.135
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Tahun Anggaran	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	%	Bertambah/ (Berkurang)
1	2020	145.000.000,00	65.436.458,22	45%	(79.563.541,78)
2	2021	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%	-
3	2022	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100%	-

No	Tahun Anggaran	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	%	Bertambah/ (Berkurang)
4	2023	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100%	-
5	2024	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100%	-

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karangasem selama tahun 2020 hingga 2024 memiliki variasi dalam jumlah realisasi dan alokasinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah. Tahun 2020, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 65.436.458,22 atau 45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 145.000.000,00. Pengeluaran ini digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, sementara tidak ada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah pada tahun tersebut. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 79.563.541,78. Tahun 2021, pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan menjadi Rp. 4.000.000.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai 100% dari anggaran yang direncanakan. Dana ini digunakan sepenuhnya untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Tahun 2022, pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp. 2.500.000.000,00 dengan tingkat realisasi juga mencapai 100%. Dana ini kembali dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Tahun 2023, pengeluaran pembiayaan meningkat tajam menjadi Rp. 41.500.000.000,00 dengan tingkat realisasi 100%. Alokasi dana ini terdiri dari Rp. 13.500.000.000,00 untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan Rp. 28.000.000.000,00 untuk pembentukan dana cadangan. Tahun 2024, pengeluaran pembiayaan kembali menurun menjadi Rp. 1.500.000.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Seluruh dana ini dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.

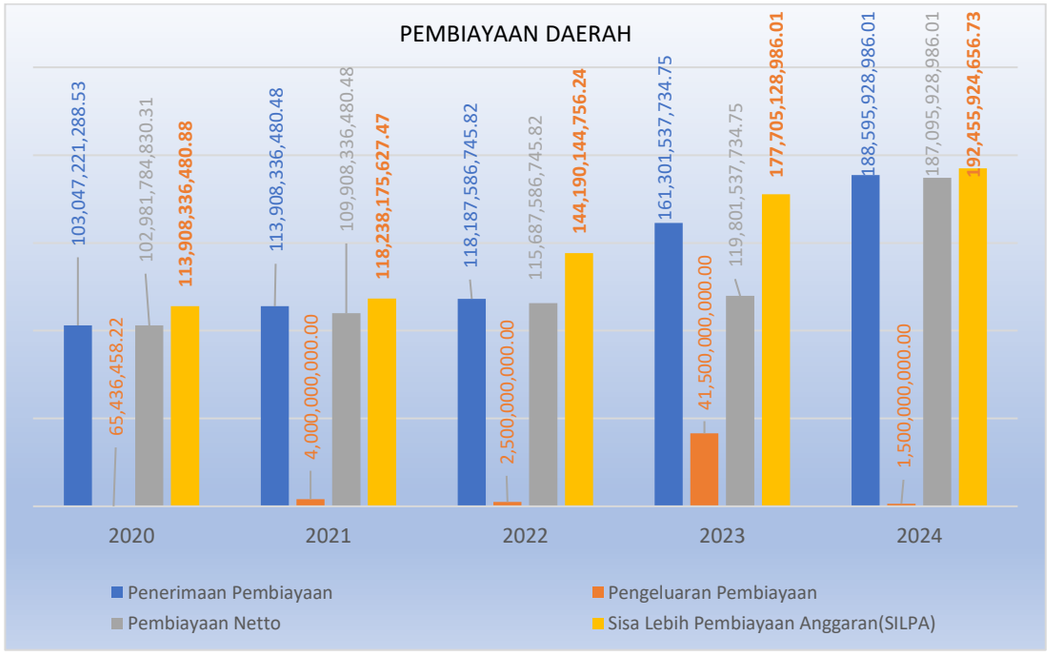
Secara keseluruhan, pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karangasem selama periode 2020-2024 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan strategis. Pengeluaran ini mencerminkan upaya pemerintah daerah

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, melakukan investasi, serta mempersiapkan pembentukan dana cadangan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.136
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan

No	Tahun Anggaran	Realisasi pengeluaran pembiayaan	Bertambah/Berkurang	%
1	2019	6.380.872.917,64	-	-
2	2020	65.436.458,22	(6.315.436.459,42)	-9651,25%
3	2021	4.000.000.000,00	3.934.563.541,78	98,36%
4	2022	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	-60,00%
5	2023	41.500.000.000,00	39.000.000.000,00	93,98%
6	2024	1.500.000.000,00	(40.000.000.000,00)	-2666,67%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024



Gambar 2.14
Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

2.6.13 Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karangasem, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
A	**Belanja Operasi**					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	453.101.859.875,00	426.075.954.929,00	424.543.362.611,80	411.524.765.202,00	443.706.719.144,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	216.937.780.847,79	108.493.000.237,00	90.252.902.370	88.669.307.775	113.960.473.110,00
3	Belanja Penerimaan lainya Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.983.100.000,00	787.000.000,00	848.350.000,00	848.700.000,00	737.600.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	6.871.578.025,75	4.372.315.528	173.977.037.519	136.370.515.763,00	10.731.404.088,13
5	Belanja Honorarium PNS**)	2.509.528.000,00	1.013.547.675	517.469.980	731.060.000,00	347.624.000,00
6	Belanja Uang Lembur**)	-	93.806.932,00	-	-	-
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-	-	-
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3.787.162.630,00	1.849.905.000,00	1.524.274.024,00	2.871.961.488,00	3.776.065.494,00
9	Belanja premi asuransi kesehatan	1.656.083.664,00	1.388.186.652,00	1.391.059.004,00	1.491.636.912,00	1.535.830.008,00
10	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	1.303.861.400,00	-	-	-	-
11	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	219.912.600,00	1.542.036.175,00	1.328.928.400,00	1.828.717.300,00	3.109.368.500,00
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	434.813.100,00	599.652.203,00	1.328.928.400,00	610.649.800,00	1.071.636.900,00
13	Belanja perjalanan dinas**)	28.310.800.996,00	18.410.307.801,00	23.647.312.471,00	29.393.617.767,00	31.340.368.198,65
14	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	81.578.987.875,56	143.668.862.436,15	139.308.067.685,15	119.036.449.121,10	250.683.792.931,76
	TOTAL	**800.695.469.014,10**	**708.294.575.568,15**	**858.667.692.464,95**	**793.377.381.128,10**	**861.000.882.374,54**

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-20

Tabel 2.138
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karangasem
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	%
1	Tahun anggaran 2020	800.695.469.014,10	1.464.700.757.106,84	54,67%
2	Tahun anggaran 2021	708.294.575.568,15	1.551.531.090.798,42	45,65%
3	Tahun anggaran 2022	858.667.692.464,95	1.551.407.880.948,46	55,35%
4	Tahun anggaran 2023	793.377.381.128,10	1.625.142.341.522,99	48,82%
5	Tahun anggaran 2024	861.000.882.374,54	1.818.457.179.582,48	47,35%

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 penggunaan belanja untuk aparatur sebesar 54,67%, Tahun 2021 sebesar 45,65 %, Tahun 2022 sebesar 55,35 %, Tahun 2023 sebesar 48.82 % dan Tahun 2024 sebesar 47,35%. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan masih dominannya persentase belanja aparatur dibandingkan belanja sektor publik. Kedepan perlu diformulasikan kembali agar proporsi belanja publik lebih besar persentasenya dibandingkan belanja aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karangasem terhadap total pengeluaran disajikan pada Tabel 3.22.

2.6.14 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama adalah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya wajib, tidak dapat ditunda, dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pengeluaran ini adalah jenis belanja yang harus dipenuhi pemerintah karena telah ditentukan oleh undang-undang atau regulasi, dan jika tidak dipenuhi, akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Contoh: Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan menjamin kelangsungan layanan publik dasar dan kegiatan rutin pemerintahan tanpa hambatan.

Untuk Prioritas Utama, Pengeluaran ini adalah alokasi anggaran untuk program atau kegiatan strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah dalam periode tertentu. Prioritas utama biasanya disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis kepala daerah. Contoh: Pembangunan Infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, belanja Hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat, termasuk subsidi dan bantuan langsung tunai, belanja modal, yang mencakup investasi untuk aset tetap, seperti gedung atau fasilitas kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan strategis dan mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan.

Tabel 2.139
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Realisasi
A	**Belanja Operasi**						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	453.101.859.875,00	426.075.954.929,00	424.543.362.611,80	411.524.765.202,00	443.706.719.144,00	431.790.532.352,36
2	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.983.100.000,00	787.000.000,00	848.350.000,00	848.700.000,00	737.600.000,00	1.440.950.000,00
3	Belanja Bunga	2.785.820,91	-	-	-	-	557.164,18
4	Belanja bagi hasil	11.558.024.859,79	12.055.086.912,23	20.875.653.392,00	30.110.567.205,20	39.170.192.200,00	22.753.904.913,84
5	Belanja barang dan jasa	376.100.346.825,58	442.983.232.013,70	452.812.860.996,76	499.841.936.183,78	460.062.847.288,96	446.360.244.661,76
6	Belanja Hibah	65.381.039.651,72	18.086.736.704,83	18.364.668.762,00	34.393.666.026,25	60.783.147.521,63	39.401.851.733,29
7	Belanja bantuan sosial	1.042.261.000,00	5.330.120.000,00	6.046.980.000,00	11.856.310.300,00	11.880.000.000,00	7.231.134.260,00
8	Belanja modal	81.578.987.875,56	143.668.862.436,15	139.308.067.685,15	119.036.449.121,10	250.683.792.931,76	146.855.232.009,94
9	Belanja tak terduga	19.630.352.099,09	2.119.880.311,00		54.000,00		7.250.095.470,03
10	Belanja bantuan keuangan	176.547.740.848,00	179.254.619.838,35	189.565.989.820,00	203.754.233.999,99	219.369.240.625,00	193.698.365.026,27
	JUMLAH	**1.188.926.498.855,65**	**1.230.361.493.145,26**	**1.252.365.933.267,71**	**1.311.366.682.038,32**	**1.486.393.539.711,35**	**1.293.882.829.403,66**
B	**Pembiayaan Pengeluaran**						
1	Pembentukan Dana Cadangan				28.000.000.000,00		28.000.000.000,00

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Realisasi
2	Pembayaran pokok utang	65.436.458,22					65.436.458,22
3	Penyertaan modal daerah		4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	13.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5.375.000.000,00
	JUMLAH	**65.436.458,22**	**4.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**41.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**9.913.087.291,64**
	TOTAL (A+B)	**1.188.991.935.313,87**	**1.234.361.493.145,26**	**1.254.865.933.267,71**	**1.352.866.682.038,32**	**1.487.893.539.711,35**	**1.303.795.916.695,30**

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Pengeluaran wajib dan mengikat memastikan keberlanjutan operasional pemerintah, sedangkan prioritas utama bertujuan untuk mendorong pembangunan strategis yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Keduanya adalah komponen penting dalam pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Karangasem selama tahun 2020 - 2024 mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan prioritas pembangunan daerah. Belanja tidak langsung melalui belanja gaji dan tunjangan mendominasi pengeluaran dengan rata-rata realisasi Rp. 515,30 miliar per tahun, belanja barang dan jasa juga signifikan dengan rata-rata Rp. 446,36 miliar selanjutnya belanja modal untuk infrastruktur mencapai rata-rata Rp.146,86 miliar serta total belanja tidak langsung mencakup rata-rata Rp. 1.377,43 miliar per tahun. Untuk pembiayaan pengeluaran melalui pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 28 miliar pada 2024 selanjutnya penyertaan modal daerah rata-rata mencapai Rp. 5,37 miliar per tahun. Sehingga total belanja melalui total pengeluaran tahunan berkisar antara Rp. 1.214,19 miliar pada 2020 hingga Rp. 1.489,55 miliar pada 2024, dengan rata-rata Rp. 1.387,34 miliar per tahunnya.

2.6.15 Defisit Rill Anggaran

Analisis pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Karangasem dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, defisit anggaran yang terjadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Secara rinci disajikan pada Tabel 3.24.

Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Karangasem dari tahun 2020 s/d tahun 2024, terdapat surplus Anggaran dari tahun ke tahun atau tidak terjadi defisit anggaran. surplus anggaran tersebut terjadi karena tingginya realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBD yang berbasis kinerja, memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan Tahun anggaran. Dalam periode Tahun 2020 s/d 2024, surplus Riil Anggaran mengalami tren fluktuaktif. Tahun 2020 Surplus Riil Anggaran sebesar Rp. 10.861.115.192,35 selanjutnya tahun 2021 mengalami penurunan surplus menjadi Rp. 4.329.839.146,99 dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 26.002.558.010,42, tahun 2023 sebesar Rp. 16.403.591.251,26, dan di tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp. 3.859.995.670,72. Secara rinci disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.140
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024

NO	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**1.475.561.872.299,19**	**1.555.860.929.945,41**	**1.577.410.438.958,88**	**1.641.545.932.774,25**	**1.822.317.175.253,20**
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.464.635.320.648,62	1.547.531.090.798,42	1.548.907.880.948,46	1.583.642.341.522,99	1.816.957.179.582,48
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	65.436.458,22	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	41.500.000.000,00	1.500.000.000,00
A	**Surplus/(Defisit) riil**	**10.861.115.192,35**	**4.329.839.146,99**	**26.002.558.010,42**	**16.403.591.251,26**	**3.859.995.670,72**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	103.044.007.652,53	113.908.336.480,48	118.187.586.745,82	144.191.886.744,75	177.705.128.986,01
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	17.109.200.000,00	10.890.800.000,00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.213.636,00	-	-	450.990,00	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**103.047.221.288,53**	**113.908.336.480,48**	**118.187.586.745,82**	**161.301.537.734,75**	**188.595.928.986,01**
A+B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**113.908.336.480,88**	**118.238.175.627,47**	**144.190.144.756,24**	**177.705.128.986,01**	**192.455.924.656,73**

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Defisit yang terjadi pada tahun 2020 – 2024 mampu ditutupi oleh komponen SiLPA pada APBD. Proporsi penutupan defisit riil pada tahun 2020 sebesar 6,528 %, pada tahun 2021 sebesar 6,82%, tahun 2022 sebesar 6,97%, tahun 2023 sebesar 9,86 %, dan di tahun 2024 sebesar 9,57%. Analisis pembiayaan ini penting untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.141
Proporsi Realisasi Penerimaan Pembiayaan terhadap total APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024 (unaudited)		Rata-rata realisasi
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Total APBD	1.578.609.093.587,72		1.669.769.266.425,89		1.695.598.025.704,70		1.802.847.470.509,00		2.010.913.104.239,21		1.751.547.392.093,30
1	**Pendapatan Daerah**	1.475.561.872.299,19	93,472 %	1.555.860.929.945,41	93,18 %	1.577.410.438.958,88	93,03 %	1.641.545.932.774,25	91,05 %	1.822.317.175.253,20	90,62 %	1.614.539.269.846,19
2	**Penerimaan Pembiayan**	103.047.221.288,53	6,53%	113.908.336.480,48	6,82 %	118.187.586.745,82	6,97 %	161.301.537.734,75	8,95 %	188.595.928.986,01	9,38 %	137.008.122.247,12
	Jumlah	1.578.609.093.587,72	100%	1.669.769.266.425,89	100%	1.695.598.025.704,70	100%	1.802.847.470.509,00	100%	2.010.913.104.239,21	100%	1.751.547.392.093,30

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2020 hingga 2024 (tahun 2024 masih dalam status *unaudited*). Data yang disajikan mencakup dua komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, serta total APBD setiap tahunnya. Tahun 2020 total APBD sebesar Rp. 1.578.609.093.587,72 dengan komponen pendapatan daerah mencapai Rp. 1.475.561.872.299,19 atau 93,47% dari total APBD, penerimaan pembiayaan menyumbang Rp. 103.047.221.288,53, setara dengan 6,53% dari total APBD. Tahun 2021 total APBD meningkat menjadi Rp. 1.669.769.266.425,89 dengan pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp. 1.555.680.929.945,41 yang merupakan 93,18% dari total APBD, penerimaan pembiayaan berjumlah Rp. 113.088.336.480,48 atau 6,82% dari total APBD. Tahun 2022 total APBD naik lagi menjadi Rp. 1.695.898.025.704,70 dengan pendapatan daerah mencapai Rp. 1.577.461.438.958,88 setara dengan 93,13% dari total APBD, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp. 118.436.586.745,82, atau 6,97% dari total APBD. Kemudian di tahun 2023 total APBD terus bertambah menjadi Rp. 1.802.847.470.509,00 dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.641.545.932.774,25 yaitu 91,95% dari total APBD, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 161.301.537.734,75, atau 8,95% dari total APBD. Dan pada tahun 2024 total APBD diproyeksikan mencapai Rp. 2.010.913.104.239,21 dengan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.822.317.175.253,90, yang merupakan 90,62% dari total APBD, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp. 188.595.928.985,31 setara dengan 9,38% dari total APBD.

Tabel 2.142
Proporsi Realisasi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024 (unaudited)		Rata-rata realisasi
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Jumlah SiLPA	**103.044.007.652,53**	**100 %**	**113.908.336.480,88**	**100,00 %**	**118.187.586.745,82**	**100,00%**	**177.705.128.986,01**	**100,00%**	**192.455.924.656,73**	**100,00%**	**141.060.196.904,39**
1	Pelampauan penerimaan PAD	12.215.706.644,53	11,85 %	6.114.518.447,88	5,37%	11.442.849.593,94	9,68%	47.412.818.425,01	26,68 %	28.416.982.759,80	14,77 %	21.120.575.174,23
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-		-		-		-		-		-
3	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-		-		-		450.990,00	0,0003%	-		90.198,00
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.510.897.584,01	5,35 %	-		5.921.786.628,00	5,01%	25.945.682,00	0,0146%	-		2.291.725.978,80
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	79.426.772.146,63	77,08 %	107.793.818.033,00	94,63%	100.823.807.315,00	85,31 %	130.265.913.889,00	73,30 %	164.038.941.896,93	85,23 %	116.469.850.656,11
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-		-		-	-	-	-	-	-	-
8	Koreksi SiLPA	74.695.298,00	0,07 %									14.939.059,60

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024 (unaudited)		Rata-rata realisasi
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
9	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	21.781.880,00	0,02 %									4.356.376,00
10	Sisa Belanja DAK	5.764.304.292,00	5,59 %									1.152.860.858,40
11	Pembayaran Pokok Hutang	14.127.082,36	0,01 %									2.825.416,47
12	Penerimaan Piutang	15.772.725,00	0,02 %									3.154.545,00

Sumber Data : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

Tahun 2020 jumlah SiLPA tercatat sebesar Rp. 103.044.007.652,53, angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 113.908.336.480,48 naik sekitar 10,56%. Tahun 2022, SiLPA kembali meningkat menjadi Rp. 118.187.586.745,82 naik 3,76%. Pada tahun 2023 terdapat lonjakan signifikan menjadi Rp. 177.705.128.986,01 dengan pertumbuhan sebesar 50,34% dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya tahun 2024, jumlah SiLPA diproyeksikan mencapai Rp. 192.455.924.656,73. Rata-rata realisasi total SiLPA selama periode 2020-2024 tercatat sebesar Rp. 141.060.196.904,39 dengan rata-rata kontribusi terbesar berasal dari sisa penghematan belanja atau alokasi lainnya sebesar Rp. 116.469.850.656,11 dan pelampauan penerimaan PAD Rp. 21.120.575.474,23. Komponen utama yang berkontribusi terhadap SiLPA adalah pelampauan penerimaan PAD dan sisa penghematan belanja. Data ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi penerimaan daerah.

2.6.16 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Karangasem selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan pajak retribusi diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga

menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.

c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

2.6.17 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karangasem (data realisasi tahun 2020-2024), maka terdapat asumsi dan beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi APBD Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2026-2030 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan proyeksi realisasi APBD Kabupaten Karangasem (Pendapatan dan Belanja Daerah) pada tahun 2026-2030 disusun mengacu kepada realisasi APBD Kabupaten Karangasem pada tahun 2020-2024.
2. Penyusunan proyeksi APBD dilakukan berdasarkan asumsi konservatif dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun waktu 2020-2024.
3. Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali yang kembali tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,28% pada tahun 2022-2023 setelah sempat mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) selama periode pandemi (2020-2021). Hingga triwulan III tahun 2024, ekonomi Bali secara kumulatif tercatat mampu tumbuh 5,58% dibandingkan tahun 2023.
4. Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga belum mempertimbangkan bila terjadi kondisi *force majeur*, seperti bencana alam yang tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi Bali, khususnya industri pariwisata sebagai penggerak

utama ekonomi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.

5. Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini, belum mempertimbangkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Tahun 2026 yang akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, antara lain kebijakan pendapatan transfer, perpajakan, retribusi, bantuan keuangan dan pengelolaan *cashflow* anggaran dari sisi pendapatan, termasuk dari sisi belanja (kebijakan pengembangan infrastruktur, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta bantuan sosial).

Tabel 2.143
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4.	**PENDAPATAN**	**1.475.561.872.299,19**	**1.555.860.929.945,41**	**1.577.410.438.958,88**	**1.641.545.932.774,25**	**1.822.317.175.253,20**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**219.234.680.191,34**	**252.729.235.767,47**	**301.332.231.354,78**	**381.240.518.353,76**	**414.565.206.028,20**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	66.506.517.157,75	85.660.356.296,00	167.957.909.825,42	232.153.510.496,00	273.646.072.481,10
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.350.561.671,00	9.187.772.781,00	10.215.719.116,00	10.472.014.639,00	9.508.777.306,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	11.968.117.309,66	10.759.415.258,47	9.321.192.563,91	10.334.895.322,92	17.077.888.186,17
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	131.409.484.052,93	147.121.691.432,00	113.837.409.849,45	128.280.097.895,84	114.332.468.054,93
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.181.370.504.509,03**	**1.218.932.970.282,13**	**1.251.259.824.797,00**	**1.258.329.468.738,00**	**1.406.411.525.953,00**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.039.076.219.402,00**	**1.097.820.639.495,00**	**1.060.714.386.563,00**	**1.065.323.588.563,00**	**1.162.203.551.295,00**
4.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**918.022.076.402,00**	**954.204.838.495,00**	**973.346.781.563,00**	**964.079.478.563,00**	**1.069.138.776.295,00**
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	21.426.698.466,00	27.677.029.795,00			17.398.566.000,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.155.335.938,00	-	-	-	-
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	713.291.169.000,00	700.663.380.000,00			775.837.883.115,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Fisik	38.269.064.645,00	82.936.341.064,00			55.595.869.328,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	143.879.808.353,00	142.928.087.636,00			220.306.457.852,00
4.2.1.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**-**	**58.326.553.000,00**	**9.523.895.000,00**	**21.860.366.000,00**	-
4.2.1.5	**Dana Desa**	**-**	**85.289.248.000,00**	**77.843.710.000,00**	**79.383.744.000,00**	80.146.587.000,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**121.054.143.000,00**	**-**	**-**	**-**	**12.918.188.000,00**
	Dana Penyesuaian	121.054.143.000,00	-	-	-	-

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Insentif fiskal					12.918.188.000,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**108.747.242.652,03**	**88.024.000.962,13**	**131.395.646.289,00**	**152.889.792.401,00**	**189.805.671.394,00**
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	108.747.242.652,03	-	-	-	-
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	88.024.000.962,13	131.395.646.289,00	152.889.792.401,00	189.805.671.394,00
4.2.4	**Bantuan Keuangan**	**33.547.042.455,00**	**33.088.329.825,00**	**59.149.791.945,00**	**40.116.087.774,00**	**54.402.303.264,00**
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	33.047.042.455,00	33.088.329.825,00	59.149.791.945,00	40.116.087.774,00	54.402.303.264,00
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	500.000.000,00	-	-	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**74.956.687.598,82**	**84.198.723.895,81**	**24.818.382.807,10**	**1.975.945.682,49**	**1.340.443.272,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	74.956.618.979,00	2.673.000.000,00	398.546.349,10	14.949.125,48	1.152.190,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	68.619,82	81.525.723.895,81	24.419.836.458,00	1.960.996.557,01	1.339.291.082,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.475.561.872.299,19**	**1.555.860.929.945,41**	**1.577.410.438.958,88**	**1.641.545.932.774,25**	**1.822.317.175.253,20**

Tabel 2.144
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.	**BELANJA**	**1.464.635.320.648,62**	**1.547.531.090.798,42**	**1.548.907.880.948,46**	**1.583.642.341.522,99**	**1.816.957.179.582,48**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.175.320.214.966,18**	**1.210.432.641.300,69**	**1.199.158.170.051,31**	**1.230.741.037.196,70**	**1.307.733.953.825,72**
5.1.1	Belanja Pegawai	732.793.781.667,97	744.032.552.582,16	721.933.660.292,55	684.649.124.686,67	775.007.959.015,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	376.100.346.825,58	442.983.232.013,70	452.812.860.996,76	499.841.936.183,78	460.062.847.288,96
5.1.3	Belanja Bunga	2.785.820,91	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	65.381.039.651,72	18.086.736.704,83	18.364.668.762,00	34.393.666.026,25	60.783.147.521,63
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.042.261.000,00	5.330.120.000,00	6.046.980.000,00	11.856.310.300,00	11.880.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**81.578.987.875,56**	**143.668.862.436,15**	**139.308.067.685,15**	**119.036.449.121,10**	**250.683.792.931,76**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.961.049.723,07	48.585.490.957,63	47.219.074.193,50	39.642.592.244,00	69.853.847.154,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.105.183.205,49	15.612.356.116,52	32.102.107.210,05	36.688.278.976,39	62.040.107.934,76
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.465.919.377,00	75.187.840.992,00	59.535.424.292,60	41.479.827.150,71	117.717.493.843,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.046.835.570,00	4.283.174.370,00	451.461.989,00	1.210.750.750,00	295.994.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	15.000.000,00	776.350.000,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**19.630.352.099,09**	**2.119.880.311,00**	**-**	**54.000,00**	**-**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	19.630.352.099,09	2.119.880.311,00	0,00	54.000,00	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**188.105.765.707,79**	**191.309.706.750,58**	**210.441.643.212,00**	**233.864.801.205,19**	**258.539.432.825,00**
5.4.1	Belanja Bagi hasil	11.558.024.859,79	12.055.086.912,23	20.875.653.392,00	30.110.567.205,20	39.170.192.200,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.547.740.848,00	179.254.619.838,35	189.565.989.820,00	203.754.233.999,99	219.369.240.625,00
	TOTAL BELANJA	**1.464.635.320.648,62**	**1.547.531.090.798,42**	**1.548.907.880.948,46**	**1.583.642.341.522,99**	**1.816.957.179.582,48**

Tabel 2.145
Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (2020-2024)
04.00	**PENDAPATAN**	**-9.16%**	**5.44%**	**1.39%**	**4.07%**	**11,01%**	**2,55%**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**-5.91%**	**15.28%**	**19.23%**	**26.52%**	**8,74%**	**12,77%**
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	-38.63%	28.81%	96.07%	38.22%	17,87%	28,47%
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	-28.33%	-1.53%	11.19%	2.51%	-9,20%	-5,11%
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	2.88%	-10.10%	-13.37%	10.88%	65,24%	11,11%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.46%	11.91%	-22.62%	12.69%	-10,87%	4,52%
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**-11.17%**	**3.18%**	**2.65%**	**0.57%**	**11,77%**	**1,40%**
04.02.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**-5.33%**	**5.65%**	**-3.38%**	**0.43%**	**9,09%**	**1,30%**
4.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**-7.04%**	**3.94%**	**2.01%**	**-0.95%**	**10,90%**	**1,77%**
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	49.82%	29.17%	-100.00%		100,00%	15,80%
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-14.73%	-100.00%	0.00%		-	-22,95%
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	-7.58%	-1.77%	-100.00%		100,00%	-1,87%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Fisik	-27.77%	116.72%	-100.00%		100,00%	17,79%
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-2.17%	-0.66%	-100.00%		100,00%	-0,57%
4.2.1.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**-**	**100.00%**	**-83.67%**	**129.53%**	**-100,00%**	**9,17%**
4.2.1.5	**Dana Desa**	**-**	**100.00%**	**-8.73%**	**1.98%**	**0,96%**	**18,84%**
04.02.02	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**10.02%**	**-100.00%**	**-**		**100,00%**	**2,00%**
	Dana Penyesuaian	10.02%	-100.00%	-			-18,00%
	Insentif Fiskal	-		-		100,00%	20,00%
04.02.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**-19.47%**	**-19.06%**	**49.27%**	**16.36%**	**24,15%**	**10,25%**
04.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	100.00%	-100.00%	0.00%			0,00%
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-100.00%	100.00%	49.27%	16.36%	24,15%	17,96%
04.02.04	**Bantuan Keuangan**	**-65.54%**	**-1.37%**	**78.76%**	**-32.18%**	**35,61%**	**3,06%**
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-7.39%	0.12%	78.76%	-32.18%	35,61%	14,99%
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	-99.19%	-100.00%	-			-39,84%
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**22.07%**	**12.33%**	**-70.52%**	**-92.04%**	**-32,16%**	**-32,06%**
04.03.01	Pendapatan Hibah	22.14%	-96.43%	-85.09%	-96.25%	-92,29%	-69,58%
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	-99.81%	118790249.34%	-70.05%	-91.97%	-31,70%	23761488,69%
	JUMLAH PENDAPATAN	**-9.16%**	**5.44%**	**1.39%**	**4.07%**	**11,01%**	**2,55%**

Tabel 2.146
Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (2020-2024)
05.00	**BELANJA**	**-10.46%**	**5.66%**	**0.09%**	**2.24%**	**14,73%**	**2,45%**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**-8.95%**	**2.99%**	**-0.93%**	**2.63%**	**6,26%**	**0,40%**
05.01.01	Belanja Pegawai	-3.28%	1.53%	-2.97%	-5.16%	13,20%	0,66%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	-24.15%	17.78%	2.22%	10.39%	-7,96%	-0,34%
05.01.03	Belanja Bunga	-79.31%	-100.00%	-			-35,86%
05.01.05	Belanja Hibah	342.87%	-72.34%	1.54%	87.28%	76,73%	87,22%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-95.39%	411.40%	13.45%	96.07%	0,20%	85,15%
05.02	**BELANJA MODAL**	**-46.41%**	**76.11%**	**-3.04%**	**-14.55%**	**110,59%**	**24,54%**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-		-			-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.83%	38.97%	-2.81%	-16.05%	76,21%	22,23%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-48.27%	-18.28%	105.62%	14.29%	69,10%	24,49%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-71.95%	267.38%	-20.82%	-30.33%	183,79%	65,62%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-40.72%	-39.22%	-89.46%	168.18%	-75,55%	-15,35%
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-		-		5075,67%	1015,13%
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**100.00%**	**-89.20%**	**-100.00%**	**100.00%**	**-100,00%**	**-17,84%**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	100.00%	-89.20%	-100.00%	100.00%	-100,00%	-17,84%
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**100.00%**	**1.70%**	**10.00%**	**11.13%**	**10,55%**	**26,68%**
05.04.01	Belanja Bagi hasil	100.00%	4.30%	73.17%	44.24%	30,09%	50,36%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.00%	1.53%	5.75%	7.48%	7,66%	24,49%
	TOTAL BELANJA	**-10.46%**	**5.66%**	**0.09%**	**2.24%**	**-5.07%**	**-3.49%**

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem untuk periode 2026-2030 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur pendapatan daerah meliputi tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, struktur belanja daerah mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Potensi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem pada periode 2026-2030 diproyeksikan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian nasional dan regional. Secara nasional, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh stabil di kisaran 5,4-6,0% per tahun pada tahun 2026, mencerminkan pemulihan yang solid pasca pandemi Covid-19. Namun, kondisi perekonomian Kabupaten Karangasem diproyeksikan berada di bawah rata-rata Provinsi Bali, mengingat dampak jangka panjang pandemi terhadap sektor pariwisata sebagai sektor utama ekonomi wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada periode tersebut diperkirakan hanya mampu mencapai sekitar 4% per tahun. Angka ini mengindikasikan tantangan struktural yang dihadapi daerah, khususnya terkait upaya diversifikasi ekonomi dan optimalisasi potensi daerah di luar sektor pariwisata. Potensi realisasi pertumbuhan juga sangat bergantung pada minimnya anomali, baik dari sisi eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, maupun internal seperti kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan yang optimal, Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu mengambil langkah-langkah strategis. Di antaranya adalah meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi sektor non-pariwisata, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam memaksimalkan dana transfer, dan mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti

agrikultur, industri kreatif, serta infrastruktur pendukung. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berpeluang untuk lebih kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.147
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2026-2030 (Rupiah)

NO	URAIAN	INDUK 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**PENDAPATAN**	**1.718.050.604.576**	**1.960.273.435.311**	**2.018.290.786.637**	**2.078.278.876.380**	**2.140.284.661.365**	**2.204.297.325.175**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**456.359.832.412**	**494.350.351.081**	**508.286.349.343**	**522.787.906.056**	**537.827.794.691**	**553.315.406.984**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	324.810.293.132	347.830.338.342	358.872.949.582	370.370.994.037	382.345.651.762	394.819.132.505
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.325.832.200	8.877.804.000	8.986.609.250	9.090.994.899	9.241.521.485	9.321.656.786
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	10.424.995.605	16.005.000.000	17.080.000.000	17.655.000.000	18.230.000.000	18.805.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.798.711.475	121.637.208.739	123.346.790.511	125.670.917.120	128.010.621.444	130.369.617.693
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.259.717.455.744**	**1.463.849.596.090**	**1.507.830.777.434**	**1.553.217.138.744**	**1.600.082.863.374**	**1.648.507.743.171**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.170.113.362.000**	**1.255.917.702.845**	**1.288.086.056.853**	**1.321.113.090.044**	**1.355.022.363.466**	**1.389.838.096.637**
4.2.01.05	Dana Desa	83.992.155.000	85.226.555.298	86.479.097.101	87.750.047.028	89.039.675.615	90.348.257.377
4.2.01.06	Insentif fiskal	21.500.426.000	22.145.438.780	22.809.801.943	23.494.096.002	24.198.918.882	24.924.886.448
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.759.626.000	21.977.222.260	22.196.994.483	22.418.964.427	22.643.154.072	22.869.585.612
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	809.880.908.000	833.367.454.332	857.535.110.508	882.403.628.712	907.993.333.945	934.325.140.629
4.2.01.09.01	DAK Fisik	1.124.124.000	56.707.786.715	57.841.942.449	58.998.781.298	60.178.756.924	61.382.332.062

NO	URAIAN	INDUK 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	231.856.123.000	236.493.245.460	241.223.110.369	246.047.572.577	250.968.524.028	255.987.894.509
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**89.604.093.744**	**207.931.893.245**	**219.744.720.581**	**232.104.048.701**	**245.060.499.908**	**258.669.646.534**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.204.483.370	79.283.914.405	84.499.574.507	90.209.143.094	96.461.707.933	103.311.261.206
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	25.399.610.374	128.647.978.840	135.245.146.075	141.894.905.607	148.598.791.976	155.358.385.327
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.973.316.420**	**2.073.488.140**	**2.173.659.860**	**2.273.831.580**	**2.374.003.300**	**2.474.175.020**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	1.973.316.420	2.073.488.140	2.173.659.860	2.273.831.580	2.374.003.300	2.474.175.020
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.718.050.604.576**	**1.960.273.435.311**	**2.018.290.786.637**	**2.078.278.876.380**	**2.140.284.661.365**	**2.204.297.325.175**
5	**BELANJA**	**1.803.499.121.925**	**2.117.523.435.311**	**2.143.887.927.196**	**2.185.488.019.985**	**2.341.251.619.395**	**2.349.207.564.412**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.490.482.292.958**	**1.706.235.818.413**	**1.710.935.240.020**	**1.711.637.201.937**	**1.768.528.667.079**	**1.707.461.314.976**
5.1.01	Belanja Pegawai	953.252.694.320	1.150.542.307.264	1.147.399.099.037	1.140.786.073.885	1.145.791.044.948	1.153.390.754.548
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.302.097.638	479.293.959.149	481.582.213.983	477.725.107.302	470.020.902.944	458.643.607.881
5.1.03	Belanja Bunga	-		-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	62.177.501.000	59.312.052.000	62.012.052.000	70.312.052.000	127.012.052.000	66.812.052.000

NO	URAIAN	INDUK 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000	17.087.500.000	19.941.875.000	22.813.968.750	25.704.667.188	28.614.900.547
5.2	**BELANJA MODAL**	**74.431.281.049**	**158.783.930.377**	**174.445.254.861**	**204.510.236.392**	**295.081.474.068**	**354.502.640.184**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.726.092.060	48.176.975.169	52.730.749.997	62.085.743.841	91.609.489.733	110.749.878.438
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.839.939.000	32.290.822.109	36.844.596.937	46.199.590.781	75.723.336.673	94.863.725.378
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.623.419.989	78.074.303.098	84.628.077.926	95.983.071.770	127.506.817.662	148.647.206.367
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.830.000	241.830.000	241.830.000	241.830.000	241.830.000	241.830.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.500.000.000**	**3.087.804.980**	**3.163.202.053**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**	**7.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000	3.087.804.980	3.163.202.053	6.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**236.085.547.918**	**249.415.881.541**	**255.344.230.262**	**263.340.581.657**	**271.641.478.248**	**280.243.609.252**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	43.298.596.293	48.155.599.216	49.661.040.442	53.124.678.451	56.780.140.121	60.621.118.394
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192.786.951.625	201.260.282.325	205.683.189.820	210.215.903.206	214.861.338.128	219.622.490.858

NO	URAIAN	INDUK 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL BELANJA	**1.803.499.121.925**	**2.117.523.435.311**	**2.143.887.927.196**	**2.185.488.019.985**	**2.341.251.619.395**	**2.349.207.564.412**
	SURPLUS/DEFISIT	**-85.448.517.349**	**-157.250.000.000**	**-125.597.140.559**	**-107.209.143.605**	**-200.966.958.030**	**-144.910.239.237**
6.	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**89.448.517.349**	**160.000.000.000**	**155.597.140.559**	**146.959.143.605**	**208.466.958.030**	**152.410.239.237**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.448.517.349	160.000.000.000	155.597.140.559	146.959.143.605	149.466.958.030	152.410.239.237
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	59.000.000.000	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.000.000.000**	**2.750.000.000**	**30.000.000.000**	**39.750.000.000**	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			24.000.000.000	35.000.000.000		
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000	2.750.000.000	6.000.000.000	4.750.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	INDUK 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
6.2.6	Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**85.448.517.349**	**157.250.000.000**	**125.597.140.559**	**107.209.143.605**	**200.966.958.030**	**144.910.239.237**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.6.18 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan nilai tambah serta kontribusi realisasi belanja terhadap ekonomi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong peningkatan PAD, perlu dirumuskan strategi dan langkah-langkah progresif dalam upaya untuk mendorong sumber-sumber PAD baru. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:
   a. Meningkatkan potensi sumber PAD terutama pengembangan destinasi wisata berbasis desa adat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan di masing-masing desa berbasis pemberdayaan masyarakat ataupun melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan desa adat.
   b. Diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi Pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pendataan ulang objek pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, restoran, dan objek wisata, untuk memastikan semua potensi terdata dan tertagih dengan baik kemudian inovasi produk pariwisata dengan Mengembangkan wisata berbasis budaya, ekowisata, dan agrowisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.
   c. Mendorong peningkatan peran dan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong peningkatan laba BUMD tersebut. Peningkatan peran dan pengembangan ini dapat dilakukan antara lain dengan keterlibatan BUMD terkait dalam pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan (dengan persetujuan DPRD Kabupaten Karangasem). Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut dapat dipergunakan sebagai tujuan daerah destinasi wisata untuk kegiatan *Meetings, Incentives, Conventions, and Events (MICE).*

Tentunya dibutuhkan kerja sama yang strategis antara BUMD dengan pihak swasta untuk mewujudkan hal ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD khususnya untuk sub komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui pendapatan laba dari penyertaan modal pada BUMD.

d. Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal melalui pengembangan UMKM dengan Memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Selanjutnya Digitalisasi Ekonomi Lokal dengan membantu UMKM dan sektor informal untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan transaksi.
e. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Keterampilan Kerja dengan mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan. Melalui Pendidikan Vokasi juga untuk menyediakan pendidikan yang fokus pada bidang-bidang yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pariwisata, agribisnis, dan teknologi.
f. Promosi Daerah melalui branding dan promosi wisata dengan memperkuat citra Kabupaten Karangasem melalui kampanye pemasaran digital, pameran, dan festival budaya untuk menarik investasi dan kunjungan wisata sehingga menjadi faktor pendukung untuk Ekspor Produk Lokal dengan mendorong promosi produk unggulan seperti kerajinan tangan, produk pertanian, dan hasil laut ke pasar internasional.
g. Untuk merealisasikan strategi-strategi tersebut, Peningkatan Kualitas Layanan Publik merupakan salah satu hal yang wajib terus di lakukan perbaikan ke arah yang lebih positif melalui Digitalisasi Administrasi Publik dengn mempermudah pengurusan perizinan, pembayaran pajak, dan layanan publik lainnya dengan sistem berbasis teknologi serta transparansi anggaran melalui penyusunan anggaran yang akuntabel dan

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Untuk mendorong peningkatan kontribusi dan nilai tambah realisasi belanja daerah terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Karangasem, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan tahapan untuk mendorong percepatan realisasi belanja daerah sesuai dengan targetnya. Persentase realisasi yang besar dan signifikan diupayakan untuk dapat dilakukan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya khususnya untuk komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan ini tentunya memerlukan upaya percepatan tahapan pengadaan (barang dan jasa serta modal), antara lain melalui percepatan tahapan pengadaan yang dapat dilakukan pada tahun sebelum masa anggaran dimulai ataupun pada periode awal masa anggaran, sehingga realisasi pengadaan dan belanja dapat dipercepat.
3. Dalam rangka mendorong akselerasi kinerja ekonomi Kabupaten Karangasem, maka prioritas anggaran pembangunan ditujukan untuk mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, prioritas anggaran pembangunan difokuskan pada pembangunan pertanian dari hulu ke hilir serta pengembangan produk olahan hasil pertanian dalam arti luas yang berorientasi ekspor.

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis

2.7.1 Permasalahan

1. Permasalahan Kondisi Geografis

Kabupaten Karangasem terletak di ujung paling timur Pulau Bali sehingga tidak dilalui jalur perdagangan antar provinsi, hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Karangasem berada pada jalur perdagangan Bali-Lombok sehingga perekonomian lambat berkembang. Secara geografis Kabupaten Karangasem, Bali yang dikitari bukit dan gunung terjal dan berbatuan, kondisinya kering dan tandus karena terbatasnya sumber air atau sekitar 92 persen dari luas wilayah yang mencapai

839,54 Km persegi, merupakan daerah kering dan tandus. Namun ada beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem memiliki sumber daya air yang cukup. Secara topografi wilayah Kabupaten Karangasem sebagian besar berada pada ketinggian sehingga koneksitas antar wilayah belum memadai. Permasalahan utama aspek geografis yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Cakupan wilayah yang luas dan sebagian besar kawasan kering.
2. Pemanfaatan sumber daya alam belum dikelola dengan baik.
3. Hampir separuh luas wilayah (43,49%), topografinya pada ketinggian > 500 m di atas permukaan laut dan berbukit.
4. Tingginya potensi bencana (bencana alam, bencana geologi, dan bencana meteorologi).
5. Sumber air yang dapat dikembangkan sangat terbatas
6. Tingginya kawasan hutan yang kritis dan kering yang rawan bencana kebakaran.
7. Curah hujan yang tidak menentu dan tidak merata.

2. Permasalahan Demografis

Jumlah penduduk Karangasem terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan implikasi dari adanya kelahiran dan ditambah dengan sedikit pengaruh dari migrasi masuk dan tingkat kelahiran yang hampir seimbang dengan tingkat kematian, serta pertumbuhan penduduk yang relatif tetap. Hampir dua pertiga penduduk produktif yang berada pada kisaran umur 15-64 tahun. Penduduk yang termasuk angkatan kerja hanya sekitar 86 persen dan sisanya termasuk usia sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lain. Hal ini menimbulkan angka ketergantungan yang tinggi. Kepadatan penduduk juga belum merata antar wilayah sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Permasalahan demografis yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk cenderung bertambah setiap tahun dan masih tingginya angka ketergantungan akibat adanya

perubahan struktur penduduk usia non produktif (khususnya penduduk usia 65 tahun ke atas) semakin bertambah.
2. Pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan lebih tinggi dan lebih padat.
3. Adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya ketimpangan gender

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

Cakupan wilayah yang luas dengan sebagian merupakan wilayah berbukit, kering dan tandus serta jumlah penduduk yang besar menimbulkan berbagai permasalahan di bidang kesejahteraan ekonomi, seperti lapangan kerja yang sedikit, kualitas SDM yang masih kurang, pemanfaatan sumber daya alam yang masih terbatas, tingginya penduduk miskin, pengangguran dan berbagai masalah sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan ekonomi yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pusat pertumbuhan ekonomi belum merata antar wilayah dan antar sektor ekonomi.
2. Pemanfaatan potensi ekonomi belum maksimal.
3. Investasi sektor ekonomi di luar pariwisata masih rendah.
4. Belum optimalnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
5. Nilai tukar petani masih rendah
6. Kesejahteraan petani dan ekonomi keluarga petani masih rendah.
7. Pendapatan per Kapita Masyarakat Karangasem masih rendah.
8. Pengeluaran untuk pangan (makanan) masih lebih tinggi dari pengeluaran untuk non makanan.
9. Kelompok pengeluaran 40% bawah masih tinggi untuk konsumsi komoditas padi-padian, diikuti komoditas makanan dan minuman.
10. Distribusi pendapatan kelompok 40% bawah masih rendah.

11. Sektor lapangan usaha UMKM, Koperasi dan Industri belum berkembang optimal.
12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah.
13. Indeks Kesejahteraan masyarakat Karangasem masih rendah.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Karangasem masih identik dengan kemiskinan, hal ini karena selama dasa warsa peringkat penduduk miskin di Kabupaten Karangasem masih tetap tertinggi di Bali. Kemiskinan lebih banyak dibentuk akibat faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk. Permasalahan kesejahteraan sosial budaya yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali.
2. Berubahnya aspek sosial multikultural dalam masyarakat Bali, seperti lebih konsumtif, kurang perhatian terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta melemahnya kohesi sosial.
3. Eksistensi nilai-nilai kebudayaan Bali yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami kemunduran
4. Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem masih di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Bali.
5. Angka melek huruf perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga menimbulkan ketimpangan gender.
6. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem masih di bawah Provinsi Bali.
7. Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Karangasem masih di bawah Provinsi Bali.
8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang tidak/belum bersekolah paling tinggi di Provinsi Bali.
9. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 masih di bawah Provinsi Bali.

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun, Usia 13-15 Tahun, Usia 16-18 Tahun, dan Usia 19-24 Tahun belum tercapai 100%.
11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat belum tercapai 100%.
12. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi belum tercapai 100%.
13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat belum tercapai 100%.
14. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem paling rendah di Provinsi Bali.
15. Sarana keolahragaan masih terbatas dan belum merata disetiap wilayah.
16. Program olah raga bagi Masyarakat belum optimal.
17. Belum ada pemetaan terhadap kondisi anak-anak yang rawan putus sekolah.
18. Program beasiswa anak kurang mampu belum optimal.

5. Permasalahan Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengelola aset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu model ekonomi dan sosial. Daya saing diperlukan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar. Permasalahan daya saing ekonomi daerah yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Ekonomi Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dan masih rendah.
2. Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karangasem secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke-enam (masih rendah dibanding kabupaten lain di Bali).

3. Sektor ekonomi pertanian masih belum mampu bangkit dari akibat covid-19.
4. Daya saing SDM masih rendah (IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali).
5. Memiliki panjang jalan kabupaten yang tinggi sehingga belum mampu semuanya dalam kondisi baik.
6. Daya saing investasi masih rendah

6. Permasalahan Terkait KLHS

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan untuk mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan daerah. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan prinsip keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), diperlukan perumusan permasalahan yang komprehensif. Rumusan permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang responsif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun rumusan permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
   Terjadi penurunan debit dan kualitas air di beberapa kecamatan, terutama pada musim kemarau, yang disebabkan oleh degradasi daerah tangkapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan pencemaran dari limbah domestik maupun pertanian.
2) Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian
   Lahan pertanian yang seharusnya dilindungi mengalami konversi untuk permukiman, pariwisata, dan infrastruktur, sehingga mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem.
3) Meningkatnya beban pencemaran lingkungan

Pertumbuhan sektor pariwisata, aktivitas industri kecil, dan transportasi meningkatkan beban pencemar air, udara, dan tanah, sementara kapasitas pengolahan limbah masih terbatas.

4) Degradasi kawasan lindung dan ekosistem penting
   Kawasan hutan, pesisir, dan ekosistem perairan terancam akibat perambahan, penebangan liar, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, serta dampak perubahan iklim.
5) Tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim
   Kabupaten Karangasem berada pada zona rawan erupsi gunung api, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, yang semakin diperparah oleh perubahan pola curah hujan dan suhu.
6) Ketimpangan distribusi dan pemanfaatan sumber daya antar wilayah
   Ketersediaan air, lahan, dan infrastruktur tidak merata, menyebabkan tekanan berlebih pada wilayah tertentu dan memperlebar kesenjangan pembangunan.
7) Pengelolaan sampah yang belum optimal
   Timbulan sampah terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan destinasi wisata, sementara fasilitas dan sistem pengelolaannya belum memadai.
8) Ketergantungan ekonomi pada sektor yang rentan lingkungan
   Struktur ekonomi masih sangat bergantung pada pariwisata massal dan eksploitasi sumber daya alam yang memiliki daya dukung terbatas.
9) Belum optimalnya integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
   Implementasi kebijakan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi target-target TPB, khususnya pada bidang pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan
    Masih terbatasnya pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan

7. Permasalahan Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Permasalahan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan merupakan langkah penting untuk membawa kehidupan menjadi lebih baik dan merupakan salah satu indikator penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa. sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Tetapi pada kenyataannya, kondisi tersebut belum tercapai mengingat Kabupaten Karangasem merupakan wilayah yang luas dan berbagai permasalahan yang terjadi di sektor pendidikan. Permasalahan pelayanan pendidikan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Rendahnya capaian rata-rata lama sekolah.
2. Sebaran sekolah TK dan SD belum merata di setiap daerah.
3. Kemampuan ekonomi peserta didik mulai TK, SD dan SMP masih rendah terutama dalam penyediaan pakaian seragam secara mandiri.
4. Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi yang kurang memadai.

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana belajar di sekolah TK hingga SMP.
6. Tingkat kesejahteraan guru yang belum baik.
7. Rasio murid terhadap guru di tingkat SMP masih tinggi (lebih dari rasio ideal, 20 murid per guru).
8. Rasio murid terhadap guru di tingkat SMA masih tinggi (lebih dari rasio ideal, 15 murid per guru).
9. Rasio murid terhadap guru di tingkat SMK masih tinggi (lebih dari rasio ideal, 15 murid per guru).
10. Jumlah sekolah SMP, SMA dan SMK belum merata di setiap kecamatan.
11. Pendidikan mental siswa belum disiplin, ulet, rajin dan sikap bela negara.

B. Permasalahan Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai visi Indonesia Sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisis data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan. Permasalahan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Kabupaten Karangasem kekurangan sarana Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu. Kekurangan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidak-adilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat.
2. Fasilitas sarana pelayanan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) dan Puskesmas belum memenuhi standar.

3. Jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan lainnya masih belum memadai.
4. Kurangnya pengembangan, penerapan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap standar pelayanan di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum (RSU)
5. Program POS YANDU belum optimal mencegah stunting.
6. Program Promosi kesehatan dan pencegahan, melalui penyuluhan-penyuluhan belum optimal.
7. Program Apotik Hidup dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK belum optimal.
8. Program UHC, dengan peningkatan layanan pasien, melalui RSUD dan Puskesmas belum optimal.

C. Permasalahan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang memadai diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang memadai secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Permasalahan pelayanan

pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Akses dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten masih belum memadai.
2. Infrastruktur jalan belum memadai ke seluruh wilayah Kabupaten.
3. Masih tingginya kondisi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.
4. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi selain dari mata air dan sungai.
5. Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi.
6. Rendahnya ketersediaan air irigasi pada musim kemarau.
7. Masih adanya Irigasi, jalan dan Jembatan dalam kondisi rusak.
8. Belum optimalnya infrastruktur air minum, dan revitalisasi embung, sumur bor dan air Telaga Waja.
9. Belum optimalnya konservasi sumber daya air.
10. Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai.
11. Belum tercapainya layanan air minum 100%.
12. Belum tercapainya layanan sanitasi 100%.
13. Belum optimalnya penanganan genangan kawasan.
14. Belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang.
15. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau, dan Taman bermain anak.
16. Belum optimalnya Penghijauan untuk lahan kritis.

D. Permasalahan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa mandiri kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah, dilain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Permasalahan pelayanan perumahan rakyat dan pemukiman yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem.
2. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam penanganan rumah tidak layak huni.
3. Bertambahnya penduduk baik karena urbanisasi menyebabkan tumbuhnya kebutuhan rumah dan pemukiman yang dapat menyebabkan adanya pemukiman kumuh perkotaan.
4. Kurangnya penataan lingkungan permukiman layak huni.
5. Kurangnya Penataan Kawasan Kota Amlapura

E. Permasalahan Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan stabilitas daerah sangat penting untuk mewujudkan penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk

mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tatanan kehidupan masyarakat dengan segala aspek sosial kultural dan sosial kemasyarakatannya dengan keberlakuan berbagai nilai-nilai di dalamnya baik sosial, agama, hukum dan budaya (adat) yang terjadi dalam suatu relasi atau hubungan sosial antar kelompok masyarakat dibutuhkan suatu perangkat aturan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan ketenteraman bagi kehidupan masyarakat. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang masih dihadapi 5 tahun mendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Masih adanya gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belum optimalnya koordinasi bersama Polri, TNI, Hansip dan Pecalang dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Belum optimalnya pencegahan dini gangguan Kamtibmas Tingkat Kabupaten, yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, Majelis Desa Adat, Majelis Keagamaan dan unsur terkait lainnya.
4. Penyuluhan kamtibmas dalam mencegah potensi gangguan keamanan desa belum optimal.
5. Masih rendahnya kompetensi Anggota Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang masih dihadapi 5 tahun mendatang oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Kemampuan pelayanan pemadam kebakaran masih terbatas (*response time* belum mencakup semua wilayah).
2. Kurangnya sarana dan prasarana operasional Pemadam Kebakaran
3. Ketersediaan Pos Pemadam Kebakaran belum merata di tiap kecamatan
4. Masih kurangnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
5. Terbatasnya SDM Pemadam Kebakaran

Permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang masih dihadapi 5 tahun mendatang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.
2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.
3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik.
4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah.

5. Belum optimalnya koordinasi Desa/Kelurahan, Polri, TNI, Hansip, dan Pecalang Desa Adat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang masih dihadapi 5 tahun mendatang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Kemampuan pelayanan penanggulangan bencana daerah (Pra Bencana; Saat Bencana; dan Pasca bencana) masih terbatas mengingat tingginya potensi bencana di Karangasem.
2. Kurangnya pelatihan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana

F. Permasalahan Pelayanan Sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti dan pandangan yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti, makanan, pakaian, rumah serta pendidikan dan kesehatan. Konsep mengenai kesejahteraan sosial ditemukan dari adanya masalah sosial dari setiap individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami keberfungsian sosial, baik itu karena faktor internal dalam keluarga maupun faktor eksternal keluarga. Kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila ada proses pelayanan dan proses penyesuaian diri dari individu, kelompok dan juga masyarakat yang mengalami masalah sosial, setiap masalah yang dialami dapat dipecahkan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah dan dalam menjalankan sebuah peran dan fungsi dari individu tersebut. Pelayanan sosial tidak hanya terfokus pada penyelesaian masalah yang bersifat sesaat. Dengan demikian untuk memberikan pelayanan sosial yang lebih komprehensif tersebut perlu adanya

identifikasi permasalahan yang dihadapi, jenis pelayanan sosial yang sudah ada, dan kebutuhan pelayanan sosial lainnya yang diperlukan. Pelayanan sosial apa yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jika mengacu pada permasalahan pada permasalahan yang ada di dalam keluarga maupun antar anggota masyarakat, maka pelayanan sosial berkisar pada pelayanan anak dan keluarga di dalam rumah maupun pelayanan sosial yang dapat menjembatani hubungan antar anggota masyarakat. Permasalahan pelayanan sosial yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih tingginya penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan sosial.
2. Jumlah rumah tangga miskin dan rentan dengan pekerjaan pokok di sektor informal berpenghasilan rendah/miskin masih tinggi.
3. Meningkatnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Kemampuan keuangan daerah untuk menangani PMKS dan PSKS masih terbatas.
5. Jumlah Desa yang termasuk rawan bencana cukup tinggi.
6. Sarana dan prasarana pelayanan, terutama gedung kantor belum memadai.

8. Permasalahan Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Permasalahan Pelayanan Tenaga Kerja

Pelayanan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja terkait proses pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang memiliki kompleksitas tinggi, akan tetapi hal ini menuntut untuk

segera diatasi, karena bila tidak diatasi maka akan menambah banyak jumlah pengangguran, sementara tren ke depan pertumbuhan kesempatan kerja relatif sedikit, hal ini menyebabkan akan makin besarnya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan yang tersedia, yang kemudian akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti menurunnya daya beli, meningkatnya jumlah penduduk miskin. Implikasi tersebut akan berlanjut pada kemampuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pelayanan tenaga kerja yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Penempatan tenaga kerja yang terbatas.
2. Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja.
3. Sertifikasi uji kompetensi peserta pelatihan ketrampilan kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk mampu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki daya saing masih terbatas.
4. Kapasitas pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat (jumlah pencari kerja yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah anggaran dan paket kegiatan yang mengarah pada kegiatan pelatihan keterampilan kerja).
5. Cakupan ke pesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah.
6. Perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang masih rendah.
7. Adanya alih teknologi dari manusia ke mesinisasi menyebabkan kebutuhan tenaga kerja berkurang.
8. Belum optimalnya LPK yang menyelenggarakan latihan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Karangasem.
9. Belum optimalnya Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja karena belum adanya Balai Besar Latihan Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem.

10. UMR Kabupaten Karangasem dengan analisa Kebutuhan Minimal Rumah Tangga masih rendah.
11. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan TKI keluar Negeri karena belum adanya biaya sistem talangan.
12. Informasi, penciptaan dan peluang lapangan kerja baru, baik dalam maupun luar negeri belum optimal.
13. Program pelatihan tenaga kerja terampil untuk kebutuhan tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun luar negeri belum optimal.

B. Permasalahan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat banyak hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan memiliki makna yang mulia karena mengatur serta mengurus sumber daya manusia dalam keluarga, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk kaum perempuan, berarti secara tidak langsung memberikan pendidikan pada individu lainnya dalam sebuah keluarga, maka suksesnya suatu rumah

tangga, sangat tergantung pada kemampuan dan potensi memadai dari perempuan, sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Perlindungan anak merupakan bagian yang terpenting dalam melindungi generasi bangsa dari bahaya kejahatan yang ada di masyarakat. Anak merupakan masa yang paling mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Usia ini merupakan masa pembentukan dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan dan kemandirian serta keterampilan sosial sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan. Anak secara hukum berhak mendapatkan perlindungan, namun dalam kenyataannya hak-hak anak masih belum terlindungi dan terpenuhi secara optimal. Upaya perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang berupa upaya tindakan untuk memastikan penjaminan dan perlindungan anak terhadap hak yang dimilikinya agar tetap melangsung kan hidup, tumbuh, berpartisipasi dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai manusia. Upaya perlindungan anak ini juga mencakup upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan dan deskriminasi. Permasalahan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih terbukanya potensi kejadian kekerasan pada anak.
2. Masih adanya kasus kekerasan perempuan.
3. Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Masih kurangnya peran forum anak dan kelembagaan PUG.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Karangasem.
6. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.
7. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak.
9. Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan.
10. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan.

11. Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;

C. Permasalahan Pelayanan Pangan

Konsep ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan meliputi: (1). Ketersediaan pangan: ketercukupan jumlah pangan; (2). Keamanan pangan (*food safety*): pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya (*food quality*) yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman; (3). Kemerataan pangan: sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata; dan (4). Keterjangkauan pangan: kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Permasalahan pelayanan pangan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan.
2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
3. Masih belum meratanya pemenuhan gizi anak usia sekolah
4. Ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal masih kurang.
5. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian/pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman.
6. Pengelola Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan belum optimal

D. Permasalahan Pelayanan Pertanahan

Tanah sebagai bagian dari aset tetap merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat, dapat juga digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan pembangunan suatu daerah sehingga pensertipikatan tanah aset ini wajib dilakukan dengan baik dan benar serta pemanfaatan tanah aset juga harus optimal sesuai tujuannya. Tanah sebagai aset Pemerintah Daerah penting untuk disertifikatkan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan bukti kepemilikan yang sah. Permasalahan pelayanan pertanahan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain masih adanya tanah aset pemerintah daerah belum bersertifikat.

E. Permasalahan Pelayanan Lingkungan Hidup

UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU- PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Permasalahan pelayanan lingkungan hidup yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Eksploitasi lahan di Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh pengusaha galian C menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Meningkatnya volume sampah terutama sampah non organik yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Belum optimalnya tata kelola sampah organik menjadi pupuk organik, sampah non organik didaur ulang, yang melibatkan kelompok pencinta lingkungan.
4. Kemampuan daerah dalam penanganan sampah masih terbatas.
5. Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dan beracun untuk industri dan pertanian.
6. Tata kelola sampah berbasis Masyarakat dan tehnologi masih belum optimal.
7. Penanganan kebersihan lingkungan, antar desa, antar sekolah dan antar perkantoran belum optimal.
8. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia masih kurang.

F. Permasalahan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan (adminduk) memiliki peran strategis dalam aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan bebas dari pungutan biaya. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan merupakan pedoman bagi penduduk dan pejabat berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Adminduk memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak-hak lainnya. Adminduk pun

memberikan pengakuan hukum atas identitas individu. Dokumen kependudukan sah dan resmi, seperti KTP, akta kelahiran, dan akta perkawinan, menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif, seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum semua lapisan masyarakat memahami penggunaan teknologi informasi khususnya dalam layanan administrasi kependudukan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang.
3. Inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di masyarakat masih rendah.
4. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan ditingkat Desa melalui *system on line.*

G. Permasalahan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu upaya yang penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Desa merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa meliputi berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan hasil perikanan. Sedangkan dalam aspek sosial, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Permasalahan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
2. Sistem pendataan profil/kelurahan desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa / kelurahan belum optimal.
3. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pedesaan masih rendah.
4. Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah.
5. Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
6. Sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan informasi kelurahan belum optimal.

H. Permasalahan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan yang diinginkan, pembinaan kesertaan keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga, penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan pendidikan dan peran wanita.

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Permasalahan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Akses pelayanan KB yang berkualitas masih belum merata.
2. Belum semua fasilitas kesehatan dan tenaga medis maupun paramedis yang dapat menggunakan teknologi informasi Keluarga Berencana, baik untuk pencatatan, pelaporan dan evaluasi maupun untuk perencana, terutama fasilitas yang dimiliki dan tenaga medis mandiri (non pemerintah).
3. Proses edukasi atau KIE masih kurang merata, khususnya di kalangan remaja.
4. Kerja sama dengan BKKBN didaerah, untuk program penyuluhan keluarga Sejahtera dan berkualitas belum optimal.

5. Belum adanya penghargaan bagi keluarga yang taat dengan program-program pemerintah.

I. Permasalahan Pelayanan Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat baik bagi masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Seiring berkembangnya zaman dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan serta kebutuhan manusia sektor transportasi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang terjadi. Permasalahan pelayanan perhubungan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pelayanan umum perhubungan yang belum memadai.
2. Belum maksimalnya pengelolaan terminal.
3. Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung pemerataan pembangunan di Bidang Perhubungan.

J. Permasalahan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik. Salah satunya adalah mengembangkan infrastruktur TIK melalu pengembangan aplikasi, muatan layanan umum, serta pemanfaatan jaringan TIK untuk peningkatan pelayanan publik. Sehingga banyak data yang dikelola, seperti data pemesanan software, pemasangan jaringan dan lain sebagainya. Untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database, tentunya membutuhkan suatu pengelolaan data atau informasi yang harus dikelola dan terdokumentasi dengan baik. Tidak hanya dalam penyediaan sistem informasi untuk pulik, namun dalam sistem informasi dan jaringan itu sendiri harus terjaga dan tertata dengan baik.

Pengelolaan data yang kurang baik tentunya dapat berdampak buruk terhadap manajemen data. Proses pengelolaan data kurang mendapatkan perhatian khusus, seperti tidak adanya dokumentasi data yang baik, sehingga risiko kehilangan, kerusakan dan tidak keakuratan data dapat menjadi masalah atau risiko pada proses pengelolaan data. Dalam hal ini manajemen jaringan dan data dapat dioptimalkan dengan

adanya sistem administrasi yang mengatur semua alur, sharing, dan semua komunikasi data yang terjadi di dalam sistem informasi.

Komunikasi data dalam suatu sistem informasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem tersebut dapat dikelola dengan baik oleh sistem admin yang baik pula. Sering kali terjadi kerusakan atau error jaringan yang menyebabkan komunikasi dalam sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Permasalahan pelayanan komunikasi dan informatika yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.
3. Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Masih adanya wilayah *Blank Spot* yang belum tersedia infrastruktur komunikasi.

K. Permasalahan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perekonomian Indonesia sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada Undang-undang No. 11 tahun 2020. Permasalahan pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.
2. Daya saing Koperasi dan UMKM masih rendah karena beberapa hal seperti: (a). Rendahnya produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM; (b). Kurangnya Koperasi dan UMKM yang mampu tumbuh ke skala lebih besar; dan (c).

Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

3. Jumlah wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan masih sedikit.
4. Kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri masih kurang.
5. Kemampuan UMKM bidang Tehnik, menejemen, Produk, Pasar dan Permodalan yang difasilitasi Lintas Pengusaha masih rendah.
6. Pemberdayaan terhadap kelompok – kelompok usaha bersama untuk perkembangan usahanya belum optimal.

L. Permasalahan Pelayanan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan iklim investasi yang menarik bagi investor. Penanaman modal sangatlah signifikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya penanaman modal mempunyai paling tidak dua manfaat bagi Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah, konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru. Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah :Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, dibedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Permasalahan pelayanan penanaman modal yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Iklim investasi di Kabupaten Karangasem belum mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangasem.

2. Kurangnya inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan promosi untuk menarik minat investor.
3. Masih lemahnya informasi potensi unggulan yang ada di Kabupaten Karangasem oleh Investor.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Mal Pelayanan Publik, dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan publik dan investasi dengan Mudah-Murah-Cepat melalui On Line System.
5. Belum optimalnya peran UMKM, PHRI, Koprasi dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait dalam menarik investasi Ke Karangasem.
6. Investasi dalam bidang pariwisata, tambang, pertanian, peternakan, pesisir dan perikanan belum optimal.
7. Kepastian mengurus perijinan usaha dengan prinsip, Mudah-Murah dan Cepat belum optimal.

M. Permasalahan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Dalam rangka mendorong optimalisasi peningkatan kualitas pemuda dan mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 57,67 pada tahun 2024, Pemerintah telah mengesahkan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam melaksanakan koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yaitu dengan meningkatkan sinergi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Permasalahan pelayanan kepemudaan dan olahraga yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktiif masih rendah.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga masih kurang.
3. Pembinaan pemuda dan atlet berprestasi belum optimal

N. Permasalahan Pelayanan Statistik

Untuk terwujudnya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat tidak terlepas dari perencanaan dan perumusan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan perencanaan dan perumusan yang baik dalam pembangunan tiada lain adalah tersedianya data dan statistik sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menterjemahkan dan mengolah data tersebut, dengan kata lain sebagai kata kunci dalam perencanaan dan perumusan pembangunan. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan institusi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Permasalahan pelayanan statistik yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Penyediaan data statistik sektoral di antaranya ada beberapa indikator pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data pada indikator dimaksud pada perangkat daerah yang bersangkutan.
2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia
3. Belum adanya data center.

O. Permasalahan Pelayanan Persandian

Sesuai Keputusan Mendagri No. 34 Tahun 2001 Tentang Proses Pengamanan Berita Rahasia Melalui Persandian Dan Telekomunikasi dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Dengan demikian, Pemerintah Daerah terutama bagi aparatur sipil negara agar efektif dalam mengelola Persandian dan Pengamanan Berita Rahasia Negara dikarenakan keterbukaan informasi publik maka itu harus efektif dalam mengelola persandian. Permasalahan pelayanan persandian yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Karangasem
2. Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi.

P. Permasalahan Pelayanan Kebudayaan

Peran pemerintah dalam pemeliharaan budaya sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman warisan budaya sebuah negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, program, dan langkah-langkah strategis guna melestarikan serta mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi identitas nasional. Program-program seperti revitalisasi seni tradisional, pendanaan bagi komunitas seniman lokal, dan promosi budaya melalui berbagai platform nasional dan internasional perlu terus diperkuat. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Berbagai cara dapat dilakukan dalam melestarikan budaya, namun yang paling penting yang harus pertama dimiliki adalah menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya sendiri, orang akan termotivasi untuk mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaannya akan tetap terus ada. Permasalahan pelayanan kebudayaan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Perlindungan warisan budaya belum optimal.
2. Perlindungan dan pelestarian kesenian tradisional melalui Parade Kebudayaan sebagai kalender event tahunan, ketersediaan stage pementasan seni dan budaya (*Art Centre*) yang belum memadai.
3. Belum optimalnya pelestarian seni budaya yang hampir punah.

4. Perlindungan dan pembinaan lembaga adat, Desa Adat, Subak/Subak Abian, Sekehe Teruna dan OKP belum optimal.
5. Pembinaan kesenian belum optimal.
6. Pembinaan sejarah lokal belum optimal.
7. Perlindungan objek diduga cagar budaya yang ditetapkan belum optimal.

Q. Permasalahan Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Permasalahan pelayanan perpustakaan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih kurangnya SDM dalam pelayanan seperti tenaga pustakawan dan arsiparis.
2. Terbatasnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan.
3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang.
4. Belum tersedianya gedung museum yang memadai.
5. Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan.

R. Permasalahan Pelayanan Kearsipan

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 menyatakan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan pelayanan kearsipan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimal perangkat daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku.
2. Masih kurangnya pengelolaan arsip in aktif.
3. SDM arsiparis yang memiliki kompetensi kearsipan masih sangat terbatas.
4. Sarana penyimpanan dan pengolahan arsip masih kurang memadai.

9. Permasalahan Pelayanan Umum Urusan Pilihan

A. Permasalahan Pelayanan Kelautan dan Perikanan

Pelayanan kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Permasalahan pelayanan kelautan dan perikanan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan.
2. Masih rendahnya produktivitas tangkap (pasca panen) daya saing produk.
3. Masih rendahnya produktivitas budidaya.
4. Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah.

B. Permasalahan Pelayanan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting bagi Negara Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,

dan pemerintah daerah. Selain itu, pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk kegiatan wisata sebagai kebutuhan dasar manusia yang diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata. Permasalahan pelayanan pariwisata yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang belum maksimal.
2. Belum Memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas.
3. Pengelolaan DTW yang belum optimal.
4. Strategi komunikasi pemasaran dan promosi belum optimal.

5. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha-usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal.
6. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional.
7. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum optimal

C. Permasalahan Pelayanan Pertanian

Pembangunan pertanian di Kabupaten Karangasem tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian daerah. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu pembangunan pertanian ditujukan untuk ketahanan pangan yang mampu memproduksi dan menyediakan sejumlah jenis pangan utama dalam jumlah yang lebih dari cukup, merata, terjangkau, berkualitas dan aman secara berkelanjutan. Berkelanjutan dicirikan dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan pelayanan pertanian dan ketahanan pangan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Rendahnya produksi dan produktivitas dan mutu produk pertanian yang disebabkan oleh belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pelibatan alat-alat, teknologi, bibit dan subsidi pupuk untuk peningkatan produktivitas.

2. Masih tingginya potensi gangguan ketahanan pangan terutama persediaan pangan secara berkelanjutan untuk menjamin aman persediaan.
3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air.
4. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian.
5. Meningkatnya OPT dan penyakit ternak.
6. Belum padunya antar-sektor dalam pembangunan pertanian.
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
8. Masih kurang Pemberdayaan kelompok Tani Ternak, melalui penyuluhan dan Temu Kemitraan Usaha Tani Ternak dengan Pengusaha bidang Pertanian.
9. Belum optimalnya pertanian terpadu peternakan dan kombinasi dengan pembuatan pupuk organik.
10. Pemberdayaan terhadap lahan menganggur, untuk program Pertanian Terpadu Kemitraan masih kurang.
11. Manajemen pemasaran dan pasca panen belum optimal
12. Akses dan implementasi teknologi pertanian belum memadai.

D. Permasalahan Pelayanan Kehutanan

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada Bangsa Indonesia sebagai salah satu potensi sumber daya alam yang tak ternila harganya, maka perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya hutan di kabupaten/kota ditarik ke provinsi.

E. Permasalahan Pelayanan Energi dan Sumber Daya Mineral

Setiap pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk di dalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral,

pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Kewenangan izin pertambangan mineral dan batu bara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Permasalahan pelayanan Energi dan Sumber Daya Mineral yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi air masih perlu ditingkatkan.
3. Koordinasi dan fasilitasi perizinan pertambangan perlu ditingkatkan

F. Permasalahan Pelayanan Perdagangan

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Permasalahan pelayanan perdagangan yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pedagang kecil belum mampu berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
2. Sarana dan prasarana distribusi barang/jasa belum memadai seperti Pasar/Gudang dan alat UTTP serta sarana pendukung usaha perdagangan lainnya.
3. Sarana dan prasarana pendukung jaminan perlindungan konsumen belum memadai.
4. Belum meratanya pasar desa di setiap desa sebagai pusat bergeraknya ekonomi lokal.

5. Belum optimalnya pengendalian harga-harga komoditas utama terutama saat terjadi lonjakan harga yang tinggi.
6. Belum adanya sembako murah bersubsidi untuk Keluarga kurang mampu.

G. Permasalahan Pelayanan Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran jika sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat. Permasalahan pelayanan industri yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum mampu bersaing.
2. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal.
3. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain, dan kebutuhan pasar.
4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.
5. Kontinuitas bahan baku penunjang industri kecil belum memadai sehingga berpengaruh terhadap harga jual produk.

H. Permasalahan Pelayanan Transmigrasi

Tahun 2019-2023 jumlah transmigrasi di Provinsi Bali sudah tidak ada lagi atau tidak ada pemberangkatan transmigrasi asal Bali. Permasalahan pelayanan transmigrasi yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain tidak optimalnya penyuluhan transmigrasi karena tidak adanya alokasi slot transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi.

10. Permasalahan Urusan Penunjang

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Namun, sering kali terjadi permasalahan yang menghambat proses perencanaan pembangunan daerah yang efektif. Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karangasem yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat dan pemanfaatannya dalam penyusunan rencana pembangunan.
2. Konsistensi pendanaan dari perencanaan ke penganggaran yang perlu lebih dikendalikan.
3. Belum optimalnya penyusunan program kerja berbasis *Problem Solving* melalui mekanisme musrenbang dan reses DPRD.

B. Keuangan

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Karangasem masih menghadapi permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya tata kelola barang milik daerah.
2. Belum optimalnya intensitifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
3. Sumber-sumber obyek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik.
4. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi belum optimal
5. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah belum optimal.

C. Kepegawaian

Kualitas kepegawaian berkorelasi dengan kualitas birokrasi di suatu negara dimana reformasi kepegawaian adalah prasyarat mutlak untuk menjamin terselenggaranya manajemen tata pemerintahan yang profesional. Manajemen kepegawaian pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kerja-kerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan. Permasalahan pegawai pemerintahan tidak hanya persoalan kuantitas jumlah pegawai tetapi juga kualitas dan kinerja pegawai. Permasalahan kepegawaian di Kabupaten Karangasem masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
2. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN.
3. Belum optimalnya suasana kerja yang riang gembira, ASN bebas dari tekanan untuk tujuan Politik Praktis dari atasan.
4. Belum optimalnya jenjang karier yang *Fair Flay*, berdasarkan atas pendekatan Merit system dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
5. Belum optimalnya penilaian kinerja, *Reward and Punishment* bagi ASN dilaksanakan secara konsisten.
6. Kesejahteraan pegawai bagi ASN dan P3K masih perlu ditingkatkan

D. Pendidikan dan Pelatihan

Penguatan manajemen Sumber Daya Aparatur menjadi tantangan bagi birokrasi modern yang berorientasi pada pelayanan publik. Pengembangan SDM Aparatur saat ini dan yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Karangasem dalam urusan pendidikan dan pelatihan 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelayanan publik yang berkualitas dan tata Kelola pemerintahan yang baik.
2. Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pejabat eselon dan pejabat fungsional, dalam hal Anti Korupsi, Kedisiplinan dan Bela Negara.
3. Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman ASN dan P3K, dalam hal Kedisiplinan, Loyalitas dan ketahanan fisik.

E. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemologi maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk peningkatan pembangunan daerah. Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah.
2. Belum optimalnya persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah.
3. Belum optimalnya persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
4. Masih rendahnya persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
5. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi kelitbangan

F. Fungsi Penunjang Lainnya

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem 5 tahun mendatang antara lain:

1. Belum optimalnya pengadaan barang milik daerah.

2. Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
3. Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.7.2 Isu Strategis Daerah

1. Isu Strategis Global

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dinamika Internasional saat ini. Sesuai dengan kebijakan internasional dalam pembangunan dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang disebut juga *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan (*goals*) dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. SDGs akan mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemetaan dan integrasi target serta indikator TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan RPJMD. Peran bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD adalah membuat pemetaan target dan indikator TPB/SDGs yang telah ada dalam RPJMD dan melakukan pemutakhiran target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RKPD. Sedangkan bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD berperan dengan mengintegrasikan tujuan, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD. Daerah juga diharapkan mengalokasikan program dan anggaran pembangunan daerah selaras dengan TPB/SDGs.

Tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
b. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
c. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia.
d. Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
e. Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

f. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
g. Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
h. Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
i. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
j. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
k. Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
l. Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
m. Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
n. Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
o. Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
p. Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
q. Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya ke tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* di atas dikelompokkan sebagai 4 (empat) pilar pembangunan berlanjutan yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial; terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5;
2. Pilar pembangunan ekonomi; terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17;
3. Pilar pembangunan lingkungan; terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15; dan
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu tujuan 16.

2. Isu Strategis Indonesia Emas RPJPN 2025-2045

Amanat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas "Impian Indonesia 2015-2085", yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Sumber: Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Visi Indonesia Emas Tahun 2045 adalah Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur meliputi (1). Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2). Ekonomi yang maju dan berkelanjutan; (3). Pembangunan yang merata dan inklusif; dan (4). Negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Berdasarkan hal tersebut, disusun 4 (empat) Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan Manusia Dan Penguasaan IPTEK dengan Agenda Utama:
   (1) Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata.
   (2) Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan.
   (3) Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan.
   (4) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat.
   (5) Reformasi ketenagakerjaan.
2. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan, dengan Agenda Utama:
   (6) Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri.
   (7) Percepatan industri dan pariwisata.
   (8) Pembangunan ekonomi maritim.
   (9) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
   (10) Pemantapan ketahanan energi dan air.
   (11) Komitmen terhadap lingkungan hidup.
3. Pemerataan Pembangunan, dengan Agenda Utama:
   (12) Percepatan pengentasan kemiskinan.
   (13) Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
   (14) Pemerataan pembangunan wilayah.
   (15) Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan dengan Agenda Utama:
   (16) Demokrasi substantif.
   (17) Reformasi kelembagaan dan birokrasi.
   (18) Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi.
   (19) Politik luar negeri bebas aktif.
   (20) Penguatan ketahanan dan keamanan.

Secara umum Arah Kebijakan Empat Pilar Pembangunan Indonesia Emas 2045 antara lain:

I. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

   Dengan sasaran yaitu: Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

   1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

      Taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan SDM unggul dan berbudaya. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2045. Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 60 persen dan angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan PT mencapai 90 persen pada tahun 2045. Peningkatan pendidikan vokasi dan penyelarasan pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif. Sedangkan Bidang Kebudayaan, Peran kebudayaan dalam pembangunan ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia. Jati diri bangsa Indonesia dan budaya bangsa diperkuat

untuk memperkokoh akar kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi.

(1). Target Pendidikan Indonesia Emas 2045

Tabel 2.148
Target Pendidikan Indonesia Emas 2045

Indikator	2015 (Baseline)	2025	2035	2045
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,3	9,5	10,7	12,0
APK Perguruan Tinggi (%)	29,9	35	50	60
Angkatan Kerja Lulusan SMA sederajat dan PT (%)	39,3	50	70	90

(2). Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional antara lain:

a. Kualitas dan Layanan Pendidikan Merata.
b. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan.
c. Profesionalisme Guru dan Perubahan Metode Pembelajaran.
d. Budaya Sekolah dan Baca, dan
e. Pendidikan Vokasi, *Enterpreneurship*, dan Karakter.

2. Kesehatan

Target nasional bidang kesehatan adalah derajat kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia semakin baik dengan rata- rata usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun. Penyakit HIV/AIDS, Tubercolosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun. Malaria tereliminasi di seluruh kabupaten/kota dan balita stunting menurun menjadi 5 persen. Strategi pembangunan kesehatan antara lain:

a. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional Tertata dan Berkelanjutan.
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Responsif.
c. Penguasaan Teknologi Kesehatan, dan
d. Pemahaman Perilaku Hidup Sehat.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan dapat ditingkatkan dengan target antara lain: Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D)

ditingkatkan dari 0,1 persen PDB (2013) menjadi 1,5-2 persen PDB (2045) yang berasal dari swasta, pemerintah, pendidikan tinggi, dan lembaga non- profit. Penguatan Iptek disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dengan mengembangkan teknologi sendiri (indigenous technology) yang didukung oleh SDM Iptek (peneliti dan perekayasa). Kolaborasi triple-helix antara perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah melembaga dalam setiap proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Indonesia akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan Iptek di kawasan Asia dan dunia, terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Adapun strategi yang ditempuh antara lain:

a. Adopsi dan Penerapan Iptek.
b. Kemampuan dan Kemandirian Iptek.
c. Pengembangan Dana Inovasi, dan
d. Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta, dan Pemerintah.

4. Ketenagakerjaan

Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja yang semakin baik. Pasar tenaga kerja perlu fleksibel dan adaptif. Partisipasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan meningkat, tingkat pendidikan tenaga kerja membaik, peranan tenaga kerja informal menurun, dan tenaga kerja di sektor pertanian berkurang dengan kesejahteraan yang lebih baik. Pengangguran akan terjaga pada tingkat *natural unemployment* (3-4 persen).

Tabel 2.149
Target Ketenagakerjaan Nasional 2045

Indikator	2015 (Baseline)	2045
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,8	78
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,9	65

Indikator	2015 (Baseline)	2045
Angkatan Kerja (juta orang)	122,4	197,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,2	3-4
Porsi Tenaga Kerja Sektor Pertanian (%)	32,9	13
Angkatan Kerja dengan Pendidikan SMA ke atas (%)	39,3	90

Tahapan Reformasi Ketenagakerjaan antara lain:

Periode 2016-2025

a) Reformasi menuju pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif.
b) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri.

Periode 2026-2035

a) Penguatan transisi lapangan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi.
b) Penguatan relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi

Periode 2036-2045

a) Pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi di seluruh sektor ekonomi serta transisi lapangan kerja.
b) Perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal

I. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan Indonesia diharapkan menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

A. Investasi dan Perdagangan Luar Negeri

Iklim investasi Indonesia ditingkatkan menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Asia dan dunia dengan rata-rata pertumbuhan investasi diperkirakan 6,4 persen per tahun dan peranan investasi terhadap PDB meningkat menjadi 38,1 persen pada tahun 2045. Pada periode 5 tahun terakhir, Indonesia mulai beralih menjadi net investor.

Strategi Perdagangan Luar Negeri antara lain:

1. Penguatan pranata ekspor melalui perubahan struktur ekspor dari komoditas pada manufaktur dan jasa.
2. Percepatan pertumbuhan ekspor melalui ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi.
3. Pemantapan ekspor melalui barang dan jasa berkualitas dunia dan berbasis inovasi.

Strategi Peningkatan Iklim Investasi antara lain:

1. Penguatan sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan bernilai tambah.
2. Percepatan investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi.
3. Investasi yang berkelanjutan dan perlindungan investasi di luar negeri.

B. Industri dan Ekonomi Kreatif

Penguatan struktur ekonomi kreatif dan digital di Indonesia hingga tahun 2045 difokuskan pada: (a) peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif/digital; (b) penguatan ekosistem; dan (c) pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi.

C. Pariwisata

Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia. Adapun strategi pembangunan sektor pariwisata antara lain:

1. Pengembangan Destinasi Unggulan.
2. Peningkatan Daya Saing.
3. Peningkatan Keragaman Wisata.

4. Peningkatan Integrasi Pariwisata Regional.
5. Penguatan sebagai Destinasi Unggulan Asia.
6. Penguatan sebagai Destinasi Unggulan Dunia.

D. Kemaritiman

Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4 persen tahun 2015 menjadi 12,5 persen tahun 2045. Adapun strategi pembangunan maritim Indonesia yaitu:

1. Mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global.
2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.
3. Meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5 persen PDB pada tahun 2045 dengan fokus pada: (1) pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, (2) industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dan (3) pariwisata bahari yang inklusif.

E. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas petani naik menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2015. Petani sebagai pengusaha atau pekerja profesi. Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Teknologi Pertanian (30 pusat riset basis tropika dan 10 pusat riset basis dasar).
2. Peningkatan Produktivitas, Pengendalian Konversi Lahan Pertanian, dan Pengembangan Pertanian Maritim.
3. Peningkatan Kualitas Petani dan SDM Pertanian.
4. Peningkatan Investasi dan Infrastruktur Penunjang Pertanian.
5. Penguatan Kelembagaan dan Kewirausahaan Petani.
6. Integrasi Kebijakan Hulu sampai Hilir serta Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Industri dan Jasa.

F. Ketahanan Air

Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi Pemantapan Ketahanan Air antara lain:

1. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan pada danau, rawa, situ, sungai, dan perairan darat lainnya.
2. Pembangunan hutan kota.
3. Pengelolaan lahan DAS dengan masyarakat.
4. Pembangunan bangunan pemanenan air (*rain water harvesting*).
5. Kampanye "Simpan, Jaga dan Hemat Air".
6. Perbaikan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, serta pengembangan sistem monitoring kondisi DAS dan sumberdaya air.
7. Efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce, reuse*, dan *recycle*.
8. Pembangunan infrastruktur sumber daya air.
9. Pembangunan prasarana pencegahan erosi dan sedimentasi.
10. Rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Prioritas

G. Ketahanan Energi

Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan menerapkan konsep kepulauan agar pemenuhan listrik per kapita lebih efektif. Pemenuhan kebutuhan energi memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan energi nuklir dimungkinkan apabila sumber energi lain tidak memenuhi.

H. Komitmen Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat menjadi lebih dari 80 didukung oleh penerapan Pembangunan Rendah Karbon. Penurunan emisi dilanjutkan sebesar 34 - 41 persen dari skenario dasar pada tahun 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan

hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu.

III. Pemerataan Pembangunan

A. Pemerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan

Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Proyeksi Rasio Gini diperkirakan ke tingkat ideal 0,34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan dan Indonesia bebas dari kemiskinan di tahun 2045. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah pokok, yaitu: 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk; 2) memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan; 3) mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan, 4) memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif, 5) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan, dan 6) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

B. Pemerataan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah terutama di luar jawa didorong terus tumbuh lebih tingi dengan arah pembangunan di Bali, Nusa Tenggara dan Maluku dengan basis wisata internasional dan perikanan nasional.

C. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur

Sistem transfortasi laut antar dan udara antar pulau diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah. Akses perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diawali dengan pengembangan kota-kota pelabuhan dengan jalur reguler ke Kawasan Barat Indonesia dan memanfaatkan potensi jalur perdagangan internasional di wilayah tengah dan timur. Akses ke kawasan terpencil dan terluar disediakan melalui

pembangunan pelabuhan dan bandara perintis. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, serta perlindungan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim didorong untuk dipenuhi hingga tahun 2045.

IV. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

A. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Reformasi birokrasi dan kelembagaan diperkuat untuk mewujudkan:

(a) peran dan fungsi pemerintah dalam pencapaian kepentingan publik;

(b) kelembagaan birokrasi yang kontekstual serta tepat fungsi dan ukuran; dan

(c) tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor, serta (d) kelembagaan birokrasi yang andal dan modern dengan SDM aparatur sipil negara yang profesional dan mampu mengelola perubahan dengan baik.

Arah Kebijakan reformasi dan kelembagaan tahun 2024 yaitu:

a. Kelembagaan yang adaptif; berbasis isu/tematik; bersifat lintas sektor, *people driven* dan *locally empowered* serta responsif terhadap isu.

b. Tata kelola yang inklusif dan berbasis TIK.

c. SDM Aparatur Sipil Negara yang berfikir kreatif, sistemik, *evidence based*, berwawasan global, inklusif, serta mampu mengelola perubahan, beretos kerja tinggi dan produktif serta memberi pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik.

B. Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya masyarakat berbudaya hukum melalui penegakan hukum yang berkualitas dan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi dengan sasaran tahun 2025 perbaikan sistem di berbagai layanan

publik, di tahun 2023 penurunan praktik dan perilaku korupsi secara signifikan, IPK = 55-60 dan di tahun 2045 terwujud masyarakat yang anti korupsi (IPK= 60-65).

3. Isu Startegis RPJPD Provinsi Bali

Isu startegis RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 untuk Periode 2025-2029 adalah Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan. Pada periode ini dimaksudkan untuk mewujudkan transformasi sosial yang merata, berkualitas dan adaptif, menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan pelayanan umum serta peningkatan pemerataan ketersediaan dan mutu pelayanan dasar. Kemudian untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inovatif difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor ekonomi unggulan sebagai fondasi kemajuan perekonomian daerah, membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital Bali, serta penguatan sarana prasarana dan teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif. Transformasi tata kelola yang berintegritas dan koordinatif diutamakan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, penguatan integritas partai politik dan reformasi kelembagaan. Berkaitan mengenai landasan transformasi bertujuan untuk memantapkan keamanan daerah tangguh dan kondusif, demokrasi substansial serta stabilitas ekonomi makro daerah, menitikberatkan pada perkuatan keamanan daerah berstandar internasional, dan peningkatan kerja sama daerah serta stabilitas ekonomi makro daerah, peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan dan penyediaan ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. Dalam upaya memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, difokuskan dengan memperkuat pertahanan sosial budaya dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penggalian dan pelestarian warisan adiluhung budaya Bali, serta penuntasan

pembangunan dan pengelolaan TPS3R serta TPST di kota/kabupaten se-Bali.

Sebagai kerangka implementasi transformasi dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dititikberatkan pada percepatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, dan berkeadilan di setiap kabupaten/kota di Bali, serta penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. Kemudian, untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan terkoneksi serta ramah lingkungan, memfokuskan pada percepatan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan terkoneksi serta ramah lingkungan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas serta pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah. Dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan dititikberatkan pada penguatan sistem pendanaan pembangunan serta penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.

4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karangasem

Isu Strategis Pembangunan 5 (lima) Tahunan Tahap I (Periode 2025-2029) RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 antara lain perkuatan Fondasi Transformasi yang meliputi:

1) Penguatan Transformasi Sosial, dilakukan dengan penguatan tata kelola pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial untuk membentuk SDM Produktif.
2) Penguatan Transformasi Ekonomi dilakukan dengan upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi biru, pertanian dalam arti luas, pariwisata, ekonomi kreatif, peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, BUMD serta pemenuhan akses digital dalam rangka peningkatan konektivitas global serta pembangunan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Bali.

3) Penguatan Transformasi Tata Kelola, dilakukan dengan penguatan tata kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik.
4) Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, dilakukan dengan Penguatan tata kelola supremasi hukum yang akuntabel berlandaskan Pancasila.
5) Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dilakukan dengan optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
6) Penguatan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, dilakukan Peningkatan pembangunan dan konektivitas wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan serta pemenuhan infrastruktur layanan dasar.
7) Penguatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dilakukan kebijakan pengembangan sarana prasarana infrastruktur regional yang berkualitas, andal, modern, dan ramah lingkungan di Kabupaten Karangasem.
8) Penguatan Kesinambungan Pembangunan, dilakukan Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko; Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

5. Penetapan Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem

Berdasarkan atas permasalahan, isu global, isu Indonesia Emas Tahun 2045 dan isu RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 serta isu RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 maka dapat ditetapkan isu

strategis daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2.150
Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Kondisi Geografis:** Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 atau 83.954 Ha (14,90 persen luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali	**ASPEK GEOGRAFIS**				
		1. Cakupan wilayah yang luas dan sebagian besar kawasan kering.	Pemanfaatan aset sumber daya alam secara berkelanjutan	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Konservasi lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan
		2. Pemanfaatan sumber daya alam belum dikelola dengan baik.				
		3. Topografi wilayah ketinggian dan berbukit.				
		4. Tingginya potensi bencana (bencana alam, bencana geologi, dan bencana meteorologi).	Pemanasan global	Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana	Belum optimalnya ketanggguhan bencana
		5. Kurangnya sumber daya air.				
		6. Tingginya kawasan hutan yang kritis dan kering yang rawan bencana kebakaran.				
		7. Curah hujan yang tidak menentu dan tidak merata.				
II.	**Penduduk:** Jumlah penduduk Karangasem tahun 2023 mencapai 499,95 ribu jiwa, meningkat sekitar 2.480 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2022. Adanya *aging population.* merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya perubahan struktur penduduk usia non produktif (khususnya	**ASPEK DEMOGRAFIS**				
		8. Pertumbuhan penduduk cenderung bertambah setiap tahun dan masih tingginya angka ketergantungan.	Perubahan karakteristik penduduk dunia sebagai konsekuensi kelahiran, kematian, dan migrasi kibat pengaruh empat kekuatan besar, yaitu urbanisasi, globalisasi, teknologi, dan struktur umur penduduk.	Perkembangan demografi global	Demografi	Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
		9. Pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan lebih tinggi dan lebih padat.				
		10. Adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.			Kualitas SDM	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan
		11. Adanya ketimpangan gender.			Kesetaraan gender	Belum optimalnya peran perempuan

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penduduk usia 65 tahun ke atas) semakin bertambah					dan kesetaraan gender
III.	**Perekonomian:** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke-sembilan (3,1%).	**KESEJAHTERAAN EKONOMI**				
		12. Pusat pertumbuhan ekonomi belum merata antar wilayah dan antar sektor ekonomi.	Ketidakpastian Geopolitik; Perubahan Nilai Mata Uang; dan Fluktuasi Harga Komoditas.	Dinamika geopolitik dan geoekonomi	Pemerataan pembangunan Ekonomi	Belum optimalnya sektor ekonomi pembentuk PAD
		13. Pemanfaatan potensi ekonomi belum maksimal.				
		14. Investasi sektor ekonomi di luar pariwisata masih rendah.				
		15. Belum optimalnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam peningkatan ekonomi maasyarakat.			Diversifikasi ekonomi	Belum optimalnya Ekonomi Pertanian berbasis masyarakat
		16. Nilai tukar petani masih rendah				
		17. Kesejahteraan petani dan ekonomi keluarga petani masih rendah.				
		18. Nilai PDRB per Kapita masih rendah.			Pemberdayaan usaha kecil dan menengah	Belum optimalnya sektor usaha industri pertanian, pengolahan dan UMKM dan Koperasi
		19. Pengeluaran untuk pangan (makanan) masih lebih tinggi dari pengeluaran untuk non makanan.				
		20. Kelompok pengeluaran 40% bawah masih tinggi untuk konsumsi komoditas padi-padian, diikuti komoditas makanan dan minuman.				
		21. Distribusi pendapatan kelompok 40% bawah masih rendah.				
		22. Sektor lapangan usaha UMKM, Koperasi dan Industri belum berkembang optimal.				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV.	**Sosial:** Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 meningkat mencapai 73,93 tahun, masih di bawah rata-rata Provinsi Bali. Rata-rata lama sekolah tahun 2023 menjadi 6,68 tahun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali	**ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA**				
		23. Persentase penduduk miskin di Kabupaten selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali.	Integrasi sosial, penyesuaian budaya, ketegangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan hak asasi manusia	Perkembangan demografi global	Pemuliaan dan pelestarian budaya	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin
		24. Berubahnya aspek sosial multikultural dalam masyarakat Bali, seperti lebih konsumtif, kurang perhatian terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta melemahnya kohesi sosial.				Belum optimalnya pemuliaan budaya Bali dan Budaya Khas Karangasem
		25. Eksistensi nilai-nilai kebudayaan Bali yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami kemunduran				
		26. Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem masih di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Bali.	Kualitas Pendidikan untuk Semua	Perkembangan teknologi		Belum optimalnya, mutu, relevansi dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan semua jenjang
		27. Angka melek huruf perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga menimbulkan ketimpangan gender.				
		28. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem masih di bawah dari Provinsi Bali.				
		29. Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Karangasem masih di bawah dari Provinsi Bali.				
		30. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang tidak/belum bersekolah paling tinggi dari Provinsi Bali.				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		31. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 masih di bawah dari Provinsi Bali.				
		32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun, Usia 13-15 Tahun, Usia 16-18 Tahun, dan Usia 19-24 Tahun belum tercapai 100%.				
		33. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat belum tercapai 100%.				
		34. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi belum tercapai 100%.				
		35. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat belum tercapai 100%.				
		36. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem paling rendah dari Provinsi Bali.				Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		37. Sarana keolahragaan masih terbatas dan belum. merata setiap wilayah tersedia.				Peningkatan keolahragaan dan kepemudaan
V.	**Daya saing daerah:** IPM Kabupaten Karangasem tahun 2019-2023 masih tetap di bawah rata-rata Provinsi Bali	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
		38. Ekonomi Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dan masih rendah.	Tumbuhnya kawasan-kawasan perdagangan dunia menuntut peningkatan daya saing produk akan mendorong peningkatan nilai tambah produk	Perkembangan demografi global dan perkembangan teknologi	Diversifikasi ekonomi	Belum optimalnya produktivitas ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja
		39. Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karangasem secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menempati urutan ke-enam (masih rendah dibanding kabupaten lain di Bali				
		40. Sektor ekonomi pertanian di tahun 2023 masih belum mampu bangkit dari akibat covid-19.				
		41. Daya saing SDM masih rendah (IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali).			Kualitas Sumber Daya Manusia	
		42. Memiliki panjang jalan kabupaten yang tinggi sehingga belum mampu semuanya dalam kondisi baik.			Infrastruktur konektivitas	Belum optimalnya mutu dan pemerataan pemenuhan infrastruktur daerah
		43. Daya saing investasi masih rendah		Perubahan konstelasi perdagangan global	Ekosistem dan pemerataan investasi	Belum optimalnya pemberian kemudahan dan informasi penanaman modal dan pelayanan perijinan
VI.	**Pelayanan Publik:** Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Karangasem tahun 2023 sebanyak 113 buah. Jumlah sekolah SD 356 tersebar di tiap-tiap kecamatan. sekolah menengah pertama di Kabupaten Karangasem saat ini terdapat 48 sekolah SMP yang tersebar di seluruh kecamatan. Rumah sakit pemerintah sebanyak 2 (dua) unit. Jumlah Puskesmas 12 buah.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
		44. Belum optimalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudan dan olahraga	Transformasi tata kelola, integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan, Perkembangan teknologi, Layanan umum dan informasi	Belum optimalnya akuntanbilitas kepuasan dan mutu pelayanan publik yang bersih, adaptif, dan reformasi birokrasi
		45. Belum optimalnya pelayanan infrastrutur jalan, irigasi, perumahan dan penataan ruang wilayah yang memadai dan merata di seluruh wilayah				
		46. Masih adanya gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundangan yang berlaku				
		47. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		48. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat				
		49. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah				
		50. Pelayanan pemadam kebakaran masih terbatas (response time belum mencakup semua wilayah)				
		51. Pelayanan penanggulangan bencana daerah masih terbatas				
		52. Tinggi penduduk miskin, penyandang disabilitas, PMKS, dan PSKS yang membutuhkan bantuan sosial				
		53. Pelayanan ketenenagakerjaan belum optimal karena masih tingginya pencari kerja yang belum ditempatkan				
		54. Pelayanan pemenuhan hak anak, perempuan dan gender belum optimal				
		55. Pelayanan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal masih kurang				
		56. Pelayanan penanganan pencemaran lingkungan dan sampah belum optimal				
		57. Pelayanan amiduk belum optimal				
		58. Pelayanan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal				
		59. Akses pelayanan pengendalian				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penduduk dan KB belum optimal				
		60. Pelayanan perhubungan belum optimal				
		61. Pelayanan komunikasi, sistem informasi, statistik dan persandian belum optimal				
		62. Pelayanan Koperasi, UMKM, industri dan perdagangan belum optimal				
		63. Pelayanan kemudahan investasi dan perijinan belum optimal				
		64. Pelayanan pelestarian nilai-nilai budaya dan kebudayaan belum optimal				
		65. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah belum optimal				
		66. Pelayanan peningkatan kepariwisataan daerah belum optimal				
		67. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan belum optimal				
		68. Pelayanan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan sumber daya mineral belum optimal				
		69. Pelayanan urusan penunjang pemerintahan daerah yang belum optimal				
		70. Pelayanan penelitian dan pengembangan daerah belum optimal diterapkan dalam pengambilan kebijakan				

No.	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah Karangasem	Isu Strategis			Isu Strategis Kabupaten Karangasem
			Global	Nasional	Provinsi Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pembangunan daerah				
		71. Pelayanan inovasi daerah belum optimal diterapkan oleh perangkat daerah, masyarakat dan industri				

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang yaitu Periode tahun 2025-2029 yang nantinya diwujudkan ke dalam indikator tujuan dan sasaran masing-masing misi. Penyusunan Visi Kabupaten Karangasem dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

3.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 adalah penjabaran pertama atau periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2025-2029 yaitu :

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG"
(Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi)

Visi tersebut terinspirasi oleh ke-Agungan Gunung Agung yang merupakan Gunung tertinggi dipulau Bali, dimana Gunung Agung juga merupakan pusat spiritual, sumber kehidupan dan sumber kemakmuran, terutama bagi masyarakat Bali dan masyarakat Kabupaten Karangasem pada khususnya. Visi "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG" mengandung makna Mewujudkan Kabupaten Karangasem menjadi kabupaten yang

berkapasitas " TINGGI dan BESAR ", sebagaimana perwujudan Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi dan terbesar di Pulau Bali, dengan menghadirkan tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*, mewujudkan kemakmuran yang besar, gemah ripah loh jinawi bagi masyarakat Karangasem sebagai perwujudan dari konsep jagadhita, dan masyarakat dengan spiritualitas yang tinggi sebagai modal dasar menuju keabadian *Moksartam.*

Pemaknaan lebih lanjut dari Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem Yang Agung", tercermin ke dalam 7 (tujuh) indikator pencapaian untuk 5 (lima) tahun kedepan meliputi:

1. Besar harapan dan tinggi cita-citanya,
2. Besar PAD, APBD dan PDRB nya,
3. Besar Pembangunannya,
4. Tinggi hasil serta manfaatnya untuk masyarakat Karangasem,
5. Besar Kesejahteraannya,
6. Tinggi Kemuliaannya dan,
7. Besar Sejarahnya.

3.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem Yang Agung", disusun 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba.
2. Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah.
3. Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

Dari ketiga misi tersebut dapat dijabarkan ke dalam 5 (lima) Fokus Program Kerja yaitu:

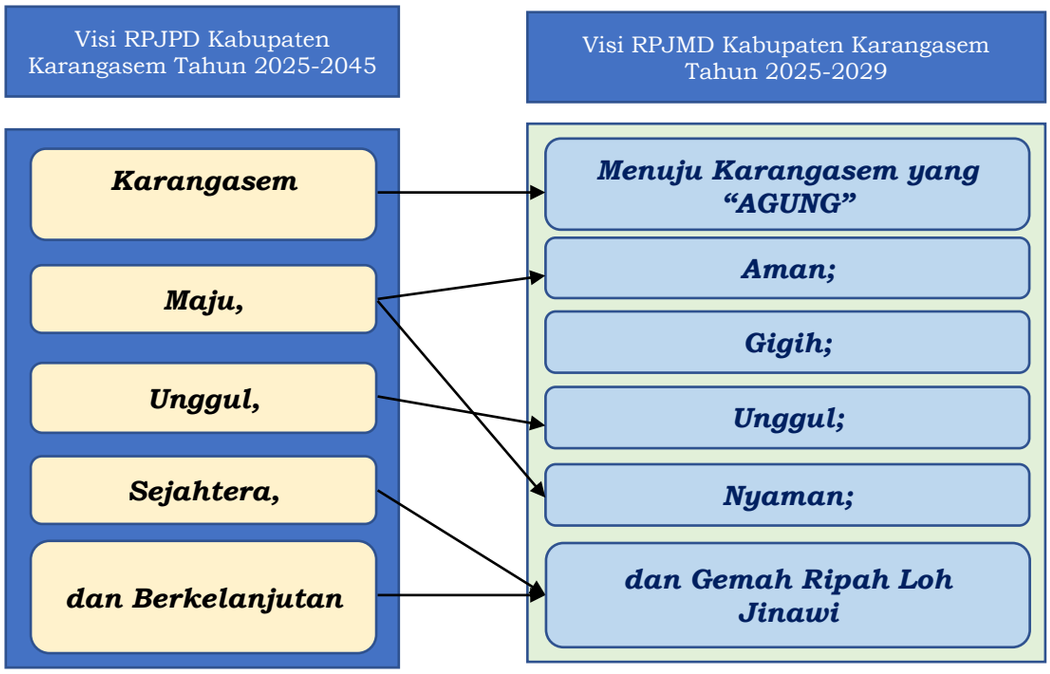
1. Program Kerja “ A “ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang AMAN.
   a. Aman dibidang kamtibmas.
   b. Aman dalam ber- Usaha.
   c. Aman terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan.
   d. Aman dalam lingkungan hidup.
   e. Aman ber- Pendidikan dan ber- Kebudayaan.
   f. Aman melaksanakan kehidupan beragama dan berkeyakinan
   g. Aman kondisi infrastruktur dasar.

2. Program Kerja “ G “ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karangasem yang GIGIH yaitu:
   a. Mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat Kabupaten Karangasem yang memiliki semangat juang tinggi, bermental baja, pekerja keras.
   b. Mewujudkan birokrasi yang bermental pejuang pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC).
3. Program Kerja “ U “ artinya Program Kerja untuk Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang UNGGUL diberbagai Bidang, meliputi:
   a. Unggul dalam bidang sumber daya manusia.
   b. Unggul dalam bidang pembangunan daerah.
   c. Unggul dalam bidang perekonomian UMKM.
   d. Unggul dalam bidang pertanian dalam arti Luas.
   e. Unggul dalam bidang perikanan/nelayan.
   f. Unggul dalam bidang pelayanan umum/publik.
4. Program Kerja “ N “ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang NYAMAN untuk semua , meliputi:
   a. Nyaman hubungan sosial antar agama, antar desa adat dan antar stake holder.

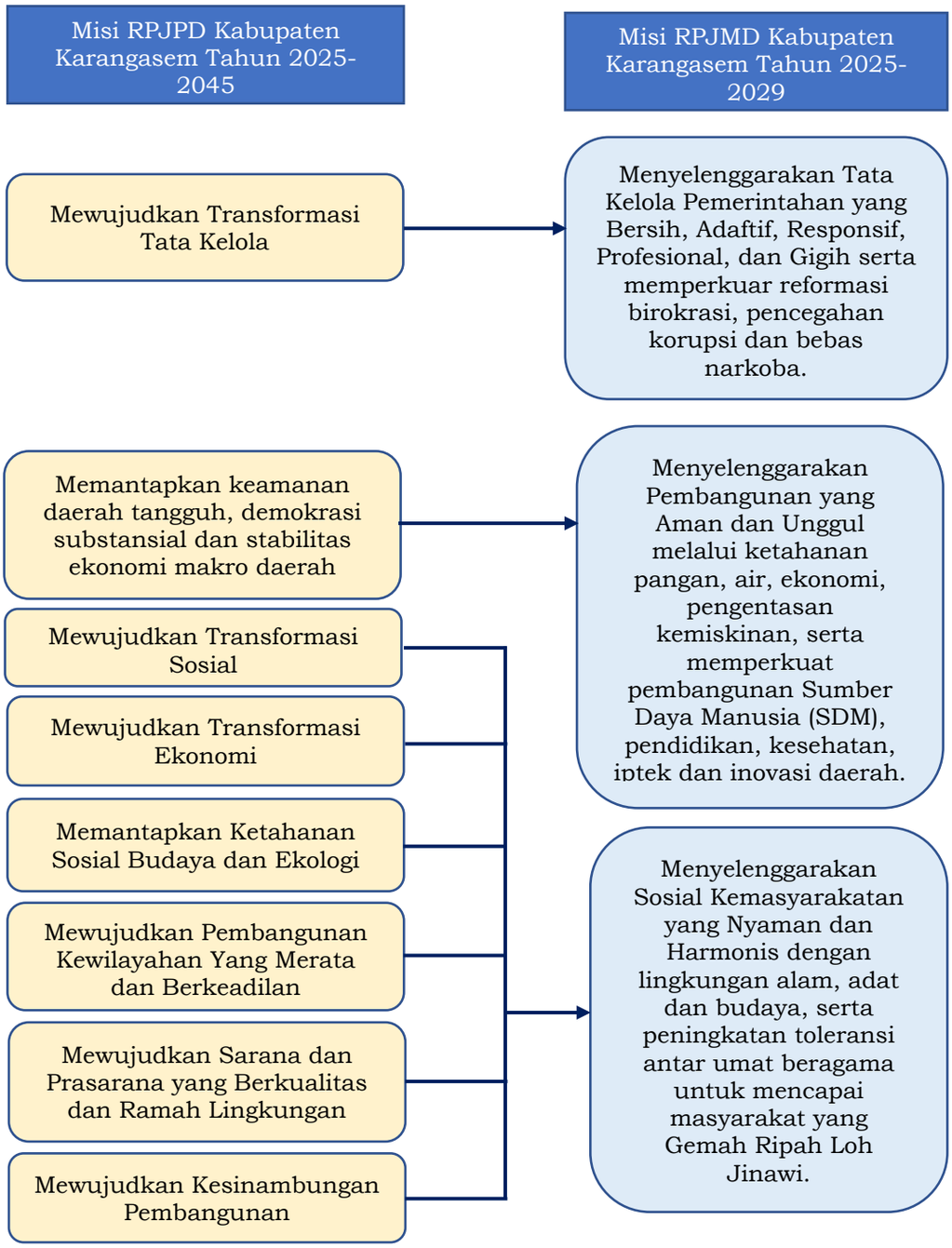
b. Nyaman hubungan antar kelembagaan baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Karangasem.
c. Nyaman bekerja dan berkarier dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem.
d. Nyaman dalam hal pendapatan per kapita penduduk.
e. Nyaman dari lingkungan alam sekitar.

5. Program Kerja “ G “ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang GEMAH RIPAH LOH JINAWI “ meliputi:
   a. Angka kemiskinan turun
   b. Angka stunting turun
   c. Jumlah orang sakit turun
   d. Angka harapan hidup naik
   e. Angka pertumbuhan penduduk terkendali
   f. Lapangan pekerjaan bertambah
   g. Angka putus sekolah untuk wajar 12 tahun turun
   h. Angka kriminalitas turun
   i. Investasi naik
   j. Kesejahteraan naik

Misi Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 khususnya Periode Pertama (Tahun 2025-2029). Adapun keselarasan Visi dan Misi disajikan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.



Gambar 3. 1
Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045



Gambar 3. 2
Keselarasan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045

3.3 Tujuan

Tujuan pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 diturunkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi

selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa fokus pembangunan, seperti:

a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
b. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
c. Peningkatan produktivitas daerah;
d. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
e. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
g. Tata kelola pemerintahan yang baik

Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 berpedoman pada tujuan nasional sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada periode tahapan pertama (Tahun 2025-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Penguatan transformasi ekonomi dan sosial. Transformasi ekonomi diharapkan ekonomi tumbuh sekitar 5,6-6,1 persen per tahun. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, dan pemenuhan akses digital. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Penguatan transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas

masyarakat sipil. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan difokuskan pada transformasi tata kelola keamanan, dan ketertiban masyarakat.

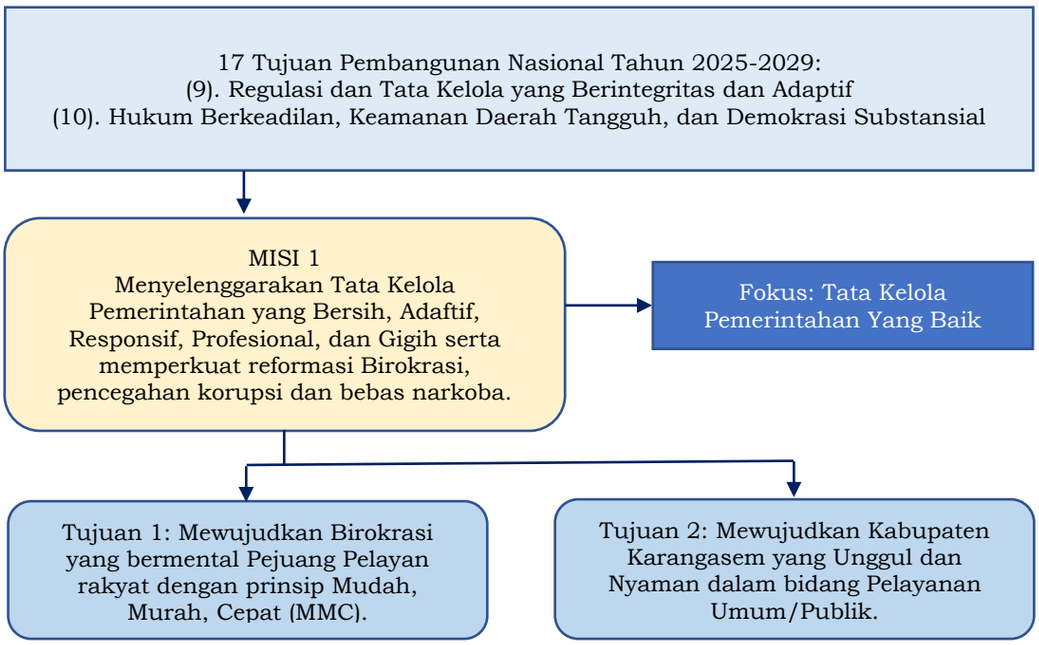
3. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
4. Pembangunan wilayah difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smaft grid*).
5. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, andal, dan modern.
6. Membangun kesinambungan pembangunan meliputi: Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko; Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Sesuai dengan fokus pembangunan nasional dan fokus pembangunan Provinsi Bali serta untuk mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Perumusan Tujuan dari Misi 1: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuatt reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba, berpedoman pada tercapainya 17 tujuan Nasional yaitu tujuan ke (9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; dan Tujuan ke (10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial. Fokus pembangunan untuk pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun pada Misi 1 adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Tujuan Misi 1 disusun guna tercapainya:

a. Fokus Program Kerja “G“ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karangasem yang GIGIH yaitu: Mewujudkan Birokrasi yang bermental Pejuang Pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC);
b. Fokus Program Kerja “U“ artinya Program Kerja untuk Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang UNGGUL di berbagai Bidang, meliputi: Unggul dalam bidang Pelayanan Umum/Publik;
c. Fokus Program Kerja “N“ artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang NYAMAN untuk semua, meliputi: (1). Nyaman hubungan antar Kelembagaan baik Eksekutif, legislatif, Yudikatif dan Lembaga-lembaga Vertikal yang ada di Kabupaten Karangasem; dan (2). Nyaman bekerja dan berkarier dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

Selengkapnya perumusan Tujuan Misi 1 disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3
Perumusan Tujuan Misi 1

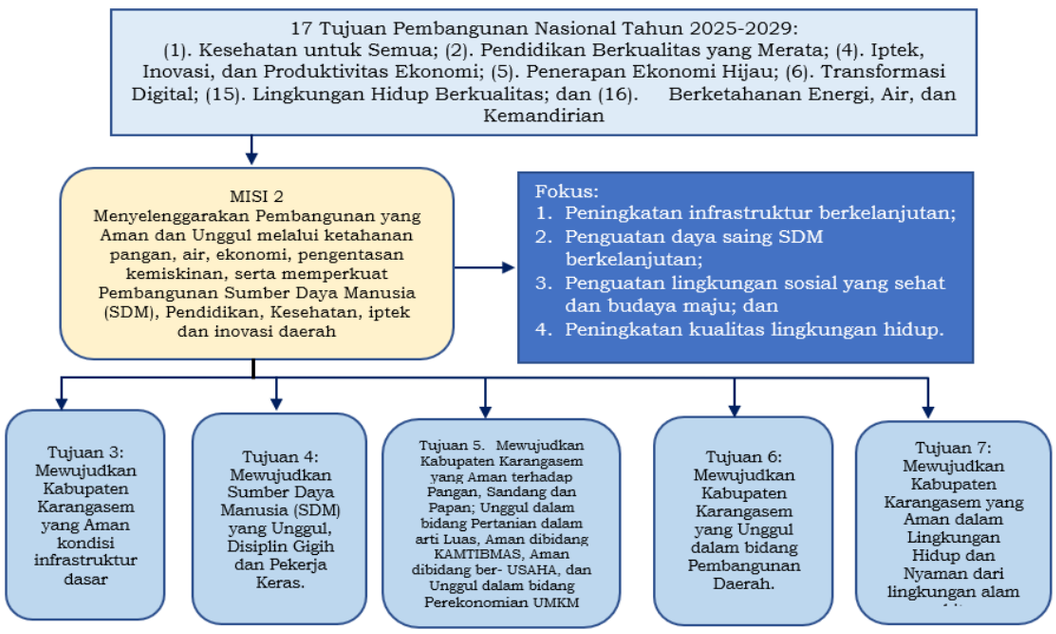
Perumusan Tujuan dari Misi 2: Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah, berpedoman pada tercapainya 17 tujuan Nasional yaitu tujuan ke (1). Kesehatan untuk Semua; (2). Pendidikan Berkualitas yang Merata; (4). Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (5). Penerapan Ekonomi Hijau; (6). Transformasi Digital; (15). Lingkungan Hidup Berkualitas; dan (16).Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian. Fokus pembangunan untuk pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun pada Misi 2 adalah: (1). Peningkatan infrastruktur berkelanjutan; (2) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; (3). Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju; dan (4). Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tujuan Misi 2 disusun guna tercapainya:

a. Fokus Program Kerja "A" artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman yaitu: (1). Aman di bidang KAMTIBMAS; (2). Aman dalam ber- USAHA; (3). Aman terhadap kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan; (4). Aman dalam

Lingkungan Hidup; (5). Aman ber- Pendidikan dan ber-Kebudayaan; (6). Aman melaksanakan kehidupan beragama dan berkeyakinan; dan (7). Aman kondisi Infrastruktur Dasar;

b. Fokus Program Kerja " G " artinya Program Kerja untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karangasem dengan yang GIGIH yaitu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia, Masyarakat Kabupaten Karangasem yang memiliki semangat juang tinggi, bermental baja, pekerja keras;
c. Fokus Program Kerja " U " artinya Program Kerja untuk Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang UNGGUL diberbagai Bidang, meliputi: (1). Unggul dalam bidang Sumber Daya manusia; (2). Unggul dalam bidang Pembangunan Daerah; (3). Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM; (4). Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas; dan (5) Unggul dalam bidang Perikanan/nelayan;

Selengkapnya perumusan Tujuan Misi 2 disajikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4
Perumusan Tujuan Misi 2

Perumusan Tujuan dari Misi 3: Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi,

berpedoman pada 17 Tujuan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 yaitu tujuan ke (3). Perlindungan

Sosial yang Adaptif; (7). Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; (8). Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; (11). Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (12). Kerja Sama Daerah dan Pertahanan Kawasan; (13). Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; (14). Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (17). Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan Misi 3 disusun guna tercapainya:

a. Fokus Program Kerja " N " artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang NYAMAN untuk semua, meliputi: (1). Nyaman hubungan sosial antar agama, antar Desa Adat dan Antar *Stakeholder*; (2) Nyaman dari lingkungan alam sekitar; dan (3) Nyaman dalam hal Pendapatan Per kapita Penduduk.
b. Program Kerja " G " artinya Program Kerja untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem yang GEMAH RIPAH LOH JINAWI " meliputi (1). Angka kemiskinan turun; (2). Angka Stunting turun; (3). Jumlah orang sakit turun; (4). Angka harapan hidup naik; (5). Angka pertumbuhan penduduk, terkendali; (6). Lapangan pekerjaan bertambah; (7). Angka putus sekolah untuk wajar 12 tahun turun; (8). Angka kriminalitas turun; (9). Investasi naik; dan (10). Kesejahteraan naik.

Selengkapnya perumusan Tujuan Misi 3 disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Perumusan Tujuan Misi 3

3.4 Sasaran

Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 adalah target yang bersifat spesifik atau kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029. Sasaran disusun lebih bersifat operasional dari masing-masing tujuan dengan memperhatikan indikator yang akan diukur untuk menentukan pencapaian berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa indikator tujuan dan sasaran yang jelas dan mudah dipahami, serta terukur untuk mengukur pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Dengan indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat memantau efektivitas program, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan menjamin manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator tujuan maupun sasaran adalah merupakan: (a). capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b). capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri atas: a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ditetapkan berpedoman pada sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045. Selengkapnya rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Indikator Kinerja dan Target Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MENUJU KARANGASEM YANG “AGUNG“ (Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi											
MISI 1: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuar reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan bebas narkoba.	**Tujuan1: Mewujudkan Birokrasi yang bermental Pejuang Pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC)**		**Indeks Reformasi Birokrasi.**	**68 (CC/Cukup Baik)**	**68.5 (CC/Cukup Baik)**	**69 (CC/Cukup Baik)**	**69.2 (CC/Cukup Baik)**	**69.5 (CC/Cukup Baik)**	**69.7 (CC/Cukup Baik)**	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)**	
		Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Karangasem yang bersih dan bebas KKN.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.20	4.24	4.28	4.33	4.37	4.40	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	
			Fasilitasi Anggaran Dana Desa (%)	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	66,5 (B/Baik)	66,75 (B/Baik)	67 (B/Baik)	67,25 (B/Baik)	67,5 (B/Baik)	67,75 (B/Baik)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	
			Indeks Penilaian Integritas.	82	84	86	88	90	92	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	RPJPD 2025-2045
			Nilai Evaluasi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP).	95	95.2	95.4	95.7	96	96.5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	60	62	65	70	75	80	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
			Dukungan operasional peningkatan kesejahteraan ASN untuk pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan (Semua Perangkat Daerah)	Program Prioritas No.5
		Sasaran 2: Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Nilai Sistem Merit	287	287	290	293	295	300	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	25	25	25	25	25	25	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan	
	Tujuan 2: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik		**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**4.4**	**4.6**	**4.8**	**5**	**5.2**	**5.4**	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)**	**RPJPD 2025-2045**
		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90	92	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	RPJPD 2025-2045
			Pelayanan Publik di tingkat Desa dan Kabupaten dengan Prinsip Mudah-Murah-Cepat dengan sistem On Line.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Prioritas No.12
			Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2.7	2.85	2.9	2.95	3	3.05	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
MISI 2: Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah	**Tujuan 3: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar**		**Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur (IKLI).**	**3**	**3.25**	**3.4**	**3.5**	**3.6**	**3.7**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	
		Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	Rasio Konektivitas	0.78	0.782	0.784	0.786	0.788	0.79	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Prioritas No.15
			Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Umum Dan Penataan Ruang	
			Jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam).	54.88	56.86	58.84	60.82	62.8	64.78	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Persentase Rumah tinggal bersanitasi.	90.11	90.11	90.13	90.15	90.17	90.19	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	86.54	87.17	88.02	89.08	90.14	91.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Persentase Penduduk berakses air minum.	98.01	98.03	98.05	98.07	98.09	98.11	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan.	68.19	68.21	68.23	68.25	68.27	68.29	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	94.4	94.6	94.8	95	95.2	95.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No. 4
			Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Sasaran 5: Meningkatnya layanan transportasi perhubungan.	Layanan angkutan darat.	28.5	29	29.5	30	30.5	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
			Persentase Pengelolaan Pelayaran	0	0	50	75	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
		Sasaran 6: Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	Cakupan Layanan Telekomunikasi.	90.50	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	RPJPD 2025-2045 & Program Prioritas No.15
			Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	20.25	22.07	22.50	25.00	25.50	29.54	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	RPJPD 2025-2045
			Penduduk yang menggunakan HP/telepon.	65.5	70	70.5	71	71.5	72	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet.	51	52	53	54	55	56	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	
	Tujuan 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Disiplin, Gigih, dan Pekerja Keras.		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**	**71.02**	**71.75**	**71.78**	**71.8**	**71.84**	**71.87**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**	
		Sasaran 7: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh jenjang.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia sampai dengan 15 tahun.	8.36	9.26	10.21	11.16	12.11	13.06	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Harapan Lama Sekolah.	12.66	12.67	12.68	12.69	12.7	12.71	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Angka Melek Huruf.	87.52	89.19	87.86	90.86	92.53	94.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
			Menurunnya Angka Putus sekolah usia 7-15 Tahun.	0.52	0.49	0.46	0.44	0.38	0.34	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
			Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Pelayanan Pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa berprestasi	50	60	70	80	90	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Prioritas No.13
			Literasi Membaca SD.	70	71	72	73	74	75	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Literasi Membaca SMP.	79	80	81	82	83	84	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Numerasi SD.	60.5	61	62	63	64	65	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Numerasi SMP	75	76	77	78	79	80	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	RPJPD 2025-2045
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	51	53	57	60	65	75	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Inmendagri No. 2 tahun 2025
			Persentase Sekolah Dasar dan Menengah yang melaksanakan praktik pembelajaran berbasis IPTEK	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		Sasaran 8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Umur Harapan Hidup (UHH).	74.41	74.65	74.89	75.13	75.37	75.61	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indikator RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	12.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.	80	80	80	80	80	80	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indikator RPJPD 2025-2045
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%).	5	4.98	4.96	4.94	4.92	4.9	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RPJPD 2025-2045
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%).	90	90	90	90	90	90	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RPJPD 2025-2045
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%).	90	90	90	90	90	90	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No. 8
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%).	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	98.9	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No.7

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Persentase Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Prioritas No.1
			Persentase peserta BPJS yang mendapat pelayanan di RSUD	92.32	92.33	92.33	92.34	92.35	92.36	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Prioritas No.7
			Cakupan Penerima Pemeriksaaan Kesehatan Gratis	5	5	5	5	5	5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Prioritas No.8
			Persentase anak balita dan ibu hamil mendapatkan PMT di Posyandu	90	92	94	96	98	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Prioritas No.8
		Sasaran 9: Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.6	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	RPJPD 2025-2045
			Angka Ketergantungan	0.36	0.33	0.3	0.28	0.25	0.22	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Inmendagri No. 2 tahun 2025
			Tingkat partisipasi angkatan kerja.	83.89	84.14	84.39	84.64	84.89	85.14	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	40.35	40.5	40.65	40.8	40.95	41.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan	32	32.2	32.4	32.6	32.8	33	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	RPJPD 2025-2045
			Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	2.96	3.76	4.56	5.36	6.16	6.96	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	RPJPD 2025-2045
			Persentase penduduk yang bekerja.	63.45	63.55	63.65	63.75	63.85	64	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
			Rasio PDB per tenaga kerja (Produktivitas Tenaga Kerja).	36.76	36.88	37	37.12	37.24	37.36	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
			Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	1.94	1.96	1.98	2	2.02	2.04	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
			Fasilitasi dana talangan bagi tenaga kerja ke luar negeri	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Prioritas No.11
			Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.	18.46	18.50	18.55	18.6	18.65	18.70	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 10: Meningkatnya kualitas generasi muda Kabupaten Karangasem serta pengembangan keolahragaan.	Indeks Pembangunan Pemuda.	30	32	35	37	40	42	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Inmendagri No. 2 tahun 2025
			Persentase pembinaan olahraga	50	50	50	50	50	50	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
			Jumlah prestasi olahraga per tahun	4	5	6	7	8	9	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
			Cakupan dana pembinaan bagi atlet berprestasi	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Prioritas No.10
	Tujuan 5: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang, dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam		**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	84.39	84.81	85.24	85.66	86.09	86.52	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**RPJPD 2025-2045**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	bidang Perekonomian UMKM.										
		Sasaran 11: Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Konsumsi Pangan	Ketersediaan lumbung pangan daerah	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Prioritas No.3
			Penanganan daerah rawan pangan.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
			Penguatan cadangan pangan.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
			Ketersediaan Pangan Utama.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
			Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).	88,44	88,88	89,33	89,77	90,22	90,67	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
			Koperasi aktif.	69.01	69.03	69.05	69.07	69.09	70.11	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Wirausaha muda	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Program Prioritas No.6
			Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	RPJPD 2025-2045
			Kapasitas Tampungan Air	22.9	23	23.25	23.5	23.75	24	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	RPJPD 2025-2045 & Program Prioritas No.15
			Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat miskin	0	11.47	18.07	20.37	23.23	24.38	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Prioritas No.2
		Sasaran 12: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rumah tidak layak huni yang tertangani	385	388	391	397	399	401	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Prioritas No.4
			Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 13: Meningkatnya Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan	Tingkat produktivitas pertanian (Rasio produksi pertanian pangan per hektar per tahun per satuan luas panen x 100%).	60.78	60.78	60.79	60.8	60.8	60.81	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	
			Peningkatan produktivitas pertanian dan Perikanan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.	62.51	62.51	62.52	62.53	62.53	62.54	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Program Prioritas No.3
		Sasaran 14: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dalam arti Luas.	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB.	25.5	25.55	25.6	25.65	25.7	25.75	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Indikator RPJPD 2025-2045
			Produk pertanian/ perikanan yang teregistrasi	1	1	2	2	3	3	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	
		Sasaran 15: Meningkatnya peran serta kelembagaan kelompok tani/nelayan dalam pengembangan sektor pertanian.	Cakupan bina kelompok petani	27	27	28	28	28	28	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Program Prioritas No.3

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	106.4	101.9	97.49	93.06	88.63	84.2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	RPJPD 2025-2045
			Indeks Ketahanan Daerah	0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	78	81	82	83	84	85	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
			Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk.	36	35	34	33	32	30	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Indikator Inmendagri No. 2 Th. 2025
			Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	84,7	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78	80	82	84	86	90	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
		Sasaran 17: Meningkatnya ekonomi sektor strategis dan unggulan daerah.	Distribusi persentase PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	4.39	4.44	4.49	4.54	4.59	4.64	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 18: Meningkatnya Forum Lintas Pengusaha (FLP) dalam Temu Usaha antar UMKM, PHRI, Koperasi dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait.	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	10	12	15	17	20	22	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	RPJPD 2025-2045
		Sasaran 19: Meningkatnya mutu dan daya saing produk industri, UMKM, dan koperasi yang berwawasan lingkungan.	Usaha Mikro dan Kecil yang aktif	71.4	72.8	74.2	75.7	77.2	78.8	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Program Prioritas No.6
			UMKM yang memanfaatkan Kredit Mikro	22	23.35	24.7	26.05	27.4	28.75	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	RPJPD 2025-2045
			Proporsi Jumlah Usaha mikro Non Pertanian di Kabupaten Karangasem	67.15	67.3	67.45	67.6	67.75	67.9	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	RPJPD 2025-2045
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karangasem	32.41	32.48	32.55	32.62	32.69	33.72	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Rasio Kewirausahaan	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Inmendagri No. 2 tahun 2025
		Sasaran 20: Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan serta akses distribusi barang dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	5.5	5.49	5.5	5.5	5.51	5.51	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	RPJPD 2025-2045
			Pertumbuhan nilai ekspor produk Karangasem	4.59	4.63	4.68	4.7	4.77	4.82	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	RPJPD 2025-2045
			Ekspor Barang dan jasa	65.5	66	66.5	67	67.5	68	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Indikator RPJPD 2025-2045
		Sasaran 21: Meningkanya pengendalian harga komuditas pokok melalui Pasar Murah bersubsidi dan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga.	Cakupan operasi pasar murah	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
		Sasaran 22: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial.	Persentase Kemiskinan	6.4	4,95 – 5,20	5,10 – 4,50	4,80 – 4,20	4,40 – 3,80	3,75 – 4,00	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Indeks Kesejahteraan Sosial.	60.03	63.03	66.03	69.03	72.03	75.03	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
			Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
			Penyandang disabilitas penerima bantuan	8	10	12	15	17	20	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	RPJPD 2025-2045
			Penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	30	40	50	60	70	80	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
			Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	60	65	70	75	80	85	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
			Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	15	17	20	22	25	30	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	RPJPD 2025-2045
			Indeks Gini	**0.281**	**0.281**	**0.280**	**0.279**	**0.278**	**0.277**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**	**Inmendagri No. 2 tahun 2025**
	Tujuan 6: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dalam bidang		**Indeks Daya Saing Daerah**	**3.6**	**3.62**	**3.64**	**3.66**	**3.68**	**3.7**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pembangunan Daerah.										
		Sasaran 23: Meningkatnya kerja sama antar daerah.	Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	2.7	2.85	2.9	2.95	3	3.05	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	RPJPD 2025-2045
		Sasaran 24: Meningkatnya pendapatan daerah.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	26.56	25.22	25.18	25.15	25.13	25.10	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	RPJPD 2025-2045
		Sasaran 25: Meningkatnya inovasi daerah.	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (59.30)	Inovatif (60.00)	Inovatif (61.30)	Inovatif (63.00)	Inovatif (64.30)	Sangat Inovatif (65.30)	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	RPJPD 2025-2045
		Sasaran 26: Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ *stakeholder*	30.04	30.08	30.12	30.16	30.2	30.25	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	
	Tujuan 7 : Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang aman dalam Lingkungan Hidup dan Nyaman dari		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**70**	**70.01**	**70.02**	**70.03**	**70.04**	**70.05**	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Indikator RPJPD 2025-2045 dan Indikator Inmendagri No. 2 Th. 2025**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Lingkungan alam sekitar										
		Sasaran 27: Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih. indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Indeks Kualitas Air	68	68.01	68.02	68.03	68.04	68.05	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	RPJPD 2025-2045
			Indeks Kualitas Udara.	91	91.01	91.02	91.03	91.04	91.05	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan.	35.5	35.51	35.52	35.53	35.54	35.55	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Ketaatan terhadap RTRW	66	67	68	69	70	71	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Laporan Inventarisasi GRK.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Luasan ruang terbuka hijau yang dikelola (Ha).	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Desa yang mengadaptasi program kampung iklim (%)	31.65	34.18	36.71	39.24	41.77	44.3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	RPJPD 2025-2045
		Sasaran 28: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan dan Limbah.	Jumlah sampah yang tertangani	31.28	32.38	32.48	32.58	32.68	32.78	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Sasaran 29: Meningkatkan sanitasi perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (pengelolaan sampah)	24	24.5	25	25.5	26	26.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	RPJPD 2025-2045
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Pengelolaan Air Limbah) (%).	3.2	3.5	3.7	4	4.2	4.5	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
MISI 3: Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.	**Tujuan 8: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman ber-Kebudayaan dan kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.**		**Persentase Desa Adat dalampenyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana**	**25**	**29.75**	**34.5**	**39.25**	**44**	**48.75**	**Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan**	**RPJPD 2025-2045**
		Sasaran 30: Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem.	Pemenuhan Bantuan Keuangan kepada Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan Yohana (STT).	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Program Prioritas No.10
			Pemenuhan penghargaan bagi seniman berprestasi	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Program Prioritas No.4
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	2	2	2	2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	
			Objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3	3	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	
			Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	20	20	20	20	20	20	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	
			Cagar budaya yang dikelola secara terpadu.	1	1	1	1	1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	
		Sasaran 31: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis. meningkatkan toleransi antar umat beragama.	Indeks Harmoni Indonesia (IHI)	6	6.2	6.5	7	7.2	7.5	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sasaran 32: Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).	81	82	83	84	85	86	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Indeks Kinerja Ormas	50	52	55	57	60	65	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Indeks Kewaspadaan Nasional	60	62	65	67	70	72	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.	50	55	60	65	70	75	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sasaran 33: Meningkatnya kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	Persentase Partisipasi pemilih	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84	Perangkat Daerah Bidang UrusanKesatuan Bangsa dan Politik	RPJPD 2025-2045
	Tujuan 9: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Nyaman dalam hal Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Per kapita Penduduk.		**PDRB per kapita.**	**33.4**	**33.13**	**33.25**	**33.46**	**33.81**	**34.27**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**	
			Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	11.399,52	11.627,51	11.860,066	12.097,26	12.339,20	12.585,99	Unsur Penunjang Urusan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Pemerintahan Perencanaan	
		Sasaran 34: Meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem.	UMK Kabupaten Karangasem	2,996,561.00	3,191,337.00	3,398,774.00	3,619,695.00	3,854,975.00	4,105,548.00	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
		Sasaran 35: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (Milyar Rupiah)	120.90	122.11	123.34	124.57	125.81	127.07	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
			Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA (Milyar Rupiah)	458.42	463	467.63	472.31	477.03	481.8	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
			Rasio daya serap tenaga kerja	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
			Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan.	99	99	99	99	99	99	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 36: Meningkatnya pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, Perindustrian, UMKM, dan sektor lainnya.	Distribusi persentase PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%).	9.66	10.16	10.66	11.16	11.66	12.16	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	RPJPD 2025-2045.
			PAD Sektor Pariwisata (%)	24.37	24.87	25.37	25.87	26.37	26.87	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
			Jumlah Tamu Wisatawan domestik dan Mancanegara (juta orang).	1,377,161	1,384,046	1,390,966	1,397,922	1,404,911	1,411,936	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	RPJPD 2025-2045
			Tertata produk wisata sesuai konsep Nyegara Gunung	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Prioritas No.17
	Tujuan 10: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Sejahtera "GEMAH RIPAH LOH JINAWI.		**Indeks Kesejahteraan Masyarakat.**	**34.71**	**35.53**	**36.36**	**37.23**	**38.12**	**38.92**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**	
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.5	4.70 – 5.30	4.9 – 5.5	5.3 – 5.9	5.7 – 6.3	6.05 – 6.55	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 37: Memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG).	0.245	0.244	0.243	0.242	0.241	0.240	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RPJPD 2025-2045
			Indeks Pembangunan Gander	91.07	91,98	92.9	93.83	94.77	95.72	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RPJPD 2025-2045
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.	62	**63**	64	65	66	67	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RPJPD 2025-2045
			Indeks Perlindungan Anak	50	52	55	58	60	62	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sasaran 38: Meningkatnya pengendalian dan administrasi kependudukan.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.52	0.55	0.57	0.6	0.62	0.64	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Kepadatan Penduduk	599	560	560.5	561	561.5	562	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
			Rasio Jenis Kelamin	102.5	102.7	103	103.2	103.5	103.7	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
			Indeks lansia berdaya	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	85.1	85.4	85.7	86	86.3	86.6	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	22.4	23.9	25.5	27.2	29	30.9	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Urusan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Indeks Pembangunan Keluarga	62.9	63.3	63.6	64.0	64.3	64.6	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	
		Sasaran 39: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga.	Desa Mandiri (%).	58	59	60	61	62	63	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator RPJPD 2025-2045
			Desa adat dalam penyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana (%).	28	30	32	35	37	40	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJPD 2025-2045

3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2029

A. Strategi Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029

Strategi RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2
Pentahapan Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
VISI: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG (Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi)					
MISI 1: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuar reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba					
Tujuan 1: Mewujudkan Birokrasi yang bermental Pejuang Pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC).	Penataan manajemen perubahan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup: (a) penataan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) evaluasi penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.	Penata tatalaksana budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup: (a) tatalaksana budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) pembinaan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.	Penguatan akuntabilitas budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup: (a) peningkatan akuntabilitas budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) peningkatan pemahaman disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.	Peningkatan pengawasan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup: (a) peningkatan pengawasan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.	Peningkatan kualitas budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup: (a) peningkatan kualitas budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang obyeklif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Karangasem yang bersih dan bebas KKN.	Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Karangasem	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) dan penerapan SPBE terintegrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 2: Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem.	Transformasi Profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Peningkatan kualitas profesionalitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Peningkatan kualitas kinerja profesionalitas aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Penguatan sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik, khususnya dalam proses pengembangan aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Peningkatan budaya yang berorientasi pada pelayanan publik, inovasi, profesionalitas dan kinerja tinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem
Tujuan 2: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik.	Peningkatan kapasitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten yang terintegrasi dengan manajemen kinerja	Peningkatan pelayanan Umum/Publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima.	Peningkatan pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien.	Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien.	Peningkatan kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien.
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem.	Pemenuhan kebijakan Standar Pelayanan pelayanan publik pada semua sektor.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur BerAKHLAK serta didukung oleh tiga pilar yaitu kepemimpinan yang baik, pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi terbaru, serta kesempatan dan fasilitasi ide yang terbuka.	Pemanfaatan teknologi informasi transformasi digital pada unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) bersifat inklusif sehingga mudah diakses masyarakat.	Penerapan inovasi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.	Transformasi tata kelola layanan pemerintahan berbasis digital dengan mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan.
MISI 2: Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah					
Tujuan 3: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar.	Pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar perdesaan yang berkualitas, serta peningkatan aksesibilitas barang dan jasa	Pemerataan pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan yang berkualitas, serta peningkatan aksesibilitas berorientasi pertumbuhan ekonomi wilayah.	Penguatan infrastruktur wilayah dan pengelolaan kawasan perkotaan maupun perdesaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar berorientasi pertumbuhan ekonomi wilayah.	Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten.	Pengembangan infrastruktur menuju pembangunan wilayah yang seimbang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	Pemenuhan infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat.	Peningkatan pelayanan ketersediaan air bersih, air baku, konektivitas jaringan jalan, permukiman yang layak, sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	Pemenuhan pemerataan ketersediaan air bersih, air baku, konektivitas jaringan jalan, permukiman yang layak, sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	Peningkatan ketersediaan air bersih, air baku, konektivitas jaringan jalan, permukiman yang layak, sarana dan prasarana pelayanan dasar menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.	Perkuatan infrastruktur ketersediaan air bersih, air baku, konektivitas jaringan jalan, permukiman yang layak, sarana dan prasarana pelayanan dasar menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
Sasaran 5: Meningkatnya layanan transportasi perhubungan.	Penyediaan layanan transportasi yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan.	Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan.	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan.	Pemerataan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan.
Sasaran 6: Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik.	Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan layanan informasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan publik.	Pengembangan *e-government* seluruh instansi pemerintah guna mendukung pelayanan publik.	Penguatan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai dan pengembangan *e-government* yang menjangkau seluruh pelayanan publik.	Penguatan transformasi digital, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang merata untuk mengurangi mengurangi kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan serta mendukung percepatan pelayanan publik.
Tujuan 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Disiplin Gigih dan Pekerja Keras.	Peningkatan sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan "Gemah Ripah Loh Jinawi".	Penguatan sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan " Gemah Ripah Loh Jinawi".	Perluasan akses dan mutu sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan " Gemah Ripah Loh Jinawi".	Penguatan mutu dan relevansi sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan " Gemah Ripah Loh Jinawi".	Peningkatan inovasi dan produktivitas sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan " Gemah Ripah Loh Jinawi".

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 7: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh jenjang.	Penguatan tata kelola pendidikan dasar dan perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif di seluruh jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi.	Penguatan tata kelola pendidikan dasar dan penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter dan berbudaya Bali.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi.	Peningkatan layanan tata kelola pendidikan dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi.	Peningkatan profesionalisme tata kelola pendidikan dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi.
Sasaran 8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas.	Pemenuhan tata kelola manajemen pelayanan, sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer, unggul, berkeadilan, merata, dan berkualitas.	Peningkatan sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.	Perluasan dan pengembangan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif, berkualitas, terintegrasi dan transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif, berkualitas, terintegrasi dan transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran 9: Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing.	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal	Peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja.	Pengembangan sistem ketenagakerjaan, tata kelola, pemberdayaan, dan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan.	Penguatan sistem ketenagakerjaan, tata kelola, pemberdayaan, dan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan.	Peningkatan inovasi sistem ketenagakerjaan, tata kelola, pemberdayaan, dan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan.
Sasaran 10: Meningkatnya kualitas generasi muda Kabupaten Karangasem serta pengembangan keolahragaan.	Peningkatan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.	Peningkatan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan Karangasem.	Penguatan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan Karangasem.	Pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan Karangasem.	Peningkatan inovasi kepemudaan dan olahraga yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan Karangasem.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan 5: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM.	Penyelenggaraan peningkatan ketahanan pangan didukung sektor pertanian yang tangguh serta perumahan yang layak, Peningkatan Peran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Rangka Upaya Pencegahan Gangguan Kamtibmas serta Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta idustri perdagangan.	Pemenuhan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), ketahanan pangan didukung sektor pertanian yang tangguh serta perumahan yang layak, Pencegahan gangguan Kamtibmas dan pelanggaran perda Kabupaten Karangasem serta Penguatan sektor ekonomi unggulan pertanian, perikanan dan pertambangan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta idustri perdagangan.	Peningkatan ketersediaan angan didukung sektor pertanian yang tangguh serta perumahan yang layak, Penguatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan gangguan kamtibmas, serta Penguatan struktur ekonomi daerah pertanian, perikanan dan pertambangan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta idustri perdagangan yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kreatif.	Peningkatan keterjangkauan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) didukung ketersediaan pangan didukung sektor pertanian yang tangguh serta perumahan yang layak, Peningkatan sistem peringatan dini terhadap gangguan Kamtibmas dan pelanggaran perda Kabupaten Karangasem, serta Peningkatan daya saing ekonomi daerah pertanian, perikanan dan pertambangan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta idustri perdagangan yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kreatif.	Peningkatan kemanfaatan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) didukung ketersediaan pangan didukung sektor pertanian yang tangguh serta perumahan yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam ikut aktif pencegahan gangguan Kamtibmas secara signifikan, serta Penguatan ekonomi hijau sektor pertanian, perikanan dan pertambangan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta idustri perdagangan yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kreatif.
Sasaran 11: Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.	Peningkatan Pola Pangan Harapan, didukung ketersediaan kapasitas tampungan air, produksi komoditas pangan utama.	Pemenuhan Pola Pangan Harapan, didukung ketersediaan kapasitas tampungan air, produksi komoditas pangan utama.	Penguatan Pola Pangan Harapan, didukung ketersediaan kapasitas tampungan air, produksi komoditas pangan utama.	Pengembangan cadangan pangan untuk mewujudkanPola Pangan Harapan, didukung ketersediaan kapasitas tampungan air, produksi komoditas pangan utama.	Peningkatan inovasi kemampuan tata laksana Pola Pangan Harapan, didukung ketersediaan kapasitas tampungan air, produksi komoditas pangan utama.
Sasaran 12: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.	Pemenuhan ketersediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni.	Peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang berkualitas.	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang	Peningkatan keterpaduan pembangunan dan pengembangan rumah

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	penduduk miski/kurang mampu.			memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.	layak huni pada kawasan permukiman.
Sasaran 13: Meningkatnya Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi tanaman pangan.	Peningkatan pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu- hilir.	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian.
Sasaran 14: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dalam arti Luas.	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan.	Pembangunan dan penguatan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi modern dalam proses budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.	Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi modern dalam proses budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.
Sasaran 15: Meningkatnya peran serta kelembagaan kelompok tani/nelayan dalam pengembangan sektor pertanian.	Optimalisasi potensi produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.	Peningkatan daya saing kelompok petani dan nelayan dalam pengembangan sektor pertanian.	Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok petani dan nelayan dalam pengembangan sektor pertanian	Perluasan akses pasar hasil produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.	Harmonisasi sistem jaminan mutu produk pertanian, peternakan dan perikanan dan peningkatan daya saing produk kelompok tani dan nelayan.
Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem.	Peningkatan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat dan/atau aparatur dalam penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan peran serta multihelix dalam penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana	Pengembangan inovasi dalam penanggulangan bencana dengan memperhatikan perkembangan iptek dalam pengurangan risiko bencana	Penguatan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana	Penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis iptek dalam pengurangan risiko bencana

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 17: Meningkatnya ekonomi sektor strategis dan unggulan daerah.	Pengembangan sektor industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan yang berdaya saing lokal dan nasional serta ekspor.	Percepatan pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan berorientasi ekspor dan unggulan daerah.	Peningkatan daya saing industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan guna mendukung perekonomian daerah.	Peningkatan iklim kewirausahaan muda, kreativitas, kapasitas, dan kompetensi industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan guna mendukung perekonomian daerah.	Pemanfaatan inovasi dan teknologi modern dalam pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan berorientasi ekspor dan unggulan daerah.
Sasaran 18: Meningkatnya Forum Lintas Pengusaha (FLP) dalam Temu Usaha antar UMKM, PHRI, Koperasi dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait.	Peningkatan kemitraan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi.	Peningkatan pemanfaatan teknologi proses produksi, perluasan pemasaran, perlindungan hukum atas hak kekayaan inteketual dan peningkatan invetasi sektor ekonomi kreatif.	Penguatan teknologi tepat guna dan modern proses produksi, perluasan pemasaran, perlindungan hukum atas hak kekayaan inteketual dan peningkatan invetasi sektor ekonomi kreatif.	Peningkatan kapasitas pengembangan produk industri kreatif dari berbagfain komoditas sehingga menembuis pasar ekspor.	Penguatan kapasitas pengembangan produk industri kreatif dari berbagai komoditas sehingga menembuis pasar ekspor.
Sasaran 19: Meningkatnya mutu dan daya saing produk industri, UMKM, dan koperasi yang berwawasan lingkungan.	Pengembangan kegiatan ekonomi industri, usaha mikro, UMKM Koperasi dan BUMD yang berwawasan lingkungan.	Pemberdayaan kemitraan Industri, Usaha Mikro, UMKM Koperasi dan BUMD yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan kegiatan Industri, Usaha Mikro, UMKM Koperasi dan BUMD yang berwawasan lingkungan, memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional.	Peningkatan kemampuan Industri, Usaha Mikro, UMKM Koperasi dan BUMD dalam mengakses, memperluas permodalan, kemitraan usaha sertaberwawasan lingkungan .	Peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi dan sumber daya manusia di bidang Industri, Usaha Mikro, UMKM Koperasi dan BUMD yang berwawasan lingkungan, memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional.
Sasaran 20: Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan serta akses distribusi barang dan jasa	Pengembangan industri dan perdagangan secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas.	Peningkatan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi sektor industri dan perdagangan.	Perluasan akses pasar domestik dan internasional melalui kerja sama keterkaitan industri dan perdagangan domestik dengan rantai nilai global.	Pengembangan Industri dan perdagangan Berorientasi Ekspor.	Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri dan perdagangan Berorientasi Ekspor.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 21: Meningkatnya pengendalian harga komuditas pokok melalui Pasar Murah bersubsidi dan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga.	Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.	Penguatan ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta mencapai target konsumsi pangan per kapita atau per tahun yang sesuai dengan standar kecukupan gizi.	Penguatan mekanisme untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	Pengawasan distribusi yang efektif dan efisien dari produk-produk pangan ke pasar-pasar lokal, meminimalkan fluktuasi harga yang tidak stabil serta meningkatkan daya beli dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi penduduk.	Pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat dan memastikan stabilitas pasokan serta harga pangan di wilayah setempat.
Sasaran 22: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial.	Peningkatan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, maupun pengurangan kesenjangan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Karangasem.	Peningkatan sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial.	Peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial.	Peningkatan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup dalam rangka mencapai kemandirian.	Peningkatan pemberdayaan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Tujuan 6: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dalam bidang Pembangunan Daerah.	Peningkatan kemajuan pembangunan daerah melalui kerja sama Perangkat Daerah Bidang Urusan di antara semua pihak yang berkepentingan.	Pengembangan potensi dan daya saing daerah melalui penguatan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah.	Peningkatan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi gap daya saing yang masih dialami.	Pengembangan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.	Peningkatan kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Sasaran 23: Meningkatnya kerjasana antar daerah.	Pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas.	Peningkatan perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel serta mempertimbangkan sumber	Pengintegrasian sistem e-planning dengan SIPD untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik melalui

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				daya dan potensi yang dimiliki.	situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.
Sasaran 24: Meningkatnya pendapatan daerah.	Peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.	Penguatan ekosistem dalam tata kelola dan optimalisasi PAD.	Optimalisasi sumber daya potensi daerah untuk menggali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD.	Efektivitas dan efisiensi dalam proses penerimaan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.	Pengelolaan keuangan yang mandiri, optimalisasi aset daerah, pengembangan layanan sektor ekonomi untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam pertumbuhan PAD.
Sasaran 25: Meningkatnya inovasi daerah.	Peningkatan inisiatif inovasi daerah yang berdampak signifikan terhadap capaian Indeks Inovasi Daerah.	Peningkatan penciptaan dan penerapan inovasi bagi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.	Peningkatan penciptaan, penerapan dan pengembangan inovasi daerah yang lebih sistematis, terarah dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan indeks inovasi daerah.	Penguatan kepemimpinan dan budaya organisasi, memperluas jejaring atau kemitraan dan kolaborasi, kemampuan organisasi yang inovatif, adaptif dan fleksibel, pengaturan tata kelola pemerintahan yang kondusif, sistem insentif dan penghargaan inovasi	Penguatan ekosistem inovasi yang bisa menciptakan inovasi sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif.
Sasaran 26: Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah	Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan 7 : **Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang aman dalam Lingkungan Hidup dan Nyaman dari Lingkungan alam sekitar**	Pengintegrasian pengelolaan lingkungan hidup antar dan lintas sektor	Peningkatan Pengendalian dan Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Sarana dan prasarana seta SDM dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan tata kelola dan inovasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
Sasaran 27: Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Peningkatan sarana dan prasaran serta SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Penguatan tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas, ruang terbuka hijau serta tanggap terhadap perubahan iklim.
Sasaran 28: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan dan Limbah.	Peningkatan komitmen, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Pengurangan volume timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Penerapan dan pengembangan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Pengurangan volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diolah pada pemrosesan akhir.	Penguatan inovasi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 29: Meningkatkan sanitasi perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	Peningkatan komitmen dan kesiapan layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.	Peningkatan kapasitas layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.	Peningkatan standar operasional dan prosedur layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.	Peningkatan kinerja dan target layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.	Peningkatan pemenuhan layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
MISI 3: Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.					
Tujuan 8: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman ber-Kebudayaan dan kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Pengintegrasian kebudayaan sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Peningkatan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif dalam kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Pengembangan nilai serta ekspresi budaya tradisional, sehingga kebudayaan daerah terus diperkaya oleh warisan leluhur untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif dalam kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Penguatan kekayaan budaya daerah Karangasem untuk meningkatkan perilaku budaya yang inklusif dalam kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem budaya dalam konteks keberlanjutan lingkungan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif dalam kehidupan sosial dan beragama.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 30: Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan komitmen pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem.	Penguatan unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.	Penerapan nilai-nilai, norma dan etika budaya ke dalam kehidupan bermasyarakat untuk membangun masa depan dan peradaban budaya daerah.	Peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan dengan mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, sehingga upaya Pemajuan Kebudayaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Sasaran 31: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis, meningkatkan toleransi antar umat beragama.	Penguatan Moderasi Beragama secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.	Peningkatan ekosistem Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dan dan Kepercayaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
Sasaran 32: Meningkatnya niali-nilai kebangsaan kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanank ehidupan masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan hukum.	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan daerah.	Penguatan wawasan kebangsaan sesuai prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lembaga dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 33: Meningkatnya kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	Pengembangan budaya politik masyarakat dalam partisipasi politik dan dalam perumusan berbagai kebijakan publik di daerah.	Penguatan budaya politik masyarakat dalam partisipasi politik dan dalam perumusan berbagai kebijakan publik di daerah.	Pembinaan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lokal.	Peningkatan partisipasi masyarakat yang melibatkan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lokal.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lokal
Tujuan 9: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Nyaman dalam hal Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Per kapita Penduduk.	Peningkatan program perbaikan kondisi fisik daerah dan lokasi daerah yang ditujukan untuk pembangunan di. Bidang ekonomi.	Peningkatan daya tarik pembangunan ekonomi daerah yang memudahkan dunia usaha untuk berinvestasi.	Peningkatan produktivitas dan konsumsi sumber daya ekonomi daerah	Peningkatan pemerataan pengembangan investasi dan pembangunan secara merata di semua wilayah.	Penguatan investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi di semua wilayah
Sasaran 34: Meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem.	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kerja, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan produktivitas tenaga kerja pada semua sektor ekonomi.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan produk/jasa dalam negeri termasuk untuk orientasi ekspor. pada semua sektor ekonomi.	Peningkatan pengelolaan sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah.	Peningkatan potensi sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah.	Perluasan iklim berusaha, dan pengembangan investasi pada semua sektor ekonomi untuk peningkatan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
Sasaran 35: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan kemudahan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan tenaga kerja dan ketahanan ekonomi daerah.	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, kemudahan berusaha]yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam membangun investasi untuk ekonomi berkelanjutan.	Peningkatan sistem pelayanan perijinan yang aman dan nyaman, memberi kepastian hukum, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.	Peningkatan investasi sektor ekonomi unggulan yang inklusif, padat modal dan tenaga kerja, komprehensif dan terintegrasi antar sektor ekonomi.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 36: Meningkatnya pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	Penguatan tata kelola destinasi dan pengembangan obyek wisata terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	Penciptaan nilai tambah produk wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	Peningkatan daya saing destinasi pariwisata, produk pariwisata, pelayanan pariwisata secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	Perluasan pangsa pasar, citra pariwisata yang berdaya saing, dan pemasaran industri pariwisata terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	Penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.
Tujuan 10: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Sejahtera “GEMAH RIPAH LOH JINAWI.	Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial guna pengurangan kesenjangan sosial.	Peningkatan kesejahteraan umum mencakup berbagai macam bidang kehidupan, misalnya kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.	Pemberdayaan, pembangunan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal menuju masyarakat madani.	Pengembangan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Peningkatan peran masyarakat dalam sistem sosial dan politik dan memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.
Sasaran 37: Memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan.	Peningkatan program kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).	Pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti persamaan derajat yang antara perempuan dan laki-laki.	Penurunan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan daerah.	Peningkatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (KKG) untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Visi/Misi Tujuan/Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sasaran 38: Meningkatnya pengendalian dan administrasi kependudukan..	Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara terintegrasi lintas sektor.	Peningkatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen masyarakat.	Peningkatan pengendalian penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.	Pengembangan kualitas penduduk melalui peningkatan kesehatan; pendidikan; nilai agama; perekonomian; dan nilai sosial budaya.	Penguatan pengendalian penduduk berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Sasaran 39: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga.	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ulet, tangguh serta mandiri untuk hidup harmonis.	Peningkatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan.	Penguatan keluarga berkualitas, sejahtera, dan berketahanan antara lain isu gender dan bentuk ketidakadilan; pembangunan keluarga yang komprehensif dan integratif.	Pembinaan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga; memberikan edukasi tentang ketahanan keluarga untuk menjamin keharmonisan dan kebahagiaan dalam berkeluarga.	Peningkatan kualitas keluarga dari dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

B. Arah Kebijakan Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan dirumuskan secara komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dibahas melalui serial FGD (*focus group discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten

Visi: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG

(Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi)

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
MISI 1: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba	**Tujuan 1: Mewujudkan Birokrasi yang bermental Pejuang Pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC).**	1. Menata dan memperkuat organisasi, tata kelola birokrasi, serta pengelolaan SDM aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan bebas KKN. 2. Mendorong perubahan *mindset* dan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, cepat, responsif, dan menjunjung tinggi etika serta nilai dasar aparatur negara. 3. Mengembangkan sistem akuntabilitas dan pengawasan budaya birokrasi melalui penerapan *reward* dan *punishment* yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
	Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Karangasem yang bersih dan bebas KKN	1. Menata kelembagaan pemerintah daerah dan mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyusunan APBD yang berkelanjutan, partisipatif, dan akuntabel. 2. Meningkatkan penerapan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, efisien, serta memperkuat sistem pelayanan terpadu di seluruh lingkungan pemerintahan. 3. Mengimplementasikan sistem integritas, reformasi birokrasi, dan pengawasan partisipatif masyarakat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan budaya inovasi dalam pelayanan publik.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
	Sasaran 2: Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	1. Meningkatkan kesejahteraan, disiplin, integritas, dan budaya kerja ASN dan P3K untuk mendukung motivasi, produktivitas, serta etos pelayanan publik yang tinggi. 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang berkelanjutan dan terintegrasi. 3. Mendorong implementasi manajemen SDM aparatur yang handal, terpercaya, dan akuntabel dalam seluruh lini pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan kinerja.
	Tujuan 2: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik.	1. Meningkatkan kapasitas dan konsistensi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi dengan manajemen kinerja untuk menjamin kualitas layanan dasar. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada pelayanan prima. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendorong transformasi digital pelayanan publik yang cepat, murah, dan efisien.
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem.	1. Melaksanakan modernisasi sistem pelayanan publik melalui penguatan manajemen, SDM aparatur yang Ber-AKHLAK, serta pemenuhan standar pelayanan di seluruh sektor. 2. Mendorong transformasi digital dan adopsi teknologi informasi secara menyeluruh dalam tata

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		kelola pemerintahan dan layanan publik, termasuk layanan daring yang inklusif hingga tingkat desa/Kantor Perbekel. 3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang efisien, transparan, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.
MISI 2: Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan	**Tujuan 3: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar**	1. Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan untuk memperluas akses terhadap barang, jasa, dan layanan publik. 2. Mengembangkan infrastruktur transportasi, pertanian, dan layanan dasar masyarakat guna memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh kawasan.
	Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang	1. Mempercepat pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti air bersih, air baku, permukiman layak, dan jaringan jalan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur dasar secara inklusif guna menjamin akses layanan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		3. Mendorong inovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin.
	Sasaran 5: Meningkatnya layanan transportasi perhubungan	1. Meningkatkan pelayanan transportasi darat dan laut yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan. 2. Memperkuat ketersediaan serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berkualitas di seluruh wilayah. 3. Mengembangkan sistem transportasi publik yang berdaya saing melalui integrasi layanan dan optimalisasi operasional untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
	Sasaran 6: Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai	1. Meningkatkan pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana perangkat lunak, perangkat keras, serta jaringan telekomunikasi untuk mendukung pelayanan publik berbasis Online System dengan prinsip mudah, murah, dan cepat. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan layanan e-government di seluruh instansi pemerintahan guna memperluas akses dan efisiensi pelayanan publik digital. 3. Mendorong pemerataan infrastruktur TIK dan transformasi digital secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan digital antarwilayah, khususnya antara perkotaan dan perdesaan, serta mempercepat pelayanan publik yang terintegrasi.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
	Tujuan 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Disiplin Gigih dan Pekerja Keras	1. Meningkatkan kualitas, akses, dan mutu sumber daya manusia Karangasem yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia secara berkelanjutan. 2. Mendorong relevansi, inovasi, dan produktivitas SDM dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. 3. Memperkuat fondasi pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan menuju masyarakat Karangasem yang makin sejahtera dalam semangat "Gemah Ripah Loh Jinawi".
	Sasaran 7: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh jenjang	1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dasar dan tinggi yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjamin akses, mutu, dan relevansi pendidikan di semua jenjang. 2. Memperluas akses pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik, termasuk melalui program Kartu Karangasem Cerdas, beasiswa, dan bantuan bea-mahasiswa. 3. Mendorong sistem pendidikan yang berkarakter, berbasis budaya Bali, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan.
	Sasaran 8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif, berkualitas, merata, dan berkeadilan, termasuk optimalisasi sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan. 2. Menguatkan tata kelola dan manajemen program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) dan pelayanan

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		RSUD sebagai fasilitas kesehatan utama bagi peserta BPJS. 3. Mendorong inovasi dan integrasi sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
	Sasaran 9: Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing	1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing secara berkelanjutan. 2. Memperkuat sistem dan tata kelola ketenagakerjaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja. 3. Memberikan fasilitasi Dana Talangan bagi tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri sebagai upaya peningkatan akses kesempatan kerja internasional.
	Sasaran 10: Meningkatnya kualitas generasi muda Kabupaten Karangasem serta pengembangan keolahragaan	1. Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan, dan kualitas pemuda agar berperan aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan pembinaan, pembudayaan, dan prestasi olahraga secara menyeluruh dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat. 3. Mengembangkan inovasi dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga yang adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan.
	Tujuan 5: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang	1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan pola konsumsi pangan B2SA, penguatan sektor pertanian yang tangguh, serta penyediaan perumahan layak bagi masyarakat.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
	KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM	2. Mengembangkan sistem pencegahan gangguan Kamtibmas dan pelanggaran perda melalui pengawasan terpadu dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. 3. Mendorong transformasi dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan (pertanian, perikanan, pertambangan, industri, jasa), penguasaan IPTEK, inovasi, serta pengembangan UMKM, koperasi, dan perdagangan berbasis ekonomi hijau dan kreatif.
	Sasaran 11: Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Meningkatkan kelembagaan, tata kelola, dan inovasi penyelenggaraan Pola Pangan Harapan (PPH) secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan cadangan pangan dalam rangka mendukung pencapaian Pola Pangan Harapan. 3. Memperkuat dukungan infrastruktur ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan produksi komoditas pangan utama
	Sasaran 12: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni serta pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas dan terpadu. 2. Memperkuat tata kelola penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif. 3. Meningkatkan kapasitas SDM, pembinaan, dan evaluasi dalam penyediaan perumahan bagi

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.
	Sasaran 13: Meningkatnya Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan penyediaan benih unggul, pengolahan lahan, praktik budidaya, pengendalian hama, dan penanganan pasca panen yang terintegrasi dari hulu ke hilir. 2. Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam praktik budidaya serta mitigasi dampak perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan sumber daya pertanian secara efisien untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh.
	Sasaran 14: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dalam arti Luas	1. Meningkatkan kualitas SDM petani serta produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk melalui pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan inovasi teknologi modern dalam budidaya. 3. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam seluruh rantai produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mewujudkan pertanian yang efisien dan berkelanjutan.
	Sasaran 15: Meningkatnya peran serta kelembagaan kelompok tani/nelayan dalam pengembangan sektor pertanian	1. Mengoptimalkan potensi produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produktivitas dan

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		kesejahteraan pelaku usaha tani, ternak, dan nelayan. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan kelompok petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan khusus, pelatihan, serta penguatan kapasitas usaha. 3. Meningkatkan daya saing dan jaminan mutu produk serta memperluas akses pasar hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis kelompok usaha rakyat.
	Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem	1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam mitigasi dan penanggulangan bencana melalui edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan mandiri untuk mengurangi risiko bencana. 2. Mendorong kolaborasi multihelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media) dalam penanggulangan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan inovasi dan sistem peringatan dini berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk mendukung efektivitas pengurangan risiko bencana.
	Sasaran 17: Meningkatnya ekonomi sektor strategis dan unggulan daerah	1. Mengembangkan dan memperkuat sektor industri kecil, menengah, koperasi, serta perdagangan yang berdaya saing lokal, nasional, dan berorientasi ekspor berbasis potensi unggulan daerah. 2. Meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor IKM, koperasi, dan perdagangan terhadap perekonomian daerah melalui penguatan kapasitas,

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		kompetensi, dan kreativitas pelaku usaha, termasuk kewirausahaan muda. 3. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi modern dalam pengembangan industri dan perdagangan untuk memperkuat produktivitas, efisiensi, dan akses pasar.
	Sasaran 18: Meningkatnya Forum Lintas Pengusaha (FLP) dalam Temu Usaha antar UMKM, PHRI, Koperasi dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait	1. Meningkatkan kemitraan strategis dan kapasitas pengembangan produk industri kreatif dari berbagai komoditas untuk mendorong daya saing dan penetrasi pasar ekspor. 2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan modern dalam proses produksi serta perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif. 3. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan peningkatan investasi di sektor kreatif yang berkelanjutan.
	Sasaran 19: Meningkatnya mutu dan daya saing produk industri, UMKM, dan koperasi yang berwawasan lingkungan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan industri, usaha mikro, UMKM, koperasi, dan BUMD yang berwawasan lingkungan serta memiliki daya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. 2. Meningkatkan kemitraan usaha, akses permodalan, serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku industri, UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia di sektor industri, UMKM, koperasi, dan BUMD untuk

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		mendukung keberlanjutan usaha dan daya saing jangka panjang.
	Sasaran 20: Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan serta akses distribusi barang dan jasa	1. Mengembangkan industri dan perdagangan secara menyeluruh melalui penyediaan insentif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan rantai nilai domestik dan global. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. 3. Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan orientasi ekspor sektor industri dan perdagangan melalui perluasan akses pasar domestik dan internasional.
	Sasaran 21: Meningkatnya pengendalian harga komoditas pokok melalui Pasar Murah bersubsidi dan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga	1. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas pangan sesuai standar kecukupan gizi melalui distribusi yang efektif dan efisien ke pasar-pasar lokal. 3. Mengendalikan dampak inflasi melalui penguatan mekanisme pengawasan harga dan distribusi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
	Sasaran 22: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan sosial.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan kapasitas penduduk melalui pemberdayaan sosial guna mendorong kemandirian dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
	Tujuan 6: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dalam bidang Pembangunan Daerah	1. Mendorong kemajuan pembangunan daerah melalui kerja sama, koordinasi Perangkat Daerah Bidang Urusan, dan inovasi yang terpadu di antara seluruh pemangku kepentingan. 2. Mengembangkan potensi dan daya saing daerah dengan memperkuat kebijakan dasar, meningkatkan investasi, serta menyediakan sarana prasarana dan akses terhadap sumber pembiayaan pembangunan. 3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan global melalui pengembangan sumber daya manusia, pelayanan dasar, serta kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.
	Sasaran 23: Meningkatnya kerja sama antar daerah.	1. Mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah yang optimal, adil, dan berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. 2. Memperkuat kerjasama antar daerah melalui pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem *e-planning*. 3. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah dengan dukungan alokasi pendanaan yang memadai serta pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah secara sinergis.
	Sasaran 24: Meningkatnya pendapatan daerah	1. Meningkatkan rasio dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. 2. Menguatkan ekosistem tata kelola PAD melalui optimalisasi potensi daerah, efisiensi proses pemungutan, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 3. Mengembangkan sumber-sumber PAD baru dengan memanfaatkan potensi daerah, optimalisasi aset, dan pengembangan layanan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
	Sasaran 25: Meningkatnya inovasi daerah	1. Meningkatkan penciptaan, penerapan, dan pengembangan inovasi daerah berbasis iptek secara sistematis, terarah, dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah. 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam inovasi melalui inisiatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. 3. Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui penguatan budaya organisasi, kepemimpinan,

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		kolaborasi, insentif, serta jejaring kemitraan strategis yang adaptif dan berbasis teknologi.
	Sasaran 26: Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	1. Menyusun kebijakan yang terintegrasi serta membangun infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung pengembangan daya saing daerah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan riset serta mendorong budaya riset dan inovasi di seluruh lapisan masyarakat. 3. Memperkuat sinergi dan jaringan kolaborasi riset dan inovasi multistakeholder melalui kemitraan strategis dan program bersama lintas sektor.
	Tujuan 7: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang aman dalam Lingkungan Hidup dan Nyaman dari Lingkungan alam sekitar	1. Mendorong kemajuan teknologi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian alam. 3. Memperkuat sarana, prasarana dan infrastruktur dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan alam.
	Sasaran 27: Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta perlindungan lingkungan hidup yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan iklim. 2. Memperkuat tata kelola, sarana prasarana, SDM, dan inovasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ekologi. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		lingkungan melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
	Sasaran 28: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan dan Limbah	1. Meningkatkan komitmen, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis secara sistematis. 2. Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui peningkatan pendauran ulang oleh masyarakat dan pengurangan volume sampah secara berkelanjutan. 3. Mendorong inovasi dalam pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi untuk mendukung ekonomi sirkular dan ketahanan lingkungan.
	Sasaran 29: Meningkatkan sanitasi perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	1. Meningkatkan komitmen, kapasitas, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sanitasi berkelanjutan melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang terpadu. 2. Meningkatkan kualitas, cakupan, dan pemenuhan layanan sanitasi melalui standar operasional dan prosedur yang konsisten serta berbasis hasil. 3. Memperkuat pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara komprehensif untuk memastikan pencapaian kinerja dan target pembangunan sanitasi berkelanjutan.
MISI 3: Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya,	**Tujuan 8: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman ber- Kebudayaan dan kehidupan sosial beragama dan**	1. Mengintegrasikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial, beragama, dan berkeyakinan melalui penguatan nilai budaya di

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi	**berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar *Stakeholder*.**	antara Desa Adat dan seluruh pemangku kepentingan. 2. Mendorong ekspresi dan interaksi budaya yang inklusif lintas kelompok serta memperkaya kebudayaan daerah dengan warisan leluhur dan nilai-nilai tradisional. 3. Meningkatkan pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, selaras dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
	Sasaran 30: Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem	1. Meningkatkan komitmen pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan melalui penguatan program pembinaan bagi seniman yang berprestasi di Kabupaten Karangasem. 2. Menguatkan unsur-unsur ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan serta mendorong penerapan nilai, norma, dan etika budaya dalam kehidupan bermasyarakat untuk membangun peradaban budaya daerah. 3. Meningkatkan pengelolaan kebudayaan yang partisipatif dengan mendorong peran aktif masyarakat dan inisiatif lokal agar pemajuan kebudayaan tercapai secara efektif dan efisien.
	Sasaran 31: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis, meningkatkan toleransi antar umat beragama	1. Menguatkan moderasi beragama secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Adat, Banjar Adat, STT, dan Subak serta bantuan langsung kegiatan upacara keagamaan.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama serta sikap toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antarkelompok kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. 3. Mendorong tumbuhnya ekosistem beragama yang inklusif dan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama serta pelayanan publik oleh pemerintah daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
	Sasaran 32: Meningkatnya niali-nilai kebangsaan kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.	1. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui pengamalan Pancasila, UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan hukum. 2. Meningkatkan kerukunan antarsuku, antarumat beragama, ras, dan golongan lainnya dengan partisipasi masyarakat dan prinsip demokrasi untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang menjunjung nilai-nilai hukum, budaya, keadilan, serta mendukung masyarakat yang bebas dari narkoba.
	Sasaran 33: Meningkatnya kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	1. Mendorong budaya politik partisipatif yang inklusif dalam masyarakat untuk memperkuat keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik daerah.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		2. Melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan kebijakan lokal. 3. Meningkatkan peran aktif dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembinaan, fasilitasi, dan pelibatan langsung dalam proses demokratis.
	Tujuan 9: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Nyaman dalam hal Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Per kapita Penduduk.	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan kondisi wilayah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 2. Mengembangkan sumber daya manusia, iklim berusaha, dan kapasitas ekonomi masyarakat dalam rangka memperkuat sektor unggulan daerah seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa. 3. Meningkatkan daya tarik investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi melalui penyebaran investasi yang adil dan kemudahan bagi dunia usaha di seluruh wilayah.
	Sasaran 34: Meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem	1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja di semua sektor ekonomi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan orientasi pasar ekspor. 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		3. Memperluas iklim usaha dan investasi untuk membuka peluang berusaha serta memperluas kesempatan kerja di dalam dan luar negeri secara berkelanjutan.
	Sasaran 35: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem	1. Meningkatkan kemudahan investasi melalui pelayanan perizinan yang berkualitas, aman, inklusif, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 2. Mendorong investasi pada sektor-sektor ekonomi unggulan yang padat modal dan tenaga kerja, serta terintegrasi secara komprehensif antar sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 3. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang produktif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
	Sasaran 36: Meningkatnya pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya	1. Mendorong tata kelola destinasi dan pengembangan objek wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM, dan sektor lainnya melalui pendekatan pariwisata Nyegara Gunung secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan daya saing destinasi, produk, dan pelayanan pariwisata melalui inovasi, adopsi teknologi, serta perluasan pasar dan citra pariwisata yang bernilai tambah. 3. Memperkuat peran komunitas, kelembagaan pariwisata, serta kebijakan kolaboratif antar sektor guna menciptakan ekosistem pariwisata yang

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
		berdaya saing dan berdampak ekonomi luas bagi masyarakat.
	Tujuan 10 : Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Sejahtera “GEMAH RIPAH LOH JINAWI	1. Meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan sosial di berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 2. Mendorong pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu mengoptimalkan potensinya menuju masyarakat madani yang inklusif dan berdaya. 3. Mengembangkan program pembangunan dan integrasi sosial yang mendorong peran aktif masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, kultural, serta sistem sosial dan politik untuk kemajuan bangsa.
	Sasaran 37: Memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatkan kapasitas, kualitas hidup, kesehatan, dan kemandirian ekonomi perempuan agar berdaya saing dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Mempercepat pengarusutamaan gender melalui pemberdayaan, peningkatan keterwakilan, dan keberpihakan pada isu-isu perempuan dalam pembangunan daerah. 3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mendorong partisipasi aktif dan setara antara perempuan, laki-laki, serta anak dalam seluruh proses pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel.

Misi	Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
	Sasaran 38: Meningkatnya pengendalian dan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara terintegrasi lintas sektor untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung lingkungan. 2. Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. 3. Mengembangkan kualitas penduduk dan keluarga melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, nilai agama, sosial budaya, serta ekonomi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
	Sasaran 39: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan desa yang mandiri, ulet, dan tangguh melalui penguatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). 2. Mengembangkan keluarga dan desa berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, adil gender, serta menjunjung nilai-nilai hak anak pada setiap tahapan kehidupan. 3. Mendorong pembangunan keluarga yang komprehensif dan integratif melalui edukasi dan penguatan dimensi ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya, serta legalitas dan struktur keluarga.

3.5.2 Program-Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas jangka pendek untuk menjadi landasan dasar penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Karangasem dalam Program Kerja skala perioritas, jangka pendek dan menjadi perhatian khusus untuk segera terelisasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan/fasilitasi program Makan Bergisi Gratis (MBG).
2. Penyesuaian tarif pelanggan golongan rumah tangga (K2), meningkatkan pelayanan Air bersih, bantuan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sambungan gratis bagi masyarakat miskin.
3. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan pembangunan lumbung pangan serta meningkatkan anggaran pemberdayaan Kelompok Nelayan, Kelompok Tani dan Ternak.
4. Memperkuat infrastruktur desa dan meningkatkan bantuan rumah layak huni bersanitasi baik bagi masyarakat miskin
5. Meningkatkan tunjangan dan kesejahteraan pegawai ASN.
6. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, penguatan dan pengembangan ekonomi, UMKM, dan industri kreatif.
7. Optimalisasi Program UHC dan pelayanan pada RSUD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan andalan untuk mendukung pelayanan masyarakat peserta BPJS.
8. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, perbaikan gizi anak dan balita serta ibu hamil.
9. Meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan perangkat desa melalui peningkatan persentase ADD menjadi 15% dari pajak dan retribusi.
10. Meningkatkan dana pembinaan bagi atlet dan seniman yang berprestasi.
11. Fasilitasi dana talangan bagi tenaga kerja ke luar negeri.

12. Meningkatkan dan memperkuat pelayanan administrasi/ Pelayanan Publik di tingkat Desa dan Kabupaten dengan Prinsip Mudah-Murah-Cepat dengan sistem On Line.
13. Meningkatkan mutu sekolah unggulan, perbaikan sekolah, memperkuat Kartu Karangasem Cerdas dan Bantuan Beasiswa.
14. Meningkatkan Bantuan Keuangan kepada Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan STT/Yowana
15. Menguatkan Infrastruktur Air Bersih, Jalan dan Telekomunikasi
16. Harmonisasi peran dan fungsi DPRD dalam penyusunan APBD
17. Mengembangkan Pariwisata dengan konsep Nyegara Gunung.

Tabel 3.4

Rumusan Program Prioritas Daerah Kabupaten Karangasem

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MENUJU KARANGASEM YANG “AGUNG“ (Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi													
MISI 1: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuar reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba	**1**	**Tujuan1: Mewujudkan Birokrasi yang bermental Pejuang Pelayan rakyat dengan prinsip Mudah, Murah, Cepat (MMC).**					**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi.**			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda	
			1	Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Karangasem yang bersih dan bebas KKN.	1	Terwujud organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN.	2	Opini BPK terhadap laporan keuangan.			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	BPKAD	
							3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda (Bagian Ekbang)	
							4	Fasilitasi Anggaran Dana Desa			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	Program Prioritas No.9
							5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda (Bagian Organisasi)	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							6	Indeks Penilaian Integritas.			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	Inspektorat	Indikator RPJPD 2025-2045
					2	Terwujud tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.	7	Nilai Evaluasi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP)			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	Inspektorat	
							8	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dispustaka	
							9	Dukungan operasional peningkatan kesejahteraan ASN untuk pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah			Urusan Pemerintahan (Semua Perangkat Daerah)	Semua OPD	Program Prioritas No.5
									1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	BPKAD	
									2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	BPKAD	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	OPD Pengampu	Ket.
					3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	
					4 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	
					5 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	Inspektorat	
					6 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	Inspektorat	
					7 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Diskominfo	
					8 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Diskominfo	
					9 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
					10 Program Penyelenggaraan Urusan	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
										Pemerintahan Umum			
									11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintahan (Semua Perangkat Daerah)	Semua Perangkat Daerah	
									13	Program Pengelolaan Arsip	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dispustaka	
									14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dispustaka	
									15	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda	
			2	Sasaran 2: Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	3	Terwujud sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan berdaya saing	10	Nilai Sistem Merit			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	BKPSDM	
							11	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									16	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	BKPSDM	
									17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	
	2	**Tujuan 2: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/ Publik.**					**12**	**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda	Indikator RPJPD 2025-2045
			3	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem.	4	Terwujud kepatuhan Standar Pelayanan Publik bagi Instansi Pemerintah penyelenggara pelayanan publik.	13	Indeks Kepuasan Masyarakat			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Setda	Indikator RPJPD 2025-2045
							14	Pelayanan Publik di tingkat Desa dan Kabupaten dengan Prinsip Mudah- Murah-Cepat dengan sistem On Line.			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Program Prioritas No.12
							15	Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Indikator RPJPD 2025-2045

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
									19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									21	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									22	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									23	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Unsur Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	
									24	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	
									25	Program Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
											dan Pencatatan Sipil		
MISI 2: Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah	**3**	**Tujuan 3: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar**					16	**Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur (IKLI).**			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
							17	**Rasio Konektivitas**			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			4	Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	5	Terwujud infrastruktur dasar daerah jalan kabupaten mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.	18	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Program Prioritas No.15
							19	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
							20	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam).			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
					6	Terwujud tata perumahan dan kawasan permukiman secara memadai	21	Persentase Rumah tinggal bersanitasi.			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
					7	Terwujud akses atas air dan sanitasi serta manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan	22	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik.			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
							23	Persentase Penduduk berakses air minum.			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
							24	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
					8	Terwujud akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	25	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No. 4
							26	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
									26	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									27	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
									28	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
									29	Program Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
									30	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
									31	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
									32	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									33	Program Penataan Bangunan dan Gedung	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
									34	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
									35	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
			5	Sasaran 5: Meningkatnya layanan transportasi perhubungan.	9	Terwujud sarana dan prasarana transportasi yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan	27	Layanan angkutan darat.			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	
							28	Persentase Pengelolaan Pelayaran			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
									36	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	
									37	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			6	Sasaran 6: Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	10	Terwujud infrastruktur telekomunikasi untuk peningkatan layanan publik secara online seluruh bidang pelayanan.	29	Cakupan Layanan Telekomunikasi.			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Indikator RPJPD 2025-2045 & Program Prioritas No.15
					11	Terwujud kualitas pelayanan e-government seluruh instansi pemerintah guna mendukung pelayanan publik pelayanan publik dengan prinsip mudah-murah-cepat berbasis On Line System.	30	Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Indikator RPJPD 2025-2045
							31	Penduduk yang menggunakan HP/telepon.			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
							32	Proporsi rumah tangga dengan akses internet.			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Indikator RPJPD 2025-2045
							33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi			Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
									38	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
									39	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
	4	**Tujuan 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Disiplin Gigih dan Pekerja Keras.**					34	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	
			7	Sasaran 7: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh jenjang.	12	Terwujud sistem tata kelola pendidikan dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.	35	Rata-rata lama sekolah penduduk usia sampai dengan 15 tahun.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							36	Harapan Lama Sekolah.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							37	Angka Melek Huruf.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
							38	Menurunnya Angka Putus sekolah usia 7-15 Tahun.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							39	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
							40	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
							41	Pelayanan Pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa berprestasi			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Program Prioritas No.13

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
					13	Terwujud peningkatan akses, mutu, relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk Pendidikan Tinggi	42	Literasi Membaca SD.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							43	Literasi Membaca SMP.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							44	Numerasi SD.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							45	Numerasi SMP			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator RPJPD 2025-2045
							46	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dispustaka	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
					14	Terwujud pendidikan dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yang didukung kurikulum berkelanjutan.	47	Persentase Sekolah Dasar dan Menengah yang melaksanakan praktik pembelajaran berbasis IPTEK			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
									40	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
									41	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
									42	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									43	Program Pengendalian perijinan pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
									44	Program Pengembangan Kurikulum	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
									45	Program Pembinaan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dispustaka	
									46	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dispustaka	
			8	Sasaran 8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	15	Terwujud tata kelola manajemen pelayanan program UHC dan pelayanan RSUD, sebagai Pasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat peserta BPJS., sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer, unggul, berkeadilan, merata dan berkualit	48	Angka Umur Harapan Hidup (UHH).			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-2045
							49	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	
							50	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	
							51	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-2045
							52	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-20465

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							53	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-2045
							54	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No. 8
							55	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Program Prioritas No.7
							56	Persentase Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Program Prioritas No.1
							57	Persentase peserta BPJS yang mendapat pelayanan di RSUD			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Program Prioritas No.7
							58	Cakupan Penerima Pemeriksaaan Kesehatan Gratis			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Program Prioritas No.8

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							59	Persentase anak balita dan ibu hamil mendapatkan PMT di Posyandu			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinkes	Program Prioritas No.8
									47	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
									48	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
									49	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
									50	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
			9	Sasaran 9: Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing.	16	Terwujud sistem ketenagakerjaan, tata kelola, pemberdayaan tenaga kerja secara berkesinambungan.	60	Tingkat Pengangguran Terbuka			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Indikator RPJPD 2025-2045
							61	Angka Ketergantungan			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Indikator Inmendagri No.2 tahun 2025
							62	Tingkat partisipasi angkatan kerja.			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Indikator RPJPD 2025-2045
							64	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Indikator RPJPD 2025-2045
							65	Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Indikator RPJPD 2025-2045
					17	Terwujud faslitasi Dana Talangan bagi Tenaga Kerja ke Luar Negeri, dan tenaga kerja mandiri serta kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan.	66	Persentase penduduk yang bekerja.			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
							67	Rasio PDB per tenaga kerja (Produktivitas Tenaga Kerja).			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
							68	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
							69	Fasilitasi dana talangan bagi tenaga kerja ke luar negeri			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	Program Prioritas No.11

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							70	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
									51	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
									52	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
									53	Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
			10	Sasaran 10: Meningkatnya kualitas generasi muda Kabupaten Karangasem serta pengembangan keolahragaan.	18	Terwujud peran aktif pemuda dalam pembangunan Karangasem.	71	Indeks Pembangunan Pemuda.			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
					19	Terwujud pembangunan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan berkelanjutan	72	Persentase pembinaan olahraga			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
							73	Jumlah prestasi olahraga per tahun			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	
							74	Cakupan dana pembinaan bagi atlet berprestasi			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Disdikpora	Program Prioritas No.10

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									54	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora	
									55	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora	
									56	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora	
	5	**Tujuan 5: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber-USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM.**					75	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	Indikator RPJPD 2025-2045
			11	Sasaran 11: Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.	20	Terwujud Pola Pangan Harapan, didukung produksi komoditas pangan utama Terwujud ketersediaan pangan tercukupi	76	Ketersediaan lumbung pangan daerah			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	Indikator RPJPD 2025-2045
							77	Penanganan daerah rawan pangan.			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	
							78	Penguatan cadangan pangan.			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	
							79	Ketersediaan Pangan Utama.			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
							80	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
					21	Terwujud koperasi aktif berbasis pada potensi unggulan daerah	81	Koperasi aktif.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
					22	Terwujud penguasaan iptek dan inovasi,sektor usaha jasa dan wirausaha muda berbasis pada potensi unggulan daerah	82	Wirausaha muda			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	Program Prioritas No.6
							83	Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	Indikator RPJPD 2025-2045
					23	Terwujud Infrastruktur Air Bersih dan ketersediaan kapasitas tampungan air memadai untuk ketahanan pangan	84	Kapasitas Tampungan Air			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Indikator RPJPD 2025-2045 & Program Prioritas No.15
							85	Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat miskin			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Program Prioritas No.2
									57	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	
									58	Program Penanganan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
										Kerawanan Pangan			
									59	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	
									60	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Distan PP	
									61	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
									62	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
									63	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
			12	Sasaran 12: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.	24	Terwujud rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.	86	Rumah tidak layak huni yang tertangani			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	Program Prioritas No.4
							87	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan	DPUPR	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
								bencana Kabupaten/Kota			Kawasan Permukiman		
									64	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
			13	Sasaran 13: Meningkatnya Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan	25	Terwujud ketersediaan, keterjangkauan benih unggul, praktik budidaya, pengendalian hama, mitigasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan teknologi modern dalam proses budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.	88	Tingkat produktivitas pertanian (Rasio produksi pertanian pangan per hektar per tahun per satuan luas panen x 100%).			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
							89	Peningkatan produktivitas pertanian dan Perikanan			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
							90	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	Program Prioritas No.3
									65	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
									66	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	Distan PP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	Distan PP	
									68	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
									69	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	Distan PP	
									70	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
									71	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
			14	Sasaran 14: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dalam arti Luas.	26	Terwujud struktur ekonomi daerah pertanian, kehutanan dan perikanan yang mandiri	91	Kontribusi sektor pertanian Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
							92	Produk pertanian/perikanan yang teregistrasi			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									72	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	Distan PP	
									73	Program Perizinan Usaha Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	
			15	Sasaran 15: Meningkatnya peran serta kelembagaan kelompok tani/nelayan dalam pengembangan sektor pertanian.	27	Terwujud pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok petani dan nelayan dalam pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan pemberdayaan Kelompok nelayan, petani dan peternak	93	Cakupan bina kelompok petani			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian	Distan PP	Program Prioritas No.3
									74	Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian		
			16	Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem.	28	Terwujud mitigasi bencana kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana.	94	Indeks Risiko Bencana (IRB).			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	Indikator RPJPD 2025-2045
							95	Indeks Ketahanan Daerah			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							96	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Disdamkar dan Penyelamatan	
							97	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Disdamkar dan Penyelamatan	
									75	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	
									76	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Disdamkar dan Penyelamatan	
					29	Terwujud pemerataan, keadilan, keamanan, ketertiban umum dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman	98	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
						Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	99	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	
							100	Penegakan PERDA			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	
							101	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk.			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD 2025-2045
							102	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Indikator RPJPD 2025-2045
									77	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			17	Sasaran 17: Meningkatnya ekonomi sektor strategis dan unggulan daerah.	30	Terwujud daya saing industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor perdagangan guna mendukung perekonomian daerah.	103	Distribusi persentase PDRB sektor Industri Pengolahan (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
									78	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
									79	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
									80	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
									81	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
			18	Sasaran 18: Meningkatnya Forum Lintas Pengusaha (FLP) dalam Temu Usaha antar UMKM, PHRI, Koperasi dan Lembaga-lembaga Keuangan terkait.	31	Terwujud peningkatan invetasi sektor ekonomi kreatif, perlindungan hukum atas hak kekayaan inteketual	104	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	Indikator RPJPD 2025-2045
									82	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	
			19	Sasaran 19: Meningkatnya mutu dan daya saing produk industri, UMKM, dan	32	Terwujud daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis pada potensi unggulan daerah	105	Usaha Mikro dan Kecil yang aktif.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	Program Prioritas No.6

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
				koperasi yang berwawasan lingkungan.			106	UMKM yang memanfaatkan Kredit Mikro			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
							107	Proporsi Jumlah Usaha mikro Non Pertanian di Kabupaten Karangasem			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
							108	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karangasem			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
							109	Rasio Kewirausahaan			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	Indikator Inmendagri No.2 Tahun 2025
									83	Program Pengembangan UMKM	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
									84	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									85	Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
									86	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskoperindag	
									87	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Diskoperindag	
									88	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Diskoperindag	
			20	Sasaran 20: Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan serta akses distribusi barang dan jasa	33	Terwujud akses pasar domestik dan internasional melalui kerjasama keterkaitan industri dan perdagangan domestik dengan rantai nilai global.	110	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB.			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
							111	Pertumbuhan nilai ekspor produk Karangasem (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
							112	Ekspor Barang dan jasa (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	Indikator RPJPD 2025-2045
									89	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	
									90	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			21	Sasaran 21: Meningkanya pengendalian harga komuditas pokok melalui Pasar Murah bersubsidi dan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga.	34	Terwujud stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.	113	Cakupan operasi pasar murah.			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	
									91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Diskoperindag	
			22	Sasaran 22: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial.	35	Terwujud taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup dalam rangka mencapai kemandirian.	114	Persentase Kemiskinan			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	Indikator RPJPD 2025-2045
							115	Indeks Kesejahteraan Sosial.			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	
							116	Persentase PMKS yang tertangani			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	Indikator RPJPD 2025-2045
							117	Persentase Penyandang disabilitas penerima bantuan.			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	
							118	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							119	Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	
							120	Persentase Penanganan Konflik Sosial			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinsos P3A PPKB	Indikator RPJPD 2025-2045
							121	Indeks Gini			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	Indikator Inmendagri No. 2 Tahun 2025
									92	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
									93	Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
									94	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
									95	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
									96	Program Penanganan Bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									97	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
									98	Program Pembangunanan Kawasan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		
	6	**Tujuan 6: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dalam bidang Pembangunan Daerah.**					122	**Indeks Daya Saing Daerah.**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	BRIDA	
			23	Sasaran 23: Meningkatnya kerja sama antar daerah.	36	Terwujud kerjasama antar daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	123	Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti.			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda	Indikator RPJPD 2025-2045
									99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Setda	
			24	Sasaran 24: Meningkatnya pendapatan daerah.	37	Terwujud ekosistem dalam tata kelola dan optimalisasi PAD.	124	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	BPKAD	Indikator RPJPD 2025-2045
									100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	BPKAD	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			25	Sasaran 25: Meningkatnya inovasi daerah.	38	Terwujud inovasi daerah yang lebih sistematis, terarah dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan indeks inovasi daerah	125	Predikat Indeks Inovasi Daerah.			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Brida	Indikator RPJPD 2025-2045
									101	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Brida	
			26	Sasaran 26: Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	39	Terwujudnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	126	Hasil kelitbangan yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholder yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Brida	
									102	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Brida	
	7	**Tujuan 7 : Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang aman dalam Lingkungan Hidup dan Nyaman dari**	27	Sasaran 27: Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas	40	Terwujud partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	127	Indeks Kualitas Air			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	Indikator RPJPD 2025-2045
							128	Indeks Kualitas Udara.			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
	Lingkungan alam sekitar	lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	serta tanggap terhadap perubahan iklim.	129	Indeks Kualitas Tutupan Lahan.			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
				130	Ketaatan terhadap RTRW.			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DPUPR	
				131	Laporan Inventarisasi GRK			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
				132	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	Indikator RPJPD 2025-2045 dan Indikator Inmendagri No. 2 Th. 2025
				133	Luasan ruang terbuka hijau yang dikelola (Ha).			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
				134	Desa yang mengadaptasi program kampung iklim (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	Indikator RPJPD 2025-2045
						103	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									104	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									105	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									106	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait Dengan PPLH	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									107	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									108	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									109	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									110	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									111	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
									112	Program Pengembangan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPR	
			28	Sasaran 28: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan dan Limbah.	41	Terwujud pengelolaan limbah B3	135	Jumlah sampah yang tertangani.			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									113	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									114	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			29	Sasaran 29: Meningkatkan sanitasi perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	42	Terwujud layanan sanitasi berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan.	136	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (pengelolaan sampah)			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	Indikator RPJPD 2025-2045
							137	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Pengelolaan Air Limbah) (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Indikator RPJPD 2025-2045
									115	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH	
									116	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	
MISI 3: Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.	**8**	**Tujuan 8: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman ber-Kebudayaan dan kehidupan sosial beragama dan berkeyakinan, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.**					138	**Persentase Desa Adat dalampenyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana**			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	Indikator RPJPD 2025-2045
			30	Sasaran 30: Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan,	43	Terwujud nilai-nilai, norma dan etika budaya ke dalam kehidupan bermasyarakat untuk membangun	139	Pemenuhan Bantuan Keuangan kepada Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan Yohana (STT).			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	Program Prioritas No.10

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
				pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Karangasem.		masa depan dan peradaban budaya daerah	140	Pemenuhan penghargaan bagi seniman berprestasi			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	Program Prioritas No.4
							141	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
							142	Objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
							143	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
							144	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
							145	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu.			Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
									117	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
									118	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
									119	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									120	Program Pembinaan Sejarah	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
									121	Program Pengelolaan Permuseuman	Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan	Disbudpar	
			31	Sasaran 31: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis, meningkatkan toleransi antar umat beragama.	44	Terwujud ekosistem Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dan dan Kepercayaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Karangasem	146	Indeks Harmoni Indonesia (IHI)			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									122	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			32	Sasaran 32: Meningkatnya nilai- nilai kebangsaan kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba.	45	Terwujud kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.	147	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD 2025-2045
					46	Terwujud pembinaan wawasan kebangsaan sesuai prinsip demokrasi, hak asasi manusia yang berbudaya berlandaskan hukum serta bebas narkoba	148	Indeks Kinerja Ormas			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							149	Indeks Kewaspadaan Nasional			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
											Bangsa dan Politik		
							150	Jumlah upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.			Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									123	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									124	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			33	Sasaran 33: Meningkatnya kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	47	Terwujud partisipasi masyarakat yang melibatkan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lokal.	151	Persentase Partisipasi pemilih.			Perangkat Daerah Bidang UrusanKesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD 2025-2045
									125	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
										Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
									126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	9	**Tujuan 9: Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Nyaman dalam hal Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Per kapita Penduduk.**					**152**	**PDRB per kapita.**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	
							153	**Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan		
			34	Sasaran 34: Meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem.	48	Terwujud peningkatan produk/jasa dalam negeri termasuk untuk orientasi ekspor pada semua sektor ekonomi.	154	UMK Kabupaten Karangasem.				Disnaker	
									127	Program Hubungan Industrial	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker	
			35	Sasaran 35: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem.	49	Terwujud kualitas pelayanan perijinan, kemudahan berusaha yang inklusif dan berkelanjutan	155	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	DPMPTSP	
							156	Jumlah nilai investasi berskala (PMA)			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							157	Rasio daya serap tenaga kerja.			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
							158	Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan.			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
									128	Program Pelayanan Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
									129	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
									130	Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
									131	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
									132	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
			36	Sasaran 36: Meningkatnya pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya.	50	Terwujud produk wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya melalui konsep pariwisata Nyegara Gunung	159	Distribusi persentase PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	Indikator RPJPD 2025-2045.
							160	PAD Sektor Pariwisata.			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	
							161	Jumlah Tamu Wisatawan domestik dan Mancanegara (orang).			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	Indikator RPJPD 2025-2045
							162	Tertata produk wisata sesuai konsep Nyegara Gunung			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	Program Prioritas No.17
									133	Program Pemasaran Pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	
									134	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	
									135	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Disbudpar	
	10	**Tujuan 10 : Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Sejahtera "GEMAH**					**163**	**Indeks Kesejahteraan Masyarakat.**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Bapeda	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
		RIPAH LOH JINAWI.					**164**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Bapeda	Indikator RPJPD 2025-2045
			37	Sasaran 37: Memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan.	51	Terwujud pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan	165	Indeks Ketimpangan Gender (IKG).			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	Indikator RPJPD 2025-2045
							166	Indeks Pembangunan Gander			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
							167	Persentase Penanganan kekerasan terhadap perempuan			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	Indikator RPJPD 2025-2045
							168	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	Indikator RPJPD 2025-2045
							169	Indeks Perlindungan Anak			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	Indikator Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									136	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	
									137	Program Perlindungan Perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	
									138	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	
									139	Program Perlindungan Khusus Anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	
									140	Program Pengelolaan Sistim Gender dan anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A PPKB	
									141	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	Dinsos P3A PPKB	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
											Perlindungan Anak		
			38	Sasaran 38: Meningkatnya pengendalian dan administrasi kependudukan.	52	Terwujud pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara terintegrasi lintas sektor	170	Laju Pertumbuhan Penduduk.			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	
							171	Kepadatan Penduduk			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Indikator Inmendagri No. 2 Tahun 2025
							172	Rasio Penduduk			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Indikator Inmendagri No. 2 Tahun 2025
							173	Indeks lansia berdaya			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	
							174	Indeks pengasuhan remaja			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
							175	Proporsi Kampung KB Mandiri			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	
							176	Indeks Pembangunan Keluarga			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	
									142	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	
									143	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	
									144	Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinsos P3A PPKB	
									145	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									146	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinsos P3A PPKB	
			39	Sasaran 39: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga.	53	Terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ulet, tangguh serta mandiri untuk hidup harmonis.	177	Desa mandiri (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	Indikator RPJPD 2025-2045
							178	Desa adat dalam penyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana (%).			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	Indikator RPJPD 2025-2045
									147	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	
									148	Program Kerja Sama Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	
									149	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas		Urusan	OPD Pengampu	Ket.
									150	Program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai dasar penyusunan RKPD setiap tahunnya.

Tabel 4. 1
Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																		
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**																		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Pencapaian mutu minimal layanan dasar	Persentase (%)	19,23	151.792.414.046	71,03	**106.220.174.231**	74,89	124.255.127.134	78,63	138.880.326.224	82,57	153.403.655.286	86,69	168.880.894.881	91,02	172.318.092.961	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase (%)	100	2.289.157.500	75	**1.391.001.189**	85	1.425.776.218	89,25	1.461.420.624	93,71	1.497.956.139	98,4	1.535.405.043	103,32	1.536.940.448	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Pendidikan Non formal/kesetaraan terhadap Rombel	Persentase (%)	72,22	1.086.905.000	22,23	**249.982.268**	23,34	256.231.824	24,51	262.637.620	25,73	269.203.560	27,02	275.933.649	28,37	276.209.583	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Jumlah satuan pendidikan swasta atau masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan	Satuan Pendidikan	106	51.939.800	128	**31.546.842**	128	32.335.513	128	33.143.900	128	33.972.498	128	34.821.810	128	34.856.632	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBM	Persentase (%)	90	438.627.450	50	**697.915.435**	75	700.873.795	78,75	750.220.009	82,69	780.146.610	86,82	805.671.008	91,16	830.375.679	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat Karangasem	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persentase (%)	5,02	173.355.849.956	5	**120.492.507.886**	4,98	125.010.860.032	4,96	130.598.882.385	4,94	134.010.860.032	4,92	138.531.077.233	4,9	141.664.608.310	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas	Persentase jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	66,5	1.353.284.620	71,4	**1.142.012.092**	73,5	1.599.544.613	74,1	1.611.535.505	74,7	1.623.766.215	75,3	1.673.667.512	75,9	1.674.341.180	Dinas Kesehatan
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas sarana farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	Persentase (%)	51,6	487.262.970	54	**512.173.266**	56,3	659.773.193	59,5	660.968.656	61,9	662.188.030	64,3	663.431.790	66,7	663.495.222	Dinas Kesehatan
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase posyandu aktif	Persentase (%)	100	522.280.750	100	**423.638.573**	100	569.505.273	100	574.895.378	100	580.393.286	100	602.824.749	100	610.127.573	Dinas Kesehatan
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**																		
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas (%)	Persentase (%)	84	11.545.538.012	10,37	5.632.281.722	11,37	10.203.052.994	11,45	12.407.114.054	11,49	13.615.256.335	11,58	15.827.561.462	11,58	15.838.389.023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	Persentase (%)			0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi (%)	Persentase (%)			0		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk yang terakses air minum	Persentase (%)	97,92	2.602.698.015	98	992.875.182	98,4	25.000.000.000	98,8	30.000.000.000	99,2	35.000.000.000	99,6	20.000.000.000	100	15.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	Persentase (%)	79		100	0	100	400.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	575.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	Persentase (%)	90,11	500.665.008	90,11	374.309.044	90,13	2.045.769.116	90,15	2.148.057.572	90,17	2.405.824.480	90,19	2.694.523.418	90,21	2.697.217.941	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase pengurangan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	Persentase (%)	10		30	200.000.000	95	884.800.000	90	929.040.000	85	1.040.524.000	80	1.165.387.000	75	1.166.553.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase tingkat pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase (%)			17,86	0	30	1.500.000.000	35	1.700.000.000	40	1.900.000.000	45	2.000.000.000	50	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
16	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Karangasem dalam Kondisi Baik	Persentase (%)	64	10.141.373.415	100	5.483.827.748	61	7.567.004.000	62	8.168.344.000	63	8.571.710.000	64	9.000.000.000	65	9.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase (%)	60	5.854.725.379	100	3.010.510.300	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	6.000.000.000	100	6.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kemantapan jalan kabupaten	Persentase (%)	67,42	118.258.298.298	68,08	31.536.883.706	70,06	94.192.224.000	72,04	95.778.416.000	74,02	97.364.607.000	76	98.950.798.000	77,98	100.536.990.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator/Teknisi/Analisis	Persentase (%)	14,08	317.103.292	21,17	216.528.235	28,26	265.982.700	35,35	292.580.970	36,48	321.839.067	40,83	354.022.974	42,53	389.425.271	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	100	771.897.800	70	1.051.694.039	72	1.220.846.998	75	2.057.053.118	80	1.895.460.898	82	1.901.541.418	83	2.631.170.172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**																	-	
21	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi	Persentase Warga Negara Rawan/Korban Bencana yang terdata dan/atau memperoleh RLH)	Persentase (%)	100	48.421.000	100	227.620.330	100	300.000.000	100	350.000.000	100	40.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		akibat program pemerintah																	
22	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase (%)	62,06	13.562.363.164	100	7.178.598.276	40	493.720.813	55	548.030.102	70	608.313.414	85	675.227.889	100	749.502.957	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang tertangani	Persentase RTLH yang tertangani	Persentase (%)	66,67	1.523.163.188	23,9	115.562.276	27,84	9.116.436.500	32,84	10.373.117.000	40,68	12.042.966.000	52,63	12.766.403.000	70,51	15.547.715.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan unutk menunjang fungsi hunian	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase (%)	100	24.384.000	100	100.389.930	100	460.000.000	100	480.000.000	100	510.000.000	100	530.000.000	100	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase ketuntasan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan	Persentase (%)			100		100	120.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
26	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Persentase (%)	71	2.971.003.989	78	**5.122.011.227**	81	4.817.947.732	82	4.914.306.686	83	5.012.592.820	84	5.112.844.676	85	5.117.957.521	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase penegakan Perda	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
27	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang dapat dilaksanakan	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%)	100	553.474.676	100	**827.936.232**	100	5.382.500.000	100	6.353.277.632	100	7.030.000.000	100	7.555.000.000	100	7.760.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban pada Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	100	553.474.676	100	**1.760.407.152**	100	1.655.438.394	100	1.688.547.161	100	1.722.318.105	100	1.756.764.467	100	1.758.521.231	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	75		78		80		82		84		86		90		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**																		
29	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan TKSK, PSM Masyarakat	Persentase (%)	-	483.485.232	100	**370.507.284**	100	1.574.000.000	100	1.605.480.000	100	1.637.589.000	100	1.670.341.392	100	1.672.011.733	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			yang mendapat pembinaan																
30	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	Persentase (%)			100		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	
31	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PAS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	Persentase (%)	23,2	391.490.283	100	**187.526.068**	100	209.965.195	100	216.264.151	100	222.752.075	100	229.434.638	100	229.664.073	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Terfasilitasinya Bantuan Sosial PAS, dan Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Valid	Persentase (%)	100	943.697.581	100	**200.616.720**	100	224.530.723	100	231.266.645	100	238.204.644	100	245.350.784	100	245.596.135	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
33	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial Bencana dan Pasca Bencana	Persentase (%)	100	90.620.424	100	**41.352.684**	100	72.487.300	100	47.671.496	100	49.101.640	100	50.574.690	100	50.625.265	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pemeliharaan dan pengelolaan Taman makam pahlawan	Persentase Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (Taman/Tugu)	Persentase (%)	100	149.479.424	100	**50.756.842**	100	5.000.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																		
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**																		
35	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	Persentase (%)			100		N/A		0		0		0		100	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
36	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujud sistem ketenagakerjaan, tata kelola, pemberdayaan tenaga kerja secara berkesinambungan	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase (%)	48	301.400.000	50	**123.900.000**	51	884.000.000	52	972.400.000	53	1.069.640.000	54	1.176.604.000	55	1.294.264.400	Dinas Ketenagakerjaan
			Persentase tenaga kerja di Sektor Prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase (%)			25		25		25		25		25		25		Dinas Ketenagakerjaan
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terwujud fasilitasi dana talangan bagi tenaga kerja ke luar negeri, dan tenaga kerja mandiri, serta kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persentase (%)	83	207.800.000	84	**102.250.000**	85	254.600.000	86	280.060.000	87	308.066.000	88	338.872.600	89	372.759.860	Dinas Ketenagakerjaan
			Tenaga kerja luar negeri yang difasilitasi	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Ketenagakerjaan
38	Program Hubungan Industrial	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial Melalui	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persentase (%)	100	51.400.000	100	**58.750.000**	100	599.851.000	100	659.836.100	100	725.819.710	100	798.401.681	100	878.241.849	Dinas Ketenagakerjaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Perjanjian Bersama	melalui perjanjian bersama																
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**																		
39	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan termasuk kontribusi PPRG dalam pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	Persentase (%)	70	289.714.212	80	**26.814.292**	90	220.174.700	90	130.916.487	90	131.843.982	90	132.799.301	100	132.832.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
40	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya pencegahan kekerasan pada Perempuan	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	Persentase (%)	100	250.506.960	100	**134.733.292**	100	148.190.907	100	163.009.997	100	179.310.997	100	197.242.097	100	197.439.339	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
41	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya lembaga Penyedia layanan dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase (%)			100	**0**	100	58.763.100	100	60.763.100	100	65.763.100	100	70.763.100	100	28.791.863	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Ketersediaan data Gender dan Anak	Ketersediaan Data Gender dan Anak	tersedia/tidak tersedia	Tersedia		tersedia	**0**	tersedia	101.550.000	tersedia	101.550.000	tersedia	101.550.000	tersedia	101.550.000	tersedia	101.651.550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan pencapaian kualitas keluarga	Persentase Terpenuhinya indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persentase (%)	75	125.075.512	80	**47.247.388**	85	150.000.000	85	58.208.782	85	65.193.836	85	73.017.096	90	73.090.113	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
44	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasaan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	Persentase (%)	100	478.164.924	100	**298.915.000**	100	334.784.800	100	374.958.976	100	419.954.053	100	470.348.539	100	470.818.888	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**																		
45	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase (%)			100		100	9.408.000	100	10.536.960	100	11.801.395	100	13.217.563	100	13.230.780	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
46	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88	151.724.200	88,44	**82.422.344**	88,88	385.908.976	89,33	424.505.373	89,77	466.955.910	90,22	103.651.502	90,67	565.016.652	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
47	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase (%)		222.972.431		**54.758.090**	3,85	33.406.814	3,85	36.747.494	3,85	40.422.244	3,85	44.464.469	3,85	48.910.915	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
48	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase (%)	100	113.365.588	100	**53.011.960**	100	49.846.771	100	55.828.384	100	62.527.790	100	70.031.125	100	70.101.156	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**																		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen RPPLH, KLHS dan Izin Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase (%)	100	263.415.588	100	**244.899.100**	100	274.286.992	100	307.201.431	100	344.065.603	100	385.353.475	100	385.738.829	Dinas Lingkungan Hidup
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Persentase (%)	100	421.289.492	68	**359.309.376**	68,01	284.778.500	68,02	318.951.920	68,03	357.226.151	68,04	400.093.289	68,05	400.493.382	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	91		90		90,01		90,02		90,03		90,04		90,05		
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persentase (%)	100	4.897.487.600	100	**893.684.424**	100	1.107.374.875	100	1.129.522.373	100	1.152.112.820	100	1.175.155.077	100	1.176.330.232	Dinas Lingkungan Hidup
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase tingkat pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase (%)	100	22.582.600	25	**14.595.092**	30	16.330.503	35	16.657.113	40	16.990.255	45	17.330.060	50	17.347.390	Dinas Lingkungan Hidup
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha yang dibina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase (%)	100	66.818.688	100	**56.330.468**	100	63.026.123	100	64.286.645	100	65.572.378	100	66.883.826	100	66.950.710	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait Dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase (%)	100	66.818.688	100	**56.330.468**	100	63.026.123	100	64.286.645	100	65.572.378	100	66.883.826	100	66.950.710	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase (%)	14	26.052.500	16	**21.100.500**	18	23.632.560	20	24.105.211	22	24.587.315	24	25.079.062	26	25.104.141	Dinas Lingkungan Hidup
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase (%)	20	162.217.500	30	**48.668.500**	35	54.508.720	40	55.598.894	45	56.710.872	50	57.845.090	55	57.902.935	Dinas Lingkungan Hidup
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa /Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase (%)	100	10.222.500	100	**8.166.800**	100	9.146.816	100	9.329.752	100	9.516.347	100	9.706.674	100	9.716.381	Dinas Lingkungan Hidup
58	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase (%)	100	19.124.603.132	55	**11.801.198.856**	60	14.161.438.627	65	15.000.000.000	70	15.500.000.000	75	15.500.000.000	80	16.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidng Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**																	-	
59	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase (%)	97,5	2.132.612.616	98	**1.836.452.409**	98,3	2.754.678.614	98,5	2.892.412.544	98,7	3.037.033.171	99	3.188.884.830	99,5	3.348.329.071	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Program Pencatatan Sipil	Meningkatkan Program	Persentase kepemilikan akta-	Persentase (%)	100	8.259.829.452	100	**7.525.153.932**	100	6.989.925.028	100	7.129.723.528	100	7.272.317.999	100	7.417.764.359	100	7.425.182.123	Dinas Kependudukan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Pencatatan Sipil	akta pencatatan sipil																dan Pencatatan Sipil
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di 8 Kecamatan	Persentase (%)	100	224.572.620	100	**138.244.020**	100	141.008.900	100	143.829.078	100	146.705.660	100	149.639.773	100	152.632.569	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatkan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase (%)	100	60.862.436	100	**35.394.276**	100	36.102.162	100	36.824.205	100	37.560.689	100	38.311.903	100	39.078.141	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**																		
63	Program Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	Persentase Terwujudnya Penataan Desa	Persentase (%)	100	167.314.724	75	**31.885.584**	80	35.042.713	85	35.743.567	90	36.458.439	95	37.187.608	100	37.224.795	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
64	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan pedesaan	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persentase (%)	100	8285000,00	75	**8.961.500**	80	9.857.650	85	10.054.803	90	10.255.899	95	10.461.017	100	10.471.478	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase (%)	100	1.837.487.928	75	**1.994.382.798**	80	2.193.789.649	85	2.237.665.442	90	2.282.418.750	95	2.328.067.125	100	2.330.395.193	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat.	Persentase terwujudnya desa yang difasilitasi penataan kelembagaan dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	Persentase (%)	100	858.831.176	75	**591.485.160**	80	650.555.103	85	663.566.205	90	676.837.529	95	690.374.280	100	691.064.654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2,1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**																	-	
67	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Memperketat tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age Specifik Fertility Rate/ ASFR 15-19 tahun)	Per mil	15	201.523.100	14	**232.588.600**	14	255.847.460	14	260.964.409	14	266.183.697	14	271.507.371	14	271.778.878	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
			Persentase Peserta KB aktif (PA)	Persentase (%)	84		85		90		90		90		90		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya askes dan kualitas pelayanan KB yang merata	Persentase Kontrasepsi Modern (MCPR)	Persentase (%)	94	3.748.244.748	95	**1.287.633.052**	95	1.416.302.070	95	1.444.628.111	95	1.473.520.673	90	1.502.991.087	100	1.504.494.078	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
			Un Meet Need	Persentase (%)	16		15		15		14		14		14		14		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Peran serta keluarga dengan menjaga tumbuh kembang anak, pendidikan serta karakter dalam peningkatan kekuarga sejahtera	Persentae terbentuknya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PIK-R di Kampung KB	Persentase (%)	80	2.732.039.212	100	**2.915.262.584**	100	3.206.757.413	100	3.270.892.561	100	3.336.310.413	100	3.403.036.621	100	3.406.439.658	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
			Persentase terbinanya kelompok kegiatan Tri Bina, PIK -R di Kampung KB	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**																		
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Layanan Angkutan darat	Persentase (%)	28,32	17.928.610.957	28,4	**4.058.898.824**	28,5	6.088.348.236	29	6.392.765.648	29,5	6.712.403.930	30	7.048.024.127	30,5	7.400.425.333	Dinas Perhubungan
71	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayaran	Perssentase Pengelolaan Pelayaran	Persentase (%)			**0**	**0**	**0**	-	50	2.150.000.000	75	229.200.000	100	47.500.000	100	65.000.000	
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**																		
72	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase (%)	100	2.868.594.500	70	**1.170.072.672**	75	1.228.576.306	80	1.290.005.121	85	1.354.505.377	90	1.422.230.646	95	1.493.342.178	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		daerah (survei)																	
73	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai/Indeks Pemerintahan Digital	Nilai/Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	100	3.979.698.114	2,7	**4.582.083.166**	1,13	4.811.187.324	1,22	5.051.746.691	1,47	5.304.334.025	1,71	5.569.550.726	2,02	5.848.028.263	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**																	-	
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase (%)	80	94.131.188	92	**66.034.184**	14,70	62.098.080	17,64	63.340.041	20,58.	64.606.842	22,06	65.898.979	23,52	65.964.878	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
75	Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi	Terwujudnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase (%)	82	88.696.788	94	**81.051.276**	28,57	76.212.720	34,28	77.736.974	40	79.291.714	42,85	80.877.548	45,71	80.958.425	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan	Persentase (%)	-	-	-		2,14	67.000.000	2,5	73.700.000	2,86	81.070.000	3,21	86.177.000	3,57	86.263.177	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase (%)	-	-	-		17.64	108.733.500	20.58	114.761.700	23.53	119.344.900	26.47	123.985.600	29.41	124.109.586	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya Wirausaha Baru	Persentase Wirausaha baru	Persentase (%)	1,25	821.888.476	0,05	**76.034.184**	0,24	704.971.400	0,26	743.257.250	0,28	768.354.499	0,3	804.752.150	0,32	805.556.902	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
79	Program Pengembangan UMKM	Terwujudnya Usaha Mikro yang Memperoleh Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang	Persentase (%)	0	0	0		0,1	164.109.084	0,11	169.245.600	0,12	172.164.400	0,14	176.379.000	0,14	179.415.650	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**																		
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase (%)	18,98	106.017.500	75	**7.274.000**	76	236.226.400	77	410.000.000	78	435.000.000	79	550.000.000	80	498.828.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase (%)	49,03	52.612.500	49,1	**54.430.376**	49,17	467.918.000	49,35	450.000.000	49,61	440.000.000	49,79	500.000.000	49,79	500.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelayanan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan yang terlayani	Persentase (%)	87,36	499.159.468	87	**276.774.628**	87	258.753.600	87	274.000.000	88	277.500.000	88	298.000.000	88	310.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase (%)	43,98	793.551.912	55	**61.559.276**	55	378.431.400	56	415.000.000	56	615.493.000	57	793.534.000	57	764.327.534	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase (%)	70,8	86.279.988	71	**18.533.000**	74	26.935.000	75	20.000.000	77	20.000.000	79	20.000.000	79	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**																	-	
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase (%)	75	628.932.600	45	**143.979.500**	50	147.578.987	52,5	151.268.462	55,13	155.050.173	57,88	158.926.428	60,78	159.085.354	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah medali / penghargaan di bidang olahraga	Medali/Penghargaan	147	12.895.626.425	50	**11.369.981.002**	143	11.654.230.527	150	11.945.586.290	157	12.244.225.947	164	12.550.331.596	172	12.562.881.928	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terfasilitasi	Persentase (%)	100	350.000.000	100	**250.000.000**	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**																		
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	100	157.706.503	2,46	**45.017.240**	2,61	100.000.000	2,61	100.000.000	2,76	100.000.000	2,76	100.000.000	2,91	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**																		
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya kapasitas pengelolaan persandian daerah.	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah yang terpenuhi	Persentase (%)	100	25.765.600	100	**18.017.080**	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**																		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
90	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian kebudayaan	Persentase pelestarian kebudayaan	Persentase (%)	63,60	5.858.548.952	78,4	**41.655.307.994**	100	47.771.288.450	100	48.726.714.219	100	49.701.248.503	100	49.701.248.503	100	49.701.248.503	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan kesenian tradisional	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan peran desa adat, banjar adat, subak dan STT/yowana	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya pembinaan kepada pelaku kesenian	Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional	Persentase (%)	5,33	999.695.600	6,67	**527.404.680**	8	1.076.235.749	9,33	1.200.000.000	10,67	1.300.000.000	12	1.500.000.000	13,33	1.800.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
92	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pembinaan sejarah di kabupaten karangasem	Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangsem yang dilaksanakan setiap tahun	Persentase (%)	56,67	111.231.200	61,67	**80.203.544**	66,67	81.005.579	71,67	81.815.635	76,67	82.633.792	81,67	83.460.130	86,67	84.294.731	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian objek yang diduga cagar budaya	Persentase objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase (%)	26,77	156.582.600	100	**34.781.032**	100	35.128.842	100	35.480.131	100	35.834.932	100	36.193.281	100	36.555.214	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
94	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya pelestarian taman budaya	Persentase museum yang ada di Kabupaten Karangasem yang terkelola dengan baik	Persentase (%)			100		100	815.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**																	-	
95	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai SNP	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase (%)	100	10.158.361.522	87,87	**84.785.460**	100	150.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pengalihaksaraan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di masyarakat	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dialihaksarakan	Persentase (%)	100	27.735.123	-		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2,2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**										100		100		100		100		
97	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase (%)	100	142.532.072	80,55	**93.402.552**	100	150.000.000	100	1.175.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase (%)	100	42.999.535	-		100	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	53.060.400	100	53.113.460	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**																	-	
3,3	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**																		
99	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	28,79	3.470.865.388	28.793	**64.185.718**	28.796	5.060.345.603	28.799	5.061.552.515	28.801	5.062.783.565	28.804	5.064.039.236	28.807	5.064.103.276	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Persentase peningkatan pemberdayaan Kelompok Nelayan melalui bantuan khusus pemberdayaan nelayan.	Persentase (%)					0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	283,79	1.065.418.912	283,81	**210.958.344**	283,84	507.031.100	283,87	571.967.960	283,9	594.700.472	283,93	622.876.986	283,96	655.611.804	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
101	Program Pengawasan Sumber Daya	Meningkatnya Kelestarian Laut dan	Luasan Kawasan Konservasi	Ha					5478,41	30.000.000	5478,41	40.000.000	5478,41	50.000.000	5478,41	60.000.000	5478,41	60.060.000	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kelautan Dan Perikanan	Keanekaragaman Hayati																	
102	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun			40		41	60.000.000	41	70.000.000	42	80.000.000	43	90.000.000	44	90.090.000	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
3,3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**																		
103	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase (%)	12,5	5.591.632.172	56	**126.943.527**	0,5	642.128.729	0,5	644.971.304	0,5	647.870.730	0,5	1.650.828.144	0,5	1.652.478.973	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
104	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya cakupan media pemasaran	Persetase cakupan media pemasaran pariwisata	Persentase (%)	-10,5	1.081.681.900	0,5	**317.628.042**	100	636.384.500	100	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
105	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif	Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya	Persentase (%)		777.442.738	12	**0**	0	10.515.322	18	10.725.628	18	10.725.628	18	10.725.628	18	10.725.628	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
106	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya tingkat produktivitas SDM pariwisata	Tingkat produktivitas SDM pariwisata	Persentase (%)			5	**242.843.860**	12	1.604.137.800	45	2.000.000.000	55	2.500.000.000	65	3.000.000.000	75	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3,3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**																		
107	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton		6.952.723.508	110022,81	**1.823.656.555**	110.034	6.654.123.141	110.045	6.687.205.604	110.056	6.720.949.716	110.067	6.755.368.710	110.078	6.762.124.079	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton			259612,91		259.639		259.665		259.691		259.717		259.743		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton			20956,3		20.958		20.960		20.963		20.965		20.967		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton			18552,9		18.555		18.557		18.558		18.560		18.562		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Persentase Kelompok petani dan peternak melalui bantuan khusus pemberdayaan petani	Persentase (%)							25		25		25		25		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persentase (%)		3.140.143.576	51	**112.281.036**	53	2.070.526.477	57	3.072.637.006	60	2.085.553.447	65	2.100.019.860	69	2.100.154.880	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
109	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase (%)	95	3.875.719.764	95	**428.020.868**	95	402.292.265	95	410.338.110	95	495.487.657	95	426.915.770	95	427.342.686	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase (%)			6		6		6		6		6		6		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
110	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase (%)		273.077.988	95	**159.424.060**	95	149.918.954	95	152.917.333	95	155.975.680	95	159.095.194	95	159.254.289	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase (%)			95		95		95		95		95		95		Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
111	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kuaalitas dan kemudahan perzinan usaha pertanian	Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi	Persentase (%)	100	12.000.000	100	**12.000.000**	100	11.289.600	100	11.515.392	100	11.745.700	100	11.980.614	100	11.980.614	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
112	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase (%)	100	1.541.964.572	100	**260.913.408**	100	1.408.958.382	100	659.783.444	100	1.476.966.333	100	260.149.589	100	1.558.836.167	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3,3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**																		
113	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase (%)	18	15.802.600	21,74	**4.500.000**	88,57	79.532.000	88,57	75.940.000	88,57	77.440.000	88,57	78.940.000	88,57	79.011.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
114	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase (%)	20	2.315.033.160	25	**2.026.718.498**	5,5	2.470.620.600	5,5	2.665.000.000	5,5	2.820.000.000	5,5	3.075.000.000	5,5	3.075.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
115	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitasi Harga Barang Kabutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase (%)	6,38/6,58	199.440.680	6,38	**34.007.092**	38,8	149.773.280	38,8	161.297.880	38,8	172.822.480	38,8	184.345.080	38,8	195.869.680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
116	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	USD	40	613.741.425	N/a	**521.342.000**	516.968,15 (USD)	1.247.539.200	516.969,40 (USD)	1.685.000.000	516.970,66 (USD)	2.070.000.000	516.971,92 (USD)	2.475.000.000	516.973,18 (USD)	2.870.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
117	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP	Persentase (%)	14,5	121.100.000	16,7	**253.098.851**	16,7	242.836.580	16,7	247.693.311	16,7	252.647.178	16,7	252.899.825	16,7	252.899.825	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
118	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi /dilaksanakan	Persentase (%)	21	56.514.200	23	**37.075.092**	11	111.402.000	11	133.670.000	11	161.000.000	11	192.600.000	11	231.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3,3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**																		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
119	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Persentase (%)	5	715.349.100	18,4	**586.077.484**	18,6	1.124.965.176	18,8	1.026.671.500	20	1.060.790.500	20,2	1.128.756.500	20,4.	1.051.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
120	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase (%)	100	35.000.000	100	**17.215.000**	100	45.007.000	100	54.000.000	100	65.000.000	100	76.000.000	100	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
121	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase (%)	6,68	48.365.588	7	**15.217.092**	7	81.302.500	7	85.000.000	7	88.000.000	7	91.000.000	7	95.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**																		
122	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Persentase (%)				50.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																		
4	**Sekretariat Daerah**																		
123	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pengatan regulasi dan fasilitasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan sosial	Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan fasilitasi acara keagamaan dan pembinaan mental di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	90	12.000.000.000	91	**13.235.147.348**	92	14.161.607.662	93	15.152.920.199	94	16.213.624.613	95	17.348.578.336	96	18.562.978.819	Sekretariat Daerah
			Persentase Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	Persentase (%)	80		82		84		86		88		90		92		Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Optimalnya harmonisasi tata kelola produk Hukum daerah dan fasilitasi penanganan bantuan hukum pemerintah daerah	Persentase (%)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
124	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terwujudnya Penguatan Tata Kelola Pengadaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Terkendalinya laju inflasi	Persentase (%)	100	1.582.232.608	100	**997.878.212**	100	1.329.686.600	100	1.356.280.312	100	1.383.406.419	100	1.411.074.367	100	1.412.485.441	Sekretariat Daerah
			Persentase Percepatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase (%)	100	553.781.607	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
			Falisitasi Pemda pada BUMD dalam penyedioaan air bersih	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4	**Sekretariat DPRD**																		
125	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas dalam Fungsi anggaran, pengawasan, dan pembentukan produk hukum	Persentase (%)	100	28.120.892.648	100	**23.261.112.358**	100	42.471.319.470	100	45.622.675.640	100	46.095.129.153	100	47.577.031.736	100	49.604.608.767	Sekretariat DPRD
			Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**																		
5	**Perencanaan**																		
126	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD,	Persentase (%)	100	1.152.700.148	100	**1.380.770.953**	100	1.321.665.000	100	1.536.825.000	100	1.426.349.204	100	1.653.032.670	100	1.654.413.203	Badan Perencanaan Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pembangunan Daerah		RPJMD dengan Renstra PD																
127	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Persentase (%)	100	203.879.896	100	**196.774.236**	100	242.195.000	100	249.791.250	100	259.359.189	100	268.398.647	100	268.667.046	Badan Perencanaan Daerah
5	**Keuangan**																	-	
128	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Laporan	1	262.273.264.541	1	**239.882.285.930**	1	253.553.168.221	1	259.567.409.015	1	270.416.118.257	1	278.727.770.449	5	288.330.987.452	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Fasilitasi ADD	Persentase (%)			100		100		100		100		100		100		
129	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	822.081.777	2	**429.697.876**	2	433.994.855	2	438.334.803	2	442.718.151	2	447.145.333	10	451.616.786	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
130	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ektensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah	Persentase (%)	100	8.641.542.659	100	**3.129.839.752**	100	3.161.138.150	100	3.192.749.531	100	3.224.677.026	100	3.256.923.797	100	3.289.493.035	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**Kepegawaian**																		
131	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Nilai Sistem Merit	Nilai Sistem Merit	Nilai	250	1.594.289.717	287	**1.110.025.477**	287	1.121.125.732	290	1.132.336.989	293	1.143.660.359	295	1.155.096.963	300	1.166.647.932	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5	**Pendidikan Dan Pelatihan**																		
132	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Persentase (%)	0,71	1.776.109.174	0,79	**1.122.181.500**	0,81	1.133.403.315	0,86	1.144.737.348	0,91	1.156.184.722	0,96	1.167.746.569	1,01	1.179.424.035	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	Persentase (%)					25		25		25		25		25		Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,1	**Penelitian Dan Pengembangan**																	-	
133	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persentase (%)	85	1.346.966.300	90	**267.633.000**	91	539.700.000	93	1.550.000.000	95	1.790.000.000	97	1.900.000.000	100	2.250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
134	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan	Persentase (%)		-	90	**224.811.720**	91	699.500.000	93	150.000.000	95	715.000.000	97	855.000.000	100	250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**																		
6	**Inspektorat Daerah**																		
135	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Desa	Meningkatnya Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level	3,03	454.496.836	3,1	**410.201.276**	3,15	1.086.456.400	3,2	1.555.000.000	3,25	1.945.000.000	3,3	2.350.000.000	3,35	2.575.000.000	Inspektorat
			Meningkatnya Nilai Capaian Penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan BPK	Nilai	92,97		94		94,5		95		95,5		96		96,5		Inspektorat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
136	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi bagi Perangkat Daerah dan Desa	Meningkatnya Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	2.916	329.000.000	3	**334.600.000**	3,05	925.597.500	3,1	1.085.000.000	3,15	1.275.000.000	3,2	1.540.000.000	3,25	1.610.000.000	Inspektorat
			Meningkatnya Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,75		3		3,05		3,1		3,15		3,2		3,25	-	Inspektorat
			Meningkatnya Nilai Maturaitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.029		3,1		3,15		3,2		3,25		3,3		3,35	-	Inspektorat
			Meningkatnya Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	78,38		78,5		79		79,4		79,7		80		80,1	-	Inspektorat
			Meningkatnya Nilai Evaluasi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP)	Nilai	94,77		95		95,2		95,4		95,7		96		96,5	-	Inspektorat
7	**Unsur Kewilayahan**																	-	
7	**Kecamatan**																	-	
137	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)	100	481.833.898	100	**36.134.184**	100	219.537.738	100	223.928.493	100	228.407.063	100	232.975.204	100	233.208.179	Kecamatan Karangasem
138	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	95.000.000	100	125.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	Kecamatan Abang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
139	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	95.000.000	100	125.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	Kecamatan Kubu
140	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	87.000.000	100	100.000.000	100	112.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Bebandem
141	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	87.000.000	100	100.000.000	100	112.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Selat
142	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**50.000.000**	100	90.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Rendang
143	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	90.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Sidemen
144	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)			100	**36.134.184**	100	90.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Manggis
145	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)	100	5.168.075.149	100	**4.819.890.840**	100	4.919.702.873	100	5.108.096.930	100	5.296.258.869	100	5.386.184.046	100	5.490.770.230	Kecamatan Karangasem
146	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan	Persentase (%)			100	**25.517.092**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Abang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Masyarakat Desa dan Kelurahan																
147	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**27.817.092**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Kubu
148	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**26.610.750**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Bebandem
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**12.624.200**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Selat
150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**25.683.592**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Rendang
151	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**6.837.100**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Sidemen
152	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (%)			100	**14.500.000**	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Manggis
153	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)	100	397.370.400	100	**21.393.500**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Karangasem

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
154	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**10.400.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Abang
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**2.000.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Kubu
156	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**3.500.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Bebandem
157	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**4.479.200**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Selat
158	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**5.743.500**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Rendang
159	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**772.200**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Sidemen
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase (%)			100	**2.500.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Manggis
161	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)	100	39.201.900	100	**21.393.500**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Karangasem

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
162	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**10.400.000**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Abang
163	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**2.000.000**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Kubu
164	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**2.000.000**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Bebandem
165	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**4.257.400**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Selat
166	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**5.049.000**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Rendang
167	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)			100	**5.692.500**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Sidemen
168	Program Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan	Persentase (%)			100	**2.500.000**	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Manggis

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Pemerintahan Umum																
169	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)	100	335.412.662	100	**81.413.600**	100	150.759.249	100	153.774.434	100	156.849.922	100	159.986.921	100	160.146.908	Kecamatan Karangasem
170	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**24.534.184**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Abang
171	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**11.317.092**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Kubu
172	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**8.000.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Bebandem
173	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**11.556.800**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Selat
174	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**13.427.092**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Rendang
175	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**2.554.200**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Sidemen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
176	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)			100	**7.500.000**	100	35.000.000	100	40.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Manggis
8	**Unsur Pemerintahan Umum**																		
8	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**																		
177	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase (%)	100	2.905.655.497	100	**2.690.410.876**	100	2.683.410.097	100	2.817.590.000	100	2.958.490.000	100	3.106.440.000	100	3.261.780.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
178	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase (%)	100	43.804.956.386	100	**1.666.718.676**	100	1.799.019.800	100	3.353.665.000	100	33.521.360.000	100	53.668.933.000	100	3.857.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
179	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase (%)	100	168.118.000	100	**127.882.400**	100	154.025.000	100	161.730.000	100	169.820.000	100	178.320.000	100	187.250.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
180	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase (%)	100	393.341.636	100	**364.751.476**	100	527.464.600	100	553.840.000	100	581.540.000	100	610.620.000	100	641.160.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
181	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persentase (%)	100	1.371.749.712	100	**1.025.854.592**	100	1.856.117.000	100	1.948.930.000	100	2.046.390.000	100	2.148.720.000	100	2.256.170.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Konflik Sosial																	
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	464.529.141.123	100	**505.494.516.930**	100	498.131.879.853	100	511.085.176.849	100	524.362.306.270	100	537.971.363.927	100	539.509.335.291	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
183	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka			90,15		92,40		94,71		97,08		99,51		100		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
184	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	353.861.827.906	100	**257.122.010.131**	100	271.202.222.569	100	276.541.231.207	100	282.564.901.106	100	288.702.887.303	100	294.961.372.471	Dinas Kesehatan
185	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan Administrasi dan Tata laksana Perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	15.321.955.543	100	**21.717.049.494**	100	23.530.229.668	100	25.412.648.041	100	27.445.659.884	100	29.641.312.675	100	32.012.617.689	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
186	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan Administrasi dan Tata laksana Perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	10.219.522.035	100	**12.793.259.018**	100	12.464.687.385	100	12.991.199.656	100	13.611.343.000	100	13.981.017.900	100	14.263.402.900	Satuan Polisi Pamong Praja
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan Administrasi dan Tata laksana Perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	4.379.907.717	100	**5.742.607.805**	100	9.955.783.400	100	11.556.500.000	100	11.955.750.000	100	12.345.000.000	100	12.567.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
188	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	3.514.593.016	100	**5.359.270.699**	100	5.439.659.759	100	5.521.254.656	100	5.604.073.476	100	5.688.134.578	100	5.773.456.597	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
189	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan dinas sosial, PPPA, dan PPKB Kabupaten Karangasem	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	7.073.132.954	100	**8.543.190.255**	100	8.597.463.973	100	13.051.287.326	100	8.212.313.072	100	9.033.544.380	100	9.042.577.924	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
190	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	5.780.364.827	100	**6.037.511.237**	100	6.920.393.884	100	7.612.433.272	100	8.373.676.600	100	9.211.044.260	100	10.132.148.686	Dinas Ketenagakerjaan
191	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	19.262.760.253	100	**24.482.290.504**	100	27.585.663.928	100%	30.344.230.321	100%	34.392.271.287	100%	37.831.498.416	100%	41.614.648.257	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan Administrasi dan Tata laksana Perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	5.154.149.796	100	**10.948.319.755**	100	11.112.544.551	100	11.279.232.720	100	11.448.421.210	100	11.620.147.529	100	11.794.449.741	Dinas Lingkungan Hidup
193	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	5.607.519.404	100	**9.142.885.612**	100	9.280.028.896	100	9.419.229.330	100	9.560.517.770	100	9.703.925.536	100	9.849.484.419	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
194	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	4.873.311.834	75	**4.899.975.820**	80	4.973.475.457	85	5.048.077.589	90	5.123.798.753	95	5.200.655.734	100	5.278.665.570	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan Administrasi dan Tata laksana Perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	7.133.680.388	100	**5.805.015.807**	100	5.892.091.044	100	5.980.472.410	100	6.070.179.496	100	6.161.232.188	100	6.253.650.671	Dinas Komunikasi dan Informatika
196	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	8.258.906.198	100	**9.978.701.620**	100	12.350.146.487	100	13.151.979.650	100	14.305.479.300	100	14.906.691.700	100	16.225.805.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	4.619.231.031	100	**6.863.397.348**	100	6.966.348.308	100	7.070.843.533	100	7.176.906.186	100	7.284.559.779	100	7.393.828.175	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
198	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	6.387.957.359	100	**7.865.832.952**	100	7.983.820.446	100	8.103.577.753	100	8.225.131.419	100	8.348.508.391	100	8.473.736.016	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
199	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	100	4.932.416.307	100	**4.332.353.219**	100	4.995.543.400	100	5.495.097.739	100	6.044.607.516	100	6.649.068.272	100	7.319.964.623	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya penguatan pelayanan administrasi pemerintah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase (%)	100	41.999.892.186	100	**45.950.658.578**	100	47.047.825.198	100	48.112.827.591	100	48.520.098.085	100	49.190.951.844	100	49.970.040.035	Sekretariat Daerah
201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD	Persentase (%)	100	43.862.983.402	100	**45.858.633.885**	100	46.546.513.393	100	47.244.711.094	100	47.953.381.761	100	48.672.682.487	100	49.402.772.724	Sekretariat DPRD
202	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	5.497.030.213	100	**5.511.711.534**	100	5.853.291.211	100	6.448.362.405	100	7.113.198.646	100	8.044.518.510	100	8.052.563.029	Badan Perencanaan Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kabupaten/ Kota	kabupaten/ kota																	
203	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	26.825.146.944	100	**33.121.757.547**	100	33.618.583.910	100	34.122.862.669	100	34.634.705.609	100	35.154.226.193	100	35.681.539.586	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
204	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%)	100	5.543.057.724	100	**5.711.566.590**	100	5.797.240.089	100	5.884.198.690	100	5.972.461.671	100	6.062.048.596	100	6.152.979.325	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
205	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan pelayanan umum, tata kelola keuangan, dan perencanaan yang baik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	2.753.045.314	100	**2.198.377.865**	100	2.231.353.533	100	2.264.823.836	100	2.298.796.194	100	2.333.278.136	100	2.368.277.308	Badan Riset dan Inovasi Daerah
206	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	9.567.382.910	100	**9.400.351.482**	100	12.652.648.281	100	13.254.600.000	100	14.540.100.000	100	15.061.000.000	100	20.492.000.000	Inspektorat
207	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	36.440.184.656	100	**7.509.916.426**	100	7.622.565.172	100	7.736.903.650	100	7.852.957.205	100	7.970.751.563	100	8.090.312.836	Kecamatan Karangasem
208	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**4.144.087.131**	100	4.206.248.438	100	4.269.342.165	100	4.333.382.297	100	4.398.383.031	100	4.464.358.777	Kecamatan Abang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
209	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**2.667.008.353**	100	2.707.013.478	100	2.747.618.680	100	2.788.832.961	100	2.830.665.455	100	2.873.125.437	Kecamatan Kubu
210	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**3.383.050.018**	100	3.433.795.768	100	3.485.302.705	100	3.537.582.245	100	3.590.645.979	100	3.644.505.669	Kecamatan Bebandem
211	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**3.245.136.154**	100	3.293.813.196	100	3.343.220.394	100	3.393.368.700	100	3.444.269.231	100	3.495.933.269	Kecamatan Selat
212	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**3.916.837.061**	100	3.975.589.617	100	4.035.223.461	100	4.095.751.813	100	4.157.188.090	100	4.219.545.912	Kecamatan Rendang
213	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**3.317.841.396**	100	3.367.609.017	100	3.418.123.152	100	3.469.394.999	100	3.521.435.924	100	3.574.257.463	Kecamatan Sidemen
214	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**3.837.497.210**	100	3.895.059.668	100	3.953.485.563	100	4.012.787.847	100	4.072.979.664	100	4.134.074.359	Kecamatan Manggis
215	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	100	5.045.609.996	100	**5.628.774.113**	100	5.824.262.683	100	6.578.000.000	100	7.430.120.000	100	8.402.560.000	100	9.601.640.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Outcome Program	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		APBD 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
									2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
216	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)			100	**14.937.248.169**	100	16.461.943.234	100	20.224.350.967		17.886.994.335	100	17.909.114.335	100	18.181.274.335	Dinas Perhubungan
JUMLAH						**2.539.067.307.742**		**1.803.499.121.925**		**2.117.523.435.311**		**2.143.887.927.196**		**2.185.488.019.985**		**2.341.251.619.395**		**2.349.207.564.412**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

lndikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*), terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karangasem

No	Indikator Kinerja Utama/Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n/a	68 (CC/Cukup Baik)	68,5 (CC/Cukup Baik)	69 (CC/Cukup Baik)	69,2 (CC/Cukup Baik)	69,5 (CC/Cukup Baik)	69,7 (CC/Cukup Baik)	Setda (Bagian Organisasi)
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.28	4,4	4,6	4,8	5	5,2	5,4	Setda
4	Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur (IKLI)	Indeks	n/a	3	3,25	3,4	3,5	3,6	3,7	DPUPR
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70.91	71,02	71,75	71,78	71,8	71,84	71,87	Bapeda
6	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.17	74,41	74,65	74,89	75,13	75,37	75,61	Dinkes
7	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1.63	1,6	1,55	1,54	1,53	1,52	1,51	Disnaker
8	Persentase Kemiskinan	Persentase (%)	6.52	6,4	4,95-5,20	5,10-4,50	4,80-4,20	4,40-3,80	3,75-4,00	Bapeda

No	Indikator Kinerja Utama/Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	110.78	106,35	101,92	97,49	93,06	88,63	84,2	BPBD
10	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56.55	60,03	63,03	66,03	69,03	72,03	75,03	Dinsos
11	Indeks Gini	Indeks	0.283	0,281	0,281	0,28	0,279	0,278	0,277	Bapeda
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	59.13	70	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	DLH
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	4.33	4,5	4,70 - 5,30	4,9 - 5,5	5,3 - 5,9	5,7 - 6,3	6,05 - 6,55	Bapeda

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 6 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :

I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
   1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
      Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
   2. Fokus kesejahteraan sosial.
      Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja,
   3. Fokus seni budaya dan olahraga.
      Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

II. Aspek pelayanan umum terdiri dari :
   1. Fokus layanan urusan pemerintah wajib
      Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah.
   2. Fokus layanan urusan pemerintah pilihan.
      Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah.
   3. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama dalam bidang terdiri dari :

1) Fokus kemampuan ekonomi daerah

   Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan produktivitas total daerah.

2) Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

   Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur.

3) Fokus iklim berinvestasi

   Analisis kinerja atas iklim berinvestasi.

Pembagian indikator kunci yang menjadi indikator kinerja dalam mensukseskan keberhasilan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih tertuang pada Tabel 4.3

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karangasem

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,97	84,39	84,81	85,24	85,66	86,09	86,52	Distan PP
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Pengelolaan Air Limbah)	Persentase (%)	3	3,2	3,5	3,7	4	4,2	4,5	DPUPR
3	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	BPBD
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase (%)	0,5	0,52	0,55	0,57	0,6	0,62	0,64	Disdukcapil

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	598,5	599	560	560,5	561	561,5	562	Disdukcapil
7	Rasio Penduduk	Rasio	102,24	102,5	102,7	103	103,2	103,45	103,7	Disdukcapil
II	**ASPEK KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT**									
8	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	32,92	33,4	33,13	33,25	33,46	33,81	34,27	Bapeda
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	65 (B)	67 (B)	70 (B)	77 (B)	81 (B)	82 (B)	84(B	Setda
10	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	9,17	10,02	10,45	10,63	10,75	10,89	11,01	Disbudpar
11	Pelayanan Publik di tingkat Desa dan Kabupaten dengan Prinsip Mudah-Murah-Cepat dengan sistem On Line	Persentase (%)	N/a	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Dukungan operasional peningkatan kesejahteraan ASN untuk pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persentase (%)	N/a	100	100	100	100	100	100	Semua Perangkat Daerah
13	Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB	Persentase (%)	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	Bapeda
14	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rp/orang	11.176.00	11.399.52	11.627.51	11.860.06	12.097.26	12.339.20	12.585.99	Bapeda
15	Indeks Kesejahteraan Masyarakat	Indeks	33,92	34,71	35,53	36,36	37,23	38,12	33,92	Bapeda
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
16	Rasio Ketergantungan	Persentase (%)	n/a	0,36	0,33	0,3	0,28	0,25	0,22	Disnaker
17	Distribusi persentase PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase (%)	4,34	4,39	4,44	4,49	4,54	4,59	4,64	Diskopperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Distribusi persentase PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persentase (%)	9,16	9,66	10,16	10,66	11,16	11,66	12,16	Disbudpar
19	Rasio Kewirausahaan	Persentase (%)	n/a	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	Diskoperindag
20	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	Persentase (%)	n/a	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	Disbudpar
21	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	83,74	83,89	84,14	84,39	84,64	84,89	85,14	Disnaker
22	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif (58.30)	Inovatif (59.30)	Inovatif (60.00)	Inovatif (61.30)	Inovatif (63.00)	Inovatif (64.30)	Sangat Inovatif (65.30)	BRIDA
23	Ekspor Barang dan jasa	Persentase (%)	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	Diskopperindag
24	Rumah tangga dengan akses hunian layak. terjangkau dan berkelanjutan	Persentase (%)	94,21	94,4	94,6	94,8	95	95,2	95,4	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	Desa Mandiri	Persentase (%)	57,33	58	59	60	61	62	63	DPMD
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,26	4,4	4,6	4,8	5	5,2	5,4	Diskominfo
27	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,28	4,4	4,6	4,8	5	5,2	5,4	Setda
28	Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
29	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68	3,7	Brida
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
	PENDIDIKAN									
30	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia sampai dengan 15 tahun	Tahun	7,36	8,36	9,26	10,21	11,16	12,11	13,06	Disdikpora
31	Persentase APK SD / MI	Persentase (%)	115,67	116,51	117,15	117,85	118,01	118,11	118,21	Disdikpora
32	Persentase APK SMP /MTs	Persentase (%)	112,84	112,97	113,01	113,14	113,22	113,53	113,67	Disdikpora
33	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,66	12,67	12,68	12,69	12,7	12,71	Disdikpora
34	Angka melek huruf	Persentase (%)	85,85	87,52	89,19	87,86	90,86	92,53	94,2	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
35	Menurunnya Angka Putus sekolah usia 7-15 Tahun	Persentase (%)	0,58	0,52	0,49	0,46	0,44	0,38	0,34	Disdikpora
36	Literasi Membaca SD	Persentase (%)	69,47	70	71	72	73	74	75	Disdikpora
37	Literasi Membaca SMP	Persentase (%)	78,89	79	80	81	82	83	84	Disdikpora
38	Numerasi SD	Persentase (%)	60,33	60,5	61	62	63	64	65	Disdikpora
39	Numerasi SMP	Persentase (%)	74,94	75	76	77	78	79	80	Disdikpora
40	Persentase Sekolah Dasar dan Menengah yang melaksanakan praktik pembelajaran berbasis IPTEK	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	Angka Pendidikan yang ditamatkan :									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Angka Partisipasi Murni :									
41	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	95,7	95,85	96,12	96,74	97,11	98,82	99,45	Disdikpora
42	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
43	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	80,38	81,21	82,13	83,54	84,67	85,97	86,49	Disdikpora
44	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	Angka Partisipasi Sekolah :									
45	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	106,83	106,98	107,25	108,86	109,27	110,43	111,11	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
46	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84,5	84,96	85,14	85,97	86,08	87,12	88,91	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah :									
47	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,14	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	Disdikpora
48	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,44	0,41	0,39	0,37	0,36	0,31	0,28	Disdikpora
	Angka Kelulusan :									
49	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
50	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Angka Melanjutkan (AM) :									
51	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase (%)	97,38	98,5	98,77	98,79	99,23	99,56	99,86	Disdikpora
52	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persentase (%)	76,2	76,87	77,23	77,84	78,76	79,78	80,26	Disdikpora
	Fasilitas Pendidikan :									
53	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	49,27	49,46	49,58	49,67	50,03	50,68	50,81	Disdikpora
54	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Disdikpora
55	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,1	0,11	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
56	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	3,35	3,36	3,37	3,38	3,39	3,41	3,45	Disdikpora
57	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah	Rasio	19,26	19,36	19,46	19,47	19,48	19,49	19,5	Disdikpora
58	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	99,74	97,76	97,77	97,78	97,79	97,8	97,81	Disdikpora
59	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
60	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	96,85	96,87	96,91	97,12	97,22	97,32	97,35	Disdikpora
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 :									
61	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (PAUD)	Persentase (%)	75,83	75,94	76,23	76,65	77,43	78,98	80,03	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
62	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (SD/MI)	Persentase (%)	95,96	96,92	97,76	97,86	97,98	97,99	98,05	Disdikpora
63	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (SMP/MTs)	Persentase (%)	96,11	97,31	97,78	97,96	98,23	98,43	98,65	Disdikpora
64	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	50	50	50	50	50	50	50	Disdikpora
65	Cakupan pembinaan atlet muda	Persentase (%)	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	Disdikpora
66	Jumlah atlet berprestasi per tahun	Jumlah	3	4	5	6	7	8	9	Disdikpora
67	Pelayanan Pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa berprestasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
68	Persentase pembinaan olahraga	Persentase (%)	50	50	50	50	50	50	50	Disdikpora

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
69	Jumlah prestasi olahraga per tahun	Jumlah	3	4	5	6	7	8	9	Disdikpora
70	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	30	32	35	37	40	42	Disdikpora
71	Cakupan dana pembinaan bagi atlet berprestasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	KESEHATAN									
72	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,39	0,39	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	Dinkes
73	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,008	Dinkes
74	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	9,5	9,49	9,48	9,47	9,46	9,45	9,44	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
75	Rasio posyandu per satuan balita	Persentase (%)	2,42	2,43	2,45	2,65	2,72	2,89	3,11	Dinkes
76	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per1000 KH	11,74	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3	11,2	Dinkes
77	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per1000 KH	12,64	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	Dinkes
78	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per100.000 KH	72,27	80	80	80	80	80	80	Dinkes
79	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	Persentase (%)	5,02	5	4,98	4,96	4,94	4,92	4,9	Dinkes
80	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase (%)	50,2	90	90	90	90	90	90	Dinkes
81	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase (%)	89	90	90	90	90	90	90	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
82	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Persentase (%)	98,5	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	Dinkes
83	Persentase peserta BPJS yang mendapat pelayanan di RSUD	Persentase (%)	N/a	92,32	92,33	92,33	92,34	92,35	92,36	Dinkes
84	Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	Rata-rata anak per wanita	1,92	1,97	1,99	2,11	2,18	2,32	2,39	Dinkes
85	Jumlah kematian ibu	Orang	4	6	6	5	5	4	4	Dinkes
86	Jumlah kematian balita	Orang	70	70	65	65	63	60	58	Dinkes
87	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase (%)	95	95	95	95	95	95	95	Dinkes
88	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persentase (%)	2	5	7	9	10	12	15	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk: Per 30.000 penduduk									
89	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 30.000 penduduk	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	Dinkes
90	Rasio pustu per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,12	0,129	0,133	0,137	0,143	0,149	0,155	Dinkes
	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk :									
91	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	Dinkes
92	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,86	0,87	0,88	0,88	0,89	0,9	0,9	Dinkes
93	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	84,2	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
94	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	89,45	89,48	89,52	89,61	89,73	89,78	89,84	Dinkes
95	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
96	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
97	Incidence Rate DBD	Per 100.000 penduduk	49	49	49	49	49	49	49	Dinkes
98	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
99	Tingkat kematian akibat malaria	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes
100	Annual Parasite Incidence (API)	Per 1.000 penduduk	0,005	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
101	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	53	95	95	95	95	95	95	Dinkes
102	Persentase kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	100	95	95	95	95	95	95	Dinkes
103	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
104	Cakupan puskesmas	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
105	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Persentase (%)	81,4	81,5	81,6	81,7	81,8	81,9	82	Dinkes
106	Cakupan pelayanan nifas	Persentase (%)	84	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	Dinkes
107	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	80	81	82	83	84	85	86	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
108	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
109	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
110	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
111	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
	Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan :									
112	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
113	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
114	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
115	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
116	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
117	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
118	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	krining kesehatan sesuai standar									
119	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
120	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
121	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
122	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
123	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
124	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 penduduk	0,66	0,86	0,86	0,86	1,06	1,06	1,06	Dinkes
125	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
126	Persentase Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis)	Persentase (%)	N/a	100	100	100	100	100	100	Dinkes
127	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persentase (%)	N/a	5	5	5	5	5	5	Dinkes
128	Persentase anak balita dan ibu hamil mendapatkan PMT di Posyandu	Persentase (%)	N/a	90	92	94	96	98	100	Dinkes

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	DPUPR & PERKIM									
129	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	DPUPR
130	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	DPUPR
131	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase (%)	69,23	69,53	69,71	69,77	69,98	70,23	70,78	DPUPR
132	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase (%)	97,44	97,48	97,73	97,81	97,91	97,99	98,01	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
133	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase (%)	90,08	90,29	90,41	90,63	91,34	91,87	92,21	DPUPR
134	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
135	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase (%)	84,6	84,9	85	85,2	85,4	85,7	85,9	DPUPR
136	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	80	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,8	DPUPR
137	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
138	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase (%)	98,01	98,01	98,03	98,05	98,07	98,09	98,11	DPUPR
139	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	DPUPR
140	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	86,01	86,54	87,17	88,02	89,08	90,14	91,4	DPUPR
141	Persentase Penduduk berakses air minum	Persentase (%)	98,01	98,01	98,03	98,05	98,07	98,09	98,11	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
142	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	Persentase (%)	90,11	90,11	90,11	90,13	90,15	90,17	90,19	DPUPR
143	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	Persentase (%)	68,17	68,19	68,21	68,23	68,25	68,27	68,29	DPUPR
144	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
145	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	381	385	388	391	397	399	401	DPUPR
146	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
147	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. sarana dan Utilitas Umum)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
148	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase (%)	65	66	67	68	69	70	71	DPUPR
149	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Proporsi	0,54	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	DPUPR
150	Kapasitas Tampungan Air	Persentase (%)	22,74	22,9	23	23,25	23,5	23,75	24	DPUPR
151	Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat miskin	Persentase (%)	0	0	11,47	18,07	20,37	23,23	24,38	DPUPR
152	Rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	792	450	1100	1100	1100	1100	1133	DPUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BPBD									
153	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
154	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
155	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
156	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
	PEMADAM KEBAKARAN									
157	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	84,7	Disdamkartan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
158	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	75	78	80	82	84	86	90	Disdamkartan
	SATPOL PP. DINSOS.DP3A DAN KB									
159	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Satpolpp
160	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
161	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Persentase (%)	71	78	81	82	83	84	85	Satpol PP
162	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
163	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
164	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
165	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
166	Penyandang disabilitas penerima bantuan	Persentase (%)	5	8	10	12	15	17	20	Dinas Sosial P3A PPKB
167	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	20	30	40	50	60	70	80	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
168	Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase (%)	n/a	60	65	70	75	80	85	Dinas Sosial P3A PPKB
169	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persentase (%)	13	15	17	20	22	25	30	Dinas Sosial P3A PPKB
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
170	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	2,86	2,98	3,05	3,85	40,15	40,67	40,78	Dinas Sosial P3A PPKB
171	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9,09	9,49	9,51	9,62	9,73	9,84	9,96	Dinas Sosial P3A PPKB
172	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	32,83	32,97	33,17	33,26	33,41	33,52	33,87	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
173	Rasio KDRT	Rasio	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial P3A PPKB
174	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	0,65	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	Dinas Sosial P3A PPKB
175	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
176	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
177	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
178	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
179	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
180	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
181	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	50,01	50,12	50,36	50,46	50,54	50,58	50,63	Dinas Sosial P3A PPKB
182	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	44,23	44,32	44,43	44,48	44,56	44,63	44,71	Dinas Sosial P3A PPKB
183	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	85,32	85,38	85,47	85,56	85,68	85,73	85,77	Dinas Sosial P3A PPKB
184	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persentase (%)	57,66	57,76	57,85	57,93	58,13	58,34	58,41	Dinas Sosial P3A PPKB
185	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Persentase (%)	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
186	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /Kota	Persentase (%)	4,5	4,57	4,68	4,79	4,84	4,95	5,03	Dinas Sosial P3A PPKB
187	Rasio Kekerasan terhadap perempuan.termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase (%)	4,14	4,34	4,46	4,62	4,74	4,82	4,96	Dinas Sosial P3A PPKB
188	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	50	50	52	55	58	60	62	Dinas Sosial P3A PPKB
189	Persentase Penanganan kekerasan terhadap perempuan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
190	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,246	0,245	0,244	0,243	0,242	0,241	0,24	Dinas Sosial P3A PPKB
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
191	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2,26	2,25	2,23	2,22	22,20	2,19	2,18	Dinas Sosial P3A PPKB
192	Ratio Akseptor KB	Rasio	85,75	85,79	85,86	85,95	86,23	86,35	86,47	Dinas Sosial P3A PPKB
193	Indeks lansia berdaya	Indeks	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8	Dinsos. PPPA. PPKB
194	Indeks pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	Indeks	84,8	85,1	85,4	85,7	86	86,3	86,6	Dinsos. PPPA. PPKB
195	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	21	22,4	23,9	25,5	27,2	29	30,9	Dinsos. PPPA. PPKB
196	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	85,75	85,79	85,86	85,95	86,23	86,35	86,47	Dinas Sosial P3A PPKB
197	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15– 19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persentase (%)	30,9	30,3	29,8	29,3	28,7	28,2	27,2	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
198	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	20,6	20,67	20,7	20,81	20,87	20,94	21,12	Dinas Sosial P3A PPKB
199	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	59,04	59,08	59,12	59,19	59,21	59,23	59,26	Dinas Sosial P3A PPKB
200	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	87,01	87,04	87,06	87,08	87,12	87,17	87,23	Dinas Sosial P3A PPKB
201	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	73,5	73,56	73,59	73,62	73,66	73,71	73,77	Dinas Sosial P3A PPKB
202	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	72,13	72,17	72,22	72,28	72,35	72,43	72,52	Dinas Sosial P3A PPKB
203	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	61,22	61,25	61,29	61,35	61,42	61,49	61,52	Dinas Sosial P3A PPKB
204	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
205	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	60,02	60,05	60,09	60,15	60,22	62,32	62,39	Dinas Sosial P3A PPKB
206	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	71,12	71,16	71,21	71,27	71,34	71,42	71,52	Dinas Sosial P3A PPKB
207	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	41,91	41,95	42,01	42,08	42,16	42,25	42,35	Dinas Sosial P3A PPKB
208	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
209	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	85,02	85,05	85,09	85,14	85,2	85,27	85,35	Dinas Sosial P3A PPKB
210	Persentase Faskes dan jejaringnya diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase (%)	90,03	90,06	90,1	90,15	90,21	90,28	90,36	Dinas Sosial P3A PPKB
211	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persentase (%)	85,06	85,08	85,12	85,18	85,27	85,39	8543	Dinas Sosial P3A PPKB
212	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	42,5	42,55	42,62	42,67	42,75	42,84	42,96	Dinas Sosial P3A PPKB

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
213	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	23,21	23,26	23,32	23,4	23,55	23,67	24,01	Dinas Sosial P3A PPKB
214	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	0,93	0,96	0,99	1,02	1,06	1,12	1,18	Dinas Sosial P3A PPKB
215	Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	Persentase (%)	39,07	45,09	51,16	57,12	63,13	69,14	75,12	Dinas Sosial P3A PPKB
216	Penanganan Pelayanan Reunifikasi Keluarga terhadap Gangguan Sosial	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A PPKB
217	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,48	62	63	64	65	66	67	Dinas Sosial P3A PPKB
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR									
	KETENAGAKERJAAN									
218	Angka Partisipasi angkatan kerja	Jumlah	86,01	86,05	86,11	86,19	86,29	86,36	86,48	Disnaker
219	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	Disnaker
220	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase (%)	0	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	100	Disnaker
221	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase (%)	82,37	82,47	82,56	82,75	82,98	83,25	83,89	Disnaker
222	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persentase (%)	29,07	31,8	32,1	32,4	32,7	33	33,3	Disnaker

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
223	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker
224	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase (%)	50	50,35	50,7	51,05	51,4	51,75	52,1	Disnaker
225	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	35,04	35,14	35,24	35,34	35,44	35,54	35,64	Disnaker
226	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase (%)	36,64	36,76	36,88	37	37,12	37,24	37,36	Disnaker
227	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase (%)	70,21	70,28	70,37	70,48	70,63	70,83	71,04	Disnaker
228	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase (%)	40,2	40,35	40,5	40,65	40,8	40,95	41,1	Disnaker
229	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan	Persentase (%)	31,8	32	32,2	32,4	32,6	32,8	33	Disnaker

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
230	Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Persentase (%)	2,96	2,96	3,76	4,56	5,36	6,16	6,69	Disnaker
231	Persentase penduduk yang bekerja	Persentase (%)	63,36	63,45	63,55	63,65	63,75	63,85	64	Disnaker
232	Rasio PDB per tenaga kerja (Produktivitas Tenaga Kerja)	Persentase (%)	36,64	36,76	36,88	37	37,12	37,14	37,36	Disnaker
233	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persentase (%)	0,72	1,94	1,96	1,98	2	2,02	2,04	Disnaker
234	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.	Persentase (%)	18,44	18,46	18,5	18,55	18,6	18,65	18,7	Disnaker
235	Rasio Kewirausahaan	Rasio	n/a	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	Disnaker

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
236	UMK Kabupaten Karangasem	Rp	2.813.672.00	2.996.561.00	3.191.337.00	3.398.774.00	3.619.695.00	3.854.975.00	4.105.548.00	Disnaker
237	Fasilitasi dana talangan bagi tenaga kerja ke luar negeri	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disnaker
	KETAHANAN PANGAN									
238	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	skor	87,84	88,44	88,88	89,33	89,77	90,22	90,67	Distan PP
239	Energi (kkal)	kkal	2150	2257	2341	2457	2531	2606	2716	Distan PP
240	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP
241	Ketersediaan lumbung pangan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
242	Penanganan daerah rawan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP
243	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP
244	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP
	PERTANIAN									
245	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.	Kw/Ha	62.50	62,51	62,51	62.52	62.53	62.53	62.54	Distan PP
246	Cakupan bina kelompok petani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Distan PP
247	Tingkat produktivitas pertanian (Rasio produksi pertanian pangan per hektar per tahun per	Persentase (%)	60,58	60,78	60,78	60,79	60,8	60,8	60,81	Distan PP

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	satuan luas panen x 100%)									
248	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan	Persentase (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Distan PP
249	Kontribusi sektor pertanian Kehutanan. Perikanan terhadap PDRB.	Persentase (%)	25,41	25,5	25,55	25,6	25,65	25,7	25,75	Distan PP
250	Produk pertanian/perikanan yang teregistrasi	Unit	1	1	1	2	2	3	3	Distan PP
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
251	Produksi perikanan	Ton	29,074	29,075	29,077	29,078	29.080	29,082	29,083	Distan PP
252	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	27	27	27	28	28	28	28	Distan PP

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	LINGKUNGAN HIDUP									
253	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
254	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
255	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
256	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DLH

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Daerah kabupaten/ kota									
257	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DLH
258	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	17	17	17	17	17	17	17	DLH
259	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
260	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. lokasi usaha dan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DLH

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dampaknya di Daerah kabupaten/kota.									
261	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase (%)	31,18	31,28	32,38	32,48	32,58	32,68	32,78	DLH
262	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persentase (%)	31,17	31,27	31,37	31,47	31,57	31,67	31,77	DLH
263	Persentase cakupan area pelayanan	Persentase (%)	12	12	12	12	12	12	12	DLH
264	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	DLH
265	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persentase (%)	2	2,01	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	DLH
266	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DLH

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	perundang-undangan									
267	Indeks kualitas Air	Indeks	50	68	68,01	68,02	68,03	68,04	68,05	DLH
268	Indeks kualitas Udara	Indeks	91,51	91	91,01	91,02	91,03	91,04	91,05	DLH
269	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,56	35,5	35,51	35,52	35,53	35,54	35,55	DLH
270	Luasan ruang terbuka hijau yang dikelola (Ha)	Ha	5	5,2	5,5	5,07	5,9	6	6,2	DLH
271	Desa yang mengadaptasi program kampung iklim	Persentase (%)	29,11	31,65	34,18	36,71	39,24	41,77	44,3	DLH
272	Jumlah sampah yang tertangani.	Persentase (%)	31,18	31,28	32,38	32,48	32,58	32,68	32,78	DLH

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
273	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (pengelolaan sampah)	Persentase (%)	23,07	24	24,5	25	25,5	26	26,5	DLH
	DISDUKCAPIL									
274	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	98,03	98,04	98,05	98,06	98,07	98,08	98,09	Disdukcapil
275	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	93,44	93,74	94,45	95,25	96,35	97,88	98,15	Disdukcapil
276	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Disdukcapil
277	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Disdukcapil
278	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
279	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
280	Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Rasio	30,11	30,67	31,45	31,89	32,45	32,99	34,67	Disdukcapil
281	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
282	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
283	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persentase (%)	70,24	70,34	70,44	70,54	70,64	70,74	70,84	Disdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
284	Cakupan pembinaan dan pengawasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPMD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	administrasi pemerintahan desa									
285	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
286	Cakupan Penataan Desa Dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
287	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
288	Fasilitasi Anggaran Dana Desa	Persentase (%)	n/a	100	100	100	100	100	100	DPMD
289	Desa adat dalam penyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana (%).	Persentase (%)		28	30	32	35	37	40	DPMD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERHUBUNGAN									
290	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	8177	9582	9825	10068	10311	10554	10797	Dinas Perhubungan
291	Jumlah Angkutan laut	Jumlah	25	28	28	28	28	28	28	Dinas Perhubungan
292	Rasio ijin trayek	Rasio	0,000285	0,000285	0,000285	0,000285	0,000285	0,000285	0,000285	Dinas Perhubungan
293	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	320	320	325	330	335	340	345	Dinas Perhubungan
294	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
295	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
296	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
297	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	Dinas Perhubungan
298	Persentase Pengelolaan Pelayaran	Persentase (%)	0	0	0	50	75	100	100	Dinas Perhubungan
299	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	Dinas Perhubungan
300	Layanan angkutan darat	Persentase (%)	28,32	28,5	29	29,5	30	30,5	31	Dinas Perhubungan
301	Jumlah Orang Melalui Dermaga Pertahun	Jumlah	2256987	2257087	2257087	2257287	2257387	2257487	2257587	Dinas Perhubungan
302	Jumlah Barang Melalui Dermaga Pertahun	Jumlah	1647780	1647880	1647980	1648080	1648180	1648280	1648380	Dinas Perhubungan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
303	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Jumlah	81.411	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000	84.500	Dinas Perhubungan
304	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	0.60<V/C<0.70	Dinas Perhubungan
305	Rasio Konektivitas	Persentase (%)	0,778	0,78	0,782	0,784	0,786	0,788	0,79	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
306	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
307	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
308	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	60	61	62	63	64	65	66	Diskominfo
309	Cakupan layanan telekomunikasi	Persentase (%)	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	Diskominfo
310	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persentase (%)	50,5	51	52	53	54	55	56	Diskominfo
311	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	Diskominfo
312	Penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase (%)	65	65,5	70	70,5	71	71,5	72	Diskominfo
313	Layanan publik yang diselenggarakan	Persentase (%)	20,25	20,25	22,07	22,5	25	25,5	29,54	Diskominfo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	secara online dan terintegrasi									
	STATISTIK									
314	Buku "Karangasem Membangun"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
315	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase (%)	58	59	59,5	60	60,5	61	61,5	Diskominfo
316	OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	58	59	59,5	60	60,5	61	61,5	Diskominfo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERSANDIAN									
317	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	32,35	32,35	33	33,5	34	34,5	35	Diskominfo
318	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH & PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN									
319	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase (%)	9,13	9,63	10,13	10,63	11,53	11,89		Diskoperindag
320	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase (%)	0,27	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,32	Diskoperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Produktivitas Industri. Usaha mikro Koperasi dan BUMD yaitu:									
321	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karangasem (%)	Persentase (%)	32,34	32,41	32,48	32,55	32,62	32,69	33,72	Diskoperindag
322	Koperasi aktif	Persentase (%)	68,97	69,01	28,57	34,28	40	42,85	45,71	Diskoperindag
323	UMKM yang memanfaatkan Kredit Mikro	Persentase (%)	N/a	22	23,35	24,7	26,05	27,4	28,75	Diskoperindag
324	Proporsi Jumlah Usaha mikro Non Pertanian di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	67	67,15	67,3	67,45	67,6	67,75	67,9	Diskoperindag
325	Wirausaha muda	Persentase (%)	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	Diskoperindag
326	Usaha Mikro dan Kecil yang Aktif	Persentase (%)	70	71,4	72,8	74,2	75,7	77,2	78,8	Diskoperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERDAGANGAN									
327	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta)	Nilai	8.222.77	8.222.79	8.222.81	8.222.78	8.222.78	8.222.79	8.222.79	Diskopperindag
328	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persentase (%)	15	15	15	15	15	15	15	Diskopperindag
329	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase (%)	20,56	20,76	20,96	21,16	21,36	21,56	21,76	Diskopperindag
330	Kinerja realisasi pupuk	Persentase (%)	49,56	49,76	49,96	50,16	50,36	50,56	50,76	Diskopperindag
331	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase (%)	5,04	5,07	5,1	5,13	5,16	5,19	5,22	Diskopperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
332	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persentase (%)	5,49	5,5	5,49	5,5	5,5	5,51	5,51	Diskopperindag
333	Pertumbuhan nilai ekspor produk Karangasem	Persentase (%)	4,5	4,59	4,63	4,68	4,7	4,77	4,82	Diskopperindag
334	Cakupan operasi pasar murah	Persentase (%)	N/a	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	Diskoperindag
	PERINDUSTRIAN									
335	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase (%)	16,21	16,31	16,41	16,51	16,61	16,71	16,81	Diskopperindag
336	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase (%)	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	Diskopperindag
337	Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Persentase (%)	9,31	9,41	9,51	9,61	9,71	9,81	9,91	Diskopperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
338	Hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	16,02	16,04	16,06	16,08	16,1	16,12	16,14	Diskopperindag
339	Hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	15,04	15,08	15,12	15,16	15,2	15,2	15,24	Diskopperindag
340	Hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Diskopperindag

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
341	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase (%)	5,01	6,01	7,01	8,01	9,01	10,01	11,01	Diskopperindag
	PENANAMAN MODAL									
342	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Jumlah	119.709.325.932	120.906.419.191	122.115.483.383	123.336.638.217	124.570.004.599	125.815.704.645	127.073.861.692	DPMPTSP
343	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Jumlah	453.881.374.068	458.420.187.809	463.004.389.687	467.634.433.584	472.310.777.919	477.033.885.699	481.804.224.556	DPMPTSP
344	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	DPMPTSP
345	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN /PMA	Persentase (%)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
346	Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan	Persentase (%)	99,73	99	99	99	99	99	99	DPMPTSP

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
347	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	31,096	31,196	31,296	31,396	31,496	31,596	31,696	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
348	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	15,098	15,108	15,128	15,148	15,168	15,188	15,218	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
349	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	17.06.5	17.06.5	17.06.5	17.06.5	17.06.5	17.06.5	17.06.5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
350	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jumlah	137	147	157	167	187	197	207	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
351	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	11,316	11,366	11,416	11,466	11,516	11,566	11,616	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
352	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
353	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase (%)	65	65,12	65,18	65,24	65,3	65,36	65,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
354	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,63	51	53	57	60	65	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
355	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks	55,15	60	62	65	70	75	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN									
356	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
357	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,9	50,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
358	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaba	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	n nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
359	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah	66	66	66	66	66	66	66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	LAYANAN URUSAN PILIHAN									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PARIWISATA									
360	Jumlah Tamu Wisatawan domestik dan Mancanegara (orang)	orang	1.370.309	1.377.161	1.384.046	1.390.966	1.397.922	1.404.911	1.411.936	Disbudpar
361	Lama Tinggal Wisatawan	Jumlah	2	2	3	3	4	4	4	Disbudpar
362	Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persentase (%)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Disbudpar
363	Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	-10.5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Disbudpar
364	Tingkat hunian akomodasi	Persentase (%)	65	65	67	69	70	71	72	Disbudpar

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
365	PAD sektor pariwisata	Persentase (%)	23,87	24,37	24,87	25,37	25,87	26,37	26,87	Disbudpar
366	Tertata produk wisata sesuai konsep Nyegara Gunung	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disbudpar
	KEBUDAYAAN									
367	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan	Jumlah	1	1	2	2	2	2	2	Disbudpar
368	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	1	1	2	2	2	2	2	Disbudpar
369	Objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disbudpar
370	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	3	3	3	3		Disbudpar

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
371	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	Disbudpar
372	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	Disbudpar
373	Persentase Desa adat dalam penyelenggaraan kehidupan krama Karangasem berlandaskan Tri Hita Karana	Persentase (%)	25	28	30	32	35	37	40	Disbudpar
374	Pemenuhan Bantuan Keuangan kepada Desa Adat. Banjar Adat. Subak. dan Yohana (STT).	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disbudpar
375	Pemenuhan penghargaan bagi seniman berprestasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Disbudpar
	PENUNJANG URUSAN									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
376	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
377	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
378	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
379	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Bapeda
380	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Bapeda

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
381	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
382	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapeda
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
383	Implementasi rencana kelitbangan.	Persentase (%)	25	25,04	25,08	25,12	25,16	25,2	25,25	BRIDA
384	Hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BRIDA
385	Hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholder	Persentase (%)	25	30,04	30,08	30,12	30,16	30,2	30,25	BRIDA

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BPKAD									
386	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
387	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase (%)	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	BPKAD
388	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persentase (%)	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	BPKAD
389	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
390	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	5,58	5,4	5,3	5,2	5,1	5	5	BPKAD
391	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	24,3	23	22	20	18	17	16	BPKAD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
392	Ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKAD
393	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase (%)	9,31	9,36	9,41	9,45	9,6	9,65	9,7	BPKAD
394	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
395	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
396	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	23,49	24,7	24,8	24,9	25	25,2	25,40	BPKAD
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
397	Nilai Sistem Merit	Nilai	287	287	287	290	293	295	300	BKPSDM

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
398	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	Nilai	25	25	25	25	25	25	25	BKPSDM
399	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase (%)	65,45	65,5	65.55	65,6	65,65	65,7	65,75	BKPSDM
400	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	24	32	32	32	32	32	32	BKPSDM
401	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	BKPSDM
402	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	5133	5133	5133	5133	5133	5133	5133	BKPSDM
403	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	137,72	137,72	137,75	137,77	137,79	137,8	137,81	BKPSDM

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
404	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	18,2	18,2	18,25	18,3	18,35	18,4	18,45	BKPSDM
405	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	41,03	41,03	42	43	44	45	46	BKPSDM
	ITDA									
406	Persentase Tindak lanjut temuan	Persentase (%)	94,45	94,47	94,49	94,51	94,53	94,55	94,57	Inspektorat
407	Jumlah temuan BPK	Jumlah	6	5	4	3	2	1	0	Inspektorat
408	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Status	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
409	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Status	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
410	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Status	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
411	Indeks Penilaian Integritas	Indeks	80	82	84	86	88	90	92	Inspektorat
412	Nilai Evaluasi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP)	Nilai	94,77	95	95,2	95,4	95,7	96	96,5	Inspektorat
	SETDA									
413	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	83	83,04	83,08	83,12	83,16	83,2	83,24	Setda
414	Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase (%)	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	Setda

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
415	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase (%)	7,93	7,94	7,95	7,96	7,97	7,98	7,99	Setda
416	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	85,5	86	87	88	89	90	92	Setda dan Kecamatan
417	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,11	4,2	4,24	4,28	4,33	4,37	4,4	Setda
418	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	n/a	66.5 (B/Baik)	66.75 (B/Baik)	67 (B/Baik)	67.25 (B/Baik)	67.5 (B/Baik)	67.75 (B/Baik)	Setda
419	Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	Persentase (%)	80	82	84	86	88	90	92	Setda
	SEKERTARIAT DEWAN									
420	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
421	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
422	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
423	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk	36,76	36	35	34	33	32	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
424	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	N/a	6	6,2	6,5	7	7,2	7,5	Badan Kesatuan Bangsan dan Politik
425	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80	81	82	83	84	85	86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
426	Indeks Kinerja Ormas	Persentase (%)	N/a	50	52	55	57	60	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
427	Indeks Kewaspadaan Nasional	Persentase (%)	N/a	60	62	65	67	70	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
428	Jumlah upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.	Persentase (%)	N/a	50	55	60	65	70	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
429	Persentase Partisipasi pemilih	Persentase (%)	83,13	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) tahun 2024.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan prioritas Provinsi Bali yang dirumuskan secara terukur, responsif terhadap isu-isu strategis daerah, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru. Selain itu, penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif, inklusif, serta berbasis data dan kajian yang komprehensif.

Sebagai dokumen perencanaan yang holistik dan integratif, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta kelestarian lingkungan. Setiap program dan kebijakan yang termuat dalam dokumen ini disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai tantangan global, nasional, serta dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025- 2029 ini dilandasi kaidah pelaksanaan dapat dimaknai sebagai aturan dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem wajib melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029.
2) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program - program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, Bapeda Kabupaten Karangasem atau sebutan lainnya wajib melakukan pengendalian dan evaluasi.
4) Bupati Karangasem melalui perangkat daerah teknis berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
5) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Guna memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Karangasem selama periode 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Mekanisme tersebut mencakup:

a) Pengendalian tahunan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b) Evaluasi kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD).
c) Evaluasi jangka menengah *(midterm review)* pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA